

P-RKPD

2025



PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KARO

TAHUN 2025





BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditegaskan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 Juni 2025
BUPATI KARO,



Diuundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 13

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-6
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN	
KARO TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai	
dengan Triwulan I.....	II-1
2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah.....	II-1
2.1.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan.....	II-4
2.1.3. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah	II-5
2.1.4. Realisasi Capaian Indikator Kunci Perangkat	
Daerah	II-7
2.1.5. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja	
Program dan Kegiatan.	II-18
2.1.6. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	II-22
2.1.7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	II-22
2.2. Permasalahan Pembangunan.....	II-23
2.3. Isu Strategis Pembangunan	II-33
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Dinamika Perekonomian Global	III-1
3.2. Perkembangan Provinsi Perekonomian	
Sumatera Utara	III-2
3.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah.....	III-3
3.4. Gambaran Keuangan Daerah	III-10
3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.4.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	III-14
3.4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah.	IV-1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-4
4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-12
4.3.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan	
Nasional	IV-12
4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi	

Sumatera Utara Tahun 2025	IV-36
4.3.3. Perubahan Prioritas dan Sasaran	
Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025..	IV-46
4.4. Integrasi Tema dan Prioritas Nasional dan Provinsi	
Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Kabupaten	
Karo Tahun 2025.....	IV-61
4.5. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci	
Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025.	IV-62
4.5.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo.	IV-62
4.4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo.....	IV-63
4.4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan	
Pemerintah Daerah.....	IV-66
4.6. Inovasi Pembangunan Daerah.	IV-82
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025	II-3
Tabel 2.3	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025	II-4
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Tahun 2025	II-5
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025	II-7
Tabel 2.6	Rekapitulasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025	II-18
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-4
Tabel 3.2	PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	III-6
Tabel 3.3	Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-6
Tabel 3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-8
Tabel 3.5	Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karo Tahun 2025	III-10
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.....	III-12
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.....	III-14
Tabel 3.8	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	III-16
Tabel 4.1	Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029	IV-5
Tabel 4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025.....	IV-8
Tabel 4.3	Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-13
Tabel 4.4	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2025).....	IV-49
Tabel 4.5	Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025	IV-51
Tabel 4.6	Indikator Makro Pembangunan pada Perubahan RKPD	

	Kabupaten Karo Tahun 2025	IV-63
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2025	IV-63
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025	IV-66
Tabel 4.9	Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	IV-82
Tabel 4.10	Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	IV-82
Tabel 4.11	Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah Siindahkaka Tahun 2022-2026	IV-83
Tabel 4.10	Inovasi Daerah Kabupaten Karo Pelaksanaan dan Penerapan Tahun 2025 Pada Aplikasi Siindahkaka (Sistem Informasi Daerah Kabupaten Karo)	IV-84
Tabel 5.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025	V-3
Tabel 5.2	Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2025	V-5
Tabel 5.3	Penetapan Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	V-7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024	III-4
Grafik 3.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-5
Grafik 3.3	Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	III-7
Grafik 3.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	III-7
Grafik 3.5	Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	III-8
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	III-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satu adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dokumen RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di daerah yang disusun berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan

- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi sub kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 343 ayat (7) dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD dan dalam hal penambahan program yang merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPD

dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, dengan terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat melalui:
 - (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - (b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD menjadi pedoman perubahan renja Perangkat Daerah memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 ini disusun simultan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan. Dalam perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dalam hal ini aplikasi SIPD pada <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.

Disamping itu, perkembangan ekonomi makro Kabupaten Karo Tahun 2025 akan mengalami koreksi yang selanjutnya perkembangan keadaan tersebut mendasari beberapa hal dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu:

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025;

2. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan;
3. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
5. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 sampai periode triwulan I.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 14);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD dan Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan Perubahan APBD. Secara umum, hubungan antara Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 secara simultan disusun dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 juga mempunyai keterhubungan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan memperhatikan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 ini adalah untuk:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Penyesuaian indikator kinerja terkait Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah, *Outcome* dan *Output* merupakan implikasi dari adanya *efisiensi* anggaran Tahun Anggaran 2025; dan
- d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

- 2.1. Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah
- 2.2. Permasalahan Pembangunan
- 2.3. Isu Strategis Pembangunan

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

- 3.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah
- 3.2. Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025
- 4.4 Integrasi Tema dan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025
- 4.5 Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025
- 4.6 Inovasi Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**Bab VI Penutup**

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Salah satu tahapan dalam penyusunan perubahan RKPD 2025 tersebut adalah Gubernur/Bupati/Walikota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I ini meliputi Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah, dan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I

2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2025 adalah **“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN MEMPERBANYAK PROGRAM INOVATIF KHUSUSNYA SEKTOR PARIWISATA DAN PERTANIAN”** dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 yaitu:

1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif;
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan APBD Pemerintah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.000.124.450,00
4.1.01	Pajak Daerah	101.353.011.918,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.250.280.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.396.832.532,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.290.395.908.055,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.239.525.087.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.870.821.055,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.055.132.871,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.055.132.871,00
	Jumlah Pendapatan	1.463.451.165.376,00
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.026.035.696.869,00
5.1.01	Belanja Pegawai	654.688.170.632,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.501.733.491,00
5.1.05	Belanja Hibah	22.845.792.746,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00
5.2	BELANJA MODAL	163.653.626.876,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.555.340.565,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.038.347.575,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.253.682.736,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.686.256.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.464.550.812,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.464.550.812,00
5.4	BELANJA TRANSFER	288.085.770.292,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276.295.441.100,00
	Jumlah Belanja	1.481.239.644.849,00
	Total Surplus/(Defisit)	(17.788.479.473,00)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.788.479.473,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.788.479.473,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Pembiayaan Netto	17.788.479.473,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Perangkat Daerah pada APBD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	428.411.048.713
2	Dinas Kesehatan	163.860.589.432
3	Rumah Sakit Umum Daerah	52.291.032.208
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	99.180.494.885
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	10.069.228.164
6	Satuan Polisi Pamong Praja	17.705.700.379
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.518.794.087
8	Dinas Sosial	5.392.143.152
9	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7.646.350.452
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	9.638.062.259
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.973.419.909
12	Dinas Lingkungan Hidup	26.896.488.202
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.627.715.920
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.939.728.086
15	Dinas Perhubungan	23.022.712.208
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.656.238.480
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.826.908.311
18	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	23.875.530.660
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.627.062.470
20	Dinas Pertanian	26.661.059.831
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.845.662.827
22	Sekretariat Daerah	34.716.893.027
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	62.746.519.786
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.285.561.948
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	301.447.389.438
26	Badan Pendapatan Daerah	11.705.846.464
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.107.098.224
28	Inspektorat Daerah	9.690.028.215
29	Kecamatan Kabanjahe	10.965.394.996
30	Kecamatan Berastagi	8.929.737.964
31	Kecamatan Barusjahe	2.838.933.657
32	Kecamatan Tiga Panah	3.057.386.301
33	Kecamatan Merek	3.026.304.110
34	Kecamatan Munte	2.449.121.245
35	Kecamatan Juhar	2.902.262.176
36	Kecamatan Tiga Binanga	3.594.591.947
37	Kecamatan Lau Baleng	2.443.781.517
38	Kecamatan Mardinding	2.348.018.345

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
39	Kecamatan Payung	2.090.213.377
40	Kecamatan Simpang Empat	3.174.337.400
41	Kecamatan Kutabuluh	2.452.244.142
42	Kecamatan Dolat Rayat	2.112.591.472
43	Kecamatan Merdeka	2.352.028.687
44	Kecamatan Namanteran	2.681.169.895
45	Kecamatan Tiganderket	2.753.785.683
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.702.434.198
TOTAL		1.481.239.644.849,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Total APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.481.239.644.849,00. Anggaran tersebut dialokasikan ke seluruh Perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karo sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Anggaran yang paling besar dialokasikan di Dinas pendidikan yakni sebesar Rp428.411.048.713,00 sedangkan anggaran yang paling kecil dialokasikan di Kecamatan Dolat Rayat yakni sebesar Rp2.112.591.472,00. Ketersediaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Karo pada dasarnya masih sangat kurang sehingga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target pembangunan daerah. Bahkan sebagian besar anggaran yang tersedia dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebagai contoh, anggaran di Dinas Pendidikan sebagian besar diperuntukkan untuk biaya operasional yakni untuk belanja pegawai.

2.1.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,5-5,1	4,22*
2	Indeks Gini	Indeks	0,239-0,229	0,214*
3	Tingkat Penganguran Terbuka	Persen	2,50	2,4*
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4-7,6	7,37*
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,98	77,49*

**Data Tahun 2024 dikarenakan capaian Tahun 2025 belum diketahui*

Diperkirakan tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo optimis tumbuh Positif dan mengalami akselerasi dibanding realisasi tahun 2024. Gambaran tersebut dapat dilihat dari kondisi perekonomian Sumatera Utara, tercatat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 4,67%, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha walaupun berkontraksi dari triwulan sebelumnya.

Dari sisi produksi kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha konstruksi, sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam, hal ini dapat di akibatkan beberapa faktor antara lain efesiensi anggaran. Perekonomian Sumatera Utara dan Kabupaten Karo diperkirakan tetap tumbuh dengan meningkatnya aktivitas perekonomian antara lain pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, investasi, UMKM. Peningkatan tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha di Kabupaten Karo. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Karo juga diperkirakan semakin membaik ditandai dengan penurunan angka pengangguran terbuka.

2.1.3. Realisasi Capaian Indikator IKU Kepala Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 TW I
1	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman)	Nilai	89,5	88.5*
2	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65	60.41*
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP*
4	Indeks Profesionalisme ASN	poin	71	76.67
5	Skor LPPD	poin	3,18	NA
6	Indeks SPBE	indeks	2,8	3,04*
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,7	10,12
8	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,90	13,26
9	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	Indeks	25,26	56,15*
10	Angka Harapan Hidup	tahun	72,05	72.44
11	Indeks Pembangunan Gender	%	96,50	96.36
12	Persentase Penegakan PERDA	%	74,69	80,77
13	Persentase PMKS yang tertangani	%	61,54	57.69*
14	Persentase Peningkatan PDRB (ADHB)	persen	6,00	9.3*
15	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	pelaku	1300	0
16	BUMD/Perusda	BUMD	1	1
17	Skor pola pangan harapan (%)	persen	92,00	92*
18	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.204.500	240543
19	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	1,60	0
20	Jumlah benda dan situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya	22	0
21	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	12	2
22	Jumlah wirausaha baru	wirausaha	50	0
23	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	persen	20	0
24	Nilai Investasi	triliun	6,90	7.16*
25	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	116.265.230.700	
26	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	68,00	63.9*
27	Persentase rurnah tinggal bersanitasi layak	%	85	74.68*
28	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	80	68.706*
29	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	52,11	55.21*

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 TW I
30	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	%	64	63.69*
31	Gedung pemerintahan yang layak dan baik	%	66	61.5*
32	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	95,53
33	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	%	100	100
34	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	%	80,00	25,09
35	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	%	99,50	62,5
36	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lokasi	2	0,00
37	Rasio konektivitas kabupaten	%	97	96,5
38	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,77	0,77
39	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	indeks	81,29	60.91*
40	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	81,30	93.37*
41	Hasil pengukuran tutupan lahan	indeks	70,16	52.47*
42	Luasan RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	%	28	25*
43	Ketaatan terhadap RTRW	%	78	73*
44	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	%	78,00	78.03*
45	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks	0,56	0.48*

* Data capaian tahun 2024

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2025. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah. Jika dilihat dari capaian IKU diatas capaian untuk TW I tahun 2025 diasumsikan sementara mendekati capaian tahun 2024 namun terdapat beberapa indikator yang telah memiliki realisasi seperti Jumlah kunjungan wisatawan pada triwulan I mencapai 240.543 orang, capaian ini terus didorong melalui pelaksanaan event dan pembenahan sarana dan prasarana maupun infrastruktur pendukung pariwisata. Untuk indikator yang belum memiliki capaian antara lain disebabkan oleh belum terlaksananya kegiatan pendukung indikator tersebut, hal ini dipengaruhi antara lain karena efesiensi atau penyesuaian penganggaran. Capaian tersebut terus di dorong melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.

2.1.4. Realisasi Capaian Indikator Kunci Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,60-5,00	4.22*
2	PDRB per kapita	ADHB	60.443.505	
		ADHK	37.674.809	
3	Indeks Gini	indeks	0,264	
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	91,25	92.63*
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	77,98	77.49*
6	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,7	10.12*
7	Angka usia harapan hidup	tahun	72,05	72.44
8	Persentase balita gizi buruk	%	2	0.08
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	2	1.75
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	59,5	0
11	Angka partisipasi angkatan kerja	%	83,96	269.587*
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83,96	84.13*
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,50	2.4*
14	Rasio penduduk yang bekerja	%	98,38	97.6*
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	0,07	0,6*
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	83,96	97.6*
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	25.7	47.69*
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	92	86,32*
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	8,03	7.41*
20	Opini BPK	opini	WTP	WTP*
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	92,0	92*
22	Penguatan Cadangan Pangan	ton	100	14,15*
23	Penanganan daerah rawan pangan	persen	0,03	0
24	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	50,62	51*
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100*
26	Produksi sektor pertanian	Ton	14.237.165	2.138.845*
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,70	5,72*
28	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.602.072	23.05*
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100*
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	16,22	N/A
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	11,48	8
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	3,86	3,82*
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	35,90	11
34	Pertumbuhan Industri	persen	4,03	1
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu	1.785.945	
2	Nilai tukar petani	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita	%	38,7	N/A
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	persen	30,25	N/A
5	Rasio ketergantungan	rasio	47,88	34.08
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1200	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	30	46,91
1.2.	Angka Partisipasi Kasar			
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD	%	103,50	100,78
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP	%	99	102,27
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan			
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	%	19	18
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	%	18,5	18
1.4.	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	94,46
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	93,78	83,63
1.5.	Angka partisipasi sekolah	%		
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	98,2	99,12
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	94	96,91
1.6.	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,01	0,02
1.7.	Angka Kelulusan:			
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	97,5
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96,00	67
1.9.	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	99,00	60,8
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	86,00	75,64
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	52,04	49,07
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	675,5	646
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	17,5	16,5
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	99	100
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	99,83
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,8	99,38
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	80
2	Kesehatan			
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	6,50	4.9
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Rasio	9	4.9
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Rasio	5,00	4.9
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Rasio	84	195.1
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	9,6	9.3
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,04	0.04
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	Rasio	0,11	0.1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0.5
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0.01
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	Rasio	0,27	0.29
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	12,90	8.68
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,08	0.09
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	Rasio	0,50	0.47
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	14.1
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	12.7
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96,00	100
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	90,00	50
2.19.	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	rasio	2,00	2 kasus
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	10	2 kasus
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	75	14.4
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	190	55
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	rasio	4,00	0
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	75,00	14.4
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,00	94.6
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	78,00	17
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,50	0.06
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	%	100	13.9
2.30.	Cakupan puskesmas	%	117,65	111.8
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	%	80,70	78.8
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100,00	13.1
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	12.5
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	50,00	0.7
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	%	100,00	9.5
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100,00	100
2.37.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100,00	100
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80,00	80
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100
2.40.	Persentase balita stunting	%	20,00	10.31
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100,00	11.7
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	100,00	13.2
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	12.2
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	%	100,00	9.5
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	%	100,00	100
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	19016
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	100,00	88
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	4335

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	630
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	77
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	12.5
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	10.37
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	%	80,00	0
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	%	90	11,7
2.55.	Persentase Posyandu aktif	%	100	96.51
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	%	84,21	78.95
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	%	78,95	68.42
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	%	76,19	73.58
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	76,75	89.79
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	%	95	95
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	84,00	78.95
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	%	95	0
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	%	95	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1.	Pekerjaan Umum:			
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	68,00	63.9*
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	85	74.68*
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	64	63.69*
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	52,11	55.21*
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	80,00	68.706*
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	%	78	78*
3.2.	Penataan Ruang:			
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	28	25*
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	78	73*
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	50	0*
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	68	61.5*
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	100,00	63,8
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	82,44	25,09
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	99,50	98,5
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	81,3
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	%	100,00	100
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	lokasi	2	0
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,267	64,75
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	2,5	76,67
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,60	41,18
5.4.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	1,9	77,78
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	%	74,69	80,77
5.2.	Bencana			
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	15014	0
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	12344	0
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	20406	0
	Indeks Kapasitas Daerah	indeks	0,56	.48*
6	Sosial			
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	61,00	58,50
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	61,00	58
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	61,89	28,89
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	33,00	0
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100,00	0
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100,00	0
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100,00	28,89
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100,00	0
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	19,61	0
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	%	97,66	0
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	0
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	94,5	0
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	70	0
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50	0
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	20	0
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	20	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,80	21,89
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	0,01
2.3.	Rasio KDRT	%	0,01	0,01
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	79,59
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,68	100
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	75	100
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	100
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	50	100
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	21,89
3	Pangan			
3.1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	44,51	0
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hari	Energi = 2.400	0
		gr/hari	Protein =63	0
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	%	100	0
4	Pertanahan			
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	1,20	0,00
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	1,00	0,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	lokasi	2,00	0,00
5	Lingkungan Hidup			
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada		0*
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada		Tidak Ada*
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	1*
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	54,11	60.91*
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	87,11	93.37*
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	60,52	52.47*
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	0
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	orang	10	0
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	kali	13	0
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	0
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	%	86	0
5.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	ton	100	0
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	%	50	0
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	86	0
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	nilai	78	0
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	0
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	0
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	jumlah izin	10	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100	-
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	-
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	-
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	-
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	-
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	-
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	90	-
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	70	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	75,52	0
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	0,20	0
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	%	100	0
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	%	0,30	0
7.5.	Persentase PKK Aktif	%	100	0
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	0
7.7.	Persentase LSM aktif	%	80	0
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,03	0,82
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,20	2,35
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	58,94	81,82
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		64	63,64
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	8	7
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	2,35
8.7.	Ratio Aseptor KB	%	69,81	53,04
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	66,7	46,7
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,89	22,9
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	44,5	41,86
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	46,73	53,04

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	920	800
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	810	580
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	579	458
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	orang	578	461
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	33
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	orang	200	150
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	269
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	90	80
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	orang	2120	1816
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	orang	1050	690
9	Perhubungan			
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	5.839.063	859082
9.2.	Rasio ijin trayek	%	0,036765	0
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	unit	5.346	145
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	4	2
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	97,00	97,00
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	75,00	7,48
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	4	0
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0357	0,0357
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	5.839.063	859.082
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	%	97	96,5
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	rasio	0,77	0,77
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	86,99	85,5*
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	86	67,69*
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	86	74,5*
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	18,5	12,85*
10.5.	Indeks SPBE	indeks	2,8	3,04*
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	64,84	51,00*
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	94	93*
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	Tidak ada data
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	95*
12	Penanaman Modal			
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	87	96*
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (dalam triliun)	6,67	7,16*
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	persen	73,48	75,3*

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	2,46	18,52*
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	0
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	16,5	0
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	77	0
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	65	0
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	17	0
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	500	0
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	20	0
14	Statistik			
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	Tidak
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	ada/tidak	ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	Tidak
15	Persandian			
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	14	25*
16	Kebudayaan			
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	2
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	22	0
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	30	0
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	-	0
17	Perpustakaan			
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	11,6	304
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	rasio	0,250	299
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	1,135	0,16
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	orang	51000	4,401
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buku	10700	10892
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	1,334	0,61
18	Kearsipan			
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	91,60	30,68
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	0
Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata			
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	1.204.500	240543
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1.6	0
1.3.	PAD sektor pariwisata	Persentase	50	12,78
2	Pertanian			
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	%	50,62	51*
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	%	5,70	5,72*
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100*
2.4.	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	56,67	60,61*
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	72,44	68,45*
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	%	7,45	7,1*
2.7.	Produksi sektor pertanian	Ton	14.237.165	2.138.845*
2.8.	Produksi sektor perkebunan	Ton	1.602.072	23.05*
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha	50	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
5	Perdagangan			
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	miliar	85,5	1.691,13 M
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		80	0
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	39,39	12
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1.	Produksi perikanan	%	90	34,02
8.2.	Konsumsi ikan	%	98,60	
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	74,23	25,46
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	74,23	25,46
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	%	44,2	
Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	0
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	0
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	0
2	Keuangan			
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP*
2.2.	Persentase SILPA	%	9,667	N/A
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,667	N/A
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	0
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	0
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	%	65,61	0
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	%	14,91	0
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	%	44,21	0
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	%	0,14	0
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,36	0
2.14.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	0
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	15	0
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	12,26	0
3.3.	Persentase keterisian jabatan	%	100	90.16
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	16	1
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	0
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	0
Penerapan SIDA:				
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	0
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	0
5	Pengawasan			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2025	
			Target	Capaian TW I
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	92,00	86.6
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0
6	Sekretariat Dewan			
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/ TIDAK	ADA	0
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/ TIDAK	ADA	0
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/ TIDAK	ADA	0

* Data Tahun 2024

2.1.5. Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Adapun Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 adalah sebesar 14,77 PERSEN. Capaian perangkat daerah dapat ditunjukkan pada tabel berikut, daftar capaian program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 2.6

Rekapitulasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (%)
1		2	3	4	5	7	8	9	10
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	01	DINAS PENDIDIKAN	150.568.382.597.406	1.183.240.599.033	428.411.048.713	117.201.530.576	27,36	1.300.442.129.609	0,86%
1	02	DINAS KESEHATAN	871.399.588.986	157.845.726.303	163.860.589.432	15.831.880.487	16,86	173.677.606.790	19,93%
1	02	RSUD KABUPATEN KARO	57.003.093.329	160.359.938.373	52.291.032.208	10.647.880.815	20,36	171.007.819.188	300,00%
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	389.790.037.244.775	408.438.104.984	99.180.494.885	3.256.465.661	3,28	411.694.570.645	0,11%
1	04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTAHANAN	8.506.796.306	36.473.584.759	10.069.228.164	892.321.773	8,86	37.365.906.532	439,25%
1	05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	66.475.968.372	46.051.224.123	17.705.700.379	3.146.401.986	17,77	46.051.224.123	69,27%
1	05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.532.328.000	39.184.937.587	6.518.794.087	1.048.225.145	16,08	40.233.162.732	127,59%
1	06	DINAS SOSIAL	22.472.685.700	22.891.863.987	5.392.143.152	863.061.454	16,006	23.754.925.441	105,71%
2	07	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	23.663.603.548	14.455.505.933	7.646.350.452	755.232.616	9,88	15.210.738.549	64,28%

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (%)
1		2	3	4	5	7	8	9	10
2	08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.900.595.241	17.690.241.647	9.638.062.259	1.047.839.418	10,87	18.594.207.615	116,94%
2	09	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	43.189.099.240	23.593.748.088	9.973.419.909	1.371.050.670	13,75	24.964.798.758	57,80%
2	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	147.813.509.970	73.162.802.256	26.896.488.202	2.556.880.461	9,51	75.719.682.717	51,23%
2	12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32.781.205.637	14.045.081.793	5.627.715.920	753.508.935	13,39	14.798.590.728	45,14%
2	13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	52.991.859.877	16.649.440.044	10.939.728.086	1.653.561.666	15,12	18.303.001.710	34,54%
2	15	DINAS PERHUBUNGAN	43.676.656.177	60.872.717.618	23.022.712.208	4.206.518.290	39,92	65.079.235.908	149,00%
2	16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41.259.575.570	23.007.475.908	9.656.238.480	920.260.374	9,53	23.927.736.282	57,99%
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37.658.588.677	16.358.603.177	5.826.908.311	893.238.879	15,33	17.251.842.056	45,81%
2	22	DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	46.181.215.605	65.267.629.690	23.875.530.660	1.663.369.265	6,97	66.930.998.955	144,93%
2	23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	32.017.919.791	11.393.317.972	15.627.062.470	1.085.513.015	6,95	12.478.830.987	38,97%
3	27	DINAS PERTANIAN	129.633.170.927	88.268.555.152	26.661.059.831	4.162.345.599	15,61	92.430.900.751	71,30%
3	29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	80.682.975.036	43.069.140.197	14.845.662.827	1.481.298.864	9,98	44.550.439.061	55,22%
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	141.345.459.910	88.558.585.749	34.716.893.027	1.790.967.525	5,16%	88.558.585.749	62,65%

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (%)
1		2	3	4	5	7	8	9	10
4	02	SEKRETARIAT DPRD	131.768.766.911	125.041.675.780	62.746.519.786	5.741.246.610	9,15	130.782.922.390	99,25%
5	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	38.967.485.345	25.510.142.367	10.285.561.948	1.506.610.817	14,65	17.551.296.841	45,04%
5	02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14.546.786.480.359	878.216.730.550	301.447.389.438	1.361.409.882	0,45	879.578.140.432	6,05%
5	02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	30.887.431.681	28.691.325.817	11.705.846.464	1.106.203.258	9,45	29.797.529.075	96,47%
5	03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.330.374.725	13.158.817.351	7.107.098.224	1.084.344.934	15,26	14.243.162.285	37,16%
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	35.788.719.371	25.818.410.218	9.690.028.215	1.886.201.394	19,47	27.704.611.612	77,41%
7	01	KECAMATAN BARUSJAHE	14.546.503.145	8.087.266.053	2.838.933.657	612.237.155	21,57	8.699.503.208	59,80%
7	01	KECAMATAN BERASTAGI	6.010.095.422.556	20.794.163.257	8.929.737.964	1.200.331.781	13,44	21.994.495.038	0,37%
7	01	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	10.242.009.625	5.952.334.566	2.112.591.472	487.608.731	23,08	6.439.943.297,00	62,88%
7	01	KECAMATAN JUHAR	19.087.580.196	4.093.077.573	2.902.262.176	648.744.714	22,35	4.741.822.287	24,84%
7	01	KECAMATAN KABANJAHE	75.689.066.445	28.778.491.780	10.965.394.996	1.509.324.005	0,14	30.287.815.785	40,02%
7	01	KECAMATAN KUTABULUH	17.024.701.440	7.857.644.851	2.452.244.142	500.655.589	20,42	8.358.300.440	49,10%
7	01	KECAMATAN LAUBALENG	12.511.770.125	6.460.793.712	2.443.781.517	508.461.941	20,81	6.969.255.653	55,70%
7	01	KECAMATAN MARDINDING	12.160.122.614	6.337.439.390	2.348.018.345	476.662.531	20%	6.814.101.921	56,04%
7	01	KECAMATAN MERDEKA	15.870.273.059	5.964.287.592	2.352.028.687	509.674.448	21,67	6.473.962.040	40,79%
7	01	KECAMATAN MEREK	14.723.550.075	6.938.070.148	3.026.304.110	650.129.735	21,483	7.588.199.883	51,54%
7	01	KECAMATAN MUNTE	17.927.437.993	6.643.307.554	2.449.121.245	527.624.835	21,543	7.170.932.389	40,00%
7	01	KECAMATAN NAMANTERAN	17.927.437.993	6.779.671.169	2.681.169.895	413.829.091	15,43	7.193.500.260	40,13%
7	01	KECAMATAN PAYUNG	10.653.337.788	5.695.055.896	2.090.213.377	309.638.889	14,81	6.004.694.785	56,36%
7	01	KEC. SIMPANG EMPAT	23.137.301.689	8.595.515.489	3.174.337.400	488.972.003	15,40	9.084.487.492	39,26%
7	01	KECAMATAN TIGA PANAH	18.290.326.555	9.112.396.914	3.057.386.301	687.141.541	22%	9.762.732.671	53,38%

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (%)
1		2	3	4	5	7	8	9	10
7	01	KECAMATAN TIGA BINANGA	31.984.962.415	9.684.146.401	3.594.591.947	692.992.499	19,28	10.377.138.900	32,44%
7	01	KECAMATAN TIGANDERKET	14.928.347.955	10.624.794.237	2.753.785.683	402.394.086	14,61	11.027.188.323	73,87%
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	53.406.345.930	68.671.115.413	9.702.434.198	1.018.373.790	10,50	69.689.489.203	130,49%
		TOTAL			1.481.239.644.849	201.560.167.733	14,77%		

2.1.6. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa faktor pendukung antara lain:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan, petunjuk teknik, petunjuk operasional sebagai panduan;
- b. Adanya peningkatan fasilitas kerja, gedung kantor, sarana dan prasarana kerja;
- c. Tersedianya media komunikasi dan informasi sebagai penunjang dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dan komitmen pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan; dan
- e. Adanya peningkatan kinerja dari aparatur disebabkan oleh penetapan indikator dan target kinerja yang semakin jelas dan terukur.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 antara lain:

- a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengharuskan seluruh perangkat daerah melakukan efisiensi sehingga terjadi penundaan pelaksanaan beberapa sub kegiatan;
- b) Koordinasi lintas sektor yang belum optimal;
- c) Pelaksanaan kegiatan belum melibatkan seluruh tim kerja;
- d) Masih belum optimal dalam pengumpulan dan pemanfaatan data;
- e) Masih terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan indikator kinerja dan target kinerja baik program dan kegiatan.

2.1.7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2025 yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, beberapa indikator capaian pembangunan belum dapat diketahui hasilnya namun indikator-indikator sebagian besar menunjukkan hasil yang baik dan mencapai target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program-kegiatan dan sub kegiatan, tingkat Realisasi Anggaran RKPD sampai dengan Tahun 2025 cukup maksimal yaitu sebesar 13,60%.

Indikator makro Kabupaten Karo, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagian besar belum dapat diketahui hasil capaian untuk tahun 2025 pada tahun berjalan. Untuk data pada triwulan I tahun 2025, disajikan capaian pada akhir tahun 2024.

Berdasarkan data Hasil RKPD Tahun 2025, maka dilakukan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Agar masing-masing Perangkat Daerah dalam merencanakan kegiatan berdasarkan analisis kinerja dan anggaran dan disesuaikan dengan kesiapan waktu pelaksanaannya dan SDM yang dimiliki sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai target;
- b. Menjadwalkan monitoring dan evaluasi secara rutin dan untuk mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan; dan

- c. Melakukan monitoring yang lebih optimal khususnya untuk program pembangunan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

2.2. Permasalahan Pembangunan

Perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut meliputi antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Karo juga mempedomani pencapaian target kinerja yang telah dimuat pada dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Pemerintah Daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen Perubahan RKPD ini permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan. Permasalahan yang telah dirumuskan merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a) Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan

- ❖ Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.

- ❖ Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran).
- ❖ Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- ❖ Kurangnya Dokter Spesialis (Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi)
- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSUD
- ❖ Masih kurangnya kelengkapan prasarana dan alat Kesehatan di Puskesmas sesuai standar
- ❖ Pelaksanaan program/kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
- ❖ Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat
- ❖ Masih terdapat sarana Puskesmas Pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak
- ❖ Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi
- ❖ Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular
- ❖ Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSUD;
- ❖ Belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan sulitnya menekan peserta Unmet Need;
- ❖ Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kematian balita.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- ❖ Persentasi jaringan jalan dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik yang cenderung stagnan serta ketersebarannya yang belum merata;
- ❖ Akses air minum belum mencapai 100%;
- ❖ Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
- ❖ Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- ❖ Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;

- ❖ Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal;
- ❖ Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memadai;
- ❖ Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- ❖ Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- ❖ Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau;

d) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- ❖ Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh akibat PSU yang tersedia belum memadai dan belum baik;
- ❖ Masih adanya rumah tidak layak huni termasuk rumah korban bencana yang belum terbangun;

e) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- ❖ Kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat akan bencana masih rendah;
- ❖ SDM Penanggulangan bencana masih kurang dan belum terlatih;
- ❖ Sarana prasarana layanan PUSDALOPS dan PUSDATIN belum memadai;
- ❖ Ketersediaan rambu-rambu dan plank informasi rawan bencana dalam rangka mitigasi belum memadai;
- ❖ Gladi/simulasi lapangan kesiapsiagaan bencana belum merata dilaksanakan di 17 Kecamatan;
- ❖ Dokumen regulasi penanggulangan bencana belum lengkap (RPKB dan Renkon bencana lain selain erupsi Gunung);
- ❖ Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan serta sarana dan prasarana moblisiasi terkait evakuasi, pemulangan, tempat penyimpanan belum memadai;
- ❖ Kurang optimalnya koordinasi antar instansi dan penguatan kelembagaan bencana terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- ❖ Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar;
- ❖ Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Karo yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- ❖ Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo masih rendah yang diakibatkan oleh kurangnya kendaraan operasional serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran serta belum adanya pos pemadam di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karo;
- ❖ Terbatasnya pagu anggaran, sehingga untuk menangani kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat ditangani maksimal.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- ❖ Dinas Sosial masih membutuhkan Pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum mencukupi untuk mendukung semua tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karo;
- ❖ Dibutuhkan penambahan anggaran guna pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabanjahe;
- ❖ Dibutuhkan Kendaraan Operasional guna mendukung penanganan PMKS (ODGJ dan Orang terlantar);
- ❖ Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar;
- ❖ Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan;
- ❖ Kegiatan KUBE belum semua usulan terpenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran;
- ❖ Belum tersedianya Rumah Singgah untuk orang terlantar.

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja

- ❖ Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- ❖ Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar;
- ❖ Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- ❖ Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;

b. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- ❖ Masih adanya perkawinan anak di bawah umur dan perundungan terhadap anak;
- ❖ Tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan sedangkan lapangan kerja terbatas; dan
- ❖ Pemberdayaan perempuan masih menjadi perhatian karena meningkatnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- ❖ Cadangan Pangan belum memenuhi Standar/Arahan Kementerian Pertanian
- ❖ Belum adanya Intervensi untuk Daerah Rawan Pangan
- ❖ Masih banyak petani yang melakukan pemakaian pestisida yang berlebihan;
- ❖ Banyak petani belum mengetahui pentingnya registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- ❖ Masih banyak masyarakat yang belum mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- ❖ Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
- ❖ Masih ada kasus tanah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

- ❖ Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup (masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Lingkungan);
- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
- ❖ Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kabupaten Karo;
- ❖ Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
- ❖ Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
- ❖ Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
- ❖ Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
- ❖ Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- ❖ Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- ❖ Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- ❖ Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
- ❖ Kurangnya ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan blangko Kartu Identitas Anak (KIA).

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ❖ Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan pengalangan potensi desa menjadi tidak maksimal, kurang berkembangnya Lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll)
- ❖ Rendahnya semangat perubahan Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat serta minimnya inovasi menuju desa mandiri (Desa masih tergantung terhadap DD dan ADD)

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- ❖ Kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 7 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
- ❖ Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai

- ❖ Adanya peningkatan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) setiap tahunnya;

i. Bidang Perhubungan

- ❖ Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sarana prasarananya
- ❖ Belum tersedianya Terminal Type C
- ❖ Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi
- ❖ Belum terpenuhinya Perbaikan, Perawatan dan Pengadaan LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)
- ❖ Belum terlaksananya meterisasi LPJU

j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- ❖ Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK), Kurangnya Sumber daya yang memadai untuk mendukung Penyelenggaraan SPBE, Kurangnya Pemerataan fasilitas akses informasi publik, belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kurangnya ruang informasi publik untuk akses informasi bagi masyarakat.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- ❖ Belum optimalnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
- ❖ Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
- ❖ Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
- ❖ Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
- ❖ Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.

l. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

- ❖ Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder;
- ❖ Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;
- ❖ Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perizinan;
- ❖ Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- ❖ Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- ❖ Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaan dan kepemudaan;
- ❖ Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga;
- ❖ Belum optimalnya prestasi olahraga;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan atlet;
- ❖ Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;
- ❖ Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan;

- ❖ Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millennial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- ❖ Belum ada sistem integrasi data statistik sektoral daerah, belum optimalnya ketersediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah, kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik sektoral.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- ❖ Kurangnya sumber daya di bidang pengelolaan persandian daerah.

p. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

- ❖ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- ❖ Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreaitifitas dan berekspresi;
- ❖ Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilai dan budaya Karo;
- ❖ Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;
- ❖ Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- ❖ Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal;
- ❖ Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- ❖ Menurunnya persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani yang bisa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.
- ❖ Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya SDM.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- ❖ Kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- ❖ Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- ❖ Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- ❖ Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh Perikanan;
- ❖ Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional BBI Lokal;
- ❖ Kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pembudidaya Ikan dalam berbudidaya ikan;
- ❖ Kurangnya ketersediaan ikan di perairan daratan.

b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- ❖ Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- ❖ Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan profesional;
- ❖ City Branding Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;
- ❖ Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;
- ❖ Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;
- ❖ Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- ❖ Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;
- ❖ Pemasaran Pariwisata yang belum memadai;
- ❖ Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif.

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- ❖ Berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
- ❖ Rendahnya kualitas SDM dan teknologi petani dan penangkar;
- ❖ Kurangnya pengetahuan petani dalam pelaksanaan SOP pertanian dan belum optimalnya mekanisasi pertanian;
- ❖ Pertanian yang masih sangat dipengaruhi oleh musim;
- ❖ Belum optimalnya infrastruktur pertanian/ permasalahan jenis, jumlah, dan akses input pertanian;
- ❖ Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- ❖ Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian;
- ❖ Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian;
- ❖ Keterbatasan SDM penyuluh baik kuantitatif maupun kualitatif dan sarana pendukung;
- ❖ Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan belum optimal;
- ❖ Belum optimalnya pemanfaatan kawasan penggembalaan umum;
- ❖ Keterjangkauan petani terhadap pupuk anorganik;
- ❖ Kenaikan harga pupuk kimia yang mengakibatkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
- ❖ Perumahan dan Fasum-fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahterimakan;
- ❖ Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus.

d) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- ❖ Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- ❖ Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

e) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- ❖ Daya Saing Komoditi/Produk Pertanian di Pasar Nasional dan Global Masih Rendah;
- ❖ Kurangnya Promosi Komoditi/Produk Unggulan di Tingkat Nasional dan Internasional;
- ❖ Perlindungan konsumen belum optimal
- ❖ Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- ❖ Belum adanya peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap pedagang yang berada di lingkungan pasar.

f) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- ❖ Belum optimalnya fasilitas dan pengelolaan sentra IKM Kabupaten Karo;
- ❖ Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;
- ❖ Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan**a. Sekretariat Daerah**

- ❖ Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo masih rendah dan nilai penerapan Standar Pelayanan Publik masih rendah.
- ❖ Nilai hasil evaluasi SAKIP masih rendah sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh (perencanaan, indikator kinerja, perjanjian kinerja, proses bisnis, cascading, dll)
- ❖ Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik belum termonitoring dengan baik.
- ❖ Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- ❖ Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- ❖ Belum semua desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki batas baku dan masih banyak desa yang tidak memiliki dokumen terkait batas desanya.
- ❖ Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
- ❖ Beberapa unsur rupa bumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.

b. Sekretariat DPRD

- ❖ Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan**a) Bidang Perencanaan**

- ❖ Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
- ❖ Belum optimalnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;

- ❖ Adanya perbedaan persepsi dan kemampuan SDM antara PD dan Bappedalitbang pelaksanaan peran dan fungsi perencanaan antara Bappedalitbang dan Perangkat Daerah;
- ❖ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ❖ Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan ke depan.

b) Bidang Keuangan

- ❖ Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap ketentuan dan regulasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
- ❖ Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- ❖ Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
- ❖ Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- ❖ Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak;
- ❖ Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah.

c) Bidang Urusan Kepegawaian

- ❖ Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll;
- ❖ Masih kurangnya kompetensi PNS terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diperlukan Penambahan Pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan dibidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- ❖ Kebijakan dan Sistem Informasi Kepegawaian dari pemerintah pusat masih sering berubah sehingga tidak sinkron dengan perencanaan Kepegawaian di daerah.

d) Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- ❖ Masih minimnya presentasi pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- ❖ Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll;
- ❖ Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun terpenuhi oleh setiap Aparatur Sipil.

e) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- ❖ Masih rendahnya dukungan PD dan Pengambil kebijakan dalam pengembangan penelitian dan pengembangan

F. Unsur Pengawas Inspektorat Daerah

- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
- ❖ Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor

- ❖ Kapabilitas APIP masih Level 2

G. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- ❖ SDM Pengurus Ormas, LSM dan OKP masih perlu untuk ditingkatkan.
- ❖ Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
- ❖ Kesadaran Politik masyarakat dan pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah.
- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

2.3. Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis berbeda dengan permasalahan pembangunan dimana isu strategis lebih fokus ke masa depan yaitu sesuatu yang belum menjadi masalah namun jika tidak ada tindakan dapat menjadi masalah. Dilain sisi bukan hanya potensi permasalahan tetapi potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan juga dapat dijadikan isu strategis.

Isu strategis Kabupaten Karo dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang perlu diperhatikan dalam Perubahan RKPD tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera.
- 2) Peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
- 3) Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima.
- 4) Demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan
- 5) Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan
- 7) Bencana dan Perubahan Iklim
- 8) Pembangunan kewilayahan yang merata dan adil
- 9) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 10) Kestinambungan pembangunan

Selain isu pembangunan di atas, dalam proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, disusul Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang bertujuan mendukung efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini diperkuat oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, telah dilakukan pergeseran anggaran melalui Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut wajib dicantumkan kembali dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi internal perangkat daerah, masih diperlukan sejumlah penyesuaian melalui pergeseran anggaran antar jenis kegiatan dan antar jenis belanja. Kemudian, alasan perlu dilakukan perubahan RKPD mengingat terdapat saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan dalam tahun anggaran 2025 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun berjalan hingga triwulan II dan perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan rasio gini. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan hingga triwulan I akan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam perubahan RKPD secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah untuk tahun 2025.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2025 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Karo.

3.1. Dinamika Perekonomian Global

Dinamika perekonomian global tahun 2025 diprediksi akan penuh tantangan dan ketidakpastian, dengan pertumbuhan global yang diperkirakan melambat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 berada di kisaran 2,7 persen hingga 3,3 persen. Beberapa faktor seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi, geopolitik, pelambatan ekonomi di beberapa negara, inflasi tinggi, tekanan pasar keuangan, perubahan iklim, dan disrupti rantai pasok, menjadi ancaman utama. Beberapa poin penting terkait dinamika perekonomian global tahun 2025:

Proyeksi pertumbuhan global turun dari 3,1 persen pada tahun 2024 menjadi 3,2 persen pada tahun 2025. Tantangan utamanya antara lain Ketidakpastian kebijakan ekonomi dan geopolitik, Pelambatan ekonomi di beberapa negara, Tingginya inflasi di beberapa negara, Tekanan pasar keuangan global, Perubahan iklim, Disrupti rantai pasok dan Peningkatan ketegangan perdagangan, terutama antara AS dan China.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif serta Inovasi dalam sektor keuangan, seperti teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*, yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan akses ke layanan keuangan.

Perdagangan global diperkirakan tumbuh lebih lambat pada tahun 2025, dengan pertumbuhan 1,8 persen dibandingkan dengan 3,4 persen pada tahun 2024. Perusahaan perlu menyiapkan strategi pengelolaan bisnis yang adaptif dan berbasis data untuk menghadapi tantangan dan peluang yang mungkin muncul.

Secara umum, tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Negara-negara, termasuk Indonesia, perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi kebijakan ekonomi maupun strategi bisnis, untuk menghadapi dinamika yang dinamis ini.

3.2. Perkembangan Provinsi Perekonomian Sumatera Utara

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2025 diperkirakan akan semakin kuat. Sumatera Utara diperkirakan akan mencapai pertumbuhan dengan rentang sasaran $4,9 \pm 5,7\%$ (yoy). Angka ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 yang sebesar $4,7 \pm 5,5\%$ secara tahunan. Ekonomi Sumut dapat tetap tumbuh walaupun dibayangi dengan risiko perlambatan ekonomi global maupun tantangan domestik. Tensi geopolitik di sejumlah negara dan risiko pertumbuhan negara mitra dagang utama yang lebih rendah dapat menekan ekspektasi lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini dapat terlihat dari indikator ekonomi di Tiongkok dan US yang merupakan negara mitra dagang Sumut ini sedang berada di bawah zona ekspansif. Hal ini membuat potensi tertahannya kinerja ekspor. Selain itu, para pelaku usaha sedang dalam mode wait and see dalam melakukan investasi di Sumut pada periode transisi pemerintahan. Sementara itu, kenaikan PPN 12% pada tahun 2025 juga berpotensi menahan kinerja konsumsi rumah tangga lebih tinggi.

Pada triwulan I tahun 2025 (yoy), pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut menempati posisi ke-5 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 4,67 persen. Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,47 persen, sementara Provinsi Sumatera Selatan di posisi ke-2 tumbuh sebesar 5,22 persen, serta Provinsi Kepulauan Riau di posisi ke-3 tumbuh sebesar 5,16 persen.

Dilihat dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) mencatat kontraksi terdalam dengan penurunan sebesar 13,62 persen, yang turut memberikan tekanan pada keseluruhan kinerja ekonomi Sumut selama periode ini.

Meski demikian, jika dibandingkan secara tahunan (year-on-year/yoy), perekonomian Sumut justru menunjukkan pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi tercatat padalapangan usaha transportasi dan pergudangan (LUTP) yang meningkat sebesar 12,13 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan sebesar 17,69 persen.

Selain memaparkan data pertumbuhan ekonomi, BPS Sumut juga mengungkapkan kondisi ketenagakerjaan terbaru di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan survei pada Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 8,108 juta orang, meningkat 108 ribu orang dibanding Februari 2024.

Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin. Jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 7,699 juta orang, naik 107 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi di sektor pendidikan, yang menyerap tenaga kerja baru sebanyak 40.000 orang. Meski demikian, proporsi pekerja formal mengalami penurunan.

Indikator lain yang mengalami perbaikan adalah tingkat setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, yang masing-masing turun sebesar 0,46 persen poin dan 3,33 persen poin. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumut pada Februari 2025 tercatat sebesar 5,05 persen, atau turun 0,05 persen poin dari tahun sebelumnya.

3.3. Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Target indikator makro ekonomi regional Kabupaten Karo yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional, nasional, regional maupun internal Kabupaten Karo. Sesuai target pembangunan yang dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 juga pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target indikator sasaran pokok periode I RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045. Beberapa kebijakan bidang ekonomi yang tercantum dalam dokumen RPJMD dan RPJPD akan terus dilakukan dengan melakukan penekanan pada sektor yang memberikan daya ungkit terhadap percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Karo.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 merupakan tahun peralihan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang sedang disusun. Sektor-sektor yang menjadi perhatian ke depan sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Karo 2025-2029 antara lain tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kualitas Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing serta lingkungan sosial yang inklusif dan berkarakter. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan

Kesejahteraan ekonomi masyarakat mengacu pada tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang dinikmati oleh suatu kelompok

atau komunitas dalam suatu wilayah. Aspek ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mencapai kehidupan yang layak dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Perlambatan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, Laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 0.80 persen. Hal ini akibat *pandemi Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi. Pada tahun 2021 kembali mengalami akselerasi hingga tahun 2024 menjadi 4,22 persen. Tabel di bawah menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.

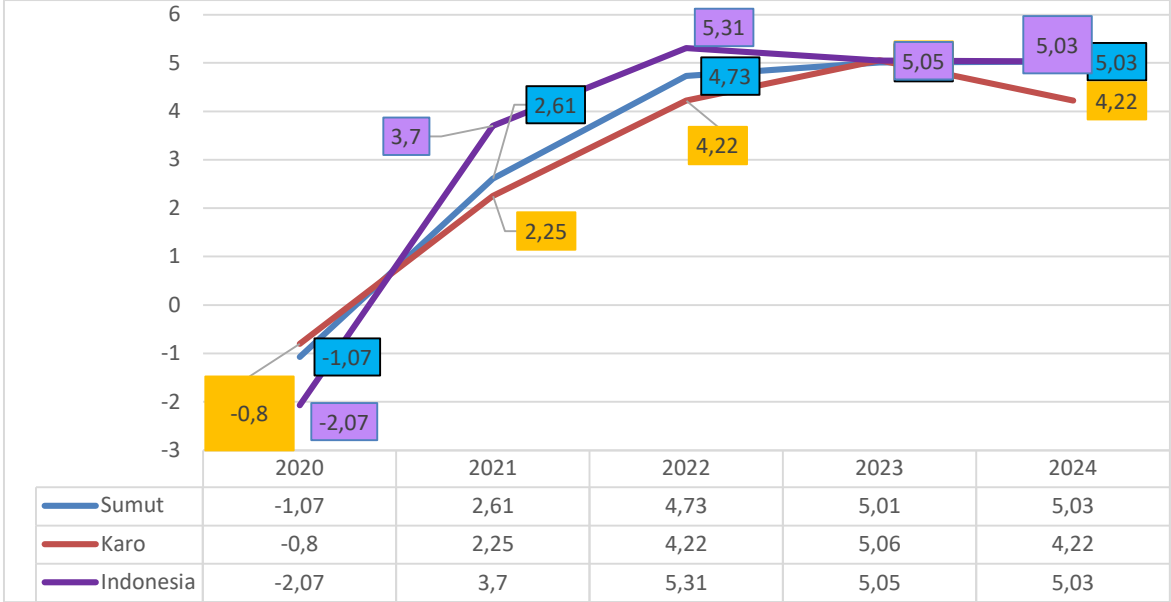
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,80	2.25	4,22	5,06	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip namun pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Sumut dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun pertumbuhan tahun 2024 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pertumbuhan mencapai 5,06 persen, sedangkan pada tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 4,22 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan

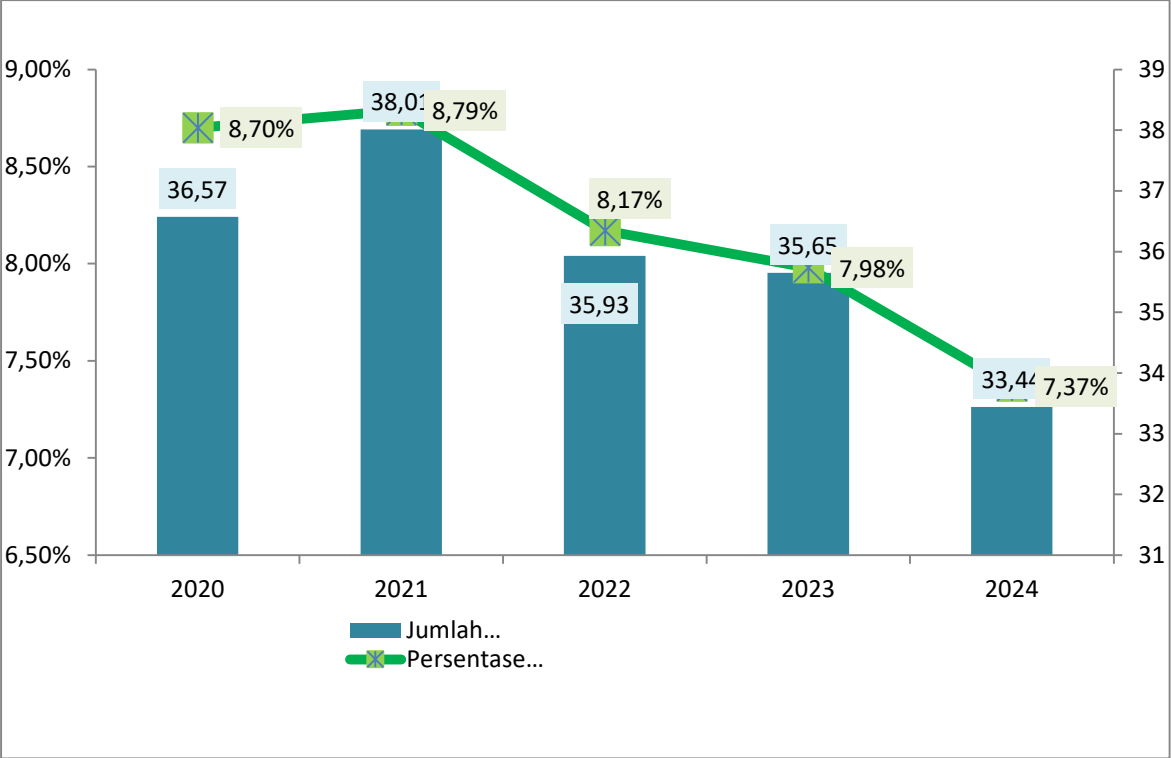
salah satu indikasi keberhasilan Pembangunan di suatu wilayah, untuk itu pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berakselerasi dengan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

B. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 8,70 persen berangsur-angsur menurun menjadi 7,37 persen di tahun 2024.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*. Sedangkan penurunan kemiskinan pada tahun 2024 didukung dari program pengurangan beban pengeluaran masyarakat misalnya program bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan pangan, pemberian bantuan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

Grafik 3.2
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2024 adalah Rp656.812 per kapita per bulan, berdasarkan garis kemiskinan tersebut didapatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 7,37 persen dari penduduk Kabupaten Karo.

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB

perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Perkembangan produk domestik regional bruto perkapita per tahun Kabupaten Karo ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	51,96	53,35	57,76	62,76	67,69
PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	35,21	35,65	36,67	37,94	-

PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2019 sampai 2023 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

D. Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan dari angka 0,271 tahun 2020 menjadi 0,214 tahun 2024.

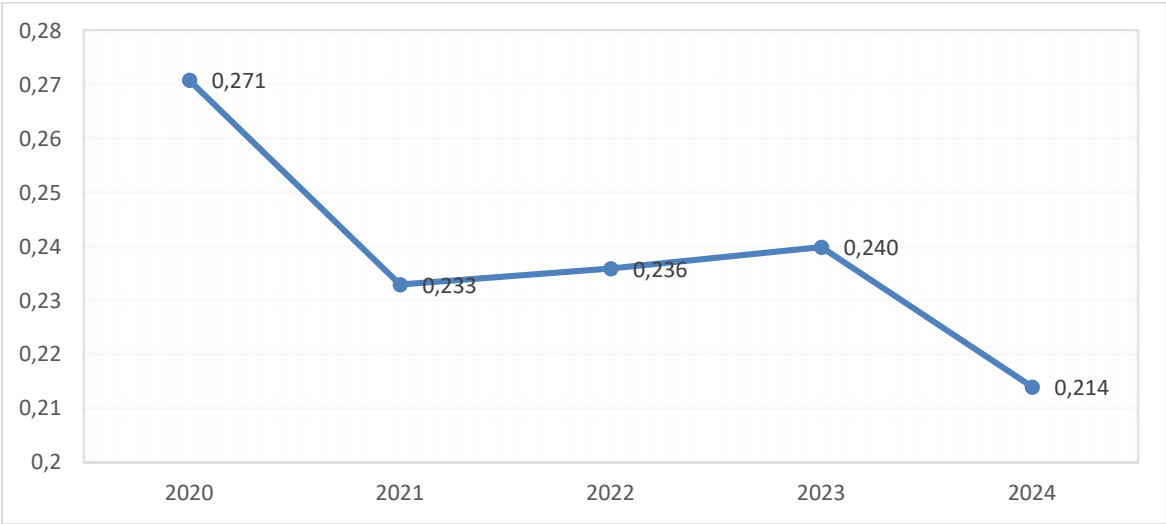
Tabel 3.3
Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,271	0,233	0,236	0,240	0,214

Sumber: BPS Sumatera Utara

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 3.3
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



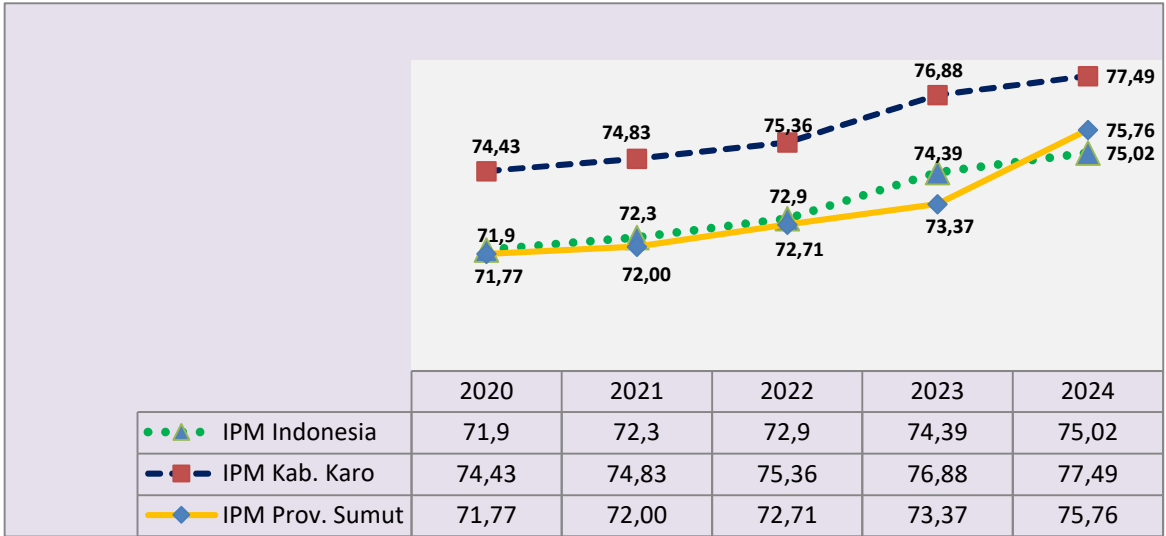
Sumber: BPS

E. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo tetap konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,43 pada 2020 menjadi 77,49 pada 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76 poin dan Nasional sebesar 75,02 poin tahun 2024. Selama tahun 2022-2024 IPM Kabupaten Karo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo tahun 2024 mencapai 77,49 tahun. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Karo berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

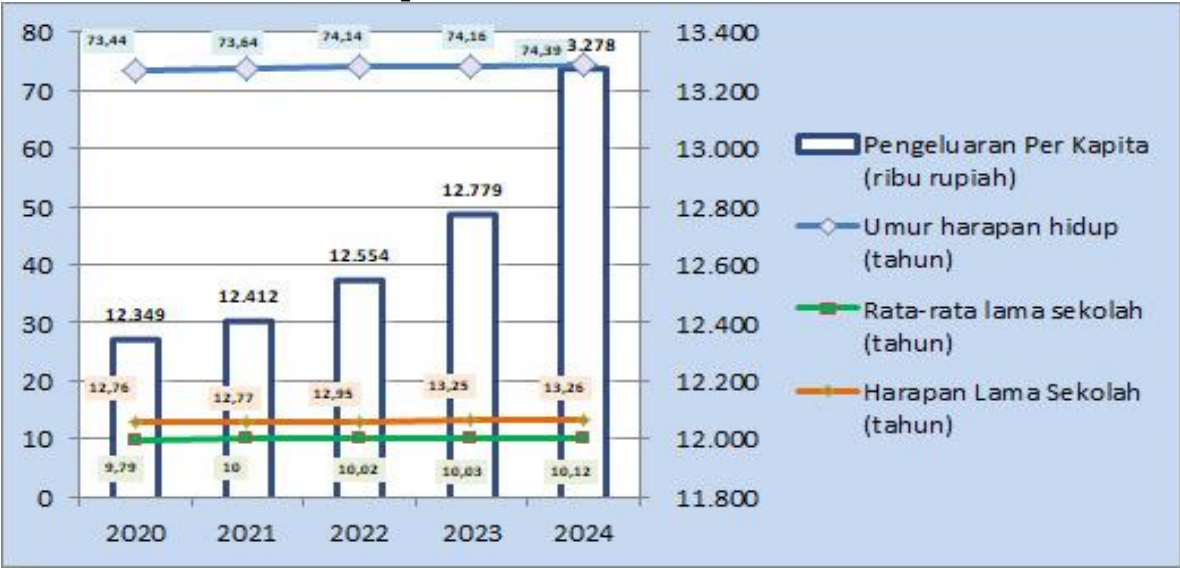
Grafik 3.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, (2025)

Terdapat 4 (empat) indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Karo mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Seperti dilihat pada grafik selama 5 (lima) tahun indikator Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin. Indikator Harapan Lama sekolah sebesar 0,10 dan Rata-rata Lama Sekolah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,10 poin. Sedangkan pada indikator Pengeluaran per Kapita berfluktuasi dengan rata-rata 161 setiap tahunnya. Pada indikator pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Grafik 3.5
Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

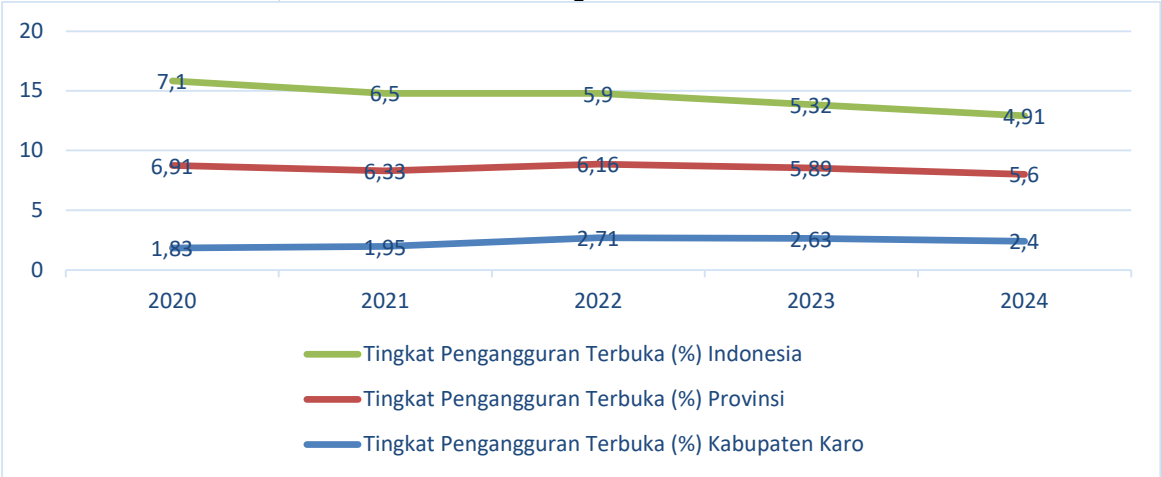
F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,83	1,95	2,71	2,63	2,40

Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Karo memiliki TPT yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Selain itu Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dilihat dari sektor pekerjaan, dominan penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian hal ini sejalan dengan kontribusi sektor pertanian memiliki peran dominan terhadap perekonomian daerah, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun masih ada yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan dengan permintaan pasar (keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital), sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, sarana dan prasarana ketenagakerjaan masih kurang, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru. Hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kompetensi tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan tenaga kerja juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberi peluang kerja bagi tenaga kerja lainnya sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat digambarkan secara jelas dikarenakan belum tersedianya data secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, untuk itu perubahan target indikator makro

ekonomi Kabupaten Karo dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional, regional dan global, memperhatikan kondisi perekonomian terkini, dan tetap mempertimbangkan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Karo diharapkan akan mengalami peningkatan. Hal ini didukung kondisi perekonomian regional, nasional serta internasional yang diperkirakan membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Karo tahun 2025. Secara umum, asumsi dasar makro ekonomi Kabupaten Karo ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perubahan Target Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Indikator Makro	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,8
2	PDRB per kapita	67,69	Rp Juta	70,34
3	Kontribusi PDRB Provinsi	2,52	persen	2,53
4	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,9
5	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,214
6	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	77,58
7	Penurunan Emisi GRK	N/A	(ton CO2eq)	130.888
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,215

Sumber: Mempedomani Rangkah RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

3.4. Gambaran Keuangan Daerah

3.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan proyeksi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya faktor perubahan regulasi. Memperhatikan faktor dimaksud, proyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD diperkirakan mengalami penurunan pada beberapa jenis pendapatan. Dari semula sebesar Rp1.463.451.165.376,00 pada APBD 2025, menurun sekitar 2,37% atau sebesar Rp34.617.557.458,00 sehingga menjadi Rp1.428.833.607.918,00.

Rincian perubahan proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan

Asli Daerah secara total diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dari sebesar Rp156.000.124.450,00 pada APBD Induk 2025 menurun sebesar Rp1.553.541.518,00 atau 1% sehingga menjadi Rp154.446.582.932,00 pada Perubahan RKPD.

Penurunan PAD tersebut terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sebesar semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp3.446.458.482,00 atau menurun sebesar Rp1.553.541.518,00. Penurunan dimaksud dilakukan sesuai dengan realisasi deviden atas penyertaan modal pada Bank Sumut tahun buku 2024 yang telah disalurkan ke RKUD di tahun anggaran 2025.

Sedangkan komponen lainnya diproyeksikan tetap yakni Pajak Daerah sebesar Rp101.353.011.918,00, Retribusi Daerah sebesar Rp40.250.280.000,00, dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp9.396.832.532,00.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diproyeksi mengalami penurunan sebesar - Rp33.064.015.940,00 atau 2,56% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.290.395.908.055,00 sehingga diproyeksikan menjadi Rp1.257.331.892.115,00. Penurunan tersebut merupakan akumulasi dari penurunan pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan peningkatan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp69.360.444.522,00 atau 5,6% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.239.525.087.000,00 sehingga Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan menjadi Rp1.170.164.642.478,00. Penurunan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA.2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA.2025 dimana terdapat penurunan alokasi DAU Spesific Grant Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik bidang jalan dan irigasi. Selain itu penyesuaian anggaran dana transfer pusat juga merupakan implikasi atas keberadaan SilPA DAK Non Fisik TA.2024 yang diperhitungkan dalam penyaluran DAK NonFisik Tahap I Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp36.296.428.582,00 atau 71,35% dari penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.870.821.055,00 sehingga Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan menjadi Rp87.167.249.637,00. Peningkatan pada transfer antar daerah tersebut adalah penyesuaian alokasi pendapatan dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Karo yang meliputi rencana penyaluran kurang bayar dan alokasi tahun anggaran 2025 dan penganggaran kembali hutang bantuan keuangan provinsi tahun anggaran 2024.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diestimasikan tidak akan mengalami perubahan atau tetap sesuai dengan penetapan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.055.132.871,00.

Peningkatan dan pengurangan pada kebijakan pendapatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	APBD INDUK 2025	Perubahan KUA	+/-	% KENAIKAN
	PENDAPATAN	1.463.451.165.376,00	1.428.599.639.418,00	(34.851.525.958,00)	(2,38)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	156.000.124.450,00	154.446.582.932,00	(1.553.541.518,00)	(1,00)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	101.353.011.918,00	101.353.011.918,00	0,00	0,00
	HASIL RETRIBUSI DAERAH	40.250.280.000,00	40.250.280.000,00	0,00	0,00
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISA	5.000.000.000,00	3.446.458.482,00	(1.553.541.518,00)	(31,07)
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	9.396.832.532,00	9.396.832.532,00	0,00	0,00
					0,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.290.395.908.055,00	1.257.097.923.615,00	(33.297.984.440,00)	(2,58)
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.239.525.087.000,00	1.169.930.673.978,00	(69.594.413.022,00)	(5,61)
	DANA PERIMBANGAN	1.035.152.572.000,00	965.598.477.978,00	(69.554.094.022,00)	(6,72)
	DTU	790.357.193.000,00	766.356.909.000,00	(24.000.284.000,00)	(3,04)
	DBH	23.882.085.000,00	23.882.085.000,00	0,00	0,00
	DAU	766.475.108.000,00	742.474.824.000,00	(24.000.284.000,00)	(3,13)
	DTK	244.795.379.000,00	199.241.568.978,00	(45.553.810.022,00)	(18,61)
	DAK FISIK	60.150.079.000,00	19.060.542.000,00	(41.089.537.000,00)	(68,31)
	DAK NON FISIK	184.645.300.000,00	180.181.026.978,00	(4.464.273.022,00)	(2,42)
	DANA INSENTIF DAERAH	6.709.109.000,00	6.668.790.000,00	(40.319.000,00)	
	DANA DESA	197.663.406.000,00	197.663.406.000,00	0,00	0,00
	TRANSFER ANTAR DAERAH	50.870.821.055,00	87.167.249.637,00	36.296.428.582,00	71,35
	PENDAPATAN BAGI HASIL	50.870.821.055,00	82.806.685.816,00	31.935.864.761,00	62,78
	BANTUAN KEUANGAN	-	4.360.563.821,00	4.360.563.821,00	0,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.055.132.871,00	17.055.132.871,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN HIBAH	-	-	0,00	0,00
	PENDAPATAN DANA KAPITAS JKN PADA FKTP	17.055.132.871,00	17.055.132.871,00	0,00	0,00

Sumber: BAPENDA dan BKAD Kabupaten Karo, Tahun 2025

Memperhatikan perubahan dari sisi proyeksi pendapatan, maka kebijakan pendapatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah diperkirakan tidak mengalami perubahan dengan tetap mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2025;
2. Penyesuaian Transfer Pemerintah Pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait alokasi dan pengelolaan dana transfer pusat;
3. Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Karo dianggarkan sebesar Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/283/KPTS/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022.

4. Penganggaran Kembali Hutang Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/2288 perihal Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi TA 2024 yang dianggarkan kembali pada APBD TA 2025.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan ketentuan reformulasi potensi penerimaan Dana Kapitasi JKN.
6. Dalam upaya peningkatan PAD pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan;
7. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah;
9. Keterlibatan secara aktif seluruh potensi sumberdaya manusia, dalam optimalisasi sumber-sumber keuangan daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik. Sumber-sumber keuangan dimaksud selain berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga swadaya masyarakat serta kerjasama sinergis dengan dunia swasta.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada di atas, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan tata kelola dan sistem administrasi.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
6. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
7. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran serta pemenuhan persyaratan pengajuan penyaluran dana transfer.

3.4.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah tetap mengupayakan pengaturan pola belanja yang proporsional, efisien dan efektif. Dimana pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Selain itu belanja daerah juga diharapkan mampu memberikan stimulus guna peningkatan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Sejalan dengan perubahan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, tentunya berimplikasi terhadap penyesuaian belanja daerah. Selain itu, perubahan belanja daerah disesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun perubahan asumsi belanja pemerintah Kabupaten Karo. Perubahan kebijakan pemerintah pusat diantaranya seperti Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD TA.2025. Perubahan asumsi belanja Pemerintah Kabupaten Karo diantaranya seperti pembayaran kewajiban jangka pendek/hutang kepada pihak ketiga, perubahan dan/atau penambahan target kinerja program/kegiatan/ subkegiatan, penggunaan belanja tidak terduga melalui pergeseran dari belanja BTT ke Perangkat Daerah Teknis dan pergeseran anggaran. Selain itu restrukturisasi belanja juga terjadi akibat adanya penyesuaian pendapatan daerah dan perubahan komposisi dalam estimasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2024.

Adanya perubahan asumsi belanja sebagaimana dijelaskan diatas, terjadi perubahan estimasi belanja yang mengalami penurunan sebesar Rp37.606.985.595,00 atau sebesar 2,54% dari penetapan semula sebesar Rp1.481.239.644.849,00 sehingga Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1.443.398.690.754,00. Uraian perubahan belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	Bertambah/(Berkurang)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	1.481.239.644.849,00	1.443.398.690.754,00	-37.840.954.095,00	-2,55%
5.1	BELANJA OPERASI	1.026.035.696.869,00	1.012.116.618.656,70	-13.919.078.212,30	-1,36%
5.1.01	Belanja Pegawai	654.688.170.632,00	660.827.911.805,00	6.139.741.173,00	0,94%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.501.733.491,00	327.742.914.105,70	-20.758.819.385,30	-5,96%
5.1.05	Belanja Hibah	22.845.792.746,00	23.545.792.746,00	700.000.000,00	3,06%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	163.653.626.876,00	142.631.779.393,30	-21.021.847.482,70	-12,85%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.555.340.565,00	41.691.042.144,00	6.135.701.579,00	17,26%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.038.347.575,00	48.448.087.427,30	4.409.739.852,30	10,01%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	75.253.682.736,00	43.485.143.822,00	-31.768.538.914,00	-42,22%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.686.256.000,00	8.887.506.000,00	201.250.000,00	2,32%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.464.550.812,00	2.964.550.812,00	-500.000.000,00	-14,43%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.464.550.812,00	2.964.550.812,00	-500.000.000,00	-14,43%
5.4	BELANJA TRANSFER	288.085.770.292,00	285.685.741.892,00	-2.400.028.400,00	-0,83%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	276.295.441.100,00	273.895.412.700,00	-2.400.028.400,00	-0,87%

Sumber: BKAD Kabupaten Karo, Tahun 2025
*Angka masih perhitungan sementara (Penyusunan P-RKPD belum berbasis rincian belanja)

Memperhatikan proyeksi perubahan belanja daerah maka kebijakan-kebijakan belanja daerah antara lain diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana akan ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung capaian sasaran pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
2. Perubahan belanja daerah tetap disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sesuai kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah;
3. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan/disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tetap memperhatikan ketersediaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat antara lain kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan PPPK, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Tetap berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Penyesuaian/restrukturisasi belanja daerah akibat ketidaksesuaian /kesalahan penganggaran pada tahun anggaran 2025 meliputi penyesuaian pemilihan rekening belanja yang lebih relevan, perubahan harga satuan, perubahan/penyesuaian target indikator capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
7. Mencantumkan hasil pergeseran anggaran dan perubahan penjabaran mendahului penetapan perubahan APBD;
8. Penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Menganggarkan kembali sisa dana tahun anggaran 2024 yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Perubahan/penambahan belanja daerah dianggarkan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
11. Pengadaan barang/jasa tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
12. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 13. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*Standby Budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam dan nonalam;
- 14. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.4.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam 2 (dua) komponen besar yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika terjadi defisit anggaran maka sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal, dan transfer ke dana cadangan.

Memperhatikan perbandingan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan rencana belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan rencana belanja.

Memperhatikan target penerimaan daerah pada perubahan RKPD sebesar Rp1.428.833.607.918,00 dan estimasi belanja daerah sebesar Rp1.443.632.659.254,00 terjadi defisit anggaran sebesar Rp14.799.051.336,00. Untuk menutupi defisit, Pemerintah daerah memanfaatkan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dipergunaan pembiayaan netto sebesar Rp14.799.051.336,00.

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	Bertambah/(Berkurang)	
		Rp	Rp	Rp	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan pembiayaan	17.788.479.473,00	14.799.051.336,00	(2.989.428.137,00)	(16,81)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya	17.788.479.473,00	14.799.051.336,00	(2.989.428.137,00)	(16,81)
6.2.	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran pokok utang				
	Penyertaan Modal Ke Bank Sumut	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	17.788.479.473,00	14.799.051.336,00	(2.989.428.137,00)	(16,81)

Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

Perubahan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 adalah dengan menganggarkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) defenitif besar Rp14.799.051.336,00,- sebagaimana hasil *unaudited* Laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Sebelumnya pada APBD Induk

Tahun Anggaran 2024 telah digunakan estimasi SiLPA sebesar Rp17.788.479.473,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp2.989.428.137,00.

Kebijakan penerimaan pembiayaan dari Silpa tersebut digunakan dalam tahun anggaran berjalan antara lain untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. menganggarkan kembali sisa dana yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis dan peruntukannya;
- d. mendanai penyesuaian perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;

Sedangkan pengeluaran pembiayaan masih dianggarkan nihil yakni untuk penyertaan modal pada Bank Sumut.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program dan kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih bersifat *indikatif*. Penyusunan Perubahan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan semester pertama dan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dasar penyusunan RKPD 2025 dan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan Pemerintah Pusat ke Daerah.

Sisi lain dalam upaya untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan antar level pemerintahan sehingga agenda pembangunan Kabupaten Karo sinkron dengan agenda pembangunan pusat dan provinsi. Dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud perlu dilakukan penelaahan RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sehingga penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo terintegrasi dan sinergis dengan prioritas nasional dan provinsi.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 disusun sebagai respons adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang berkembang, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah pada bab sebelumnya, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara terarah melalui penetapan sasaran dan prioritas pembangunan yang tepat. Sebagai upaya penanganan, sasaran pembangunan dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan dengan akar permasalahan, serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.

4.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, Visi Kabupaten Karo yang telah ditetapkan adalah:

**“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO
MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU
INDONESIA EMAS”**

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 yaitu “*Kabupaten Karo Mejuah-Juah, Maju dan Berkelanjutan*”, dimana periode RPJMD ini adalah tahap pertama dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025–2045. Karena itu, penyusunannya harus sejalan dengan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (Dua puluh) tahun ke depan.

Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketahanan sosial budaya serta ekologi. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan pondasi pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dimulai dari jenjang paling bawah hingga ke atas. Demikian pula dengan kesehatan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan IPTEKIN dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan, peningkatan nilai tambah/hilirisasi, peningkatan sektor industri maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam penguatan pondasi transformasi, pemerintah juga akan berbenah dengan meningkatkan manajemen ASN untuk membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ **Karo Beriman** merupakan komitmen mendalam dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai landasan utama dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi sebagai pedoman kolektif dalam kehidupan sehari-hari, yang mengarahkan interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan berbasis pada etika yang kokoh. Visi ini mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam RPJMN yang mengutamakan penguatan Ideologi Pancasila sebagai pilar dalam pembentukan masyarakat yang berintegritas dan mampu mengelola keberagaman untuk keberlanjutan pembangunan nasional.
- ✓ **Karo Berbudaya** adalah tekad Pemerintah Kabupaten Karo untuk memelihara dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas yang memperkuat ikatan sosial dan rasa bangga masyarakat. Warisan budaya yang meliputi tradisi, adat istiadat, serta seni lokal tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai sumber potensi kreatif yang dapat memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan budaya sebagai landasan pembangunan, Kabupaten Karo berupaya membentuk masyarakat yang inovatif, adaptif, dan bangga akan warisan leluhur. Visi ini sejalan dengan RPJMN yang menjadikan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian budaya sebagai prioritas, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing dalam kancah nasional maupun internasional.
- ✓ **Karo Modern** menggambarkan visi Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam

setiap dimensi pembangunan. Modernisasi yang dijalankan dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Transformasi digital ini memastikan pemerataan manfaat teknologi di seluruh lapisan masyarakat, menjadikan setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang berdaya dan berkembang. Visi ini mendukung RPJMN yang menekankan pentingnya konektivitas dan digitalisasi sebagai sarana untuk mempercepat proses modernisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

- ✓ **Karo Unggul** adalah inisiatif Pemerintah Kabupaten Karo untuk memaksimalkan potensi daerah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Dalam upaya ini, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang berbasis pada peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama. Tujuan dari visi ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan kompetitif, siap menghadapi tantangan global. Visi ini juga sejalan dengan RPJMN yang mengutamakan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
- ✓ **Karo Sejahtera** adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi akan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Visi ini mendukung RPJMN yang mengedepankan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan sebagai pilar utama untuk menyeimbangkan kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial, guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan, serta berdaya tahan dalam menghadapi tantangan masa depan.
- ✓ **Menuju Indonesia Emas** menggambarkan Kabupaten Karo tidak hanya berkembang sebagai entitas lokal yang adaptif dan kompetitif, tetapi juga berperan sebagai katalis yang mendukung terciptanya ekosistem pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dan Kabupaten Karo berkomitmen untuk menjadi bagian integral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Setiap keunggulan daerah akan menjadi simpul kekuatan yang memperkuat fondasi bangsa, dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat sektor unggulan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berkontribusi pada kemajuan Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang mengusung Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera merupakan langkah konkret yang mendukung pencapaian visi jangka panjang RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, yaitu *Karo Mejuah-juah, Maju, dan Berkelanjutan*. Melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat aspek spiritual, budaya, teknologi, dan ekonomi, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 menyiapkan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, sehingga mendukung tercapainya keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai landasan bagi kemajuan Kabupaten Karo dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, berdaya saing tinggi, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan komitmen ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 memastikan bahwa tujuan jangka menengah akan memperkuat fondasi yang kokoh untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, menjadikan Kabupaten Karo sebagai wilayah yang *mejuah-juah*, majudan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah **“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS”** dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik;
6. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah; dan
9. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Hal ini adalah dalam rangka pencapaian

visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dari 9 (sembilan) misi pembangunan Kabupaten Karo tersebut, dirumuskan ke dalam 10 (sepuluh) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Misi		Tujuan		Sasaran
1	Mewujudkan Roda Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Efektif dan Efisien untuk meningkatkan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
				1.2.	Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi
				1.3.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal.	2	Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius
3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	3	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian, dan Pariwisata	4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal
				4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				4.3	Penguatan stabilitas ekonomi daerah
5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelktual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik	5	Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda
				5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni
				5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata	6	Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan
				7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
				7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau
		8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
				8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
8	Meningkatkan Pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	9	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
					percepatan pembangunan daerah
9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita cita bangsa menjadi Indonesia Emas	10	Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi

Tabel 4.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Keterangan
1	Mewujudkan Roda Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Efektif dan Efesien untuk meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik			1a	Indeks Reformasi Birokrasi	68,51	Indeks	68,7	
			1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1.1.1	Belanja Riset (% APBD)	N/A	Persen	0,06	
					1.1.2	Indeks Inovasi Daerah	62,02	Indeks	63	
					1.1.3	Indeks Reformasi Hukum	87,22	Indeks	87,4	
					1.1.4	Indeks Integritas Nasional	76,07	Indeks	77	
					1.1.5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Opini	WTP	
					1.1.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	0,0194	Persen	0,0195	
			1.2.	Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	1.2.1	Indeks Pelayanan Publik	88,5	Indeks	88,5	
2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal.	Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal			2a	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,96	
					2b	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	45,00	
			2.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	2.1.1	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,96	
					2.1.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	45,00	
3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat			3a	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,44	Tahun	73	
			3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	3.1.1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75,90	Jiwa/100.000 kelahiran hidup	75,90	
					3.1.2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	23,45	Persen	22,2	
					3.1.3	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	70,9	Persen	90	
					3.1.4	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	93	Persen	90	
					3.1.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	96,03	Persen	98	
4					4a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,8	

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Keterangan
	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian, dan Pariwisata	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan			4b	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,9	
					4c	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,213	
					4d	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,52	persen	2,53	
					4e	PDRB perkapita (Rp Juta)	67,69	Rp Juta	65,99	
			4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	4.1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	Persen	2,74	
					4.1.2	Kontribusi industri pengolahan	3,82	Persen	3,85	
					4.1.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,59	Persen	2,60	
					4.1.4	Jumlah Kunjungan wisatawan	1.434.797	Kunjungan	1.577.400	
			4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	4.2.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Udermourishment</i>)	6,1	Persen	6,09	
					4.2.2	Kapasitas Air Baku	N/A	m3/detik	1	
			4.3	Penguatan stabilitas ekonomi daerah	4.3.1	Tingkat Inflasi	N/A	Persen	3±1	
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik	Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat			5a	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	77,58	
					5b	Indeks Modal Manusia	N/A	Indeks	0,535	
			5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	5.1.1	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	68,5	Persen	70,55	
					5.1.2	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	59,32	Persen	60,2	
					5.1.3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	67,25	Persen	69,26	
					5.1.4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	65,89	Persen	66,87	
					5.1.5	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,12	Tahun	11- 12	
					5.1.6	Harapan lama sekolah	13,26	Tahun	14	
					5.1.7	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)		Persen	17	
					5.1.8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,08	Indeks	69,5	
			5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas,	5.2.1	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	59,9	
					5.2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,291	Indeks	0,40	

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Keterangan		
				prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	5.2.3	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	81,82	Persen	83,62			
					5.2.4	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	80	Persen	81,75			
					5.2.5	Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA	103/0	Ormas/Konflik	103/0			
					5.2.6	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	29,29	Persen	32,82			
					5.2.7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,1	Persen	10-15%			
					5.2.8	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	93,33	Persen	93,4			
					5.2.9	Persentase prestasi olahraga	19	Persen	20			
					5.2.10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,3	Persen	35			
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	5.3.1	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	2,3	Persen	3,9			
					6a	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,215			
					6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	6.1.1	Pembentukan modal tetap Bruto (% PDRB)	31-33	persen	30-31	
							6.1.2	Rasio kewirausahaan daerah	3,78	Rasio	4,11	
							6.1.3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,95	Rosio	1,95	
							6.1.4	Net Ekspor (Milyar)	1691,13	Milyar	1741,86	
							6.1.5	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,36	Persen	11,58	
							6.1.6	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	27	Pelaku Usaha	100	
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	7a	Indeks Daya Saing Infrastruktur	N/A	Indeks	3,1			
					7.1.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	63,9	Persen	65			
					7.1.2	Akses sanitasi aman	74,68	Persen	75,58			
					7.1.3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	39,5	Persen	39,9			
					7.1.4	Irigasi dalam kondisi baik	55,21	Persen	56			
					7.1.5	Drainase dalam kondisi baik	63.69	Persen	64			
					7.1.6	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	61,5	Persen	62			
					7.1.7	Ketaatan terhadap RTRW	73	Persen	74			
			7.2		7.2.1	Rasio Rumah Layak Huni	98,91	Persen	98,92			

No	Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Keterangan	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman			7.2.2	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	0,22	Persen	0,22		
					7.2.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	100	Persen	100		
					7.2.4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	10	Persen	10		
			7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	7.3.1	Rasio konektivitas kabupaten	0,32	Persen	0,32		
					7.3.2	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,97	Persen	0,95		
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			8a	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	130.887,52	
						8b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23	
						8c	Indeks Risiko Bencana	103,81	Indeks	103	
				8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	8.1.1	Timbulan Sampah yang ditangani (%)	78,03	Persen	77	
		8.1.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			78,03	%	78,06			
		8.1.3	Persentase cakupan area pelayanan (%)			41	Persen	41			
				8.1.4	Konsumsi listrik per Kapita	535,8	(kWh perkapita)	529			
		8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	8.2.1	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks	0,5			
8	Meningkatkan Pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah			9a	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	Indeks	3,6		
			9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	9.1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	Indeks	3,09		
					9.1.2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,71	Indeks	2,8		
9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita cita bangsa menjadi Indonesia Emas	Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi			10a	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	96	%	96,5		
					10b	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	%	100		
			10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	10.1.1	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	96	%	96,5		
					10.1.2	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	%	100		

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu prioritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

4.3.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana keda dan penganggaran nasional tahunan, intensifikasi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 – 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 – 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 – 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1) **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.

Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan

upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban

masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut. Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia. Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy* dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data *economic intelligence* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses akses Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development*.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi

akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan *Food, Energy, Water Nexus* memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema

Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.

Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan

lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain:

a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur,

Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan

infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat;

b. Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,

Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Penguatan koperasi,

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan,

pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).

d. Mengembangkan industri kreatif,

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

e. Pendalaman sektor keuangan,

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk:

- a) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l)

melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- b) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*.
- c) Memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu

pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan

peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

- d) Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat

dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan- perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

- e) Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada :

- a. pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).

- b. Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional;

Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang

konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besibaja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

c. Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global;

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan

konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) penguatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :

a) Membangun dari desa dan dari bawah;

Dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan

pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

b) Pemerataan ekonomi

Dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara-Balikpapan-Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.

c) Memberantas kemiskinan;

Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data

Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 7 difokuskan pada :

- a. Arah kebijakan reformasi politik;
Dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.
- b. Arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum,
yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan

perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum

- c. Arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan

pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menysasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

- d. Arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan

melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :

- a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis,

melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

- b. Melestarikan budaya,

melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

c. Penanganan bencana,

melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber

daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 yang merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2029 yaitu tahap "Penetapan Pondasi Transformasi" menuju pencapaian visi RPJPD "Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu ***"Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan"***.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kolaborasi, bermakna Proses kerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dalam rangka menyelesaikan masalah secara bersama menuju visi Bersama;

SUMUT-Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Berkah, bermakna Harapan agar pembangunan tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak;

Unggul, bermakna Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global;

Maju, bermakna Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana

pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan; **Berkelanjutan**, bermakna Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan” dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Trisula Pembangunan ditetapkan sasaran utama Pembangunan Sumatera Utara yaitu:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dari 5,03 persen pada Tahun 2024 menjadi 6,60-7,00 persen pada Tahun 2029;
- 2) Peningkatan PDRB Per Kapita dari 73,57 Juta Rupiah pada Tahun 2024 menjadi 115,3 Juta Rupiah pada Tahun 2029;
- 3) Peningkatan kontribusi PDRB Provinsi Sumatera Utara terhadap PDB Nasional dari 5,2 persen pada Tahun 2024 menjadi 5,3 persen pada Tahun 2029;
- 4) Penurunan Kemiskinan dari 7,19 persen pada Tahun 2024 menjadi 2,82-3,82 persen pada Tahun 2029;
- 5) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 5,60 persen pada Tahun 2024 menjadi 4,75-5,20 persen pada Tahun 2029;
- 6) Rasio gini dari 0,306 poin pada Tahun 2024 menjadi 0,287 - 0,291 pada Tahun 2029;
- 7) Indeks Daya Saing Daerah dari 3,71 poin pada Tahun 2024 menjadi 3,75 poin pada Tahun 2029;
- 8) Indeks Modal Manusia yang ditargetkan sebesar 0,54 poin pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 0,57 poin pada Tahun 2029, dan
- 9) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan sebesar 1 persen pada Tahun 2025 menjadi 18,52 persen pada Tahun 2029.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideologi Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender yang **sejalan dengan Asta Cita 4 pada RPJMN 2025-2029**.

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global yang **sejalan dengan Asta Cita 6 pada RPJMN 2025-2029**.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang **sejalan dengan Asta Cita 7 pada RPJMN 2025-2029**.

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah yang **sejalan dengan Asta Cita 3 pada RPJMN 2025-2029**.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas yang **sejalan dengan Asta Cita 8 pada RPJMN 2025-2029**.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 8 (delapan) tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025– 2029. Tujuan ini dipandang sebagai fondasi utama untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang unggul, maju, dan berkelanjutan serta mendukung Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Di samping itu, tujuan ini juga mendukung Misi ke-4 RPJMN 2025-2029, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. Dalam konteks ini, sumber daya manusia tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam proses transformasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, serta adaptif terhadap dinamika perubahan global dan domestik. Secara substansial, peningkatan kualitas SDM mencakup upaya sistematis dalam memperluas akses dan mutu layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Upaya tersebut

diwujudkan melalui peningkatan layanan kesehatan yang inklusif, penguatan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas, serta penyelenggaraan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial ekonomi. Sasaran ini mencakup antara lain penguatan pelayanan kesehatan primer dan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas guru dan peserta didik melalui reformasi pendidikan, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program-program yang dirancang dalam kerangka tujuan ini meliputi pembangunan infrastruktur layanan dasar, penyediaan beasiswa dan pelatihan vokasi, penyelenggaraan jaminan sosial berbasis data terpadu, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola isu-isu sosial. Lebih lanjut, pencapaian tujuan ini mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya dalam agenda pembangunan manusia unggul, berkarakter, dan berkeadilan.

Tujuan 2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pilar strategis dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Pemahaman terhadap kesejahteraan tidak terbatas pada aspek peningkatan pendapatan, tetapi mencakup kondisi yang lebih komprehensif, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar, akses merata terhadap layanan publik yang berkualitas, partisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi, serta perlindungan sosial yang menyeluruh bagi semua kelompok masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dimaknai sebagai proses transformatif yang menitikberatkan pada pengurangan kemiskinan, penanggulangan kesenjangan sosial, serta penguatan jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merancang strategi yang meliputi penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, penciptaan lapangan kerja yang layak dan inklusif, serta reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata, penyediaan hunian yang layak dan sehat, serta transformasi pelayanan publik menjadi unsur pendukung untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil. Selain itu, partisipasi masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan dari perencanaan hingga pengawasan menjadi pendekatan penting guna menjamin keberlanjutan dan rasa kepemilikan terhadap program kesejahteraan yang dilaksanakan. Tujuan ini tidak hanya berkontribusi terhadap dimensi ekonomi dan sosial pembangunan daerah, tetapi juga secara langsung mendukung Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat merupakan prasyarat bagi terciptanya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Lebih jauh, tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan Misi ke-6 RPJMN 2025–2029, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Relevansi ini diperkuat oleh keterkaitan dengan program prioritas nasional seperti “Pemberantasan Kemiskinan”, “Pelayanan Kesehatan untuk Semua”, serta “Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau”.

Dengan pendekatan lintas sektor yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis keadilan sosial, diharapkan seluruh masyarakat Sumatera Utara dapat menikmati manfaat pembangunan secara proporsional. Kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini, menjadi indikator utama keberhasilan RPJMD sekaligus fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang Sumatera Utara sebagai provinsi yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Tujuan 3 Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan merupakan salah satu orientasi strategis dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Tujuan ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata antarwilayah, serta tangguh terhadap tekanan global dan krisis lingkungan. Ekonomi yang berdaya saing merefleksikan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas barang dan jasa.

Sementara itu, dimensi keberlanjutan ekonomi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini mencakup penguatan prinsip pembangunan rendah karbon, pelestarian ekosistem, serta keberlanjutan antargenerasi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang diusung tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan kesinambungan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dalam konteks pembangunan Sumatera Utara, pencapaian tujuan ini ditempuh melalui sejumlah strategi utama, seperti hilirisasi industri berbasis sumber daya alam lokal, pengembangan kawasan ekonomi strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan konektivitas antarwilayah. Selain itu, perluasan investasi produktif, penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital, serta pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi menjadi pilar penting untuk memperkuat struktur perekonomian daerah. Seluruh strategi ini dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan ekonomi hijau, pengelolaan energi terbarukan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”. Melalui penguatan struktur ekonomi yang produktif dan berorientasi pada daya saing jangka panjang, Provinsi Sumatera Utara diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mendorong kemandirian masyarakat, terutama dalam sektorsektor unggulan berbasis potensi lokal.

Lebih jauh, orientasi ini juga bersesuaian dengan sejumlah misi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Misi Kedua, yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”, serta Misi Kelima, yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Membangun Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”. Keterpaduan antara arah pembangunan daerah dan pusat ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat dalam upaya menciptakan sistem ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Tujuan 4 Ekonomi yang Stabil dan Inklusif

Perekonomian yang stabil dan inklusif merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata. Dalam kerangka RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, arah pembangunan ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga pada bagaimana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal. Stabilitas ekonomi mencakup aspek ketahanan terhadap gejolak eksternal, pengendalian inflasi yang terjaga, kesinambungan fiskal daerah, serta keberlangsungan sektor riil yang produktif dan adaptif. Di sisi lain, inklusivitas ekonomi menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh mata rantai kegiatan ekonomi—dari proses produksi hingga distribusi dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan perekonomian yang stabil dan inklusif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan serangkaian strategi yang komprehensif, meliputi: penguatan daya saing ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor unggulan; dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi berbasis komunitas; percepatan hilirisasi industri yang berbasis potensi sumber daya lokal; dan pengembangan infrastruktur ekonomi yang merata dan terintegrasi antarwilayah. Selain itu, perluasan akses terhadap pembiayaan produktif, penguatan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan, serta penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi yang adil dan partisipatif. Strategi ini ditujukan untuk memperkuat kohesi sosial-ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap tekanan ekonomi struktural.

Tujuan pembangunan ini secara langsung mendukung Misi ke-2 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yakni “Meningkatkan

Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”. Melalui upaya menciptakan sistem ekonomi daerah yang stabil dan terbuka terhadap partisipasi semua kelompok, pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan tetapi juga untuk memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

Lebih lanjut, tujuan ini selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, khususnya Misi Keenam, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”, serta Misi Ketiga, yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim di Sentra Produksi”. Keterpaduan arah pembangunan pusat dan daerah ini memperkuat sinergi dalam menciptakan sistem ekonomi nasional yang berdaya tahan, berkeadilan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan 5 Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Adaptif dan Berintegritas

Penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berorientasi hasil, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem administrasi dan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, efisien, dan akuntabel. Pemerintahan yang profesional ditandai dengan kemampuan birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan, regulasi, dan pengelolaan pembangunan secara tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pemerintahan yang adaptif mengedepankan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dan layanan terhadap perubahan sosial, teknologi, serta tuntutan pelayanan yang terus berkembang. Integritas birokrasi menjadi landasan etis dan moral bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya oleh publik.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi ke-3 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Dalam kerangka misi tersebut, birokrasi yang profesional dan berintegritas berfungsi sebagai mesin utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Peningkatan kinerja pemerintahan diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi agenda prioritas yang mencakup transformasi digital pelayanan publik, perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja,

serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan berbasis data.

Upaya penguatan tata kelola dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai strategi. Di antaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan publik terpadu, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan sistem meritokrasi dan manajemen kinerja yang objektif. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal terus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi, inefisiensi, serta penyalahgunaan kewenangan di semua level pemerintahan. Dalam konteks desentralisasi, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dan efektivitas program pembangunan lintas wilayah dan sektor.

Arah tujuan ini juga selaras dengan Misi Ketujuh RPJMN 2025–2029, yakni “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Program prioritas nasional seperti Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas, dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi merupakan bagian integral dari kerangka kebijakan yang mendasari tujuan ini. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat fondasi kelembagaan pemerintahan sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan global, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Tujuan 6 Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang responsif, serta pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, keamanan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan gangguan ketertiban umum, tetapi juga mencakup terjaminnya ruang publik yang aman bagi seluruh warga, perlindungan terhadap hak-hak sipil, serta penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Tujuan ini menjadi semakin penting dalam situasi sosial yang kompleks dan dinamis, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam menciptakan rasa aman, menjamin kepastian hukum, dan mengelola risiko sosial secara preventif maupun represif.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui RPJMD 2025–2029 menempatkan stabilitas keamanan sebagai bagian integral dari upaya penguatan tata kelola sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sistem keamanan daerah berbasis kolaborasi multi-stakeholder, peningkatan kapasitas kelembagaan penegak hukum dan aparat keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pencegahan potensi gangguan sosial.

Stabilitas keamanan yang terjaga juga menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan. Lingkungan yang aman dan tertib merupakan syarat esensial bagi masuknya investasi,

tumbuhnya sektor produktif, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat secara inklusif. Dalam kaitannya dengan RPJMN 2025–2029, arah kebijakan ini selaras dengan Misi Nasional Ketujuh, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan”. Dengan demikian, stabilitas kawasan tidak hanya menopang penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Tujuan 7 Peningkatan Akses terhadap Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan guna Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat.

Peningkatan akses terhadap infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan merupakan salah satu prioritas strategis dalam kerangka pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Tujuan ini menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian fisik semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, daya dukung ekologi, dan kualitas tata ruang publik. Infrastruktur yang dirancang secara ramah lingkungan seperti sistem transportasi rendah emisi, sanitasi dan air bersih berkelanjutan, serta fasilitas publik hemat energi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi tekanan ekologis, dan mendukung daya saing wilayah di tengah tantangan perubahan iklim.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, yaitu “Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan”. Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menciptakan keterpaduan antarwilayah, memperluas akses pelayanan dasar, serta memperkuat konektivitas sosial-ekonomi di daerah tertinggal, perdesaan, dan kawasan pertumbuhan baru. Infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetik dan berwawasan lingkungan diyakini mampu meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat, memperkuat identitas wilayah, dan menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan bersama.

Selaras dengan pengembangan infrastruktur, penguatan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan ini. Akses terhadap infrastruktur dasar—seperti energi, air, jalan produksi, dan jaringan digital—merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian berbasis organik, dan ekonomi desa. Pendekatan berbasis potensi wilayah ini tidak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan produktif.

Tujuan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029, terutama Misi Ketiga, yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan

Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim di Sentra Produksi”. Oleh karena itu, implementasi tujuan ini secara terintegrasi dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sumatera Utara sebagai provinsi yang tangguh secara ekonomi, maju secara sosial, dan lestari secara ekologis.

Tujuan 8 Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

Ketahanan sosial dan budaya merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan ini tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan stabilitas sosial, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkuat identitas kolektif, jati diri masyarakat, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Dalam kerangka RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, ketahanan sosial dan budaya diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, toleransi antarumat beragama, pelestarian keragaman budaya lokal, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial.

Tujuan ini secara langsung mendukung Misi 5 RPJMD Provinsi Sumatera Utara, yaitu “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh”. Ketangguhan yang dimaksud mencakup kemampuan masyarakat dalam merespons perubahan sosial, tekanan ekonomi, maupun ancaman ideologis dengan sikap adaptif, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kebudayaan lokal yang kokoh. Ketahanan budaya di sini mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya daerah sebagai basis penguatan identitas serta kemandirian masyarakat.

Upaya pencapaian tujuan ini dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dan kebudayaan lokal, fasilitasi ruang-ruang ekspresi seni dan budaya, penguatan kelembagaan adat, serta promosi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan keberagaman sebagai kekuatan integratif. Pemerintah juga mendorong pembentukan forum dialog lintas agama dan budaya, serta program perlindungan sosial berbasis komunitas yang mampu menjangkau kelompok rentan dan memperkuat struktur sosial masyarakat dari tingkat akar rumput.

Tujuan ini juga mencerminkan keselarasan dengan Misi 1 RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta penguatan hak-hak warga negara sebagai pilar integrasi sosial. Selain itu, tujuan ini juga sejalan dengan Misi 8 RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”, yang menekankan pentingnya keharmonisan sosialbudaya dan hubungan antarmanusia yang selaras dengan alam dan nilai-nilai kultural.

4.3.3. Perubahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2025, amanat Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Karo khususnya.

Pelaksanaan RKPD 2025 yang diimplementasikan melalui APBD 2025 yang telah mencapai triwulan I telah dilakukan evaluasi dan dalam perjalanannya terdapat asumsi-asumsi yang berubah, pergeseran anggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian prioritas dan sasaran RKPD 2025.

Prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD ini mempedomani prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan terkoordinasi dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 1) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- 2) Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi
- 3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 4) Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius
- 5) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup
- 6) Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal
- 7) Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau
- 8) Penguatan stabilitas ekonomi daerah
- 9) Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda
- 10) Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni
- 11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
- 12) Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja

- 13) Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan
- 14) Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
- 15) Perwujudan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau
- 16) Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
- 17) Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
- 18) Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah
- 19) Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi.

Dengan 9 (sembilan) program strategis daerah atau Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan layanan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data;
4. Pelestarian Budaya Karo dengan mewujudkan identitas, martabat, dan pembangunan berwawasan budaya;
5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
7. Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan *The Paradise of Karo Highland*;
8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
9. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi).

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Strategi yang dilakukan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 tersebut adalah:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Mendorong Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil
- 4) Peningkatan pendapatan daerah
- 5) Penguatan pemerintahan yang dinamis dan responsif
- 6) Peningkatan manajemen kepegawaian ASN
- 7) Pembangunan spritualitas dan toleransi antar umat beragama

- 8) Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan
- 9) Pengembangan Nilai dan warisan budaya daerah
- 10) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif
- 11) Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas sistem, tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan
- 12) Peningkatan Produksi dan produktivitas yang berkualitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal
- 13) Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan/ hilirisasi produk, perdagangan yang padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan
- 14) Meningkatkan daya saing sektor pariwisata
- 15) Penguatan Kemandirian Pangan
- 16) Peningkatan ketersediaan air baku untuk irigasi
- 17) Tingkat inflasi yang rendah dan stabil
- 18) Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan yang berkelanjutan
- 19) Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.
- 20) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga
- 21) Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusi
- 22) Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
- 23) Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil
- 24) Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta kebebasan berdemokrasi
- 25) Optimalisasi penguatan peran olahraga dan pemuda
- 26) Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia.
- 27) Mendorong pertumbuhan penanaman modal
- 28) Pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif melalui pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.

Dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8

(Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD terhadap RPJMN bertujuan untuk:

- 1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah.
- 2. Mewujudkan RPJMD Kabupaten Karo yang harmonis dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- 3. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dan RPJMN
- 4. Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan Kabupaten Karo, selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, juga diarahkan untuk mendukung misi pembangunan provinsi dan nasional sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara
dan Kabupaten Karo Tahun 2025

ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA		MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO	
Astacita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
Astacita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
				Misi 6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata;
Astacita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Misi 6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui

ASTA CITA/PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA		MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO	
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
Astacita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 1	Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efesien untuk meningkatkan pelayanan publik;
				Misi 8	Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik;
				Misi 3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi;
Astacita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Misi 9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas
				Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2025

Tabel 4.5

Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
1	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1.1.1	Belanja Riset (% APBD)	Persen	0,06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				1.1.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan
				1.1.3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan
				1.1.4	Indeks Integritas Nasional	Indeks	77	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
				1.1.5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
				1.1.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	Persen	0,0195	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
								PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
								PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah
								PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
								PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
								PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	1.2.	Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	1.2.1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	88,5	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	1.3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	1.3.1 Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75,7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	2.1 Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	2.1.1 Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Persen	0,96	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2.1.2 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	Persen	45,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
								PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
								PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	3.1.1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Jiwa/100.000 kelahiran hidup	75,90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah
				3.1.2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	22,2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				3.1.3	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	Persen	90	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
				3.1.4	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	Persen	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				3.1.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98		
6	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	4.1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,74	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				4.1.2	Kontribusi industri pengolahan	Persen	3,85	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				4.1.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				4.1.4	Jumlah Kunjungan wisatawan	Kunjungan	1.577.400	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
								PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian
								PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian
								PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian
7	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	4.2.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Udernourishment</i>)	Persen	6,09	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				4.2.2	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
8	Penguatan stabilitas ekonomi daerah	4.3	Penguatan stabilitas ekonomi daerah	4.3.1	Tingkat Inflasi	Persen	3±1	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
								PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
								PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
								PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial
								PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
								PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				9	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	5.1.1	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
				5.1.2	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	Persen	60,2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan
				5.1.3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	Persen	69,26	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				5.1.4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	Persen	66,87	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
				5.1.5	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11- 12	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				5.1.6	Harapan lama sekolah	Tahun	14	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				5.1.7	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)	Persen	17		
				5.1.8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,5		
10	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	5.2.1	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,00-6,8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.2	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,23-58,50	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.4	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	83,62	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
				5.2.5	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	Persen	81,75	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.6	Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA	Ormas/Konflik	103/0	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.7	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	32,82	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.8	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Persen	10-15%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.9	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	Persen	93,4	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB
				5.2.10	Persentase prestasi olahraga	Persen	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
				5.2.11	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	35	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
								PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
11	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	5.3.1	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	Persen	3,9	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan
12	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	6.1.1	Pembentukan modal tetap Bruto (% PDRB)	persen	30-31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				6.1.2	Rasio kewirausahaan daerah	Rasio	4,11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				6.1.3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Rasio	1,95	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				6.1.4	Net Ekspor (Milyar)	Milyar	1741,86	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				6.1.5	Kontribusi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	11,58	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
				6.1.6	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	100	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
								PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
								PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
								PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
								PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata
13	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur	7.1.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	65	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				7.1.2	Akses sanitasi aman	Persen	75,58	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
	ekonomi yang baik dan berkelanjutan		ekonomi yang baik dan berkelanjutan	7.1.3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	39,9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				7.1.4	Irigasi dalam kondisi baik	Persen	56	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				7.1.5	Drainase dalam kondisi baik	Persen	64		
				7.1.6	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	62		
				7.1.6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	74		
14	Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	7.2.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	98,92	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				7.2.2	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	Persen	0,22	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				7.2.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	Persen	100	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
				7.2.4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
15	Perwujudan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	7.3.1	Rasio konektivitas kabupaten	Persen	0,32	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				7.3.2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Persen	0,95	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
								PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Dinas Perhubungan
								PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
16	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	8.1.1	Timbulan Sampah yang ditangani (%)	Persen	77	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				8.1.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	78,06	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
				8.1.3	Persentase cakupan area pelayanan (%)	Persen	41	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator		Satuan	Target Tahun 2025	Program	Perangkat Daerah
				8.1.4	Konsumsi listrik per Kapita	(kWh perkapita)	529	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
								PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
17	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	8.2.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja
18	Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	9.1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,09	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
				9.1.2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	2,8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	10.1.1	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	%	96,5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				10.1.2	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	%	100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
								PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

4.4. Integrasi Tema dan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025

Integrasi antara tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Karo menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan yang sinkron, terarah, dan efektif dalam Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025. Hal ini dilakukan guna menjamin tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Karo.

Dukungan perhatian Pemerintah Kabupaten Karo terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi seperti:

1) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis untuk mengatasi masalah gizi buruk, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendukung produktivitas dan pendidikan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Adapun program yang dibuat untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik, dengan langkah strategis dan subkegiatan sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Koordinasi penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik
- b) Sosialisasi dan advokasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik.

2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya kepada seluruh masyarakat bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo mendukung program ini dengan memberikan layanan kepada individu berdasarkan usia dan tanggal ulang tahunnya mencakup bayi baru lahir hingga usia 6 tahun, dewasa usia 18 tahun keatas.

3) Percepatan penanggulangan Tuberkulosis.

Penanggulangan Tuberkulosis sudah dilakukan dengan skreening kasus TB, investigasi kontak kasus TB, pelacakan kasus mangkir TB, pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT), penemuan kasus Infeksi Laten TB. Untuk percepatan penanggulangan *tuberculosis* perlu dilakukan pemenuhan alat TCM, pengadaan alat *mobile ronqent* TB, pengadaan *catridge* TCM

4) Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

5) Percepatan penurunan stunting.

Penurunan stunting merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Stunting dapat dicegah meningkatkan intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Adapun strategi dan bentuk dukungan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi Spesifik (langsung pada anak dan ibu dan Intervensi Sensitif (tidak langsung, tapi mendukung gizi).

6) Memastikan pemenuhan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC).

Pemenuhan cakupan universal Health Coverage (UHC) menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Karo dengan menargetkan UHC sebesar 98,6%, artinya pemerintah menjamin penduduk memiliki akses terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang bermutu, dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam bidang kesehatan.

7) Percepatan implementasi pengarusutamaan gender dalam rangka peningkatan pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Percepatan implementasi pengarusutamaan gender dilakukan dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. memastikan bahwa program dan anggaran pemerintah tidak hanya menargetkan kelompok mayoritas, tetapi juga memenuhi kebutuhan kelompok marginal, dengan menggunakan analisis gender sebagai alat untuk memahami bagaimana perbedaan gender mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Selanjutnya membuat profil gender serta rencana aksi pengarusutamaan gender.

8) Penguatan pelaksanaan dan peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).

Penguatan pelaksanaan dan peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Karo Layak Anak, melalui kebijakan sistematis dan kolaboratif, pemerintah daerah memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh. Langkah strategis yang dilakukan yaitu:

- a) Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dan lembaga Non pemerintah tentang kabupaten layak anak
- b) Mengikut sertakan semua lintas sektoral pihak yang terlibat mulai dari pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat sipil.
- c) Melaksanakan sosialisasi dan menginformasikan kepada OPD yang terkait agar dapat menciptakan kabupaten/kota layak anak.

4.5. Target Indikator Kinerja Makro, Utama dan Kunci Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025

4.5.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

Tabel 4.6
Indikator Makro Pembangunan pada Perubahan RKPD
Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Indikator Makro	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,8
2	PDRB per kapita	67,69	Rp Juta	70,34
3	Kontribusi PDRB Provinsi	2,52	persen	2,53
4	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,9
5	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,214
6	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	77,58
7	Penurunan Emisi GRK	N/A	(ton CO2eq)	130.888
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,215

Sumber: Hasil desk indikator makro dan kewilayahan dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara

4.5.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang terseleksi sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karo Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025
1a	Indeks Reformasi Birokrasi	68,51	Indeks	68,7
1.1.1	Belanja Riset (% APBD)	N/A	Persen	0,06
1.1.2	Indeks Inovasi Daerah	62,02	Indeks	63
1.1.3	Indeks Reformasi Hukum	87,22	Indeks	87,4
1.1.4	Indeks Integritas Nasional	76,07	Indeks	77
1.1.5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Opini	WTP
1.1.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0194	Persen	0,0195
1.2.1	Indeks Pelayanan Publik	88,5	Indeks	88,5
1.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	75,69	Indeks	75,7
2a	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,96

Indikator Kinerja Utama		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025
2b	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	45,00
2.1.1	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,96
2.1.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	45,00
3a	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,44	Tahun	73
3.1.1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	75,90	Jiwa/100.000 kelahiran hidup	75,90
3.1.2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	23,45	Persen	22,2
3.1.3	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	70,9	Persen	90
3.1.4	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	93	Persen	90
3.1.5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	96,03	Persen	98
4a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,8
4b	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,9
4c	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,214
4d	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,52	persen	2,53
4e	PDRB perkapita (Rp Juta)	67,69	Rp Juta	65,99
4.1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	Persen	2,74
4.1.2	Kontribusi industri pengolahan	3,82	Persen	3,85
4.1.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2,59	Persen	2,60
4.1.4	Jumlah Kunjungan wisatawan	1.434.797	Kunjungan	1.577.400
4.2.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Udemourishment</i>)	6,1	Persen	6,09
4.2.2	Kapasitas Air Baku		m3/detik	1
4.3.1	Tingkat Inflasi	N/A	Persen	3±1
5a	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	77,58
5b	Indeks Modal Manusia	N/A	Indeks	0,535
5.1.1	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	68,5	Persen	70,55
5.1.2	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	59,32	Persen	60,2
5.1.3	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	67,25	Persen	69,26
5.1.4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	65,89	Persen	66,87
5.1.5	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	10,12	Tahun	11- 12
5.1.6	Harapan lama sekolah	13,26	Tahun	14
5.1.7	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)		Persen	17
5.1.8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,08	Indeks	69,5
5.2.1	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	58,23-58,50
5.2.2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,291	Indeks	0,39
5.2.3	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	81,82	Persen	83,62
5.2.4	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	80	Persen	81,75
5.2.5	Pembinaan Ormas dan jumlah konflik SARA	103/0	Ormas/Konflik	103/0

Indikator Kinerja Utama		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025
5.2.6	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	29,29	Persen	32,82
5.2.7	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,1	Persen	10-15%
5.2.8	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	93,33	Persen	93,4
5.2.9	Persentase prestasi olahraga	19	Persen	20
5.2.10	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,3	Persen	35
5.2.11	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	58,23-58,50
5.3.1	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	2,3	Persen	3,9
6a	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,215
6.1.1	Pembentukan modal tetap Bruto (% PDRB)	31-33	persen	30-31
6.1.2	Rasio kewirausahaan daerah	3,78	Rasio	4,11
6.1.3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,95	Rasio	1,95
6.1.4	Net Ekspor (Milyar)	1691,13	Milyar	1741,86
6.1.5	Kontribusi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,36	Persen	11,58
6.1.6	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	27	Pelaku Usaha	100
7a	Indeks Daya Saing Infrastruktur	N/A	Indeks	3,1
7.1.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	63,9	Persen	65
7.1.2	Akses sanitasi aman	74,68	Persen	75,58
7.1.3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	39,5	Persen	39,9
7.1.4	Irigasi dalam kondisi baik	55,21	Persen	56
7.1.5	Drainase dalam kondisi baik	63.69	Persen	64
7.1.6	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	61,5	Persen	62
7.1.6	Ketaatan terhadap RTRW	73	Persen	74
7.2.1	Rasio Rumah Layak Huni	98,91	Persen	98,92
7.2.2	Persentasi luas kawasan kumuh yang ditangani	0,22	Persen	0,22
7.2.3	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	100	Persen	100
7.2.4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	10	Persen	10
7.3.1	Rasio konektivitas kabupaten	0,32	Persen	0,32
7.3.2	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,97	Persen	0,95
8a	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	130.887,52
8b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23
8c	Indeks Risiko Bencana	103,81	Indeks	103
8.1.1	Timbulan Sampah yang ditangani (%)	78,03	Persen	77
8.1.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	78,03	%	78,06
8.1.3	Persentase cakupan area pelayanan (%)	41	Persen	41
8.1.4	Konsumsi listrik per Kapita	535,8	(kWh perkapita)	529
8.2.1	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks	0,5
9a	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	Indeks	3,6
9.1.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	Indeks	3,09
9.1.2	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,71	Indeks	2,8
10a	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	96	%	96,5
10b	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	%	100

Indikator Kinerja Utama		Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025
10.1.1	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	96	%	96,5
10.1.2	Tingkat sinkronisasi program prioritas daerah terhadap program prioritas provinsi dan nasional	100	%	100

4.5.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025 yang telah direncanakan. Untuk mengukur keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun capaian dan target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Indikator Kinerja Kunci Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Karo Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	11
1	Indeks Ketahanan Pangan	82	Indeks	82,28	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	6,13	Persen	6,12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	535,8	(kWh perkapita)	529	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	39,5	Persen	39,9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,21	Indeks	79,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Akses sanitasi aman	74,68	Persen	75,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	78,03	%	78,06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	Persen	130.887,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Indeks Risiko Bencana	103,81	Indeks	103	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks	0,49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,35	Persen	1,308	BADAN PUSAT STATISTIK

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
12	Rasio Penduduk	47,420	Persen	47,271	BADAN STATISTIK PUSAT
13	Kepadatan Penduduk	193,25	Orang/km2	195,775	BADAN STATISTIK PUSAT
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,8	BADAN STATISTIK PUSAT
2	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,9	BADAN STATISTIK PUSAT
3	PDRB Per Kapita	67,69	Rp Juta	65,99	BADAN STATISTIK PUSAT
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,215	BADAN STATISTIK PUSAT
5	Indeks Gini	0,214	Rasio	0,213	BADAN STATISTIK PUSAT
6	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	77,58	BADAN STATISTIK PUSAT
7	Usia Harapan Hidup	72,44	Tahun	73,00	DINAS KESEHATAN
8	Indeks Keluarga Sehat	0,25	Indeks	0,45	DINAS KESEHATAN
9	Prevalensi Stunting	16	Persen	8,7	DINAS KESEHATAN
10	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	Tahun	10,17	DINAS PENDIDIKAN
11	Harapan Lama Sekolah	13,26	Tahun	13,28	DINAS PENDIDIKAN
12	Angka Literasi/Numerasi:				
12.1	Literasi SD dan SMP	67,87	Persen	72,70	DINAS PENDIDIKAN
12.2	Numerasi SD dan SMP	62,60	Persen	71,73	DINAS PENDIDIKAN
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,08	Indeks	70,58	DINAS PENDIDIKAN
14	Indeks Literasi Digital	39,99	Indeks	40,59	DINAS PENDIDIKAN
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	29,29	Persen	32,82	DINAS KESEHATAN
16	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	0,95	Persen	0,96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
17	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	37,93	Persen	41,38	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
18	Indeks Perlindungan Anak		Indeks	63,39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
19	Indeks Pembangunan Keluarga	58	Indeks	59,9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,291	Indeks	0,4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
21	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,3	Persen	35	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1	Angka Ketergantungan		Persen	47,271	BADAN STATISTIK PUSAT
2	Kontribusi industri pengolahan	3,82	Persen	3,85	DINAS PERTANIAN
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0,258	Rasio	0,26	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
4	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	27	Pelaku Usaha	100	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
5	Rasio kewirausahaan daerah	3,78	Rasio	4,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	84,13	Persen		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	Indeks Inovasi Daerah	62,02	Indeks	63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,54	Persen	2,74	DINAS PERTANIAN
9	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	130.887,52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
10	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,71	Indeks	2,8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31-33	persen	30-31	BADAN PUSAT STATISTIK
12	Net Ekspor (Milyar)	682,67	miliar	720,31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13	Indeks Daya Saing Infrastruktur	N/A	Indeks	3,1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
14	Rasio Rumah Layak Huni	98,91	Persen	98,92	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	Persentase Desa Mandiri	2,3	Persen	3,9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,0194	Persen	0,0195	BADAN PUSAT STATISTIK
17	Tingkat Inflasi	N/A	Persen	3±1	BADAN PUSAT STATISTIK
1	Indeks Reformasi Hukum	87,22	Indeks	87,4	SEKRETARIAT DAERAH
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,04	indeks	3,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	Indeks Pelayanan Publik	88,5	Indeks	88,5	SEKRETARIAT DAERAH
4	Indeks Integritas Nasional	76,07	Indeks	77	SEKRETARIAT DAERAH
5	Persentase Penegakan Perda	81,82	Persen	83,62	SATPOL PP
6	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	93,33	Persen	93,4	SEKRETARIAT DAERAH
7	Indeks Demokrasi Indonesia		Indeks		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Indeks Rasa Aman		Indeks		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	60,50	Indeks	62,01	SATPOL PP
8	Indeks Daya Saing Daerah	N/A	Indeks	3,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
1	Pendidikan				DINAS PENDIDIKAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :				DINAS PENDIDIKAN
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	37,96	%	37,96	DINAS PENDIDIKAN
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	N/A	%	60	DINAS PENDIDIKAN
4	Angka Partisipasi Kasar :				DINAS PENDIDIKAN
4.1	Angka partisipasi kasar SD	107,21	%	100	DINAS PENDIDIKAN
4.2	Angka partisipasi kasar SMP	96,96	%	97,96	DINAS PENDIDIKAN
5	Angka Partisipasi Murni :				DINAS PENDIDIKAN
5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,85	%	95,79	DINAS PENDIDIKAN
5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,70	%	91,43	DINAS PENDIDIKAN
6	Angka Partisipasi Sekolah :				DINAS PENDIDIKAN
6.1	Angka partisipasi sekolah usia (APS) Usia 5-6 tahun	57,17	%	60,35	DINAS PENDIDIKAN
6.2	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-12 tahun	98,38	%	98,5	
6.3	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	99,41	%	99,41	DINAS PENDIDIKAN
6.4	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	3,94	%	5,89	DINAS PENDIDIKAN
7	Kemampuan Literasi :				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
7.1	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	58,86	%	61,36	DINAS PENDIDIKAN
7.2	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	68,72	%	69,82	DINAS PENDIDIKAN
8	Kemampuan Numerasi :				
8.1	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	53,26	%	56,16	DINAS PENDIDIKAN
8.2	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62,05	%	63,55	DINAS PENDIDIKAN
9	Kualitas Pembelajaran :				
9.1	Kualitas Pembelajaran SD	68,50	%	70,85	DINAS PENDIDIKAN
9.2	Kualitas Pembelajaran SMP	67,25	%	74,56	DINAS PENDIDIKAN
10	Iklim Keamanan :				
10.1	Iklim Keamanan SD	72,67	nilai	73,57	DINAS PENDIDIKAN
10.2	Iklim Keamanan SMP	86,35	nilai	69,85	DINAS PENDIDIKAN
11	Iklim Kebinekaan :				
11.1	Iklim Kebinekaan SD	69,88	nilai	70,88	DINAS PENDIDIKAN
11.2	Iklim Kebinekaan SMP	70,88	nilai	71,88	DINAS PENDIDIKAN
12	Iklim Inklusivitas :				
12.1	Iklim Inklusivitas SD	57,98	nilai	60,48	DINAS PENDIDIKAN
12.2	Iklim Inklusivitas SMP	56,6	nilai	59	DINAS PENDIDIKAN
2	Kesehatan				DINAS KESEHATAN
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	20	kasus	21	DINAS KESEHATAN
2.2.	Angka Kematian Balita	22	kasus	25	DINAS KESEHATAN
2.3.	Angka Kematian Neonatal	20	kasus	19	DINAS KESEHATAN
2.4.	Angka Kematian Ibu	6	kasus	5	DINAS KESEHATAN
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	9,30	Rasio	9,3	DINAS KESEHATAN
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	0,04	Rasio	0,04	DINAS KESEHATAN
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	0,00	Rasio		DINAS KESEHATAN
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	0,50	Rasio	0,5	DINAS KESEHATAN
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,01	Rasio	0,01	DINAS KESEHATAN
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	0,29	Rasio	0,29	DINAS KESEHATAN
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	8,68	Rasio	8,68	DINAS KESEHATAN
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	0,09	Rasio	0,09	DINAS KESEHATAN
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	0,47	Rasio	0,47	DINAS KESEHATAN
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	75,48	%	75,5	DINAS KESEHATAN
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67,60	%	70	DINAS KESEHATAN
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,60	%	100	DINAS KESEHATAN
2.19.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di bawah umur 15 Tahun	tidak ada kasus	Orang	2	DINAS KESEHATAN
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	tidak ada kasus	%	100	DINAS KESEHATAN
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,90	%	90	DINAS KESEHATAN
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	273,00	rasio		DINAS KESEHATAN
2.21.	Tingkat Insiden tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		rasio	190	DINAS KESEHATAN
2.22.	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	93,00	%	90	DINAS KESEHATAN
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6,00	rasio	6	DINAS KESEHATAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	70,90	%	75	DINAS KESEHATAN
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	93,87	%	90	DINAS KESEHATAN
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,06	%	0,06	DINAS KESEHATAN
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	73,90	%	80	DINAS KESEHATAN
2.30.	Cakupan puskesmas	111,80	%	111,8	DINAS KESEHATAN
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	78,80	%	78,8	DINAS KESEHATAN
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	77,70	%	80	DINAS KESEHATAN
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	69,30	%	70	DINAS KESEHATAN
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	9,49	%	9,5	DINAS KESEHATAN
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	55,60	%	60	DINAS KESEHATAN
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	86,00	%	90	DINAS KESEHATAN
2.37.	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	92,36	%	100	DINAS KESEHATAN
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	80,00	%	80	DINAS KESEHATAN
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.40.	Persentase balita stunting	8,70	%	8,7	DINAS KESEHATAN
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	79,10	%	80	DINAS KESEHATAN
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	67,30	%	70	DINAS KESEHATAN
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	69,10	%	70	DINAS KESEHATAN
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	55,60	%	60	DINAS KESEHATAN
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	92,36	%	100	DINAS KESEHATAN
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41,52	%	55	DINAS KESEHATAN
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	87,36	%	88	DINAS KESEHATAN
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,03	%	50	DINAS KESEHATAN
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61,00	%	70	DINAS KESEHATAN
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	51,38	%	60	DINAS KESEHATAN
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,90	%	100	DINAS KESEHATAN
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	53,08	%	70	DINAS KESEHATAN
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	94,50	%	100	DINAS KESEHATAN
2.55.	Persentase Posyandu aktif	96,51	%	96,51	DINAS KESEHATAN
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	78,95	%	78,95	DINAS KESEHATAN
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	68,42	%		DINAS KESEHATAN
2.57.	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas		%	36	DINAS KESEHATAN
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	73,58	%	70,75	DINAS KESEHATAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95	%	98,6	DINAS KESEHATAN
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	100,00	%	100	DINAS KESEHATAN
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	95,00	%	95	DINAS KESEHATAN
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki 15 jenis tenaga kesehatan			78,95	DINAS KESEHATAN
2.64.	Saka Bakti Husada Pramuka	0,00	Pangkalan	2	DINAS KESEHATAN
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	90,00	%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar		%		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.	Pekerjaan Umum:				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	63,90	%	65	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	74,68	%	75,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	63,69	%	64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,21	%	56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	68,706	%	68,708	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	84,00	%	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.	Penataan Ruang				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	25,00	%	26	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	73,00	%	74	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	0,00	Orang	-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	61,50	%	62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.1.	Rasio rumah layak huni	98,91	%	98,92	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	0,20	%	0,22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	100,00	%	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	10,00	lokasi	10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				SATPOL PP & BPBD
5.1.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12,50	%	12,5	SATPOL PP
5.1.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80,00	%	81,75	SATPOL PP
5.1.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	41,18	%	47,06	SATPOL PP
5.1.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	91,43	%	91,66	SATPOL PP
5.1.5	Persentase Penegakan PERDA	81,82	%	83,62	SATPOL PP
5.2.	Bencana				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	11.816	Orang	11.916	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5.666	Orang	6.176	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	23.713	Orang	23.793	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.2.4	Indeks Kapasitas Daerah	0,48	indeks	0,49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	Sosial				DINAS SOSIAL
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	58,00	%	58,50	DINAS SOSIAL
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	58,00	%	58,00	DINAS SOSIAL
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	57,69	%	57,69	DINAS SOSIAL
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,00	%	0,00	DINAS SOSIAL
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	%	100,00	DINAS SOSIAL
6.8.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	58,59	%	58,59	DINAS SOSIAL
1	Tenaga Kerja				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	1,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	1,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	71,00	%	71,5	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	85,9	%	85,92	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	%	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	%	15	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	11,00	%	11,01	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	5,56	%	5,57	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	13,31	%	13,50	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,60	%	3,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	30,00	%	30,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.3.	Rasio KDRT	0,01	%	0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,00	%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
	atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak				PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3	Pangan				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2.430,00	Kkal/kap/hari	2492	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		63,00	gr/hari	63	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	100,00	%	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4	Pertanahan				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	146,61	Ha	145	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	1,00	kasus	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	10,00	lokasi	10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5	Lingkungan Hidup				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	ada	Belum ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	ada	Belum ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1,00	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	60,91	indeks	82,29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93,37	indeks	81,3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	52,47	indeks	70,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	104,00	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0,00	orang	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait 3R dan Bank Sampah	13,00	kali	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.11.	Terlesainya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	78,03	%	77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	78,00	ton	78,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	41,00	%	41,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,99	%	99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	99,15	%	98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	60,03	%	60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada/Tidak Ada	Ada	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah/Belum	Sudah	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,51	%	99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	62,18	%	60	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60,00	%	62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	70	%	70,6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,15	kelompok	17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	0,20	%	5,8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.5.	Persentase PKK Aktif	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.7.	Persentase LSM aktif	80,00	%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,35	%	1,3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,19	kelahiran	2,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	81,82	%	85	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	63,64	%	65	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	7,00	Kelompok	7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,19	anak	2,1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.7.	Ratio Akseptor KB	53,04	%	54,64	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	46,70	%	48,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	22,90	%	20,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	41,86	%	42,69	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	53,04	%	51,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	800,00	orang	800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	580,00	orang	580	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	458,00	orang	458	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	461,00	orang	461	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	150,00	orang	150	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00	%	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80,00	%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1.816,00	orang	1816	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	690,00	orang	690	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.23.	ASFR (15-19)	25,6	Kelahiran per 1000	25,6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.24.	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (demand satisfied)	67,1	%	67,8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
9	Perhubungan				DINAS PERHUBUNGAN
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	#####	orang	4.113.375,00	DINAS PERHUBUNGAN
9.2.	Rasio ijin trayek	760,46	%	59,26x	DINAS PERHUBUNGAN
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	945,00	unit	995	DINAS PERHUBUNGAN
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4,00	buah	4	DINAS PERHUBUNGAN
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	100,00	%	80%	DINAS PERHUBUNGAN
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	13,00	%	35	DINAS PERHUBUNGAN
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	12,00	%	17%	DINAS PERHUBUNGAN
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	366,00	rasio	70	DINAS PERHUBUNGAN
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	4.095.356	orang	4.113.375	DINAS PERHUBUNGAN
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	97,00	%	95	DINAS PERHUBUNGAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,32	rasio	0.32	DINAS PERHUBUNGAN
10	Komunikasi dan Informatika				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,50	%	85.55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	60,64	%	60,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	48,49	%	48,54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	15,78	%	15,83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.5.	Indeks SPBE	3,04	indeks	3,04	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.1.	Persentase koperasi aktif	51,00	%	52	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,00	%	95,5	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
12	Penanaman Modal				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	96,00	investor	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7,16	Rp. (dalam triliun)	7,31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	75,30	persen	74,01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	18,52	persen	5,5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	Kepemudaan dan Olah Raga				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,30	%	35	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.2.	Persentase wirausaha muda	47,00	%	52	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	56,00	%	46	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	N/A	%	108	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	7,00	%	15	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	220,00	atlet	230	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	12,00	Cabor	12	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
14	Statistik				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	Ada	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
14.3.	Buku "PDRB"	Tidak	ada/tidak	ada	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	Persandian				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	25,00	%	30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	Kebudayaan				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15,00	Kali	1	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11,00	Cagar Budaya	1	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	27,00	Karya Budaya	3	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
17	Perpustakaan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,3	%	0,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,3	rasio	0,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,107	rasio	1,109	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	128.208,00	orang	30000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	10.892,00	buku	8600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,82	%	0,856	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18	Kearsipan				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	78,8	%	75,21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1,00	Kegiatan	2 Kegiatan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1	Pariwisata				DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.1.	Kunjungan wisata	1.434.797	Orang	1.577.400	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.2.	Lama kunjungan Wisata	2,5	Hari	2,5	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
1.3.	PAD sektor pariwisata	81,44	Persentase	83	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
2	Pertanian				DINAS PERTANIAN
2.4.	Produktivitas padi per hektar	60,71	Kw/Ha	60,86	DINAS PERTANIAN
2.5.	Produktivitas palawija per hektar (Jagung)	68,73	Kw/Ha	68,90	DINAS PERTANIAN
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	12,25	%	12,6	DINAS PERTANIAN
2.7.	Produksi sektor pertanian Unggulan	1.841.951	Ton	1.846.556	DINAS PERTANIAN
4	Energi dan Sumber Daya Mineral				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4,4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	1,00	pengusaha	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	Perdagangan				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
5.1.	Net Ekspor	682,67	miliar	720,31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13,00	persen	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	Perindustrian				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	33,33	persen	33,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	Kelautan dan Perikanan				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.1.	Produksi perikanan Budidaya	1.199,00	Ton	880	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.2.	Konsumsi ikan	61,00	Kg/Kap/Tahun	61,5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.3.	Produksi perikanan kelompok nelayan	30	Ton	35	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.4.	Produksi Benih Ikan	600.000,00	Ekor	747.452	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.5.	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	5,00	Ton	12 Ton	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	20,00	Kelompok	15 Kelompok	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1	Perencanaan Pembangunan				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Dokumen	Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Keuangan				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		opini	WTP	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.2.	Persentase SILPA	2,43	%	2,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	2,43	%	2,55	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	0	%	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	0	%	0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,99	%	32,54	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	18,74	%	19,68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah	66,71	%	70,05	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	14,71	%	15,45	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	42,12	%	44,23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	0,19	%	0,20	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,65	%	0,68	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah
2.14.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1.	Nilai IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN)	1,10	%	75,7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.2.	Persentase Keterisian Jabatan Struktural	0,42	%	90,6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.3.	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang diproses	90,60	%	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.4.	Nilai IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) dari dimensi kompetensi	11,00	indeks	20,1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Penelitian dan Pengembangan				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Penerapan SIDA:				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	%	100	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	Pengawasan				INSPEKTORAT
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	83,42	%	83,5	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	0,00	%	0,05	INSPEKTORAT
6	Sekretariat Dewan				SEKRETARIAT DPRD
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA/TIDAK	ADA	SEKRETARIAT DPRD

4.6. Inovasi Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo maka Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan kebijakan inovasi daerah tersebut di bawah ini:

- 1. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

IID Kabupaten Karo dengan ditetapkannya regulasi inovasi daerah tersebut di atas, terus meningkat. Adapun peningkatan IID Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024, seperti disajikan di tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Predikat Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

TAHUN	SKOR/ INDEKS	PREDIKAT	PERINGKAT KAB/KOTA SE-SUMUT	PERINGKAT KAB SE- INDONESIA
2020	3.319 (skor)	SANGAT INOVATIF	3	49
2021	53,24 (Indeks)	INOVATIF	3	67
2022	53,69 (Indeks)	INOVATIF	2	107
2023	55,96 (Indeks)	INOVATIF	2	61
2024	62,02 (Indeks)	SANGAT INOVATIF	1	63

Jumlah usulan dan penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 meningkat. Jumlah yang diusulkan setiap tahun lebih sedikit karena jumlah yang diterapkan dihitung mulai dari 2 (dua) tahun terakhir sampai tahun berjalan. Berikut data penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Karo Tahun 2019-2023 seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang
Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan SIDA					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	60	59	46	46	46
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	59	46	46	46
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	43	27	43	71	111
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	21	22	49	62	49
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	205	123	88	115	227

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2024;
* Jumlah inovasi yang diusulkan ke IGA/ Siindahkaka mulai 2 tahun terakhir sampai tahun berjalan

Bappedalitbang Kabupaten Karo juga menyediakan Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi setiap jam dan hari kerja untuk berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Tahun 2025, Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* dikembangkan menjadi RUDII/MO/RO dimana ruang diskusi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu RUDII (Ruang Diskusi Inovasi) via WhatsApp, RUDIIMO (Ruang Diskusi Inovasi Mingguan Online) dan RUDIIRO (Ruang Diskusi Inovasi Rutin Offline). Inovasi ini dibuat dalam rangka menyelaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi, workshop dan desk inovasi untuk fasilitator inovasi instansi.

Jumlah inovasi daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Kabupaten Karo melalui SK Bupati Karo lebih banyak jumlahnya daripada yang ditetapkan penerapannya melalui Peraturan Bupati Karo. Jumlah Inovasi yang diusulkan ke IGA Kemendagri lebih sedikit lagi karena tingkat kematangan inovasi yang diterapkan rendah. Banyak inovasi yang tidak dilaksanakan dengan komitmen tinggi, belajar dan kerja keras sehingga tingkat kematangan inovasi rendah dan tidak layak diusulkan ke IGA Kemendagri.

Dalam rangka meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan tingkat kematangan inovasi yang diusulkan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karo menetapkan Peraturan Bupati Karo 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang memuat “pengurangan TPP akan dikenakan kepada seluruh ASN pada perangkat daerah tersebut apabila tidak memenuhi pelaporan kinerja berupa ayat 2 (b) Laporan Inovasi Perangkat Daerah setiap triwulan dan akhir tahun”. Hasil penerapan Peraturan bupati ini, pada tahun 2025 jumlah Perangkat Daerah/UPT PD yang melaksanakan inovasi meningkat seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah Siindahkaka Tahun 2022-2026

TAHUN	JUMLAH USULAN	STATUS	JUMLAH PD/UPT PD
2022	22	PENERAPAN	20
2023	51	PENERAPAN	42
2024	54	PENERAPAN	54
2025	62	PELAKSANAAN	62
2026	54	PERENCANAAN (INISIATIF)	54

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo melalui instansi pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah/UPT PD (Puskesmas) sedang melaksanakan Inovasi Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 sebanyak 62

inovasi dari 62 Perangkat Daerah/UPT PD (Puskesmas) yang terdiri dari 29 inovasi dari 29 Perangkat Daerah bukan kecamatan, 17 inovasi dari 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah Kecamatan dan 16 inovasi dari 16 Puskesmas. Jumlah Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang berinovasi pada Tahun 2024 masih belum sesuai dengan Perda dan Perbup, tetap diharapkan kepada 20 Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah melaksanakan inovasi tahun 2024.

Pelaksanaan 62 inovasi daerah Tahun 2025 sudah dan akan dilaksanakan dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang sudah dimuat pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 lampiran II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025. Rencana inovasi tersebut, dilaksanakan untuk mengatasi beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Karo yang sudah dimuat pada Bab II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025. Pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2025 ini akan menentukan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2026 dan 2027, diharapkan Kabupaten Karo dapat meningkatkan indeks inovasi daerahnya. Komitmen, kerja keras, serta kemauan untuk selalu mau belajar dan menjadi lebih baik menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan dan penerapan inovasi daerah pada tahun 2025.

Tabel 4.12
Inovasi Daerah Kabupaten Karo Pelaksanaan dan Penerapan Tahun 2025 Pada Aplikasi Siindahkaka (Sistem Informasi Daerah Kabupaten Karo)

No.	Judul Inovasi	Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah
1	"SEKIN KARO" Sekolah Inklusif Untuk Pelayanan Pendidikan Dasar Kabupaten Karo	DINAS PENDIDIKAN
2	"TOURING WASMAMIN" (LABORATORIUM KELILING PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
3	SILITA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	SITARU (Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Karo)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	PERASAAN (Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ke Pemerintah Daerah)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
6	SIMENTASI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	SIMAN IKAN [Sistim Informasi Manajemen Logistik dan Pergudangan] 2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	SINAMPAT (Sistem Informasi Administrasi Manajemen Pelayanan Terpadu)	DINAS SOSIAL
9	Simelias (Sistem Melayani Inovatif Akurat Dan Sinergis)	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	Pengkerina (Pencegahan Kekerasan Ibu dan Anak)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11	MANINDU HEAT (MASKULINISASI IKAN NILA DENGAN MADU DAN DENGAN BANTUAN HEATER)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No.	Judul Inovasi	Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah
12	SISTEM INOVASI PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	SIPP_LAH (Sistem Permohonan Pelayanan secara Online Akta Lahir)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	SIPEDAASI "Sipesikap Desa Arah Sistem Informasi)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	JUPIKA (JURU PARKIR ID CARD)	DINAS PERHUBUNGAN
16	SATU DATA SATU PLATFORM “SADA SAPO”	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	SICANTIK KARO	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	Mobile Friendly Website	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
19	KLIK LINK PERPUS (Klinik Keliling Akreditasi Perpustakaan)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
20	AGENS HAYATI TANGKIS PENYAKIT	DINAS PERTANIAN
21	Klinik IKM	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
22	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kabupaten Karo	SEKRETARIAT DAERAH
23	Pengkerina (Pencegahan Kekerasan Ibu dan Anak)	SEKRETARIAT DPRD
24	E-SURA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25	IMAJINAR (Informasi Manajemen Anggaran)	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	Mojak PBB Bapenda Karo	BADAN PENDAPATAN DAERAH
27	KLINIK LAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
28	e-APIP Tahun 2025	INSPEKTORAT
29	RARASEN/Ras-ras Mesikapsa (Bekerja sama Mewujudkan 5 R)	KECAMATAN BARUSJAHE
30	KAPE AGI (Klinik Aparatur Pemerintah Desa di Berastagi)	KECAMATAN BERASTAGI
31	SAMPAH JADI KERAJINAN TANGAN	KECAMATAN DOLAT RAYAT
32	SAHAR SUKA ENZY (Sampah Juhar dengan Swakelola dan Eco Enzyme)	KECAMATAN JUHAR
33	E-SIPEDEKEL (SISTEM PELAYANAN DESA DAN KELURAHAN)	KECAMATAN KABANJAHE
34	BIMTEK SIMOLE	KECAMATAN KUTABULUH
35	JEBOL ANDUK (Jemput Bola Administrasi Kependudukan)2025	KECAMATAN LAU BALENG
36	SADAR BAYAR PAJAK MASYARAKAT (SAPAKAT)	KECAMATAN MARDINDING
37	STAR OF THE MONTH (2025)	KECAMATAN MERDEKA
38	GERAK DORONG PENDAPATAN PAJAK (GEDOR PAJAK)	KECAMATAN MEREK
39	GARUDA (Generasi Muda Melestarikan Budaya)	KECAMATAN MUNTE
40	ENTA PBB (Endi-Enta Pajak Bumi Bangunan)	KECAMATAN NAMANTERAN
41	SAPA DESA (Sarana Penyusunan APB Desa) 2025	KECAMATAN PAYUNG
42	“SAMPAH SUMBER DUITG” (DANA, USAHA, INOVASI TEPAT GUNA)”	KECAMATAN SIMPANG EMPAT

No.	Judul Inovasi	Perangkat Daerah/UPT Perangkat Daerah
43	CEGAH STUNTING TIGABINANGA (CETINGAN)	KECAMATAN TIGA BINANGA
44	KLINIK BERSAMA (Bereskan RPJMDes, RKPDes, SAMa Apbdes)	KECAMATAN TIGANDERKET
45	Tigapanah Bergelora II	KECAMATAN TIGA PANAHA
46	Si-ORMAS (Sistem Informasi Pengabsahan Organisasi Masyarakat) Tahun 2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
47	CIREM (Cekatan, rIngkas, Rajin, Elok, Merawat)	PUSKESMAS KABANJAHE
48	SIDUMAS (Sistem Pengaduan Masyarakat)	PUSKESMAS BERASTAGI
49	JEMPUT DAHAK, OBATI SAMPAI RAMPUNG (GODA OPUNG)	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT
50	POSKO PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR)	PUSKESMAS PAYUNG
51	SETULUS KASIH (SERTIFIKAT TANDA LULUS KONSUMSI ASI EKSKLUSIF)	PUSKESMAS TIGANDERKET
52	GEMAR PENSI (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI HIPERTENSI)	PUSKESMAS MUNTE
53	SKETER ASIK MAS (SKRINING KESEHATAN TERINTEGRASI ANTARA FASILITAS KESEHATAN DAN MASYARAKAT)	PUSKESMAS TIGABINANGA
54	Kanal Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat (KAPAS)	PUSKESMAS JUHAR
55	KILA ITING " KIAM LAKTASI ATASI STUNTING "	PUSKESMAS BARUSJAHE
56	RUMUS PASTI (RUANG ILMU KESEHATAN PUSKESMAS TIGAPANAH)	PUSKESMAS TIGAPANAH
57	NADI SELINGKAR (Penanganan Diabetes Secara Holistik Dengan Kartu) Tahun 2025	PUSKESMAS MEREK
58	JEBOL SILACI (Jemput Bola Deteksi Populasi Silima Kunci)	PUSKESMAS MARDINDING
59	Cegah kamu dengan rehat (Cegah kawin muda dengan remaja sehat)	PUSKESMAS MERDEKA
60	DOPING (Dapur Olahan Cegah Stunting)	PUSKESMAS DOLATRAYAT
61	LUSA ASIEK (Keluarga Sadar Asi Eksklusif)	PUSKESMAS SINGA
62	GENCAR SAPU TBC (GERAKAN PENCARIAN SUSPEK DAN PENDERITA TBC)	PUSKESMAS KORPRI

Sumber: Aplikasi Siindahkaka

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan subkegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matriks rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Karo sampai dengan Triwulan 1 2025, tantangan dan kendala yang akan terjadi. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan semua sektor pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Karo untuk mendukung pencapaian target target RPJMD diantaranya adalah yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan lain-lain. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, diuraikan secara jelas pada Lampiran II Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Adapun persandingan antara jumlah program, kegiatan dan subkegiatan RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Tahun berkenaan (Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH SUBKEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	4	4	4	15	15	15	107	105	103	0	0	0	0	0	4
2	DINAS KESEHATAN	5	5	5	18	18	18	55	56	51	0	0	0	0	0	4
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	2	2	2	6	7	7	8	9	9	0	0	1	0	1	0
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	10	9	9	14	15	15	49	38	40	0	1	1	0	0	9
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	5	5	4	8	8	8	19	19	18	0	1	0	0	0	1
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	3	3	8	8	8	24	23	23	0	0	0	0	0	1
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	2	2	10	10	10	31	31	29	0	0	0	0	0	2
8	DINAS SOSIAL	7	7	7	12	15	15	29	30	30	0	0	3	0	1	0
9	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH	9	9	9	16	16	16	25	26	27	0	0	0	0	2	0
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10	10	10	25	25	25	45	41	42	0	0	0	0	0	3
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8	8	8	17	17	17	35	35	35	0	0	0	0	0	0
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10	16	16	16	26	30	33	0	0	0	0	7	0
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	13	13	13	24	24	25	0	0	0	0	1	0
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	3	3	7	7	7	27	27	27	0	0	0	0	0	0
15	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	17	17	17	37	36	38	0	0	0	0	1	0
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	5	9	9	9	26	26	26	0	0	0	0	0	0
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	6	6	11	11	11	25	25	25	0	0	0	0	0	0

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH SUBKEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD	
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG
18	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA SERTA PARIWISATA	11	11	11	20	20	20	43	42	42	0	0	0	0	0	1
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	3	3	10	10	10	23	21	21	0	0	0	0	0	2
20	DINAS PERTANIAN	6	6	6	14	14	14	27	27	28	0	0	0	0	1	0
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7	7	7	13	13	13	27	27	27	0	0	0	0	0	0
22	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	17	17	17	53	53	54	0	0	0	0	1	0
23	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	15	15	15	56	56	56	0	0	0	0	0	0
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	4	4	16	16	16	34	36	37	0	0	0	0	3	0
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	3	3	11	11	11	38	38	38	0	0	0	0	0	0
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	2	2	6	6	6	18	18	18	0	0	0	0	0	0
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	12	12	12	28	28	28	0	0	0	0	0	0
28	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	14	13	13	29	29	27	0	0		1	0	2
29	KECAMATAN	107	107	106	204	204	204	354	360	356	0	1	0	0	2	0
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	9	9	9	19	19	20	0	0	0	0	1	0
TOTAL		257	256	254	583	587	587	1341	1335	1333	0	3	5	1	21	29

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan jumlah program sebanyak 3 (tiga) program, semula berjumlah 257 program menjadi 254 program pada Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025. Sedangkan untuk kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025 bertambah dan berkurang sebanyak 5 (lima) dan 1 (satu) kegiatan yaitu dari 583 menjadi 587 kegiatan. Untuk subkegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami pengurangan dan penambahan berjumlah 21 (dua puluh satu) dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan yaitu dari 1.341 menjadi 1.333 subkegiatan.

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah pagu anggaran perangkat daerah, maka hampir seluruh perangkat daerah mengalami pergeseran jumlah pagu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Jumlah Pagu Anggaran pada RKPD, APBD dan Perubahan RKPD 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	Dinas Pendidikan	408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00
2	Dinas Kesehatan	157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	12.449.856.794,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	3.753.454.175,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	(60.108.221.948,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	8.874.408.865,00	10.069.228.164,00	11.575.264.224,00	2.700.855.359,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	2.180.210.141,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	4.418.453.848,00
8	Dinas Sosial	4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00
9	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	720.329.189,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB	10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	(1.517.846.986,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.980.026.791,00	9.973.419.909,00	9.613.447.024,00	(366.579.767,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup	28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	(1.167.158.065,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	(1.348.080.409,00)
15	Dinas Perhubungan	22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	70.539.620,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.427.691.879,00	9.656.238.480,00	9.087.111.473,00	659.419.594,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	(1.994.153.183,00)
18	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	22.929.001.299,00	23.875.530.660,00	22.108.353.888,00	(820.647.411,00)
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	10.219.194.362,00
20	Dinas Pertanian	30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	(3.349.870.896,00)

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.770.958.282,00	14.845.662.827,00	14.217.435.206,00	(1.553.523.076,00)
22	Sekretariat Daerah	34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	3.200.560.085,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	(9.422.424.722,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	(689.964.663,00)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	(1.672.419.064,00)
26	Badan Pendapatan Daerah	11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	(409.035.464,00)
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.058.482.441,00	7.107.098.224,00	7.094.008.419,00	35.525.978,00
28	Inspektorat Daerah	12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	(4.026.742.621,00)
29	Kecamatan Kabanjahe	10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00
30	Kecamatan Berastagi	8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	(121.970.046,00)
31	Kecamatan Barusjahe	2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	(72.899.472,00)
32	Kecamatan Tiga Panah	3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	(135.315.644,00)
33	Kecamatan Merek	3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	(155.176.036,00)
34	Kecamatan Munte	2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	(249.259.868,00)
35	Kecamatan Juhar	3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	(282.551.755,00)
36	Kecamatan Tiga Binanga	3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	(75.610.381,00)
37	Kecamatan Lau Baleng	2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	(45.293.291,00)
38	Kecamatan Mardinding	2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	(2.100.389,00)
39	Kecamatan Payung	2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	(137.965.674,00)
40	Kecamatan Simpang Empat	3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	(227.906.853,00)
41	Kecamatan Kutabuluh	2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	(262.918.155,00)
42	Kecamatan Dolat Rayat	2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	(55.051.645,00)
43	Kecamatan Merdeka	2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	(170.059.022,00)
44	Kecamatan Namanteran	2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	128.786.143,00
45	Kecamatan Tiganderket	2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	(147.073.342,00)
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	(836.708.762,00)
TOTAL		1.465.554.735.139,00	1.481.239.644.849,00	1.443.398.690.754,00	(22.156.044.385,00)

Berikut ini disajikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam program-program perangkat daerah.

Tabel 5.3
Penetapan Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
						Dinas Pendidikan			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 92 Indeks Indeks	92 89 Indeks Indeks	311.278.955.926,00	320.190.993.983,00	325.068.708.599,00	DINAS PENDIDIKAN
	1					NON URUSAN			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
2	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 92 Indeks Indeks	89 92 Indeks Indeks	311.278.955.926,00	320.190.993.983,00	325.068.708.599,00	DINAS PENDIDIKAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	DINAS PENDIDIKAN	
3	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 92 Indeks Indeks	89 92 Indeks Indeks	311.278.955.926,00	320.190.993.983,00	325.068.708.599,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	68,35%	68,35%	96.538.118.870,00	107.787.044.730,00	110.290.232.244,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	17 sekolah	17 sekolah	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
6	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,06%	0,06%	170.000.000,00	233.560.000,00	167.681.201,00	DINAS PENDIDIKAN
7	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan NonFormal	8%	8%	83.450.000,00	199.450.000,00	122.930.793,00	DINAS PENDIDIKAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	105.087.695.124,00	95.452.608.299,00	95.342.937.961,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	50.746.836.594,00	66.952.341.333,00	72.749.435.871,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	100%	100%	719.939.800,00	719.939.800,00	863.846.480,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman	68 95/66 % %	95/66 68 % %	215.700.000,00	215.700.000,00	220.748.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							memenuhi persyaratan						
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per. 1.000 balita	9,6 rasio	9,6 rasio	520.000.000,00	520.000.000,00	563.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	50.116.539.046,00	51.506.249.648,00	53.135.392.581,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar/Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	95/95/93 %/%%/%%	95/95/93 %/%%/%%	283.940.000,00	784.782.560,00	1.018.540.640,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
15	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	9.553.384.667,00	9.906.082.782,00	9.631.490.522,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51.61 %	56%	16.422.140.000,00	17.085.489.800,00	5.344.499.962,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
17	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	68706%	68708%	15.790.588.183,00	1.100.000.000,00	992.601.998,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
18	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rurnah tinggal bersanitasi	75.08 %	75.58 %	4.528.158.000,00	4.619.118.404,00	4.569.978.189,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
19	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)	64%	64%	3.730.085.481,00	6.000.000.000,00	11.107.975.853,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
20	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	66%	66%	250.000.000,00	1.396.000.000,00	2.196.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
21	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	27%	27%	1.125.000.000,00	2.158.000.000,00	2.608.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
22	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	66%	68%	72.900.793.093,00	56.426.744.414,00	28.083.721.417,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
23	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
24	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	78%	74%	500.000.000,00	489.059.485,00	307.659.535,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.304.408.865,00	9.499.228.164,00	11.006.702.849,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.304.408.865,00	9.499.228.164,00	11.006.702.849,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
25	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Indeks	89 Indeks	4.295.837.435,00	4.290.656.734,00	4.203.018.219,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
26	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
27	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
28	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	60 Persen	60 Persen	300.000.000,00	120.000.000,00	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
29	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	98,7 Persen	98,7 Persen	3.708.571.430,00	5.088.571.430,00	6.803.684.630,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			570.000.000,00	570.000.000,00	568.561.375,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			570.000.000,00	570.000.000,00	568.561.375,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
30	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dental Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	1 Kasus	1 Kasus	210.000.000,00	210.000.000,00	208.561.375,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
31	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	1,30 Pensen	1,30 Pensen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
32	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang terselesaikan, selaras dan terimplementasikan Persentase capaian sasaran strategis Satpol PP Persentase employee engagement ASN Satpol PP yang "Sangat Engaged"	100 13 86 % % %	100 86 13 % % %	11.513.427.399,00	13.444.576.829,00	13.384.041.404,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda Kab. Karo dan Peraturan Bupati Karo Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	66,80 77,15 84,03 % % %	77,15 66,80 84,03 % % %	830.193.150,00	1.144.540.800,00	1.117.189.286,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
34	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	54 89,94 % %	54 89,94 % %	3.093.982.750,00	3.116.582.750,00	3.116.582.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
35	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	92 Indeks	20%	5.351.907.204,00	5.610.688.947,00	5.466.705.355,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
36	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	0,56 Indeks	20%	910.047.100,00	908.105.140,00	5.213.702.797,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
37	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 undefined % undefined	undefined 100 undefined %	3.590.047.575,00	4.056.085.315,00	4.044.170.454,00	DINAS SOSIAL
	1					NON URUSAN			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
38	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	3.590.047.575,00	4.056.085.315,00	4.044.170.454,00	DINAS SOSIAL
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	DINAS SOSIAL	
39	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	3.590.047.575,00	4.056.085.315,00	4.044.170.454,00	DINAS SOSIAL
40	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja Kabupaten/Kota sosial masyarakat Kewenangan kabupaten /Kota	90 Orang	90 Orang	190.000.000,00	255.000.000,00	170.837.601,00	DINAS SOSIAL
41	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	65 Orang	65 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	50	DINAS SOSIAL
42	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	61,54%	61,54%	255.689.837,00	449.057.837,00	426.075.952,00	DINAS SOSIAL
43	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	97,66%	97,66%	170.000.000,00	167.000.000,00	117.500.473,00	DINAS SOSIAL
44	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	135.000.000,00	135.000.000,00	119.332.116,00	DINAS SOSIAL
45	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	380.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
46	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	4.214.672.149,00	4.507.242.394,00	4.210.275.313,00	DINAS KETENAGAKERJAAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
													KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					NON URUSAN			6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
47	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	4.214.672.149,00	4.507.242.394,00	4.210.275.313,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
48	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	4.214.672.149,00	4.507.242.394,00	4.210.275.313,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
49	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih undefined	20 undefined % undefined	20 undefined % undefined	400.000.000,00	800.000.000,00	777.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
50	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase penempatan tenaga kerja	70%	70%	50.000.000,00	49.754.000,00	19.058.081,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
51	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	120.000.000,00	119.260.000,00	63.218.257,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.553.950.258,00	2.170.094.058,00	1.989.399.945,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
52	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi yang patuh	25 koperasi	25 koperasi	100.000.000,00	99.580.000,00	33.601.055,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
53	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	koperasi aktif	64,84%	64,84%	878.950.258,00	1.496.894.858,00	1.360.979.359,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
54	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang meningkat pendapatannya	21%	21%	180.000.000,00	179.949.000,00	334.906.562,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
55	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase umkm yang bermitra Persentase umkm yang bermitra	0,432 35,65 %	0,432 35,65 %	145.000.000,00	144.583.800,00	94.650.663,00	DINAS KETENAGAKERJAAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
								%	%				KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
56	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas	0,576 34,78 % %	34,78 0,576 % %	250.000.000,00	249.086.400,00	165.262.306,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
57	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2					NON URUSAN				10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
58	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
59	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	96%	96%	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
60	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender	96,5 96,5 % %	96,5 96,5 % %	162.017.095,00	160.517.095,00	86.027.457,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
61	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 100 % %	100 100 % %	70.000.000,00	69.250.000,00	56.287.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
62	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,01%	0,01%	60.000.000,00	120.000.000,00	58.903.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
63	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio KDRT	0,01%	0,01%	247.777.115,00	245.827.115,00	335.894.603,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
64	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT	0,01%	0,01%	111.502.135,00	110.902.135,00	30.599.502,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.998.592.000,00	3.731.781.000,00	3.663.885.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
65	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
66	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB	64/8/69,81 %	64/8/69,81 %	459.000.000,00	297.750.000,00	286.254.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
67	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun	12,98 1,35 % %	12,98 1,35 % %	2.941.092.000,00	2.263.671.000,00	2.251.671.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
68	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	52,26 52,26 % %	52,26 52,26 % %	1.477.500.000,00	1.099.360.000,00	1.125.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.364.921.791,00	7.358.314.909,00	7.116.919.948,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			7.364.921.791,00	7.358.314.909,00	7.116.919.948,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
69	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	6.486.090.791,00	6.519.483.909,00	6.423.977.921,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
70	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	4 Unit	20%	200.000.000,00	150.000.000,00	137.674.466,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
71	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	20 Persen	20 Persen	498.831.000,00	508.831.000,00	417.830.906,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
72	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	-	1 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.881.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
73	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT)	100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	130.000.000,00	97.555.055,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.615.105.000,00	2.615.105.000,00	2.496.527.076,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.615.105.000,00	2.615.105.000,00	2.496.527.076,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
74	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	-	74,23` %	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	1.217.390.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
75	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	94,38 Persen	100 Persen	1.245.105.000,00	1.245.105.000,00	1.134.582.924,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
76	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	20 Usaha	20 Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	144.554.152,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					NON URUSAN				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
78	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
79	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					NON URUSAN				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
80	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
81	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2				NON URUSAN				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
82	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
83	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2				NON URUSAN				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
84	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
85	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
86	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.660.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
87	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,88 Indeks	68,88 Indeks	710.000.000,00	710.000.000,00	529.978.215,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
88	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pengelolaan RTH	1 Lokasi	1 Lokasi	18.998.077,00	18.998.077,00	160.641.062,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
89	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
90	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,	100%	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	21.192.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
91	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
92	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup	ada ada	ada ada	100.000.000,00	100.000.000,00	71.008.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
93	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Hidup	100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	42.434.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
94	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	86 Persen	86 Persen	16.181.302.618,00	14.181.302.618,00	14.630.615.160,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
95	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.000.765.123,00	4.593.176.841,00	4.611.046.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2				NON URUSAN				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
96	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.000.765.123,00	4.593.176.841,00	4.611.046.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
97	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.000.765.123,00	4.593.176.841,00	4.611.046.690,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
98	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100/70 %	100/70 %	787.660.409,00	782.663.209,00	707.691.519,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
99	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%)	100 / 100 %	100 / 100 %	99.747.070,00	99.747.070,00	75.187.880,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
100	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah Sudah/Belum	Sudah Sudah/Belum	97.440.120,00	97.440.120,00	49.279.140,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
101	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada	54.688.680,00	54.688.680,00	54.538.680,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
102	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.636.982.000,00	4.756.231.579,00	4.872.308.717,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
103	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	5.187.485.262,00	5.181.948.602,00	3.316.642.354,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
104	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	9 Lembaga	9 Lembaga	647.982.905,00	1.001.547.905,00	935.418.687,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	DINAS PERHUBUNGAN
		2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	DINAS PERHUBUNGAN
105	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/Skor Nilai AKIP	72/63 Indeks/B	72/63 Indeks/B	17.935.869.573,00	7.873.732.484,00	7.760.915.943,00	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
106	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	97/0,77 Rasio/Indeks	97/0,77 Rasio/Indeks	4.902.186.691,00	15.123.979.724,00	15.160.123.205,00	DINAS PERHUBUNGAN
107	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	12.556.736,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.427.691.879,00	9.656.238.480,00	9.087.111.473,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.772.691.879,00	8.948.781.395,00	8.652.481.875,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
108	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.207.764.674,00	5.735.886.190,00	5.630.427.005,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	2,8 Indeks	2,8 Indeks	1.067.666.761,00	1.065.634.761,00	905.170.866,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
110	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-	-	1.497.260.444,00	2.147.260.444,00	2.116.884.004,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				550.000.000,00	603.755.085,00	378.077.598,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
111	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	2,8 Indeks	2,8 Indeks	550.000.000,00	603.755.085,00	378.077.598,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
112	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
113	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	87 Indeks	5.301.221.694,00	4.633.958.311,00	4.398.652.186,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
114	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	200.000.000,00	160.027.000,00	134.382.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
115	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	97 investor	97 investor	500.000.000,00	305.553.000,00	241.414.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
116	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan	2100 izin	2100 izin	374.000.000,00	357.950.000,00	240.014.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
117	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN	97 investor	97 investor	798.985.000,00	249.420.000,00	165.591.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
118	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	2100 izin	2100 izin	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.475.750.000,00	5.067.750.000,00	4.828.766.213,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				2.525.750.000,00	3.852.750.000,00	2.928.581.183,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
119	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	50%	50%	300.000.000,00	1.127.000.000,00	515.550.190,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
													SERTA PARIWISATA
120	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	20 cabang olahraga	20 cabang olahraga	1.770.000.000,00	2.270.000.000,00	2.005.233.652,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
121	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	65%	65%	410.000.000,00	410.000.000,00	362.047.341,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
122	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	7.613.737.155,00	7.789.027.836,00	7.608.327.136,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				950.000.000,00	1.215.000.000,00	1.900.185.030,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
123	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	30 karya budaya	30 karya budaya	250.000.000,00	450.000.000,00	815.730.673,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
124	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 kali	12 kali	150.000.000,00	215.000.000,00	541.423.357,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
125	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22 Cagar Budaya	22 Cagar Budaya	550.000.000,00	550.000.000,00	543.031.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.453.251.299,00	18.807.780.660,00	17.279.587.675,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				19.453.251.299,00	18.807.780.660,00	17.279.587.675,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
126	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	7.613.737.155,00	7.789.027.836,00	7.608.327.136,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
127	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1204500 orang	1204500 orang	3.900.000.000,00	4.490.934.000,00	5.476.904.316,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
128	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1204500 orang	1204500 orang	5.855.264.144,00	4.055.264.144,00	2.838.829.128,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
129	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi	185 orang	185 orang	2.130.000.000,00	2.518.304.680,00	1.401.277.095,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
130	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.702.574.310,00	4.765.476.950,00	4.699.347.332,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2					NON URUSAN				5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
131	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.702.574.310,00	4.765.476.950,00	4.699.347.332,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
132	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.702.574.310,00	4.765.476.950,00	4.699.347.332,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
133	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	25.26 Indeks	25.26 Indeks	388.974.830,00	10.683.974.830,00	10.683.599.595,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				178.602.690,00	177.610.690,00	106.399.265,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
134	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola arsip secara baku Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	86 95.85 %	95.85 86 %	178.602.690,00	177.610.690,00	106.399.265,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	DINAS PERTANIAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	DINAS PERTANIAN
135	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	86 Indeks	19.244.962.920,00	19.189.274.051,00	19.434.100.087,00	DINAS PERTANIAN
136	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas komoditi pertanian Produktivitas Komoditi Pertanian Persentase ketersediaan Sarana Pertanian	6,37 91,13 93,24 Persen Kuintal/ha Persen	93,24 91,13 6,37 Persen Kuintal/ha Persen	3.498.276.460,00	2.848.276.460,00	2.770.462.639,00	DINAS PERTANIAN
137	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi Pertanian Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	3 91,13 Persen Kw/ha	91,13 3 Kw/ha Persen	6.612.869.000,00	3.165.000.000,00	3.122.093.423,00	DINAS PERTANIAN
138	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah HPR yang divaksin	70 Persen	70 Persen	450.000.000,00	458.793.400,00	442.084.480,00	DINAS PERTANIAN
139	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman yang Dikendalikan OPT nya Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulangan OPT	1,83 23 undefined Persen	23 1,83 undefined Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	196.424.796,00	DINAS PERTANIAN
140	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	80 Rekomendasi	80 Rekomendasi	0	0	0	DINAS PERTANIAN
141	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	7,45 Persen	7,45 Persen	400.000.000,00	799.715.920,00	1.091.072.059,00	DINAS PERTANIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.770.958.282,00	14.845.662.827,00	14.217.435.206,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
142	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-	-	50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.066.856.282,00	13.753.622.827,00	13.373.688.947,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
143	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik	52,49%	52,49%	2.880.000.000,00	2.877.537.000,00	3.055.832.306,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
144	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor	6749 miliar	6749 miliar	450.000.000,00	445.269.000,00	315.104.844,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
145	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang	100%	100%	106.000.000,00	104.467.860,00	59.412.614,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
146	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 indeks	92 indeks	9.630.856.282,00	10.326.348.967,00	9.943.339.183,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.654.102.000,00	1.042.540.000,00	816.722.601,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
147	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase pertumbuhan industri/ikm	4,03%	4,03%	2.504.102.000,00	895.590.000,00	741.783.758,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
148	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase ikm yang masuk kedalam sistem informasi industri nasional	100	100	150.000.000,00	146.950.000,00	74.938.843,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	SEKRETARIAT DAERAH
149	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Indeks	83 Indeks	31.527.596.824,00	32.137.656.562,00	35.290.927.768,00	SEKRETARIAT DAERAH
150	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.332.074.435,00	1.332.074.435,00	992.412.791,00	SEKRETARIAT DAERAH
151	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan jumlah Permohonan tender Laporan TPID	220 7,75 Paket Nilai	220 7,75 Paket Nilai	1.247.162.030,00	1.247.162.030,00	1.024.052.815,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
152	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	31.676.387.054,00	33.745.543.916,00	35.897.820.116,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
153	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada Ada/ Tidak	Ada Ada/ Tidak	29.674.891.150,00	29.000.975.870,00	16.031.033.366,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01				PERENCANAAN				8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
154	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
														PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5						NON URUSAN				9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
155	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01					PERENCANAAN				8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
156	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5						NON URUSAN				9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
157	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01					PERENCANAAN				8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
158	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
159	5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100%	100%	1.687.371.022,00	1.574.838.777,00	1.052.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
160	5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.304.847.611,00	1.235.844.251,00	828.135.317,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
													PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			538.297.402,00	1.147.610.413,00	803.113.913,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
161	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah	3,75 Indeks	3,75 Indeks	538.297.402,00	1.147.610.413,00	803.113.913,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02				KEUANGAN				299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
162	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	5.180.756.299,00	5.722.743.287,00	5.507.334.635,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
163	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	292.908.007.502,00	294.815.695.622,00	291.253.496.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
164	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	918.961.369,00	908.950.529,00	574.474.497,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02				KEUANGAN				11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
165	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 Indeks	83 Indeks	7.684.846.343,00	7.254.649.589,00	7.050.593.612,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
166	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	63705471000 Rp	63705471000 Rp	3.833.071.875,00	4.451.196.875,00	4.058.289.142,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.058.482.441,00	7.107.098.224,00	7.094.008.419,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03				KEPEGAWAIAN				6.313.482.441,00	6.362.098.224,00	6.416.901.219,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
167	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks	89 Indeks	4.707.154.876,00	4.774.940.659,00	4.766.577.354,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
168	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,dan Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	36 dan 323 jabatan	36 dan 323 jabatan	1.606.327.565,00	1.587.157.565,00	1.650.323.865,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				745.000.000,00	745.000.000,00	677.107.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
169	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	12,26 15 15/12,26 % % %/%	15 12,26 15/12,26 % % %/%	745.000.000,00	745.000.000,00	677.107.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
170	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6					NON URUSAN			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
171	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
172	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6					NON URUSAN			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
173	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	INSPEKTORAT DAERAH	
174	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	INSPEKTORAT DAERAH
175	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan / Persentase pelanggaran pegawai	92/0 % /%	92/0 % /%	3.492.063.001,00	1.569.237.100,00	837.625.060,00	INSPEKTORAT DAERAH
176	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan/Persentase pelanggaran pegawai/	92/0 %/%	92/0 %/%	872.589.413,00	505.284.000,00	259.563.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
177	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	6.570.124.232,00	6.863.624.406,00	6.824.633.486,00	KECAMATAN KABANJAHE
178	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	47.124.000,00	47.124.000,00	33.615.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
179	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	-	1 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
180	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan	7.100.000,00	4.066.840,00	2.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
181	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	2 Urusan	2 Urusan	28.629.750,00	28.629.750,00	25.779.150,00	KECAMATAN KABANJAHE
182	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi	8 Pemerintahan Desa	8 Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN KABANJAHE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	-	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
185	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
186	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7	01				KECAMATAN			10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	KECAMATAN KABANJAHE	
187	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	-	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	01				KECAMATAN			8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI	
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	92 Indeks	92 89,20 Indeks Indeks	5.501.204.288,00	5.540.176.685,00	5.488.654.597,00	KECAMATAN BERASTAGI
189	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89,20 Indeks	114.933.010,00	112.419.010,00	88.547.045,00	KECAMATAN BERASTAGI
190	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertipan Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan	2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan	100 persen	13.944.819,00	13.944.819,00	8.820.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
191	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	2 Urusan	100 2 persen Urusan	63.197.450,00	63.197.450,00	60.322.250,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7	01				KECAMATAN			8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI	
192	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat	19 Kegiatan	19 4 Kegiatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	KECAMATAN BERASTAGI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
							di Tingkat Desa dan Kelurahan		Kelurahan				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	01				KECAMATAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
193	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	4 19 Kelurahan Kegiatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	01				KECAMATAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
194	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	4 19 Kelurahan Kegiatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7	01				KECAMATAN				8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	KECAMATAN BERASTAGI
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 Kegiatan	4 19 Kelurahan Kegiatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7	01				KECAMATAN				2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	KECAMATAN BARUSJAHE
196	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah	92 Indeks	100%	2.751.728.449,00	2.729.957.372,00	2.704.237.837,00	KECAMATAN BARUSJAHE
197	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM	92 Indeks	3,56 Indeks	53.732.830,00	53.704.700,00	45.198.900,00	KECAMATAN BARUSJAHE
198	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	1 kegiatan	80%	7.533.950,00	7.533.950,00	5.146.950,00	KECAMATAN BARUSJAHE
199	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangasaan	1 Urusan	70%	36.509.855,00	36.732.685,00	29.743.925,00	KECAMATAN BARUSJAHE
200	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-Rata Capaian Peningkatan Kapasitas Apartur Desa dan Fasilitasi Tata Kelola Desa	19 Pemerintahan Desa	75%	11.004.950,00	11.004.950,00	3.282.950,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7	01				KECAMATAN				3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	KECAMATAN TIGA PANAH
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	92 Indeks	100%	2.849.300.465,00	2.813.649.821,00	2.772.517.841,00	KECAMATAN TIGA PANAH
202	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 indeks	128.924.000,00	128.924.000,00	102.757.520,00	KECAMATAN TIGA PANAH
203	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	10 Kegiatan	100%	15.205.800,00	15.205.800,00	7.554.060,00	KECAMATAN TIGA PANAH
204	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	90%	100%	16.907.000,00	16.907.000,00	10.968.200,00	KECAMATAN TIGA PANAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
205	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	100%	67.699.680,00	67.699.680,00	54.913.680,00	KECAMATAN TIGA PANAH
206	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	29 Desa	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	9.010.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	KECAMATAN MEREK
	7	01				KECAMATAN				3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	KECAMATAN MEREK
207	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	laporan bulan	laporan bulan	2.939.816.676,00	2.861.904.110,00	2.818.858.640,00	KECAMATAN MEREK
208	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	kegiatan Dokumen	kegiatan Dokumen	99.050.000,00	99.050.000,00	77.998.000,00	KECAMATAN MEREK
209	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	perda Kegiatan	perda Kegiatan	15.350.000,00	15.350.000,00	3.720.000,00	KECAMATAN MEREK
210	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan umum	urusan Laporan	urusan Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.464.000,00	KECAMATAN MEREK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	KECAMATAN MUNTE
	7	01				KECAMATAN				2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	KECAMATAN MUNTE
211	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat	84,50 87 92 Indeks indeks Indeks	84,50 87 92 Indeks indeks Indeks	2.409.720.898,00	2.251.821.532,00	2.214.468.373,00	KECAMATAN MUNTE
212	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Naman Teran	84 92 Indeks Indeks	92 84 Indeks Indeks	111.000.000,00	111.000.000,00	80.880.600,00	KECAMATAN MUNTE
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	16.150.000,00	16.150.000,00	11.342.400,00	KECAMATAN MUNTE
214	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	1 2/2/2 Kegiatan Perda/Perkada/Kegiatan	2/2/2 1 Perda/Perkada/Kegiatan Kegiatan	18.684.000,00	18.684.000,00	13.160.800,00	KECAMATAN MUNTE
215	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	1 1 Urusan Urusan	1 1 Urusan Urusan	41.315.713,00	41.315.713,00	30.774.570,00	KECAMATAN MUNTE
216	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi	22 22 Desa Pemerintahan Desa	22 22 Desa Pemerintahan Desa	10.150.000,00	10.150.000,00	7.134.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR
	7	01				KECAMATAN				3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR
217	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
218	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
220	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
221	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
222	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
223	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
224	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
225	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 92 Indeks Indeks	92 92 Indeks Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
226	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 92 Indeks Indeks	92 92 Indeks Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
227	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 92 Indeks Indeks	92 92 Indeks Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					NON URUSAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
228	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 92 Indeks Indeks	92 92 Indeks Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
	7	01				KECAMATAN			3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	KECAMATAN JUHAR	
229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	KECAMATAN JUHAR
230	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Indeks	87 Indeks	100.999.430,00	100.999.430,00	74.719.430,00	KECAMATAN JUHAR
231	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	3.235.730,00	KECAMATAN JUHAR
232	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	1 Urusan	1 Urusan	33.983.730,00	33.983.730,00	25.983.730,00	KECAMATAN JUHAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	01				KECAMATAN				3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	2.666.597.182,00	2.650.751.417,00	2.628.754.161,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
234	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	86 Indeks	79.883.420,00	79.883.420,00	51.128.700,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
235	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan	2/2/2 Perda/Perkada/Kegiatan	20.600.000,00	19.387.360,00	16.787.360,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
236	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan	2 Urusan	2 Urusan	44.569.750,00	44.569.750,00	39.369.750,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7	01				KECAMATAN				3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	19 kegiatan	19 kegiatan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	KECAMATAN LAU BALENG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	7	01				KECAMATAN			2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	KECAMATAN LAU BALENG	
238	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	92 Indeks	100%	2.283.367.083,00	2.303.045.877,00	2.268.935.572,00	KECAMATAN LAU BALENG
239	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	69.935.130,00	69.935.130,00	55.343.650,00	KECAMATAN LAU BALENG
240	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	1 Kegiatan	100%	20.520.000,00	20.520.000,00	9.565.700,00	KECAMATAN LAU BALENG
241	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2/2/3 Perda/Perkada/Kegiat	100%	8.953.300,00	8.953.300,00	6.373.300,00	KECAMATAN LAU BALENG
242	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Urusan	100%	38.249.210,00	38.249.210,00	35.513.210,00	KECAMATAN LAU BALENG
243	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	15 Pemerintahan Desa	100%	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	KECAMATAN MARDINDING
	7	01				KECAMATAN				2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	KECAMATAN MARDINDING
244	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	92 Indeks	100% Persen	2.132.902.337,00	2.198.875.365,00	2.156.023.528,00	KECAMATAN MARDINDING
245	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	95 Indeks	100.047.280,00	100.047.280,00	84.358.840,00	KECAMATAN MARDINDING
246	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2/2/3 Perda/Perkada/Kegia	2/2/3 Perda/Perkada/Kegia	4.800.000,00	4.800.000,00	3.360.000,00	KECAMATAN MARDINDING
247	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Urusan	1 Urusan	41.575.700,00	41.575.700,00	34.362.560,00	KECAMATAN MARDINDING
248	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	12 Desa	12 Desa	2.720.000,00	2.720.000,00	1.840.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	KECAMATAN PAYUNG
	7	01				KECAMATAN				2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	KECAMATAN PAYUNG
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	-	100%	2.060.647.373,00	1.973.964.033,00	1.968.199.889,00	KECAMATAN PAYUNG
250	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ingkat indeks kepuasan masyarakat -	-	84,3 indeks	51.399.940,00	51.399.940,00	46.210.450,00	KECAMATAN PAYUNG
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	1 kegiatan	100%	23.987.100,00	23.987.100,00	0	KECAMATAN PAYUNG
252	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	38 indeks	100%	11.980.000,00	11.980.000,00	0	KECAMATAN PAYUNG
253	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan -	2,75 indeks	100%	20.882.304,00	20.882.304,00	19.420.704,00	KECAMATAN PAYUNG
254	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	2,75 indeks	100%	8.000.000,00	8.000.000,00	5.100.000,00	KECAMATAN PAYUNG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7	01				KECAMATAN			3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
255	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.125.342.829,00	2.990.737.400,00	2.941.629.256,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
256	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	106.600.000,00	106.600.000,00	84.622.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
257	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada Jumlah Kegiatan Dalam Upaya N/A % Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2/2/3 N/A % Perda/Perkada/Kegiat	N/A 2/2/3 Perda/Perkada/Kegiat %	17.000.000,00	17.000.000,00	2.903.600,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
258	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	1 1 2,75 Laporan Urusan Indeks	1 2,75 1 Urusan Indeks Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	51.881.120,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
259	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi	17 Pemerintahan Desa	17 Pemerintahan Desa	0	0	0	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7	01				KECAMATAN			2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	KECAMATAN KUTABULUH	
260	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	92 Indeks	100%	2.430.256.121,00	2.250.963.542,00	2.208.668.034,00	KECAMATAN KUTABULUH
261	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	94,5 Indeks	132.365.900,00	132.365.900,00	101.606.900,00	KECAMATAN KUTABULUH
262	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	2 Kegiatan	100%	7.570.000,00	7.570.000,00	5.170.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
263	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2 Perda dan Perkada	100%	8.140.000,00	8.140.000,00	5.930.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
264	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Urusan	100%	40.834.700,00	40.834.700,00	38.233.632,00	KECAMATAN KUTABULUH
265	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	16 Pemerintah Desa	100%	12.370.000,00	12.370.000,00	9.010.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7	01				KECAMATAN			2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
266	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat	92 Indeks	100%	2.044.337.783,00	2.030.898.565,00	2.007.584.045,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
267	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	42.437.600,00	42.437.600,00	34.098.200,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
268	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	5 kegiatan	100%	14.979.600,00	14.979.600,00	5.095.800,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT

PERUBAHAN

RKPD KABUPATEN KARO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
269	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Urusan	100%	24.275.707,00	24.275.707,00	24.201.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	KECAMATAN MERDEKA
	7	01				KECAMATAN				2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	KECAMATAN MERDEKA
270	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	92 Indeks	2.313.408.462,00	2.200.270.141,00	2.172.985.300,00	KECAMATAN MERDEKA
271	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	73.991.160,00	73.991.160,00	57.296.250,00	KECAMATAN MERDEKA
272	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	6 kegiatan	6 kegiatan	19.082.900,00	19.082.900,00	17.260.080,00	KECAMATAN MERDEKA
273	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	2/2/6 Perda/Perkada/Kegiatan	2/2/6 Perda/Perkada/Kegiatan	16.331.030,00	16.331.030,00	11.525.824,00	KECAMATAN MERDEKA
274	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan	1 Urusan	1 Urusan	37.354.456,00	37.354.456,00	32.541.232,00	KECAMATAN MERDEKA
275	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	9 Pemerintahan Desa	9 Pemerintahan Desa	4.999.000,00	4.999.000,00	3.499.300,00	KECAMATAN MERDEKA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7	01				KECAMATAN				2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	KECAMATAN NAMANTERAN
276	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)	89,91 indeks	89,91 indeks	2.341.439.579,00	2.531.631.636,00	2.496.305.212,00	KECAMATAN NAMANTERAN
277	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	82.620.000,00	82.620.000,00	57.460.510,00	KECAMATAN NAMANTERAN
278	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	11.600.000,00	11.600.000,00	10.680.000,00	KECAMATAN NAMANTERAN
279	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	1 urusan	1 urusan	55.318.259,00	55.318.259,00	55.318.259,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7	01				KECAMATAN				2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	KECAMATAN TIGANDERKET
280	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan	92 Indeks	100%	2.617.692.825,00	2.535.529.683,00	2.501.637.883,00	KECAMATAN TIGANDERKET
281	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Indeks	3.35 indeks	60.680.000,00	60.680.000,00	53.329.400,00	KECAMATAN TIGANDERKET
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan	2 Kegiatan	100%	30.920.000,00	30.920.000,00	22.624.400,00	KECAMATAN TIGANDERKET
283	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2/2/1 Perda/Perkada/Kegiat	100%	19.587.000,00	19.587.000,00	15.675.800,00	KECAMATAN TIGANDERKET
284	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Urusan	100%	58.918.000,00	58.918.000,00	53.335.600,00	KECAMATAN TIGANDERKET
285	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan	-	100%	48.151.000,00	48.151.000,00	42.272.400,00	KECAMATAN TIGANDERKET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
286	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Indeks	92 Indeks	4.585.000.927,00	4.919.649.860,00	4.939.939.854,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
287	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	1.152.140.215,00	1.148.651.215,00	964.419.325,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
288	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Pembinaan Partai Politik	11 Parpol	11 Parpol	1.103.296.437,00	1.103.296.437,00	1.088.748.437,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
289	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	32.661.333,00	32.661.333,00	20.047.333,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
290	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi	42 Kegiatan	42 Kegiatan	2.192.444.580,00	2.176.834.580,00	1.293.890.765,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
291	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopimda dan Forkopincam, Persentase Pamantauan/Pengawasan Konflik di Masyarakat	11 Kegiatan	11 Kegiatan	322.450.773,00	321.340.773,00	244.239.789,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H		1.465.554.735.139,00	1.481.239.644.849,00	1.443.398.690.754,00	

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD ini juga dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karo pada tahun 2025.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo serta pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.

3. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
4. Kepala Bappedalitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
5. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/ Kegiatan Tahun 2025, berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025.
6. Kepala Bappedalitbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
7. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
8. Rencana kerja dan pendanaan pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2025 tertuang dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Karo dapat berjalan dengan baik dengan harapan terciptanya Kabupaten Karo yang Unggul dan Sejahtera.


BUPATI KARO,
ANTONTUS GINTING



LAMPIRAN I

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO SAMPAI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I
LAPORAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN KARO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (output))	Satuan	Target Renstra pada Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2022-2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
3				4	5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1			DINAS PENDIDIKAN				150.568.382.597.406		1.183.240.599.033		428.411.048.713		117.201.530.576		117.201.530.576		27,36%		1.300.442.129.609		86%	DISDIK
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	150.538.382.597.406	98	850.024.192.123	100	320.190.993.983	25	58.600.765.288	25	58.600.765.288	25,00	18,30	123,00	908.624.957.411	129,47	0,60	DISDIK
1	1	1	202	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Renstra, Renja, Lakip, LPKD Dinas Pendidikan	Dokumen	4	625.000.000		52.808.090	1	31.739.227		0	0		0,00	52.808.090	0,00	8,45			DISDIK
1	1	1	202	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2				1	31.739.227		0	0								DISDIK
1	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	usulan RKA, RKAP, dan DPPA yang terverifikasi Penatausahaan SP2D Laporan Keuangan	Dokumen	100	1.476.817.853.375		847.882.597.945	2	318.195.947.776	1	58.427.605.288	1	58.427.605.288	50,00	18,36	1,00	906.310.203.233	1,00	61,37	DISDIK
1	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				2765	317.802.587.776	2765	58.360.765.288	2.765	58.360.765.288	100,00	18,36					DISDIK
1	1	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen				500	393.360.000	125	66.840.000	125	66.840.000	100,00	16,99					DISDIK
1	1	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian yang terselesaikan jumlah evaluasi PNS yang di kelola	%	60	1.702.993.685		570.204.590	1 1	142.590.000		0	0	0,00	0,00	0,00	570.204.590	0,00	33,48		DISDIK
1	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket				100	75.000.000		0	0								DISDIK
1	1	1	205	5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen				1	67.590.000		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang				0	0,00		0	0								DISDIK
1	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Dinas Pendidikan yang terkelola	%	60	245.297.891.405.847		1.158.013.468	100%	533.896.980	25%	62.796.177	0	62.796.177	25,00	11,76	0,25	1.220.809.645	0,42	0,00	DISDIK
1	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				1	10.000.000	1	4.977.550	1	4.977.550	100,00	49,78					DISDIK
1	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				1	126.700.000	1	31.527.792	1	31.527.792	100,00	24,88					DISDIK
1	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket				1	60.000.000	1	9.996.360	1	9.996.360	100,00	16,66					DISDIK
1	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket				2	150.798.780	1	16.294.475	1	16.294.475	50,00	10,81					DISDIK
1	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen				0	0,00		0	0	-	0						DISDIK
1	1	1	206	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan				1	15.000.000		0	0	-	0						DISDIK
1	1	1	206	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan				30	171.398.200		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berkas RKBMd yang dilaporkan	dokumen	29	275.000.000		318.782.000	80,00%	350.000.000		0	0	0,00	-	0,00	318.782.000	0,00	115,92		DISDIK
1	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit				130	200.000.000		0	0								DISDIK
-	-	-	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit				12	150.000.000		0	0								DISDIK
1	1	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenaga Honor, Petugas Kebersihan dan Keamanan Dinas Pendidikan yang tersedia	orang	70	22.988.700.000		8.801.814.426	100%	689.980.000	25%	100.568.046	0	100.568.046	25,00	14,58	0,25	8.902.382.472	0,36	38,73	DISDIK
1	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan				24	73.800.000	11	16.523.046	11	16.523.046	45,83	22,39					DISDIK
1	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan				3	30.000.000		0	0	-	0						DISDIK
1	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan				12	586.180.000	3	84.045.000	3	84.045.000	25,00	14,34					DISDIK
1	1	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan	unit	224	521.300.000		330.706.265	100%	246.840.000	25%	9.795.777	0	9.795.777	25,00	3,97	0,25	340.502.042	0,11	65,32	DISDIK
1	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	unit				2	76.840.000	2	9.795.777	2	9.795.777	100,00	12,75					DISDIK
1	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit				0	0,00		0	0								DISDIK
1	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit				1	170.000.000		0	0	-	0						DISDIK
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan	%	7.433	468.957.283.335		322.659.083.174	%	107.787.044.730		0	0	0,00	0,00	0,00	322.659.083.174	0,00	68,80		DISDIK
1	1	2	201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 2. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 3. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	9.071	196.845.348.096		194.229.453.342	98%	59.905.787.000		0	0	0,00	0,00	0,00	194.229.453.342	0,00	98,67		DISDIK
1	1	2	201	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang				0	0,00		0	0		0,00						DISDIK
1	1	2	201	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang				4	967.830.000		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	2	201	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang				8	3.162.800.000		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	2	201	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang				6	700.000.000		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	2	201	6	Pembangunan Sarana Pasaran dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Pasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit				15	1.500.000.000		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	2	201	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sekolah/Berat	ruang				0	0,00		0	0		0						DISDIK
1	1	2	201	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang				4	598.967.650		0	0	-	0						DISDIK
1	1	2	201	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab sedang/ berat	Ruang				0	0,00		0	0		0						DISDIK
1	1	2	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang				0	0,00		0	0	-	0,00						DISDIK
1	1	2	201	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket				17	940.000.000		0	0	-	0						DISDIK
1	1	2	201	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket				0	0,00		0	0	-	0						DISDIK
1	1	2	201	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	satuan pendidikan				0	0,00		0	0		0						DISDIK
1	1	2	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan				0	0,00		0	0		0						DISDIK
1	1	2	201	24	Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik				0	0,00		0	0		0						DISDIK

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1	2	201	25	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		peserta didik		285	255.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		orang		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	201	27	Pengembangan karir peserta didik tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga kependidikan yang Mengembangkan karir keprofesionalitas yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Gaji		orang		300	399.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		satuan pendidikan		285	220.000.000			0	0							DISDK
1	1	2	201	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		satuan pendidikan		285	37.554.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		orang		285	320.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		ruang		21	6.393.900.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		orang		100	120.000.000											
1	1	2	201	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		konten digital		120	190.000.000											
1	1	2	201	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		orang		100	180.000.000											
1	1	2	201	38	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen		40	780.098.350			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	201	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		Orang		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	201	41	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		komunitas		10	100.000.000											
1	1	2	201	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi		satuan pendidikan		285	200.000.000											
1	1	2	201	45	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah buku teks dan non teks		buku		0	0,00			0	0							
1	1	2	201	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik		paket		19	1.931.000.000			0	0		0,00					
1	1	2	201	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		unit		6	900.000.000											
1	1	2	201	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		orang		100	180.000.000											
1	1	2	201	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar		satuan pendidikan		285	70.000.000			0	0							
1	1	2	201	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		ruang		4	1.338.191.000			0	0		0,00					
1	1	2	201	54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		peserta didik		600	485.000.000											
1	1	2	201	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang disediakan		paket		3	420.000.000											
1	1	2	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 2. Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 3. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	9,161	245.823.200.000	106.640.510.595	%	41.239.049.950	0	0	0,00	0,00	0,00	106.640.510.595	0,00	43,38		
1	1	2	202	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Dibangun		unit		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		ruang		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		ruang		2	682.310.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		ruang		9	1.704.250.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		ruang		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	202	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		ruang		3	1.629.260.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	12	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		ruang		4	800.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		ruang		13	5.232.670.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		ruang		0	0,00			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		ruang		3	535.390.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		ruang		4	757.330.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		unit		5	615.490.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		paket		10	500.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		paket		5	500.000.000			0	0							DISDK
1	1	2	202	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		paket						0	0							DISDK
1	1	2	202	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		peserta didik		620	475.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	34	Perengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia		paket		0	0,00			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		paket		0	0,00			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		peserta didik		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		satuan pendidikan		0	0,00			0	0							DISDK
1	1	2	202	38	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		peserta didik		1.200	710.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		orang		60	100.000.000			0	0							DISDK
1	1	2	202	40	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		orang		500	662.829.950			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		satuan pendidikan		69	200.000.000			0	0		0,00					DISDK
1	1	2	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS		satuan pendidikan		38	23.119.900.000			0	0		0					DISDK
1	1	2	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		orang		69	410.000.000			0	0		0					DISDK
1	1	2	202	44	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhabilitasi sedang/ berat		ruang		0	0,00			0	0		0,00					
1	1	2	202	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Orang		80	100.000.000			0	0							DISDK
1	1	2	202	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		konten		5	110.000.000											
1	1	2	202	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		orang		90	140.000.000											
1	1	2	202	51	Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang		Dokumen		69	1.099.340.000			0	0		0,00					DISDK

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum RSUD	Persen	100	50.000.000	100,00	49.999.150				-				100,00	49.999.150	1,00	100,00	RSUD		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	58														RSUD		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD	Persen	100	3.664.359.998	100,00	10.654.043.683	100	3.602.710.000		455.280.000	0	455.280.000	0,00	12,64	100,00	11.109.323.683	1,00	303,17	RSUD	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	120				428.400.000,00	-	0	-	0,00	0,00						RSUD	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60			60	3.174.310.000,00	10	455.280.000	10	455.280.000	16,67	14,34					RSUD	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD	Persen	100	55.271.141	100,00	110.588.843	100	55.271.141		-	0	-	0,00	0,00	100,00	110.588.843	1,00	200,08	RSUD	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	Unit	5				55.271.141,00	-	0	-	0,00	0,00						RSUD	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1					-	0	-	0,00	0,00						RSUD	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD	unit kerja	1	23.076.255.375	100,00	78.876.051.171		23.737.125.000		5.785.515.572	0	5.785.515.572	0,00	24,37	100,00	84.661.566.743	100,00	366,88	RSUD	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1				23.737.125.000,00	1,00	5.785.515.572	1	5.785.515.572	0,00	24,37					RSUD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelengkapan Sarana Rumah Sakit sesuai standar	Persen	90	6.414.957.182	85	4.548.322.759		784.782.560	-	0	-	0,00	0,00	85,00	4.548.322.759	0,94	70,90	RSUD	
						Persentase kelengkapan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	Persen	95		95				0	-	0,00		95,00					RSUD	
						Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum	Persen	93		85				0	-	0,00		85,00					RSUD	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persen	100	6.114.957.182	100,00	3.328.390.250		500.842.560		0	-	0,00	0,00	100,00	3.328.390.250	1,00	54,43	RSUD		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Non Medis yang sesuai standar																	RSUD	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat medis yang sesuai standar	Unit	11				500.842.560	-	0	-	0,00	0,00						RSUD	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan pada RSUD	Persen	100	300.000.000	100,00	1.219.932.509		283.940.000		0	-	0,00	0,00	100,00	1.219.932.509	1,00	406,64	RSUD		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat Bencana dan/ atau berpotensi Bencana sesuai standar	Dokumen	10															RSUD	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengolahan jaminan Kesehatan Masyarakat		700				283940000	-										RSUD	
-	-	-	-	-	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Indeks	83		471.607.201								0,00	471.607.201	0,00	0,00		RSUD	
-	-	-	-	-	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persen	100		471.607.201								0,00	471.607.201	0,00	0,00		RSUD	
-	-	-	-	-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif nakes non ASN	Orang/Bulan	20															RSUD	
1	3			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			389.790.037.244.775		408.438.104.984		99.180.494.885		3.256.465.661		3.256.465.661		3,28%		411.694.570.645		0,11		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	93.792.176.930	826,0	29.232.107.725	92	9.906.082.782		1.756.694.671	0	1.756.694.671	0,00	17,73	826,00	30.988.802.396	8,69	33,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terventifikasinya usulan RKAP, RKAP, DPA dan DPPA Terlaksananya penatausahaan SPKD Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen,Berkas dan Laporan Keuangan	60	34.248.068.430	24	19.089.356.178	12	7.005.670.783	3	1.506.988.391	3	1.506.988.391	25,00	21,51	27,00	20.596.344.569	0,45	60,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Bulan		1.540		742	6.743.017.533	159	1.485.958.391	159	1.485.958.391	21,43	22,04					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen		24		12	262.653.250	3	21.030.000	3	21.030.000	25,00	8,01					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian berupa usulan bekalnak pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami, kartu istri, tabungan asuransi pensiun, pengitaman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai	%	100	250.000.000		59.200.000	12	60.480.000		0	-	0,00	0,000	0,00	59.200.000	0,00	23,68		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stell		82		76	60.480.000		0	-	0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, terkumpul dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah yang meliputi, administrasi surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, pengumpulan, kearsifan, perlengkapan/perbekalan, dan rumah tangga Dinas Terkoordinasinya kegiatan pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor	%	100	6.917.508.500	24	3.634.821.378	12	1.117.579.779	3	29.078.428	3	29.078.428	25,00	2,60	27,00	3.663.899.806	0,27	52,97		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	001	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		6		3	13.999.345		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	206	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		84		42	363.504.385		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	Jenis		54		27	84.773.349		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis		4		2	30.398.700		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	Orang/bulan		1.649		600	624.904.000	50	29.078.428	50	29.078.428	8,33	4,65					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terancang dan terprosesnya pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas	%	100	3.020.000.000	3	574.182.600	1	30.000.000		0	-	0,00	0,000	3,00	574.182.600	0,03	19,01		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit		1					0	-	0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	207	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		0					0	-	0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2		1	30.000.000		0	-	0,00	0,000						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkoordinasinya kegiatan pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor	%	100	46.106.600.000	24	2.945.447.059	12	993.092.720	3	195.450.000	3	195.450.000	25,00	19,68	27,00	3.140.897.059	0,27	6,81		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	001	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon Internet air dan Listrik	Laporan		24		12	61.500.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		24		12	64.610.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	001	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Laporan		24		12	866.982.720	3	195.450.000	3	195.450.000	25,00	22,54						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	3	001	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah	%	100	3.250.000.000	36	2.929.100.510	32	699.259.500	7	25.177.852	7	25.177.852	21,88	3,60	43,00	2.954.278.362	0,43	90,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			30		15	49.270.000	6	12.910.827	6	12.910.827	40,00	26,20					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	001	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit			37		18	649.989.500	1	12.267.025	1	12.267.025	5,56	1,89					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	5.211,00	62.932.563.070	5.295	41.149.798.455	56	17.085.489.800		531.670.450	0	531.670.450	0,00	3,11	5.295,00	41.681.468.905	101,61	66,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	002	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1,00	800.000.000		0		0			0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	201	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit								0	-	0,00	0,000					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Saluran Irigasi yang dilakukan Rehabilitasi,Peningkatan dan Pemeliharaan pada tahun anggaran tersebut	KM	442,59	62.132.563.070	5.295,00	41.149.798.455	56	17.085.489.800		531.670.450	0	531.670.450	0,00	3,11	5.295,00	41.681.468.905	11,96	67,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	002	202	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Bendung Irigasi			2		1	1.500.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM			10	7.300.000.000		0	-	0,00	0,000							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	KM		84,00		8	4.929.489.800		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	002	202	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang dipelihara dan Jumlah Honorarium Non PNS Lainnya Petugas Lapangan Bidang Penguatan/Pekerja Saluran (Peksal)	KM		108,00		12	3.356.000.000	1	531.670.450	1	531.670.450	8,33	15,84					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum tersebut	%	68,7093	14.800.000.000	7.459,00	25.757.152.152	68,708	1.100.000.000		0	-	0,00	0,00	7.459,00	25.757.152.152	108,56	174,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	003	201		Pengelolaan dan Pengembangan akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memiliki akses Minum yang aman pada tahun anggaran tersebut	Unit Rumah	79.975	14.800.000.000	7.459,00	25.757.152.152	68,708	1.100.000.000		0	-	0,00	0,00	7.459,00	25.757.152.152	0,09	174,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	003	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen		4		1	100.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	003	201	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Optimalisasi SPAM	Liter/Detik			1	1.000.000.000		0	-	0,00	0,00							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	004			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penanganan Sampah	%	7586	2.400.000.000		0			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	004	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-DR/TPS di Daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran tersebut	Unit	1	2.400.000.000		0		0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	3	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersantiasi	%	76,58	12.850.000.000	7.464,00	13.029.579.749	75,58	4.619.118.404		0	-	0,00	0,00	7.464,00	13.029.579.749	97,47	101,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	005	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses santiasi yang layak pada tahun anggaran tersebut	SR	3750	12.850.000.000	7.464,00	13.029.579.749	75,58	4.619.118.404		0	-	0,00	0,00	7.464,00	13.029.579.749	1,99	101,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	005	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen				1	100.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	005	201	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peningkatan SDM terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok		15		6	109.795.404		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	005	201	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga		750		300	4.409.323.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak terumbat	%	65	22.939.937.995	637,0	31.972.230.020	64	6.000.000.000		273.951.040	0	273.951.040	0,00	4,57	637,00	32.246.181.060	9,80	140,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	006	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Saluran Drainase yang dilakukan pembangunan,peningkatan dan Pemeliharaan Yang Terhubung Ke pembuangan akhir pada tahun anggaran tersebut	M	5512755	22.939.937.995	637,0	31.972.230.020	64	6.000.000.000		273.951.040	0	273.951.040	0,00	4,57	637,00	32.246.181.060	0,00	140,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	006	201	01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Dokumen		6		2	300.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan	M		4.040		2000	2.500.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201	006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang Optimal	M		2.100		1000	1.500.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201	007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang baik	M		1.050		200	200.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	006	201	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	M		11.000		10000	1.500.000.000	1000	273.951.040	1.000	273.951.040	10,00	18,26					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%	65	8.575.105.449	615,0	18.713.136.789	62	1.396.000.000		0	-	0,00	0,00	615,00	18.713.136.789	9,46	218,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang dilakukan Pembangunan dan Rehabilitasi pada tahun anggaran tersebut	Unit/Dokumen	16	8.575.105.449	36	18.713.136.789	2	1.396.000.000		0	-	0,00	0,00	36,00	18.713.136.789	2,25	218,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	008	201	02	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemantauan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Unit/Dokumen		17		2	1.396.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	3.300.000.000	25	7.597.112.446	26	2.158.000.000		101.132.000	0	101.132.000	0,00	4,69	25,00	7.698.244.446	1,00	233,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	009	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Yang dilakukan Penataan dan Pembangunan di Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun anggaran tersebut	Kawasan	2	3.300.000.000	2,00	7.597.112.446	2	2.158.000.000		101.132.000	0	101.132.000	0,00	4,69	2,00	7.698.244.446	1,00	233,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	009	201	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan		2		2	2.158.000.000	1	101.132.000	1	101.132.000	50,00	4,69					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	009	201	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Kawasan		2				0	-	0,00	0,00							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	70	163.200.253.800.775	6.304,00	237.992.202.654	65	56.426.744.414		593.017.500	0	593.017.500	0,00	1,05	6.304,00	238.585.220.154	90,06	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	010	201		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Panjang Jalan dan jembatan Yang dilakukan pembangunan dan Peningkatan pada tahun anggaran tersebut	KM	1013	163.200.253.800.775	981,00	237.992.202.654	92	56.426.744.414		593.017.500	0	593.017.500	0,00	1,05	981,00	238.585.220.154	0,97	0,15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	010	201	05	Pembangunan Jalan	Jalan dibangun / ditingkatkan	KM		41		11	13.790.291.286		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1	3	010	201	08	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	KM		247		30	35.084.720.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan yang dilaporkan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian yang terverifikasi	Dokumen Lokasi	100	3.601.571.306	87	23.301.803.729	25	5.088.571.430		0	-	1,01	0,00	87,00	23.301.803.729	87,00	646,99	Perkim	
1	04	05	2.01	01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	10	200.000.000	0	0	1	150.000.000	0,00	-	0	-	2,01	0,00				Perkim	
1	04	05	2.01	02 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	13	3.601.571.306	42		20	4.858.571.430	0,00	-	0	-	7,69	1,660				Perkim	
1	04	05	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan	laporan	0	-	3		4	80.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000				Perkim	
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peraturan tanahnya diatas izin lokasi dihindangkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Kasus	1	200.000.000	0	249.810.140	4	210.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000	0,00	249.810.140	0	124,91	Perkim
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terinventarisasi Jumlah Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kasus	5	200.000.000	300	249.810.140	4	210.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000	300,00	249.810.140	6.000	124,91	Perkim
2	10	04	2.01	02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	berita acara	2	100.000.000	0		2	150.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000				Perkim	
2	10	04	2.01	05 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2	100.000.000	0		2	60.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000				Perkim	
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	TERLAKSANANYA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase	12,60	400.000.000	12	859.794.650	1	360.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000	12,00	859.794.650	95	214,95	Perkim
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Bupati/Walikota Tentang Penetapan Penerima Bantuan Tanah yang disusun Jumlah Berita Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Dokumen Laporan	12,60	400.000.000	12	859.794.650	1	360.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000	12,00	859.794.650	95	214,95	Perkim
2	10	05	2.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	400.000.000	12		1	360.000.000	0,00	-	0	-	0,00	0,000				Perkim	
01	05			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				66.475.968.372		46.051.224.123		17.705.700.379		3.146.401.986		3.146.401.986		17,77%		46.051.224.123	101,54	69,27	SATPOL-PP
01	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,00	Indeks	64.264.572.720	81,06	40.295.777.698	83,09	13.444.576.829		2.942.391.616		2.942.391.616		21,89		43.238.169.314		67,28	SATPOL-PP
01	05	01	2.02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi keuangan Satpol PP	2635	Dokumen	23.433.523.488	1484	12.556.582.990	498	7.051.399.858	173	1.157.205.479	173	1.157.205.479	34,74	16,41	1.657	13.713.788.469	62,88	58,52	SATPOL-PP
01	05	01	2.02	0001 Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2516	orang/ bulan	23.017.964.488	1448	12.146.262.990	486	6.929.239.858	170	1.128.705.479	170	1.128.705.479	34,98	16,29				SATPOL-PP	
01	05	01	2.02	0002 Pelaksanaan Pnatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pnatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	415.559.000	36	410.320.000	12	122.160.000	3	28.500.000	3	28.500.000	25,00	23,33				SATPOL-PP	
01	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Satpol PP	5	Paket	302.550.000	1	450.246.000		-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	450.246.000	20,00	148,82	SATPOL-PP	
1	05	01	2.04	0002 Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	302.550.000	1	450.246.000		-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Laporan Penyelenggaraan Administrai Umum Satpol PP	680	Paket	564.399.232	366	998.451.040	55	276.038.471	5	89.214.067	5	89.214.067	9,09	32,32	371	1.087.665.107	54,56	192,71	SATPOL-PP
1	05	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	77.650.000	5	93.562.250	2	34.684.700	1	20.640.000	1	20.640.000	50,00	59,51				SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	173.939.232	6	153.598.869	1	83.939.900	1	27.327.365	1	27.327.365	100,00	32,56				SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	4.000.000	5	116.750.879	1	36.094.984	1	8.750.904	1	8.750.904	100,00	24,24				SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	15.000.000	5	66.444.460	1	25.648.336	1	20.922.220	1	20.922.220	100,00	81,57				SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dokumen	3.000.000	-			-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!					SATPOL-PP	
1	05	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	Laporan	290.810.000	345	568.094.582	50	95.670.551	1	11.573.578	1	11.573.578	2,00	12,10				SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket penyelenggaraan pengadaan BMD penunjang urusan Satpol PP	52	Paket	1.185.000.000	60	113.776.561	5	12.078.500	-	-	-	-	0,00	-	60	113.776.561	115,38	9,60	SATPOL-PP
1	05	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	1.120.000.000	2			-		-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	unit	45.000.000	57	113.776.561	5	12.078.500	0	-	-	-	0,00	-				SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	10.000.000	1			-		-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	01	2.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	unit	10.000.000				-		-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP	180	Laporan	35.784.100.000	122	23.068.916.347	62	6.105.060.000	12	1.695.972.070	12	1.695.972.070	19,35	27,78	134	24.764.888.417	74,44	69,21	SATPOL-PP
1	05	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0	buah					-		-	-	0,00	0					SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	80.000.000	60	95.613.347	36	51.220.000	9	10.949.070	9	10.949.070	25,00	21,38				SATPOL-PP	
1	05	01	2.08	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	49.000.000	26	64.440.000	14	9.980.000		-	-	-	0,00	-				SATPOL-PP	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	SATPOL-PP	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1677	2.995.000.000	662	2.079.404.160		-		-		-	0,00	-	662	2.079.404.160	39,48	69,43	SATPOL-PP	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1675	unit	2.678.325.000	660					0	-	0,00	0,00					SATPOL-PP	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	unit	316.675.000	2					-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75,00	%	2.179.195.652	81,82	4.701.601.867	83,62	1.144.540.800	80,77	92.300.370	80,77	92.300.370	96,59	8,06	162,59	4.793.902.237	216,79	219,98	SATPOL-PP
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah	3698	1.994.695.652	2959	4.176.446.075	688	1.109.540.800	46	90.425.370	46	90.425.370	6,69	8,15	3005	4.266.871.445	81,26	213,91	SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	4	19.930.370	2	8.710.000	1	4.180.370	1	4.180.370	50,00	48,00				SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0006	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	0	Dokumen	-	4	28.555.370	4	108.024.000	1	8.120.000	1	8.120.000	25,00	7,52				SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	1700	Orang	166.437.500	1.952	312.414.700	200	26.290.000		-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen	166.437.500	5	70.975.000		-	-	-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan gangguan ketertaman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan Segah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan.	800	Laporan	332.875.000	598	3.017.863.885	158	250.000.000	30	46.875.000	30	46.875.000	18,99	18,75				SATPOL-PP	
1	05	02	2.01	0016	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum	1188	unit	1.328.945.652	396	726.706.750	324	716.516.800	14	31.250.000	14	31.250.000	4,32	4,36				SATPOL-PP	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	472	184.500.000	228	521.156.177	19	31.608.000	3	1.875.000	3	1.875.000	15,79	5,93	231	523.031.177	48,94	283,49	SATPOL-PP	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	38	Laporan	71.000.000	20	233.435.515	1	15.388.000	-	-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	79	Laporan	78.000.000	34	163.726.262	10	10.220.000	-	-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	355	Laporan	35.500.000	174	123.994.400	8	6.000.000	3	1.875.000	3	1.875.000	37,50	31,25				SATPOL-PP	
1	5	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	Laporan	-	2	3.999.615	2	3.392.000	0	-	0	-	0,00	-	2	3.999.615	#DIV/0!	#DIV/0!	SATPOL-PP
1	5	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0	Laporan	-	2	3.999.615	2	3.392.000	-	-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	65	%	32.200.000	41,18	1.053.844.558	47,06	3.116.582.750	41,17	111.710.000	41,17	111.710.000	87,48	3,58	82,35	1.165.554.558	126,69	3619,73	SATPOL-PP
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Bercun Kebakaran dalam Daerah/Kota	363	32.200.000	207	788.873.013	36	3.116.582.750	10	111.710.000	10	111.710.000	27,78	3,58	217	900.583.013	59,78	2796,84	SATPOL-PP	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	-		-		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!					SATPOL-PP	
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25	75.000.000	15	1.069.120.000	9	101.110.000	9	101.110.000	60,00	9,46				SATPOL-PP	
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				25	7.500.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	100,00	100,00				SATPOL-PP	
1	05	04	2.01	0006	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	5	Desa/ Kelurahan	-		-		-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!					SATPOL-PP	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	353	Unit	32.200.000	157	706.373.013	20	2.036.862.750	-	-	-	0,00	-					SATPOL-PP	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2844	-	1.545	264.971.545	-	-	0	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1545	264.971.545	54,32	#DIV/0!	SATPOL-PP	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	2844	Orang	-	1.545	264.971.545	-	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!					SATPOL-PP	
1	5				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		31.532.328.000		39.184.937.587		6.518.794.087		1.048.225.145		1.048.225.145	41,24	16,08%		40.233.162.732	83,16	127,59	BPBD	

3				4		5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	5	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	23.784.550.000	82,00	14.678.812.226	83,00	5.610.688.947	82,00*	1.048.225.145	82,00	1.048.225.145	82,00*	45,29	82,00*	15.727.037.371	86,32	66,12	BPBD
1	5	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang selesai dengan baik	%	100	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan ASN yang terpenuhi	%	100	15.583.900.020	60	10.838.162.305	100	4.170.017.029	25,00	938.748.579	25,00	938.748.579	25,00	22,51	65,00	11.776.910.884	65,00	75,57	BPBD
1	5	001	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	15.000.580.020	91	10.496.732.305	28	4.094.767.029	28	929.268.579	28,00	929.268.579	25,00	22,69					BPBD
1	5	001	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	583.320.000	36	341.430.000	12	75.250.000	3	9.480.000	3,00	9.480.000	25,00	12,60					BPBD
1	5	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	%	100	275.120.000	10,00	41.664.000		53.760.000	0,00		0,00	-	0,00	0,00	10,00	41.664.000	10,00	15,14	BPBD
1	5	001	2.05	0000	Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	335	225.120.000	62	41.664.000	64	53.760.000	0		0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	001	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan rutin administrasi umum kantor yang terpenuhi	%	100	2.695.280.000	40	1.485.699.305	100	348.201.318	21,43	18.415.165	21,43	18.415.165	21,43	5,29	44,29	1.504.114.470	44,29	55,81	BPBD
1	5	001	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	20.000.000	12	13.516.300	4	3.990.808	0	-	0,00	-	9,03	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	205	244.250.000	122	155.424.750	40	52.489.312	32	-	32,00	-	22,34	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	70	38.030.000	49	26.060.450	15	8.099.888	9	-	9,00	-	31,07	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	225.000.000	15	128.192.000	5	43.615.310	5	-	5,00	-	18,65	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4.500	27.000.000	1457	8.820.000	300	2.100.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	483.200.000	36	201.980.000	12	46.390.000	3	-	3,00	-	6,25	0,00					BPBD
1	5	001	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	60	1.657.800.000	36	951.705.805	12	191.516.000	3	18.415.165	3,00	18.415.165	6,25	9,62					BPBD
1	5	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	560.849.980	4	110.783.000	100	257.049.600	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	110.783.000	4,00	19,75	BPBD
1	5	001	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	33	134.856.600	0		0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	001	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	45	510.849.980	13	110.783.000	9	122.193.000			0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	001	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1	5	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan rutin jasa penunjang operasional kantor yang terpenuhi	%	100	2.933.900.000	40	1.479.551.853	100	502.544.000	25,00	83.195.151	25,00	83.195.151	25,00	16,55	45,00	1.562.747.004	45,00	53,27	BPBD
1	5	001	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	144.800.000	36	53.737.320	12	21.000.000	3	4.315.449	3,00	4.315.449	6,25	20,55					BPBD
1	5	001	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	2.789.100.000	36	1.425.814.533	12	481.544.000	3	78.879.702	3,00	78.879.702	25,00	16,38					BPBD
1	5	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%	100	1.726.500.000	33,33	722.951.763	100	279.117.000	16,67	7.866.250	16,67	7.866.250	16,67	2,82	36,66	730.818.013	36,66	42,33	BPBD
1	5	001	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	65	1.159.600.000	35	546.831.763	8	153.880.000	4	7.866.250	4,00	7.866.250	50,00	5,11					BPBD
1	5	001	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	66.900.000	40	26.435.000	10	7.100.000	2	-	2,00	-	20,00	0,00					BPBD
1	5	001	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	500.000.000	1	149.685.000	1	118.137.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana	Indeks	0,60	7.747.778.000	0,49	24.306.125.361	0,49	908.105.140	0,48*	-	0,48*	-	97,96	0,00	0,48*	24.306.125.361	80,00	316,30	BPBD
1	5	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	1.010.000.000	30,00	229.884.261	100	50.143.275	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	30,00	229.884.261	30,00	22,76	BPBD
1	5	003	2.01	0007	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Kota/Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana	Orang	4.600	810.000.000	1490	161.728.261	100	50.143.275	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	003	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legit paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	200.000.000	1	68.156.000													BPBD
1	5	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penyediaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	5.131.962.000	23,33	15.277.885.578	100	417.944.703	4,17	-	4,17	-	4,17	0,00	24,16	15.277.885.578	24,16	297,70	BPBD
1	5	003	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Dokumen	1	540.000.000															BPBD
1	5	003	2.02	0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bag Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	22	450.000.000	10	78.000.000	2	28.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	003	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	4.400	1.091.560.000	799	188.090.100	400	100.059.282	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	003	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	30	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	5	250.000.000	3	136.177.700	1	10.047.165	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD
1	5	003	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	75	150.402.000	30	48.002.370	50	50.000.976	0	-	0,00	-	0,00	0,00					BPBD

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	5	003	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana)sampai dengan di nyatakan sah/legal online lama dalam (satu) tahun.	Dokumen	3	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPK) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun.	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops)dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan, tempat tinggalnya. Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun.	Laporan	4	250.000.000	1	47.852.640	1	69.849.880	1	1,00	-	25,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Dokumen	1	150.000.000	0	0	1	159.987.400	0	0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah penanganan pasca bencana	Orang	1.200	1.200.000.000	217	382.382.555	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.02	007	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jenis	6	580.000.000	2	14.397.380.213	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	935.000.000	30,0	6.764.724.510	100	70.049.144	25,00	-	25,00	0,00	35,00	6.764.724.510	35,00	723,50		BPBD	
1	5	003	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Laporan	2	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	180	675.000.000	1826	6.664.003.610	20	19.999.780	0	0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen			0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/ Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1.200	80.000.000	402	52.820.900	60	50.049.364	80	80,00	-	133,33	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam (Epidemi/ Wabah Penyakit SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	3	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Laporan	2	100.000.000	1	47.900.000	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	670.816.000	6,15	2.233.631.012	100	369.968.018	5	-	5,00	0,00	7,15	2.233.631.012	7,15	332,97		BPBD	
1	5	003	2.03	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD	
1	5	003	2.03	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen KerjaSama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	17	170.816.000	1	65.891.750	1	49.999.860	0	0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	18	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0006	Pembinan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Dokumen	48	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Laporan	4	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Dokumen	3	15.000.000	0	0	1	100.000.000		0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kabupaten/ Kota yang dikekalkan	Orang			1	404.930.480	1	10.000.000		0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain: lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah melakukan aksi sosial.	Orang			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota Jumlah data penduduk terpalih di daerah rawan bencana	Dokumen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan			1	9.846.440	1	59.968.158		0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal online lama dalam 1 (satu) tahun.	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Laporan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD
1	5	003	2.03	0018	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			0	0	1	150.000.000		0,00	-	0,00	0,00					BPBD	
1	5	003	2.03	0006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			1	1.752.962.342	0	0	0	0	0	0	0	0					BPBD

17

3					4		5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	6	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen			90		0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!							DINSOS
1	6	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial	%	100	826.150.800	100	853.747.300	97,66	167.000.000	-	0	-	0,00	0,000	100,00	853.747.300	100,00	103,34			DINSOS	
1	6	05	2.02		Kegiatan :Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	%	100	826.150.800	100	853.747.300	100	167.000.000	-	0	-	0,00	0,000	100,00	853.747.300	100,00	103,34			DINSOS	
1	6	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata	Orang	2.300		590		600	117.000.000	-	0	-	0,00	0,000							DINSOS	
1	6	05	2.02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima M anfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	360				110	50.000.000	-	0	-		0,000								
1	6	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	409.984.000	100	605.259.660	100	135.000.000	-	0	-	0,00	0,000	100,00	605.259.660	100,00	147,63			DINSOS	
1	6	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	%	100	409.984.000	100	605.259.660	100	110.000.000	-	0	-	0,00	0,000	100,00	605.259.660	100,00	147,63			DINSOS	
1	6	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 1x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			180		180	25.000.000	-	0	-	0,00	0,000							DINSOS	
1	6	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang			180		180	85.000.000	-	0	-	0,00	0,000							DINSOS	
1	6	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	100	330.000.000			100	25.000.000	-	0	-										
1	6	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Org	100				60	25.000.000	-	0	-										
1	6	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	624.627.000	95	753.317.680	100	315.000.000	22.500.000	0,00	22.500.000	0,00	7,143	95,00	775.817.680	100,00	124,20			DINSOS	
1	6	07	2.01		Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	%	100	624.627.000	100	753.317.680	100	315.000.000	20	22.500.000	20,00	22.500.000	20,00	7,143	120,00	775.817.680	120,00	124,20		DINSOS	
1	6	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	dokumen	4	624.627.000			4	15.000.000	0	-											
1	6	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	4		10		4	300.000.000	1	22.500.000	1,00	22.500.000	25,00	7,500						DINSOS	
					DINAS KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH				23.663.603.548	15.682	14.455.505.933		7.646.350.452	50	755.232.616		755.232.616	9,88%		15.210.738.549		64,28			DISNAKERKUKM	
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	18.501.238.206	86	10.574.860.786	89	4.507.242.394	50	755.232.616	50,00	755.232.616	51,66	136,00	11.330.093.402	143,16	61,24			DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKAA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi Penatausahaan SP2D, Laporan Keuangan	%	100	14.084.238.606	100	8.385.700.828	100	3.365.964.912	25	739.166.779	25,00	739.166.779	0,00	55,26	125,00	9.124.867.607	125,00	64,79			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	100	13.204.163.606	47	8.001.410.828	19	3.261.444.912	19	721.746.779	19,00	721.746.779	100,00	22,13	66	8.723.157.607	66,00	66,06			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	880.075.000	168	384.290.000	12	104.520.000	3	17.420.000	12,00	17.420.000	100,00	16,67	180	401.710.000	300,00	45,64			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	%	100	211.680.000	-	22.500.000	100	21.000.000	-			0,00	22.500.000	0,00	10,63					DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel	9	211.680.000	30		2	21.000.000	0	-		0,00	0,00	-		0,00	0,00			DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Terdistribusi, Terkelola, Terpelihara, Teramankan dan Tercatatnya Barang Inventaris serta Barang Milik Daerah; Terkelola Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi Administrasi Surat Menyurat, Kehumasan, Dokumentasi, Perpustakaan, Kepegawaian, Perlengkapan/Pembekalan dan Rumah Tangga Dinas; Terkoordinasinya Kegiatan Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	%	100	1.849.519.600	100	946.470.494	100	331.387.482	-	90	-	0,00	25,95	190,00	946.470.494	190,00	51,17			DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	23.000.000	60	15.597.680	1	6.995.440	0	-	6,00	-	600,00	0,00	66	15.597.680	1320,00	67,82			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	114.000.000	42	110.221.880	3	49.661.640	0	-	42,00	-	1.400,00	0,00	84	110.221.880	560,00	96,69			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	41.500.000	40	22.279.587	2	9.998.699	0	-	22,00	-	1.100,00	0,00	62	22.279.587	620,00	53,69			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Jenis	15	215.000.000	70	38.003.443	0		0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	70	38.003.443	466,67	17,68			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	63.500.000	14	47.993.416	8	19.730.843	0	-	8,00	-	100,00	0,00	22	47.993.416	146,67	75,58			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1.392.519.600	102	712.374.488	12	245.000.860	0	-	12,00	-	100,00	0,00	114	712.374.488	190,00	51,16			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terancang dan Terprosesnya Pengadaan Barang untuk Keperluan Rumah Tangga Dinas	%	100	560.000.000	100	218.198.000	100	-	-	1,00	-			101,00	218.198.000	101,00	38,96			DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	16	240.000.000	21	47.009.500	0		0	-	0,00	-	0,00	0,00	21	47.009.500	131,25	19,59			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	320.000.000	12	171.188.500	0		0	-	1,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	13	171.188.500	81,25	53,50			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkoordinasinya Kegiatan Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	%	100	1.008.800.000	100	582.846.311	100	190.200.000	25	16.065.837	24	16.065.837	24,00	8,45	124,00	598.912.148	124,00	59,37			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	101.000.000	24	48.059.611	12	23.820.000	3	3.415.837	12,00	3.415.837	100,00	14,34	36	51.475.448	60,00	50,97			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	907.800.000	156	534.786.700	12	166.380.000	3	12.650.000	12,00	12.650.000	100,00	7,60	168	547.436.700	280,00	60,30			DISNAKERKUKM
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terdistribusi, Terkelola, Terpelihara, Teramankan dan Tercatatnya Barang Inventaris serta Barang Milik Daerah	%	100	787.000.000	100	419.145.153	100	598.690.000	-	41	-	183,33	0,00	141,00	419.145.153	141,00	53,26			DISNAKERKUKM	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	165.000.000	3	113.985.554	1	38.420.000	0	-	1,00	-	100,00	0,00	4	113.985.554	80,00	69,08			DISNAKERKUKM

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	07	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Unit	25	255.000.000	10	143.899.599	5	55.000.000	0	-	5,00	-	100,00	0,00	15	143.899.599	60,00	56,43	DISNAKERKUKUM
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	117.000.000	16	61.260.000	10	25.000.000	0	-	35,00	-	350,00	0,00	51	61.260.000	102,00	52,36	DISNAKERKUKUM
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Unit	5	250.000.000	2	100.000.000	0	-	0	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	100.000.000	40,00	40,00	DISNAKERKUKUM
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	250.000.000			1	480.270.000											
2	7	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	%	20	890.000.000	1485,00	777.281.494	18	800.000.000	0	-	32	-	0,00	99,50	1.517,00	777.281.494	7.585,00	87,33	DISNAKERKUKUM
2	7	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	%	100	890.000.000	100	777.281.494	100	800.000.000	0	-	32	-	#NAME?	#NAME?	132,00	777.281.494	132,00	87,33	DISNAKERKUKUM
2	7	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	288	770.000.000	164	777.281.494	48	800.000.000	0	-	32,00	-	#NAME?	#NAME?	196	777.281.494	68,06	100,95	DISNAKERKUKUM
2	7	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	%	-	7.162,00	-	50	49.754.000							7.162,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!		DISNAKERKUKUM
2	7	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	%	100		0	-	70	49.754.000							0,00	-	0,00	#DIV/0!	DISNAKERKUKUM
2	7	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Orang	-	0	-	300	49.754.000	0	-		-								DISNAKERKUKUM
2	7	05			Program Hubungan Industrial	%	65	500.000.000	1354,00	193.710.200	60	119.260.000			2	-	100,00	0,00	1.356,00	193.710.200	2.086,15	38,74	DISNAKERKUKUM
2	7	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	150.000.000	100	28.727.245	100	29.574.000			1	-	100,00	0,00	101,00	28.727.245	101,00	19,15	DISNAKERKUKUM
2	7	05	2.01	03	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Laporan	5	150.000.000	1	28.727.245	1	29.574.000	0	-	1,00	-	100,00	0,00	2	28.727.245	40,00	19,15	DISNAKERKUKUM
2	7	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	350.000.000	100	164.982.955	60	89.686.000			1	-	100,00	-	101,00	164.982.955	101,00	47,14	DISNAKERKUKUM
2	7	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Perkara	5	350.000.000	2	164.982.955	1	69.686.000	0	-	1,00	-	100,00	0,00	3	164.982.955	60,00	47,14	DISNAKERKUKUM
2	7	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Lembaga	1	60.000.000	0		1	20.000.000	0	-		-							DISNAKERKUKUM
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	45	180.000.000	0	-	0	-					0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISNAKERKUKUM
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	180.000.000	0	-	0	-			10	-			10,00	-	10,00	0,00	DISNAKERKUKUM
2	17	02	2.01	01	Penelitian Pemenuhan Izin Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha			0		0	-	0	-		-							DISNAKERKUKUM
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi	30	750.000.000	28,00	116.579.166	25	99.580.000			10	-	#DIV/0!	#DIV/0!	38	116.579.166	126,67	15,54	DISNAKERKUKUM
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	750.000.000	100	116.579.166	100	99.580.000			10	-	#DIV/0!	#DIV/0!	110,00	116.579.166	110,00	15,54	DISNAKERKUKUM
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota Kinerja	Unit Usaha	100	750.000.000	83	116.579.166	0	-	0	-	10,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	93	116.579.166	93,00	15,54	DISNAKERKUKUM
2	17	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	100	750.000.000			20	99.580.000	0	-		-							
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkerpoperasian	%	6516	870802000	5226	1998121019	65	1.496.894.858			132	-	41,12	0,00	5.358,00	1.598.121.019	82,23	183,52	DISNAKERKUKUM
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkerpoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	870802000	100	1998121019	100	1.496.894.858			132	-	41,12	0,00	232,00	1.598.121.019	232,00	183,52	DISNAKERKUKUM
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerpoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Orang	390	870.802.000	340	1.598.121.019	321	1.496.894.858	0	-	132,00	-	41,12	0,00	472	1.598.121.019	121,03	183,52	DISNAKERKUKUM
2	17	05	2.01	05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Keterbacaan, Penguatan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi						0	-		-		-							
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	46	250.000.000	282,00	222.331.773	42	179.949.000			-	-	0,00		282,00	222.331.773	613,04	88,93	DISNAKERKUKUM
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	250.000.000	100	222.331.773	100	179.949.000			-	-	0,00	#VALUE!	100,00	222.331.773	100,00	88,93	DISNAKERKUKUM
2	17	06	2.01	01	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Keterbacaan Penguatan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Unit Usaha	70	250.000.000	90	#VALUE!	6	179.949.000	0	-		-	0,00	#VALUE!	90	#VALUE!	128,57	#VALUE!	DISNAKERKUKUM
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	%	1,00	530.000.000	28,00	235.512.395	0	144.583.800			20	-	100,00	0,00	48,00	235.512.395	4.800	44,44	DISNAKERKUKUM
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	%	100	530.000.000	100	235.512.395	100	144.583.800			20	-	100,00	0,00	120,00	235.512.395	120	44,44	DISNAKERKUKUM
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	230	530.000.000	125	235.512.395	20	24.940.000	0	-	20,00	-	100,00	0,00	145	235.512.395	63	44	DISNAKERKUKUM
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Unit Usaha	180	300.000.000	35	41.141.235	50	49.925.000	0	-		-	0,00	0,00	35	41.141.235	19	14	DISNAKERKUKUM
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	0	-	0	-	0	-		-					#DIV/0!	#DIV/0!		DISNAKERKUKUM
2	17	07	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	orang					5	69.718.800	0	-		-							
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	%	36	2.004.563.342	31,00	681.309.100	31	249.086.400			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	31,00	681.309.100	77,36	33,99	DISNAKERKUKUM
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi	%	100	2.004.563.342	100	681.309.100	100	249.086.400			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	681.309.100	77,36	33,99	DISNAKERKUKUM

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2	39.073.645	2	68.916.500	2	60.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2	68.916.500	100,00	176,38	DP3AP2KB	
2	08	07			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Kepemangan Kabupaten/Kota	PATBM/ desa	36	58.950.000	36	279.173.200	36	245.827.115	0	0,00	0,00	0,00	36	279.173.200	100,00	473,58	DP3AP2KB	
2	08	07	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peresentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%	100	58.950.000	100	225.982.200	100	109.003.105	0	0,00	0,00	0,00	100	225.982.200	100,00	383,29	DP3AP2KB	
2	08	07	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	1	58.950.000	1	87.571.400	150	67.253.105	0	0,00	0,00	0,00	1	87.571.400	100,00	148,55	DP3AP2KB	
2	08	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	1	58.950.000	1	87.571.400	150	41.750.000	0	0,00	0,00	0,00	1	87.571.400	100,00	148,55	DP3AP2KB	
2	08	06	2.02		Pengatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota, Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak, anak	10, 10	124.334.400	10 10	181.877.000	10 10	136.824.010	-	-	-	-	-	20	181.877.000	200	293	DP3AP2KB
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	90.938.500	10	87.424.010	0	0,00	0,00	0,00	10	90.938.500	100,00	146,28	DP3AP2KB	
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	90.938.500	10	49.400.000	0	0,00	0,00	0,00	10	90.938.500	100,00	146,28	DP3AP2KB	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	20	124.334.400	20	167.211.000	20	110.902.135	-	-	-	-	-	20	167.211.000	200	269	DP3AP2KB
2	08	06	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	83.605.500	10	89.400.000	-	-	-	-	-	10	83.605.500	100	134	DP3AP2KB
2	08	06	2.02	02	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	83.605.500	10	89.400.000	0	0,00	0,00	0,00	10	83.605.500	100,00	134,48	DP3AP2KB	
2	08	06	2.03		Pengatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	83.605.500	10	21.502.135	-	-	-	-	-	10	83.605.500	100	134	DP3AP2KB
2	08	06	2.02	02	Pengatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	anak	10	62.167.200	10	83.605.500	10	21.502.135	0	0,00	0,00	0,00	10	83.605.500	100,00	134,48	DP3AP2KB	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	326.400.000	100	391.120.354	100	297.750.000	0	0,00	0,00	0,00	100	391.120.354	100,00	119,83	DP3AP2KB	
2	14	02	-		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangsa kencana (pembangunan keluarga/kependudukan dan keluarga berencana)	Laporan	2	30.000.000	2	41.951.000	2	30.000.000	-	-	-	-	-	2	41.951.000	100	140	DP3AP2KB
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan rapat pengendalian program bangsa kencana (pembangunan keluarga/kependudukan dan keluarga berencana)	Laporan	2	30.000.000	2	41.951.000	2	30.000.000	0	0,00	0,00	0,00	2	41.951.000	100,00	139,84	DP3AP2KB	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelidikan dan Pengelolaan Data Kependudukan, Jumlah Laporan Pembiinan dan Pngawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	dokumen laporan	1	296.400.000	1	244.590.154	1	267.750.000	-	-	-	-	-	3	244.590.154	300	288	DP3AP2KB
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan	dokumen	1	51.600.000	1	51.600.000	1	161.400.000	0	0,00	0,00	0,00	1	51.600.000	100,00	100,00	DP3AP2KB	
2	14	02	2.02	0009	Pembiinan dan Pngawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembiinan dan Pngawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	122.400.000	1	114.990.154	1	78.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1	114.990.154	100,00	93,95	DP3AP2KB	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	122.400.000	1	78.000.000	1	28.350.000	0	0,00	0,00	0,00	1	78.000.000	100,00	63,73	DP3AP2KB	
2	14	03			PROGRAM PEMBIANAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	%	14	2.042.550.000	14	5.204.750.490	14	2.363.671.000	0	0,00	0,00	0,00	14	5.204.750.490	100,00	254,82	DP3AP2KB	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan hasil pengolahan opsional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana), Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	laporan laporan	56	1.199.800.000	56	2.051.610.240	60	754.220.000	-	-	-	-	-	56	2.051.610.240	400	667	DP3AP2KB
2	14	03	2.01	0010	Pengolahan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengolahan opsional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)	Laporan	4	644.800.000	4	1.229.072.040	4	529.400.000	0	0,00	0,00	0,00	4	1.229.072.040	100,00	190,61	DP3AP2KB	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	255.000.000	1	315.392.000	12	99.820.000	0	0,00	0,00	0,00	1	315.392.000	100,00	123,68	DP3AP2KB	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	100.000.000	1	197.926.200	2	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	1	197.926.200	100,00	197,93	DP3AP2KB	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	50	200.000.000	50	309.220.000	42	100.000.000	0	0,00	0,00	0,00	50	309.220.000	100,00	154,61	DP3AP2KB	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia, Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	unit organisasi	269	807.000.000	-	-	283	449.211.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3AP2KB
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	0	-	0	-	14	218.011.000	0	0,00	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	DP3AP2KB	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	269	807.000.000	0	-	269	231.200.000	0	0,00	0,00	0,00	-	0	0,00	0,00	DP3AP2KB	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	laporan, orang	40 600	879.642.000	40 600	1.839.213.850	40 600	746.640.000	-	-	-	-	-	680	1.839.213.850	300	531	DP3AP2KB
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	40	24.300.000	40	44.200.000	40	21.200.000	0	0,00	0,00	0,00	40	44.200.000	100,00	181,89	DP3AP2KB	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	600	826.942.000	600	1.756.266.850	600	713.200.000	0	0,00	0,00	0,00	600	1.756.266.850	100,00	212,38	DP3AP2KB	
2	14	03	2.03	0008	Pembiinan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	40	28.400.000	40	38.747.000	40	12.240.000	0	0,00	0,00	0,00	40	38.747.000	100,00	136,43	DP3AP2KB	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangsa berencana (pemabngunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	kampung	29	35750000	29	53956400	29	313600000	0	0	0	0	29	53956400	100	150,92699	DP3AP2KB		
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Rencana Di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangsa berencana (pemabngunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana) di kampung KB	kampung	29	35.750.000	29	53.956.400	29	313.600.000	0	0	0,00	0,00	29	53.956.400	100,00	150,93	DP3AP2KB		
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	1549	677.500.000	26	1252822100	1059	1.099.360.000	0	0	0,00	0,00	26	1.252.822.100	1,68	184,92	DP3AP2KB		
2	14	04			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	26	677.500.000	26	608.886.100	1.059	1.099.360.000	-	-	-	-	26	608.886.100	200	337	DP3AP2KB		
2	14	04	2.01	0034	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Koneceling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	20	100.000.000	20	280.596.100	1.053	576.360.000	0	0	0,00	0,00	20	280.596.100	100,00	280,60	DP3AP2KB		
2	14	04	2.01	0036	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	6	577.500.000	6	328.290.000	6	523.000.000	0	0	0,00	0,00	6	328.290.000	100,00	56,85	DP3AP2KB		
					PANGAN																	DKPP		
2	9				DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		43.189.099.240		23.993.748.088		9.973.419.909	0	1.371.050.670		1.371.050.670		13,75%		24.964.798.758		57,80	DKPP		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	37.162.850.990	83,72	12.385.465.150	84	6.519.483.909	3	1.371.050.670	3	1.371.050.670	3,57	39,963	86,72	13.756.515.820	91,28	37,02	DKPP
2	9	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Grand Desain	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	usulan RKA, DPA dan DPPA, Penatausahaan APBD, Laporan Keuangan	Berkas	60	32.147.407.074	12	11.086.799.318	12	5.726.955.973	3	1.346.970.731	3	1.346.970.731	42,00	40,578	15,00	12.433.770.049	25,00	38,68	DKPP
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	-	-	-	12	5.586.351.734	3	1.324.350.731	3	1.324.350.731	50,00	40,999	-	-	-	-	DKPP	
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Pemata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	bulan	-	-	-	12	140.604.239	2	22.620.000	2	22.620.000	-	-	-	-	-	-	DKPP	
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Unit	2	35.000.000	100	35.000.000	-	-	0	-	0	-	100,00	35.000.000	5.000,00	100,00	-	DKPP	
2	9	1	2.03	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah	unit	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian pensiun / pembuatan Kartu, Karsi, tabungan asuransi pensiun	Berkas	60	386.706.250	100	71.670.000	50	47.250.000	0	-	0	-	100,00	71.670.000	166,67	18,53	DKPP		
2	9	1	2.05	1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Berserta Atribut	stel	-	-	-	50	47.250.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.05	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Didlat	orang	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramanakan dan tercatat barang inventaris serta barang milik daerah	Berkas	60	2.423.433.061	12	499.546.392	12	376.707.936	0	-	0	-	5,00	499.546.392	20,00	20,61	DKPP		
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jenis	1	2.000.000	0	1	2.000.000	0	-	0	-	100,00	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	45	130.000.000	0	45	130.000.000	0	-	0	-	26,67	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	6	16.635.000	0	6	16.635.000	0	-	0	-	100,00	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	Jenis	1	26.040.096	0	1	26.040.096	0	-	0	-	100,00	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	6	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas	bulan	12	202.032.840	-	12	202.032.840	0	-	0	-	41,67	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah	Unit	50	208.376.905	0	-	2	40.000.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	-	DKPP	
2	9	1	2.07	2	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas/Operasional	unit	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Meubelur	Jumlah Meubelur	unit	1	30.000.000	0	1	30.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	10.000.000	0	1	10.000.000	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	60	1.250.627.700	100	494.810.264	12	239.150.000	3	24.079.939	3	24.079.939	350,00	36,067	103,00	518.890.203	171,67	41,49	DKPP
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa TeleponIntermetair dan Listrik/Taahan Listrik	bulan	12	41.500.000	3	3.719.939	3	3.719.939	3	3.719.939	50,00	26,943	3,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	unit	12	16.650.000	0	12	16.650.000	0	-	12	0,00	0,000	0,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Honorarium Tidak Tetap	bulan	12	181.000.000	2	20.360.000	2	20.360.000	2	20.360.000	41,67	41,652	3,00	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramanakan dan tercatatnya barang inventaris serta BMD	Unit	60	711.000.000	3	197.639.176	12	89.420.000	0	-	12	0,00	0,000	15,00	197.639.176	25,00	27,80	DKPP	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Unit	-	-	-	1	38.420.000	0	-	1	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak kendaraan dinas/operasional lapangan	unit	-	-	-	11	51.000.000	0	-	11	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	%	100	7.166.921.825	20	4.293.190.750	20	150.000.000	0	-	0	-	20,00	4.293.190.750	20,00	59,90	DKPP		
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kemandirian pangan	Unit	100	5.103.023.850	20	4.293.190.750	4	150.000.000	0	-	0	-	20,00	4.293.190.750	20,00	84,13	DKPP		
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan	unit	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai jemur	unit	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur kemandirian pangan lainnya	unit	-	-	-	4	150.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Jumlah pemantauan dan evaluasi penyediaan infrastruktur logistik	dokumen	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	2	2.01	5	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Pembuatan desain peta jalan dan infrastruktur pendukung	%	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	%	100	5.355.153.520	20	1.373.348.790	20	508.831.000	0	-	0	-	5,00	1,260	20,00	1.373.348.790	20,00	25,65	DKPP
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan utama, energi dan protein cukup	KKal/ Gr/Ka p	100	1.010.000.000	20	146.638.188	20	123.831.000	0	-	0	-	0,00	12,284	20,00	146.638.188	20,00	14,52	DKPP
2	9	3	2.01	1	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	dokumen	1	43.831.000	0	1	43.831.000	0	-	1	-	0,00	12,284	-	-	-	DKPP		
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	3	2.01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah KoordinasiSinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Dokumen	0	-	1	40.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	3	2.01	4	Pemantauan StokPasokan dan Harga Pangan	Jumlah survey pemantauan stok pasokan dan harga pangan ke kecamatan	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga jaringan distribusi pangan	kali	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPP		
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah lembaga usaha pangan	kali	0	-	0	0													

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	9	3	2.02	1	koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali		0													DKPP	
2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah rencana kebutuhan pangan lokal	kali		0		1	55.000.000	0	-								DKPP	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan	ton	100	58,5		7	200.000.000	0	-	0		100,00	78.213				DKPP	
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeliharaan cadangan pangan					1	10.000.000	0	-								DKPP	
2	9	3	2.02	5	Penentu Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Regulasi terkait Harga Minimum Daerah untuk pangan lokal	Regulasi	2			-							0,00	-	0,00	#DIV/0!	DKPP	
2	9	3	2.03	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentu Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah regulasi harga minimum pangan pokok lokal																DKPP	
2	9	3	2.03	1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	100	1.090.250.000	92	235.665.160	94	120.000.000	0	-	0	5,00	5,991	92,00	235.665.160	92,00	21,62	DKPP
2	9	3	2.04	-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah survey data	dokumen		1		1	50.000.000	0	-	1	100,00	14,350					DKPP	
2	9	3	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatanragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pameran B2SA kecamatan	kali		17		17	70.000.000	0	-	17							DKPP	
2	9	3	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita	Dokumen		-													DKPP	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan daerah rentan Pangan	%	1	3.937.998.760	1	0	1	50.000.000	0	-	0		1,00	-	100,00	0,00		DKPP
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Dokumen	4	3.937.998.760	0	1	50.000.000	0	-	0		0,00	-	0,00	0,00		DKPP	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen		3		1	50.000.000	0	-								DKPP	
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan tertangani	Dokumen	21	682.681.400	1	0		0				1,00	-		0,00		DKPP	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan PanganKabupaten/ Kota	Jumlah Grand Desain Ketahanan Pangan Kabupaten Karo	Dokumen		1			0										DKPP	
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan Pengolahan dan Penyuluran Cadaga Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung cadangan pangan masyarakat	Dokumen		0													DKPP	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PAT)	Persen	100	785.000.000	20	135.025.900	20	130.000.000	0	-	20	75,00	59,307	40,00	135.025.900	40,00	17,20	DKPP
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	sampel	100	785.000.000	45	159.505.085	20	130.000.000	0	-	20	75,00	59,307	65,00	159.505.085	65,00	20,32	DKPP
2	9	5	2.01	1	Pengaturan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	gapoktan		0													DKPP	
2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Sertifikasi Pangan segar asal tumbuhan	sampel							15		75,00	59,307					DKPP	
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Registrasi Keamanan Pangan	kelompok		0													DKPP	
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	kelompok		0													DKPP	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	paket		20		20	130.000.000	0	-								DKPP	
3	25	2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	100	575.416.000	78	655.460.310	85	1.220.000.000	0	-	144,1	0,00	42,626	222,10	655.460.310	222,10	113,91	DKPP
3	25	2	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya alat penangkapan ikan dan terlaksananya restocking	Unit	430000	475.416.000	430000	510.904.310	50.000	50.000.000	0	-	50000	0,00	92,340	480.000,00	510.904.310	111,63	107,46	DKPP
3	25	2	2.01	1	Penyedia Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data dan Jumlah Produksi hasil tangkap	Laporan		60													DKPP	
3	25	2	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pos Pendaratan Ikan	Unit		1													DKPP	
3	25	2	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bibit Ikan dan alat tangkap	Ekor dan Unit		125.000 Ekor dan 3 Unit		50.000	50000000	0	-	50000	0,00						DKPP	
3	25	2	2.02		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyuluhan dan Sosialisasi kepada Nelayan	Ton		40		35	1.170.000.000	0	-	5	0,00	0,000					DKPP	
3	25	2	2.02	1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	195	100.000.000	7	75.000.000			0	-	0,00	0,000	7,00	75.000.000	3,59	75,00	DKPP	
3	25	2	2.02	2	Pengembangan kapasitas Nelayan kecil	Jumlah Sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap	Unit		4		10	1.170.000.000	0	-	5	0,00	80,10					DKPP	
3	25	4	-	-	Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan pembiayaan dan kemitraan usaha	Jumlah Sosialisasi Kemitraan Usaha	Kali		269													DKPP	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	448.18	3.372.492.000	173,7	625.149.488	100	1.245.105.000	0	-	173,74	0,00	0,00	347,44	625.149.488	#VALUE!	18,54	DKPP
3	25	4	2.01		Penerbitan ijin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kab/ Kota	Terbitnya surat Rekomendasi	Rekomendasi	12	26.047.500	48	26.047.500							48,00	26.047.500	400,00	100,00		DKPP
3	25	4	2.02	-	Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lokasi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	Rekomendasi		1089													DKPP	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Terlaksananya pendistribusian bibit ikan dan dempang	Ton	2004.21	1.686.444.500	1119	1.867.513.688	880	680.605.000	0	-	0	0,00	0,00	1.119,00	1.867.513.688	#VALUE!	110,74	DKPP
3	25	4	2.02	2	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana usaha perikanan budidaya	Unit		20		15	500.558.000	0	-	1	0,00	0,00					DKPP	
3	25	4	2.02	3	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah sosialisasi Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kali		160													DKPP	
3	25	4	2.04	-	Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi serta perencanaan pendidikan dan pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih	Orang		4212500		20	180.047.000	0	-	62	0,00	10,16					DKPP	
3	25	3	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Bibit Ika	ekor	4.212.500	1.660.000.000	1.310.000	229.477.800	1.375.000	564.500.000		0	0,00	0,00	#####	229.477.800	31,10	13,82	DKPP	
3	25	3	2.04	2	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perikanan budidaya	Laporan		1													DKPP	
3	25	3	2.04	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	unit		4212500													DKPP	
3	25	3	2.04	4	Pengamanan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pembudidayaan Ikan	Ekor		747.452		1.375.000	500.000.000	0	-	0	0,00	38,50					DKPP	
3	25	3	2.04	5	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Alat Pemeriksaan Kesehatan Ikan	Unit		20		2	50.000.000	0	-	2	0,00	64,48					DKPP	
3	25	5	-	-	Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pembudidaya Ikan	Kali		1		1	14.500.000	0	-								DKPP	
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Perikanan	Dokumen	100	82.500.000	48	82.500.000			0				48,00	82.500.000	48,00	100,00		DKPP
3	25	5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Laporan Pengawasan	Laporan	48	82.500.000	60	41.250.000	0					60,00	41.250.000	125,00	50,00		DKPP	
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Tangkap	Data		60				0									DKPP	
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Data dan Informasi Pengawasan Perikanan Budidaya	data		100				0									DKPP	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100	658.250.000	48	73.913.200	20	150.000.000	0	-	2	0,00	0,00	50,00	73.913.200	50,00	11,23	DKPP
3	25	6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Surat Rekomendasi	Rekomendasi	48	35.000.000	60	35.000.000							60,00	35.000.000	125,00	100,00		DKPP
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Data ikan konsumsi yang masuk dan keluar dari Kab. Karo	Laporan		48													DKPP	
3	25	6	2.02		Pembinan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sosialisasi dan Pertemuan	Kali	48	45.000.000	48	45.000.000							48,00	45.000.000	100,00	100,00		DKPP

3					4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	44		0		12	15000000											DLH		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0		0	0	0	0											DLH		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan dan/atau Pembiutan		0		0	0	0	0											DLH		
2	11	06			PROGRAM PEMBIKINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persen	100	367.000.000	100	45.370.000	100%	45.000.000	0	0	0,00	0,000	100,00	45.370.000	100,00	12,36			DLH		
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/dan/atas Kegiatan yang Iain Lingkungan dan Iain PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	100	367.000.000	100	45.370.000	1	45.000.000		0	0,00	0,000	100,00	45.370.000	100,00	12,36			DLH		
2	11	06	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Iain Lingkungan dan/atau Iain PPLH	Dokumen	40		0		10	30.000.000		0	0,00	0,000							DLH		
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	orang	4		0		1	15000000											DLH		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Iain Lingkungan Hidup Iain PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Badan Usaha	36		0		100			0	0,00	0,000							DLH		
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dokumen	8		0		0	0											DLH		
-	-	-	-	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Penetapan Pemerintah terkait Penetapan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Badan	0		0		0	0													
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Orang	40	40.000.000	100	290.000.874	0	400000000					100,00	290.000.874	250,00	725,00			DLH		
2	11	08	201		Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	100	40.000.000	100	290.000.874	0	400000000					100,00	290.000.874	100,00	725,00			DLH		
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dokumen	2		0		2	400000000											DLH		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	ada	ada	1.111.211.000		75533622	ada	100.000.000	0	ada	0,00	0,000	#VALUE!	75.533.622	100,00	6,80			DLH		
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ada	ada	1.111.211.000	0	75533622	ada	100.000.000		ada	0,00	0,000	#VALUE!	75.533.622	100,00	6,80			DLH		
2	11	09	201	01	Prestasi Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Plaintropt dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Entitas	250			50	100.000.000			0	0,00	0,000							DLH		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen	100	122.000.000	0	0	450000000						0,00		0	0,00	0,00		DLH		
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	122.000.000	0	0	450000000						0,00		0	0,00	0,00		DLH		
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pengaduan	2		0		0	450000000											DLH		
2	11	10	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Singkerta dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Perikara	12		0	0	0												DLH		
2	11	11			Program Pengelolaan Sampah	Persen	79	78.601.271.058	79	39.227.955.740	86	14.181.302.618		1.710.843.450	0		1.710.843.450	40,48	25,962	79,00	40.938.799.190	100,00	52,08	DLH	
2	11	11	201		persentase jumlah sampah yang Tertangani	Persen	100	78.601.271.058	79	39.227.955.740	86	14.181.302.618		1.710.843.450	0		1.710.843.450	40,48	25,962	79,00	40.938.799.190	79,00	52,08	DLH	
2	11	11	201	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	2		0		1	150000000											DLH		
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	4		0		1	250000000											DLH		
2	11	11	201	03	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengalihan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	1.342.199		100		276252	12.463.998.618		1.710.843.450	0		1.710.843.450	45,33	32,309				DLH		
2	11	11	201	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Persampahan	Kelompok	47		100		6	200.000.000			0	0,00	0,000						DLH		
2	11	11	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dokumen	20		0	0	0												DLH		
2	11	11	201	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	dokumen	4		0	0	300000000												DLH		
2	11	11	201	5	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota																		DLH		
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	unit	124		100		16	1.087.304.000			0	1,67	3,990						DLH		
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		32.781.205.637		14.045.081.793		5.627.715.920		753.508.935			753.508.935	13,39%		14.798.590.728		45,14		Disdukcapil		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	29.754.517.583		11.654.555.563	92	4.993.176.841		750.632.535	0		750.632.535	0,00	10,01	0,00	12.405.188.098	0,00	41,69	Disdukcapil
2	12	01	2.01		Pencapaian Kinerja Peringkat Daerah	Laporan	60	239.122.970	14	15.351.200	0	-						14,00	15.351.200	23,33	6,42		Disdukcapil		
2	12	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	70			0													Disdukcapil		
2	12	01	03		Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah	Laporan	20			0													Disdukcapil		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Laporan	60	17.747.619.004		7.942.702.370	12	3.434.487.811		662.619.098	0		662.619.098	50,00	44,39	0,00	8.605.321.468	0,00	48,49	Disdukcapil	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60			27	3.355.377.811	3	662.619.098	3		662.619.098	50,00	45,50					Disdukcapil		
2	12	01	2.02	03	Prakarsaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	21			24	79.110.000			-	0		-	35,29	10,86				Disdukcapil		
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah	Paket	60	1.170.410.096	24	67.991.600	0	33.750.000						24,00	67.991.600	40,00	5,81		Disdukcapil		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Paket	215			49	33.750.000												Disdukcapil		
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20			0	-												Disdukcapil		
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Laporan	60	5.553.782.657	24	1.668.801.361	100	227.199.832		0			50,00	48,25	24,00	1.668.801.361	40,00	30,05		Disdukcapil	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	500				100	6.433.300		0			41,00	99,61					Disdukcapil		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	225				45	60.439.390		0			87,88	88,17					Disdukcapil		
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	85				24	9.452.362		0			0,00	0,00					Disdukcapil		

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	15	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang untuk Keperluan Rumah Tangga Dinas yang dirancang dan diproses	%	100	323.000.000	7	1.721.428.187	100	35.000.000		0		0,00	0,20	7,00	1.721.428.187	26,00	832,95	DISHUB	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit					1	5000000										DISHUB	
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	unit					3	20000000										DISHUB	
2	15	1	2.07	6	Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7		1	10.000.000		0		0,00	0,00					DISHUB	
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							0			0,00	0,20					DISHUB	
2	15	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Kelembaan dan Hasil Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	%	100	2.852.491.760	24	32.930.829.370	100	789.343.000	25	63.989.650	25	63.989.650	133,33	48,38	49,00	32.994.819.020	31,00	1.156,70	DISHUB
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24		12	39.343.000	3	4.834.650	3	4.834.650	50,00	49,09					DISHUB
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2		10	10.000.000		0		0,00	0,00					DISHUB	
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			24		12	740.000.000	3	59.155.000	3	59.155.000	50,00	39,42					DISHUB
2	15	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Terdistribusi, Terkelola, Terpelihara, Teramanakan dan Tercatatnya Barang Inventarisnya serta Barang Milik Daerah	%	100	627.000.000	33	736.872.776	100	858.526.967		0		47,06	22,36	33,00	736.872.776	35,00	117,82	DISHUB	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1		1	40.000.000		0		400,00	21,33					DISHUB	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			30		19	150.000.000		0		25,00	22,49					DISHUB	
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dihabilitasi			1		2	668.526.967										DISHUB	
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dihabilitasi			1													DISHUB	
2	15	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	97	6.078.349.893	95	8.844.204.055	95	15.123.979.724	97	2.773.389.976	97	2.773.389.976	35,79	32,77	192,00	11.617.594.031	40,00	191,13	DISHUB
					Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Indeks	77	-	77		77		77									DISHUB	
2	15	2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota	%	100	115.000.000	0	5029719			0		0,00	0,00	0,00	5.029.719	42,00	4,37	DISHUB		
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																DISHUB	
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																DISHUB	
2	15	2	2.01	4	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Revisi) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota							0		0,00	0,00						DISHUB	
2	15	2	2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rambu, Guadrill, LKJU, Marka, Rambu, RPU, Delimitor, APIL, dan Cermat Tikus yang terpasang	%	100	234.954.889	100	3.044.104.660	100	13.024.277.605		2.773.389.976	0	2.773.389.976	33,33	26,67	100,00	5.817.494.636	46,00	2.476,00	DISHUB
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					73	158.117.033		5.700.000	0	5.700.000	0,00	0,60				DISHUB	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			51		425	12.866.160.572		2.767.689.976								DISHUB	
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	unit								0		0,00	0,00					DISHUB	
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara			133					0		54,67	32,59					DISHUB	
2	15	2	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Jumlah Terminal, Bangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	%	100	243.721.988	0	30895068			0		0,00	0,00	0,00	30.895.068	51,00	12,68	DISHUB		
2	15	2	2.03	1	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																DISHUB	
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Gedung Terminal																DISHUB	
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Sarana dan Prasarana Terminal																DISHUB	
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal																DISHUB	
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	SDM Pengelola Terminal Tipe C																DISHUB	
2	15	2	2.03	7	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)							0		0,00	0,00						DISHUB	
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara							0		0,00	0,00						DISHUB	
2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Jumlah Lahan Parkir, Sarana dan Prasarana Lahan Parkir yang tersedia	%	100	545.697.546	1	233.554.648	100	372.466.769		0		0,00	8,96	1,00	233.554.648	59,00	42,80	DISHUB	
2	15	2	2.04	1	Fasilitas pemenuhan Peryyaratan Penolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					1	235.000.000										DISHUB	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			4		3	137.466.769		0		0,00	8,96					DISHUB	
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan yang wajib Memberikan Jaminan Keselamatan Secara Teknik terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor, Terwujudnya Kelestarian Lingkungan dan Kemungkinan Pencemaran	%	100	1.103.162.000	100	1.263.547.685	100	30.000.000		0		2,00	27,61	100,00	1.263.547.685	62,00	114,84	DISHUB	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1												DISHUB	
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya																DISHUB	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																DISHUB	
2	15	2	2.05	5	Sosialisai Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan/Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																DISHUB	
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisa Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisa Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji					2	20.000.000										DISHUB	
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara																DISHUB	
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2				0		-	33,33	30,94					DISHUB	
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																DISHUB	
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2	10.000.000		0		-	0,00	0,00				DISHUB	
2	15	2	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekayasa Jalan yang disediakan untuk Memberikan Kondisi Lalu Lintas yang Aman dan Lancar	%	100	2.965.813.470	69	3.944.141.111	100	1.442.335.350		0		8,70	40,21	69,00	3.944.141.111	72,00	132,99	DISHUB	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2													DISHUB	
2	15	2	2.06	2	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			6													DISHUB	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi/Kabupaten	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			12		6	912.664.000		0		-	50,00	44,58				DISHUB	
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2													DISHUB	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	15	3	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	laporan			3	66.503.350			0	-	25,00	6,52					
2	15	4	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan	Dokumen			3	463.168.000			0	-	6,67	0,90					
2	15	5	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan							0	-	100,00	98,00					
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	%	100	15.000.000	1	7.533.555	100	48.400.000	0	-	0,00	0,00	1,00	7.533.555	80,00	50,22	DISHUB
2	15	2	2.07	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Perizinan Teknis Andalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalin yang ditetapkan	dokumen			1	48.400.000											DISHUB
2	15	3	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Jumlah Persentase Keselamatan Pengguna Angkutan Umum di Jalan	%	100	467.000.000	4	58.931.455	100	54.500.000	0	-	9,09	9,73	4,00	58.931.455	82,00	12,62	DISHUB
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan															DISHUB
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan			4		3	16.000.000	0	-	0,00	0,00					DISHUB
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Penyeragaman Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Penyeragaman Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan					3	14.900.000	0	-	33,33	24,00					DISHUB
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan															DISHUB
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan			6	23.600.000			0	-	0,00	0,00					
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Angkutan Umum yang tersedia untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	%	100	118.000.000	1	160.816.260	100	81.000.000	0	-	100,00	10,71	1,00	160.816.260	88,00	136,28	DISHUB
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit															DISHUB
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan			2		1	81.000.000	0	-	0,00	0,00					DISHUB
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit							0	-	5,26	10,71					
2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah lain yang mengarah ke Tertatasya Perjalanan Trayek Angkutan Perkotaan	%	100	70.000.000	0		100	71.000.000			0,00	-	92,00	0,00			DISHUB
2	15	2	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.11	2	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen			1	71.000.000											DISHUB
2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah lain yang mengarah ke Tertatasya Perjalanan Trayek Angkutan Pedesaan	100	%	100.000.000	1	43.972.575			0	-	0,00	0,00	1,00	43.972.575	95,00	43,97	DISHUB
2	15	2	2.12	1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			1				0	-	0,00	0,00					DISHUB
2	15	2	2.12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Lokasi Penetapan Daerah Pelayanan Taksi di Kabupaten Karo	100	%	50.000.000	0						0,00	-	95,00	0,00			DISHUB
2	15	2	2.13	1	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.13	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.14		Penelitian Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Iain Trayek yang Diberbitkan dalam lintas daerah Kabupaten/Kota	100	%	16.000.000	0				0	-	100,00	41,69	0,00	95,00	0,00		DISHUB
2	15	2	2.14	1	Facilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan															DISHUB
2	15	2	2.14	2	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Iain Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Iain Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan							0	-	100,00	66,50					DISHUB
2	15	2	2.14	3	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Iain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	unit							0	-	0,00	16,88					
2	15	2	2.15		Penelitian Iain Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Iain Trayek yang diterbitkan untuk angkutan taksi dalam lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	6.000.000	0							0,00	-	105,00	0,00		DISHUB
2	15	2	2.15	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Iain Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Iain Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan															DISHUB
2	15	2	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan	%	100	28.000.000		9999758			0	-	0,00	0,00	0,00	9.999.758	107,00	35,71	DISHUB
2	15	2	2.16	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analista Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.16	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen															DISHUB
2	15	2	2.16	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan							0	-	0,00	0,00					DISHUB
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAN Pelayaran	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	97	40.408.482	0	26781753	97	25.000.000	0	-	0,00	0,00	0,00	26.781.753	0,00	66,28	DISHUB

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P*100%		15=7+13		16=15P*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	15	3	2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penerbitan Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang disediakan	%	100		10.000.000	0	100		25.000.000					0,00		0,00	0,00	DISHUB	
2	15	3	2.04	1	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen				1	25.000.000											DISHUB	
2	15	3	2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Persentase Jumlah Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan kapal	%	100	13.408.482	13587000					0	-	0,00	0,00	0,00	13.587.000	0,00	101,33	DISHUB	
2	15	3	2.08	1	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen								0	-	0,00	0,00					DISHUB	
2	15	3	2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya	%	100	17.000.000	13194753					0	-	0,00	0,00	0,00	13.194.753	0,00	77,62	DISHUB	
2	15	3	2.09	2	Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen								0	-	0,00	0,00					DISHUB	
2	16			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			41.259.575.570	23.007.475.908			9.656.238.480		920.260.374		920.260.374	9,53%		23.927.736.282		57,99	Dinas Kominfo		
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			40.763.025.570	22.527.484.681			8.948.781.395		908.930.374		908.930.374	10,16	0,00	23.436.415.055		57,49	Dinas Kominfo		
2	16	01		PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	26.617.735.000	84,15	15.253.809.628	89	5.735.886.190		855.428.174	0	855.428.174	0,00	14,91	84,15	16.109.237.802	88,58	60,52	Dinas Kominfo
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi	Berkas	20		12		4		3.287.878.025		677.806.599	0	677.806.599	20,62		9.050.455.078		56,81	Dinas Kominfo
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang bulan	1260	15.445.527.955	784	7.936.008.179	280	3.172.805.775	80	658.510.999	80	658.510.999	28,57	20,75					Dinas Kominfo
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	486.018.905	36	436.640.300	12	115.072.250	3	19.295.600	3	19.295.600	25,00	16,77					Dinas Kominfo
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakatan dinas beserta belengkalannya	Paket	174	102.000.000	44	33.000.000	80	58.455.000	80	51.600.000	80	51.600.000	0,00	88,27	44,00	84.600.000	25,29	82,94	Dinas Kominfo
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	174	102.000.000	44	33.000.000	80	58.455.000	80	51.600.000		51.600.000	0,00	88,27					Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas	laporan	10		6		1							15,70		1.219.094.615		147,19	Dinas Kominfo
2	16	01	2.06		Administrasi umum Dinas yang dikelola	Jenis	15	828.257.805	9	1.157.843.742	3	390.073.700		61.250.873	0	61.250.873							Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	145	103.427.805	89	205.320.100	30	21.243.700	30	18.164.650	30	18.164.650	100,00	85,51					Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	208.650.000	9	145.149.850	3	47.270.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5400	27.000.000	3.240	17.226.000	1080	7.560.000	0	-	0,00	0,00							Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	35	100.000.000	24	69.507.000	7	20.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1000	389.180.000	600	720.640.792	200	294.000.000	50	43.086.223	50	43.086.223	25,00	14,66					Dinas Kominfo
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKMED yang dilampirkan	Berkas	1	40.000.000	1	35.900.000							1,00		35.900.000	100,00	89,75	Dinas Kominfo	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	40.000.000	1	35.900.000													Dinas Kominfo
2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pegawai Harian Lepas	Orang	22	9.577.930.335	22	5.475.194.937	12	1.923.889.465		53.506.702	0	53.506.702	0,00	2,78	22,00	5.528.701.639	100,00	57,72	Dinas Kominfo
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	7.962.030.335	36	4.444.993.387	12	1.586.000.000	3	247.602	3	247.602	25,00	0,02					Dinas Kominfo
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	40	22.000.000	20	12.000.000	10	5.000.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	1.593.900.000	36	1.018.201.550	12	332.889.465	2	53.259.100	2	53.259.100	16,67	16,00					Dinas Kominfo
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas	Laporan	1	138.000.000	1	179.222.470	1	75.590.000		11.264.000	0	11.264.000	0,00	14,90	1,00	190.486.470	100,00	138,03	Dinas Kominfo
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	1	138.000.000	1	179.222.470	1	75.590.000	1	11.264.000	1	11.264.000	100,00	14,90					Dinas Kominfo
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	Indeks	3	3.039.229.912	3,04	2.653.170.013	3,04	1.065.634.761		17.171.000	0,00	17.171.000	0,00	1,61	3,04	2.670.341.013	101,33	87,56	Dinas Kominfo
2	16	02	2.01		Jumlah konten yang dihasilkan oleh Bidang Humas dan IKP kemudian disebarluaskan melalui Website, Medsos, radio, siaran kelling, balho, soundak dan billboard	konten	750		450		150												Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	orang	75	3.039.229.912	45	2.653.170.013	15	1.065.634.761		17.171.000	0	17.171.000	#VALUE!	1,61	#VALUE!	2.670.341.013	#VALUE!	87,56	Dinas Kominfo
2	16	02	2.01		Terkelolanya PPID di Daerah Kabupaten Karo	perangkat daerah	46		46		46												Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik/ Penyusunan Konten	dokumen	830	817.304.688	450	821.141.000	1049	65.640.000	293	16.271.000	293	16.271.000	27,93	24,79					Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik/ Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	dokumen	1318	1.086.240.000	600	907.719.163	250	262.535.000		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media/ Pengelolaan Media Komunikasi Publik	layanan	135	131.625.000	90	44.454.000	30	33.948.000	3	900.000	3	900.000	10,00	2,65					Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	orang	14	46.288.650	14	38.140.650	15	17.271.120		0	-	0,00							Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Kominfo Informasi di Daerah / Pelayanan Informasi Publik	dokumen	3	134.682.240	1	16.668.200	1	365.870.735		0	-								Dinas Kominfo
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemitraan komunitas/ Relasi Media	dokumen	31550	823.089.334	24.000	825.047.000	8000	320.369.906		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Indeks	3	11.106.060.658	3,04	4.620.505.040	3,04	2.147.260.444		36.331.200	2,87	36.331.200	84,54	1,69	5,61	4.656.836.240	187,00	41,93	Dinas Kominfo
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten	laporan	1	2.591.089.051	1	872.949.000	1	309.260.444		-	0	-	0,00	0,00	1,00	872.949.000	100,00	33,69	Dinas Kominfo
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	domain	1	242.000	1	121.000				0	-	100,00	100,00						Dinas Kominfo
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	22.000.000	1	12.940.000				0	-	100,00	99,93						Dinas Kominfo
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah/ Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	53	2.568.847.051	30	859.888.000	46	309.260.444		0	-	0,00	0,00						Dinas Kominfo

3				4	5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P*100%		15=7+13		16=15P*100%		17	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terusunnya dokumen pengelolaan e-government Terkoordinasinya kegiatan pengelolaan e-government Persetase indikator sasaran kegiatan e-government	dokumen	1	8.514.971.607	1	3.747.556.040	1	1.838.000.000		36.331.200	0	36.331.200	0,00	1,98	1,00	3.783.887.240	100,00	44,44	Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan danPengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	25	723.490.144	-	-												Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	279.920.000	1	92.733.930			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	2	498.666.519	-	-												Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	dokumen	1	50.000.000	1	99.735.000			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	dokumen	4	605.160.000	3	41.736.200			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	3	1.002.032.000	2	292.059.800	4	842.000.000		0	-	0,00	0,00					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	7	411.000.000	3	192.059.800	4	96.000.000		0	-	0,00	0,00					Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengrolaian Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas/ Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	2	2.914.468.019	2	1.674.250.700	1	700.000.000		32.000.000	0	32.000.000	0,00	4,57				Dinas Kominfo	
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	1	800.000.000	1	136.575.500			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	dokumen	1	1.150.234.925	1	1.179.864.250			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE/ Fasilitas penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	80.000.000	1	38.540.860	1	200.000.000		4.331.200	0	4.331.200	0,00	2,17				Dinas Kominfo	
2	20	002			PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	3	261.550.000	3,04	284.057.800	3,04	603.755.085		11.330.000	0	11.330.000	0,00	1,88	3,04	295.387.800	101,33	112,94	Dinas Kominfo	
2	20	002				Terselenggaranya penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten	jenis	2						11.330.000	0	11.330.000	0,00	1,88	3,04	295.387.800	101,33	112,94	Dinas Kominfo	
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	orang	67	261.550.000	3,04	284.057.800	3,04	603.755.085		11.330.000	0	11.330.000	0,00	1,88	3,04	295.387.800	#VALUE!	112,94	Dinas Kominfo
2	20	2	201			Tersedianya dokumen Pembangunan Metadata Statistik Sektoral	jenis	2																
2	20	2	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral/ Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	1	69.110.000	1	138.186.200	1	257.305.085	1	600.000	1	600.000	100,00	0,23					Dinas Kominfo
2	20	2	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	64	36.220.000	14	96.055.150			0	-	#DIV/0!	#DIV/0!						Dinas Kominfo	
2	20	2	201	03	Membangun metadata statistik sektoral/ Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	1	57.110.000	1	49.816.450	1	346.450.000	1	10.730.000	1	10.730.000	100,00	3,10				Dinas Kominfo	
2	20	2	201	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	2	99.110.000	-	-			0									Dinas Kominfo	
2	21	002			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBANDIARAN	Indeks SPBE	3	235.000.000	3,04	195.933.427	3,04	103.702.000		-	0	-	0,00	0,00					Dinas Kominfo	
2	21	002			PROGRAM PENYELenggaraAN PERBANDIARAN UNTUK PENGAMANAN	Indeks SPBE	3	235.000.000	3,04	195.933.427	3,04	103.702.000		-	0	-	0,00	0,00	3,04	195.933.427	101,33	83,38	Dinas Kominfo	
2	21	002	201		Penyelenggaraan Perbandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terselenggaranya tanda tangan elektronik di lingkup daerah Kabupaten	perangkat daerah	46	235.000.000	46	195.933.427	3,04	103.702.000		-	0	-	0,00	0,00	46,00	195.933.427	100,00	83,38	Dinas Kominfo
2	21	2	201	01	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	5	235.000.000	3	195.933.427	2	103.702.000		0	-	0,00	0,00					Dinas Kominfo	
2	18				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KUTU			37.658.588.677		16.358.603.177		5.826.908.311		893.238.879		893.238.879		15,33%		17.251.842.056		45,81	DPMPTSP	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	87,5	31.327.242.677	86,2	13.482.286.883	87,50	4.633.958.311	83,18	889.229.079	83,18	889.229.079	95,06	19,19	83,18	14.371.515.962	95,06	45,88	DPMPTSP
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	laporan	4	21.175.508.206	4	9.998.449.633	4	3.268.564.064	1	758.051.366	1,00	758.051.366	25,00	23,19	5,00	10.756.500.999	125,00	50,80	DPMPTSP
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan					27	3.175.444.046	25	743.831.366	25	743.831.366	92,59	23,42				DPMPTSP	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen					12	93.120.000	3	14.220.000	3	14.220.000	25,00	15,27				DPMPTSP	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian berupa urusan keuangan pangkat, mutasi, gaji, bersila, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami, kartu istri, tabungan asuransi pensiun, pengimanan peserta pendidik dan pelatihan/bimbingan teknis dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai	%	100	842.568.000	100	80.352.000	100	55.440.000		-		0,00	0,00	100,00	80.352.000	100,00	9,54	DPMPTSP	
2	18	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit										0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakiaian Dinas Berserta Atribut Keleengkapan	Jumlah Paket Pakiaian Dinas berserta Atribut Keleengkapan	paket					50	55.440.000				0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang										0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Laporan	27	2.399.298.971	100	1.291.397.987	27	519.174.295	9	27.761.248	9	27.761.248	33,33	5,35	109,00	1.319.159.235	403,70	54,98	DPMPTSP
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket					50	3.165.635		0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket					45	64.600.152		0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket					21	20.845.788		0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	paket					7	49.977.720	3	3.161.900	3	3.161.900	42,86	6,33				DPMPTSP	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	dokumen								0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan					12	380.585.000	3	24.599.348	3	24.599.348	25,00	6,46				DPMPTSP	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	55	2.420.000.000	100	510.021.750	21	287.869.970		-	0	-	0,00	0,00	100,00	510.021.750	181,82	21,08	DPMPTSP
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit								0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit					3	9.682.410		0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit					18	278.187.560		0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	3.805.310.500	100	1.486.910.036	12	464.490.000	3	97.109.570	3	97.109.570	25,00	20,91	103,00	1.584.019.606	858,33	41,63	DPMPTSP

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		12	30.160.000			3	5.729.570	3	5.729.570	28,00	19,00			DPMPTSP		
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan		21	14.810.000				0	-	0,00	0,00					DPMPTSP	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		12	419.520.000			3	91.380.000	3	91.380.000	25,00	21,78			DPMPTSP		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1	684.557.000	100	115.155.477	1,00	38.420.000	1	6.306.895	1	6.306.895	100,00	16,42	101,00	121.462.372	10.100,00	17,74	DPMPTSP	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya		unit		1	38.420.000			1	6.306.895	1	6.306.895	100,00	16,42			DPMPTSP		
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit						0	-	0,00	0,00					DPMPTSP		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berusaha Nasional PMA/PMDN	Investor	89	1.807.852.000	84	361.224.226	100	160.027.000	96	505.200	96	505.200	96,00	0,32	180,00	361.729.426	202,25	20,01	DPMPTSP
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan yang terasus	dokumen	4	700.000.000	100	134.209.576			0	-	0,00	0,00	100,00	134.209.576	2.500,00	19,17		DPMPTSP	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		dokumen						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		kegiatan usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang investasi	dokumen	5	1.107.852.000	100	227.014.650	1	160.027.000		505.200	0	505.200	0,00	0,32	100,00	227.519.850	2.000,00	20,54	DPMPTSP
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		dokumen						0	-	0,00	0,00							
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		dokumen						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	02	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		dokumen			1	160.027.000		505.200	0	505.200	0,00	0,32						
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berusaha Nasional PMA/PMDN	investor	89	1.153.500.000	93	351.234.890	100	305.553.000	96	436.600	96	436.600	96,00	0,14	189,00	351.671.490	212,36	30,49	DPMPTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi	investor	11	1.153.500.000	100	351.234.890	2	305.553.000		436.600	0	436.600	0,00	0,14	100,00	351.671.490	909,09	30,49	DPMPTSP
2	18	03	2.01	01	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal		dokumen						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal		dokumen		2	185.544.000			0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabu/Kota		dokumen		1	120.009.000			436.600	0	436.600	0,00	0,36						DPMPTSP
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan	izin	2200	1.183.500.000		467.127.900	2.100	357.950.000	297	-	297	-	14,14	0,00	297,00	467.127.900	13,50	39,47	DPMPTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan	izin	2200	1.183.500.000	100	467.127.900	2.100	357.950.000	297,00	-	297	-	14,14	0,00	397,00	467.127.900	18,05	39,47	DPMPTSP
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		pelaku usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		kegiatan usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	04	2.01	03	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan		orang						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		kegiatan usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen		1	30.000.000			0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		pelaku usaha		2.100	114.000.000		297		297	-	14,14	0,00						DPMPTSP
2	18	04	2.01	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		pelaku usaha		40	24.000.000						0,00	0,00						
2	18	04	2.01	08	Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		kegiatan usaha		800	189.950.000			0	-	0,00	0,00							DPMPTSP
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berusaha Nasional PMA/PMDN	investor	91	1.456.622.000		1.514.029.278	100	249.420.000		3.068.000	96	3.068.000	96,00	1,23	96,00	1.517.097.278	105,49	104,15	DPMPTSP
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	kegiatan usaha	75	1.456.622.000		1.514.029.278	70	249.420.000		3.068.000	0	3.068.000	0,00	1,23	0,00	1.517.097.278	0,00	104,15	DPMPTSP
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		kegiatan usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		pelaku usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		kegiatan usaha						0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		kegiatan usaha		10	26.220.000			0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	18	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		pelaku usaha		165	132.183.775			0	-	0,00	0,00							DPMPTSP
2	18	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspekti Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		kegiatan usaha		50	91.016.225			3.068.000	0	3.068.000	0,00	3,37						DPMPTSP
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan	izin	2100	729.872.000		182.700.000	2100	120.000.000	297	-	297	-	14,14	0,00	297,00	182.700.000	14,14	25,03	DPMPTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan data yang dipenuhi kepada instansi yang membutuhkan	%	100	729.872.000		182.700.000	100	120.000.000		0	-	0,00	0,00	0,00	182.700.000	0,00	25,03		DPMPTSP
2	18	06	2.01	01	Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Didaki dan Dimanfaatkan		dokumen		1	120.000.000			0	-	0,00	0,00						DPMPTSP	
2	22				DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAKARAGA SERTA PARIWISATA	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	34	526.007.341	21	621.059.969	30	450.000.000	0	0	-	169,23	0,00	21,00	621.059.969	61,76	118,07	Diabudoparpar	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDG Kebudayaan, Lembaga dan Pranaa Kebudayaan yang Dibina	orang	100	451.007.341	100	621.059.969	120	450.000.000	0	0	#VALUE!	-	0,00	0,00	#VALUE!	621.059.969	#VALUE!	137,71	Diabudoparpar
2	22	02	2.01		Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranaa Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranaa Kebudayaan	Orang			120	450.000.000			0	0	-	0,00	0,00						Diabudoparpar

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesenian tradisional yang dibina	orang	100	75.000.000	-	0								0,00	-	0,00	0,00	Diabudporapar		
2	22	02	2.02	02 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional	Kali										-	-	0,00	0,00			Diabudporapar		
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	13	532.121.835	22	847.118.462	12	215.000.000	0	0	-	-	118,18	8,17	22,00	847.118.462	169,23	159,20	Diabudporapar	
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	orang	100	532.121.835	100	847.118.462	120	215.000.000	0	0	-	-	25,00	8,17	100,00	847.118.462	100,00	159,20	Diabudporapar	
2	22	03	2.01	01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					90	215.000.000	0	0	-	-	0,00	8,17					Diabudporapar	
-	-	-	-	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga										-	-	0,00	0,00			Diabudporapar		
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda Situas dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	Cagar Budaya	25	598.950.000	9	762.480.083	22	550.000.000	11	0	11	-	45,00	3,86	20,00	762.480.083	80,00	127,30	Diabudporapar	
2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang ditetapkan	objek	100	453.750.000	100	436.736.973	13	150.000.000	0	0	-	-	25,00	3,86	100,00	436.736.973	100,00	96,25	Diabudporapar	
2	22	05	2.01	01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek							0	0	-	-	0,00	3,86					Diabudporapar	
2	22	05	2.01	02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek					2	150.000.000	0	0	-	-	0,00	3,86					Diabudporapar	
2	22	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	cagar budaya	100	145.200.000	100	325.743.110	22	400.000.000	11	0	11	-	0,00	0,00	111,00	325.743.110	111,00	224,34	Diabudporapar	
2	22	05	2.01	01 Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek					1	400.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	16.325.501.124	78	24.183.922.510	92	7.789.027.836		1.413.099.265		1.413.099.265	0,00	39,31	78,00	25.597.021.775	82,11	156,79	Diabudporapar	
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	usulan RKA, RKAP, DPA dan DPFA yang diverifikasi dokumen penatausahaan SP2D Laporan Keuangan	dokumen	100	6.634.081.394	100	17.229.519.134	1	5.641.384.347	0	1.191.837.834	-	1.191.837.834	50,00	40,14	100,00	18.421.356.968	100,00	277,68	Diabudporapar	
3	26	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					43	5.464.864.347	43	1.191.837.834	43	1.191.837.834	200,00	41,40					Diabudporapar	
3	26	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					1	176.520.000	0	0	-	-	0,00	2,12					Diabudporapar	
3	26	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	dokumen	100	6.634.081.394	100	17.229.519.134	1	45.750.000	0	0	-	-	50,00	40,14	100,00	17.229.519.134	100,00	259,71	Diabudporapar	
3	26	01	2.05	02 Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Keleengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Berserta Atribut Keleengkapannya	paket					61	45.750.000	0	0	-	-	200,00	41,40					Diabudporapar	
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit rumah tangga yang disediakan Jumlah dokumen bahan cetak yang disediakan Jumlah dokumen bahan bocoran/perturan perundang-undangan yang disediakan Banyaknya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Paket	100	1.489.560.091	100	2.464.720.375		38 8 5 1 1	480.798.289	0	16.886.350	-	16.886.350	50,00	46,42	100,00	2.481.606.725	100,00	166,60	Diabudporapar
3	26	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					10	15.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					45	100.000.000	0	0	-	-							Diabudporapar	
3	26	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					15	12.480.000	0	0	-	-							Diabudporapar	
3	26	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					5	36.860.000	0	0	-	-	60,00	18,42					Diabudporapar	
3	26	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen					1	4.988.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	311.470.289	0	16.886.350	-	16.886.350	0,00	48,72					Diabudporapar	
3	26	01	2.05	02 Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Keleengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Berserta Keleengkapannya	paket										0,00	0,00					Diabudporapar		
3	26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai Jumlah unit jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah bulan pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan unit bulan	100	1.429.869.342	100	3.364.897.462	12 35 12	1.179.530.000	0	196.815.081	-	196.815.081	50,00	41,28	100,00	3.561.712.543	100,00	249,09	Diabudporapar	
3	26	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1	142.920.000	0	11.555.081	-	11.555.081	0,00	41,85					Diabudporapar	
3	26	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					1	24.950.000	0	-	-	-							Diabudporapar	
3	26	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	1.011.660.000	0	185.260.000	-	185.260.000	0,00	41,07					Diabudporapar	
3	26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara	unit	100	130.438.000	100	969.853.911	7	281.565.200	0	7.560.000	-	7.560.000	50,00	5,32	100,00	977.413.911	100,00	749,33	Diabudporapar	
3	26	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit					8	242.565.200	0	0	-	-	0,00						Diabudporapar	
3	26	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					10	39.000.000	0	7.560.000	-	7.560.000	57,14	38,16					Diabudporapar	
3	26	01	2.09	09 Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terteliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit										0,00	0,00					Diabudporapar		
3	26	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Didirikan	unit	100	7.470.903	100	42.431.628	10	160.000.000	0	0	-	-			100,00	42.431.628	100,00	567,96	Diabudporapar	
3	26	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit										-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.07	05 Pengadaan Mebelur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit					10	30.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					1	80.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Adanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit										-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	50.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1306500	22.496.465.026	1280978	19.046.038.029	1.204.500	4.490.934.000	240.543	0	240.543	60,23	0,00	*****	19.046.038.029	116,46	84,66	Diabudporapar		
3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang Dikelola	objek	100	519.090.000	-	-	4	-	-				0,00	-	0,00	0,00			Diabudporapar	
3	26	02	2.01	03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan																		Diabudporapar	
3	26	02	2.01	04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		Diabudporapar	
3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikelola	kawasan	100	179.510.000	-	-	2	500.000.000							0,00	-	0,00	0,00	Diabudporapar	
3	26	02	2.02	01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek yang Ditencanakan di Kawasan Strategis Pariwisata												0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	02	2.02	02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota												0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikelola	objek	100	21.797.865.026	100	19.046.038.029	4	3.990.934.000	0	0	-	-			100,00	19.046.038.029	100,00	87,38	Diabudporapar	
3	26	02	2.03	04 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)	lokasi					2	500.000.000	0	0	-	-							Diabudporapar	
3	26	02	2.03	04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Tertelihara	unit					6	3.490.934.000	0	0	-	-							Diabudporapar	
h	26	02	2.03	05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan										0,00	0,00					Diabudporapar		
3	26	02	2.03	06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata dalam Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					1	500.000.000	0	0	-	-	0,00	0,00					Diabudporapar	
3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1306500	1.961.869.279	1.280.978	8.270.514.083	1.204.500	4.055.264.144	240.543	239.700.000	240.543	239.700.000	60,23	18,52	*****					

3					4	5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen					1	200.000.000	0	0	-	-	-	-					Diabudporapar			
3	26	03	2.01	02	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan					12	3.650.000.000	2	239.700.000	2	239.700.000	-	-					Diabudporapar			
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					1	205.264.144	0	0	-	-	-	-					Diabudporapar			
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	195	2.200.000.000	330	4.767.594.975	185	2.518.304.680	0	10.570.000	-	10.570.000	-	10.570.000	330,00	4.778.164.975	169,23	217,19	-	-	Diabudporapar	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	orang	100	1.800.000.000	100	4.497.952.225	120	2.438.304.680	0	10.570.000	-	10.570.000	-	10.570.000	100,00	4.508.822.225	100,00	250,47	-	-	Diabudporapar	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang										-	-	-	-					Diabudporapar		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang										-	-	-	-					Diabudporapar		
3	26	05	2.01	03	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang										-	-	-	-					Diabudporapar		
3	26	05	2.01	06	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang					200	500.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
3	26	05	2.01	9	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Orang					200	1.800.000.000	0	10.570.000	-	10.570.000	0,59	0,59								
3	26	05	2.01	010	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang					24	138.304.680	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00						
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	orang	100	400.000.000	100	269.642.750	90	80.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	269.642.750	100,00	67,41	-	-		
3	26	05	2.02	01	Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang					75	80.000.000	0	0	-	-	-	-								
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	53	514.201.000	100	668.033.913	50	1.127.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	668.033.913	188,68	129,92	-	-	Diabudporapar	
2	19	02	2.01		Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Jumlah Wirasaha Muda, Pemuda Pelopor yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	orang	100	509.701.000	100	570.308.550	100	1.127.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	570.308.550	100,00	111,89	-	-	Diabudporapar	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Tersedianya Fasilitas Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	org										-	-	0,00	0,00					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Pemuda	17 kec										-	-	0,00	0,00					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda Advokasi Akses Pengembangan Diri Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	05	Penyusunan Koordinasi Strategi Lintas Sektor	Tersedianya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	dokumen										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	06	Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Pengadaan Pemasatan Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	dokumen										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi pemuda yang berjasa dan atau Terpilihnya Anggota Pasukitama Tk Nasional/Propinsi dan Kab.Karo	Tersedianya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah kalangan Pemuda	org										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	08	Perkembangan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelaan Pemuda	Tersedianya Anggota Pasukitama Tk Nasional/Propinsi dan Kab.Karo	ORG										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.01	011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepewirausahaan Pemuda bagi wirasaha pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirasaha Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	orang					50	407.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	02	2.01	014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota yang baknya terpenuhi	orang					50	500.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	02	2.01	015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	orang					85	220.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten yang ditingkatkan	organisasi	100	4.500.000	100	97.725.363	5	-	-	-	-	-	-	-	100,00	97.725.363	100,00	2.171,67	-	-	Diabudporapar	
2	19	02	2.02	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tersedianya Rancangan Pola Kemitraan antar Pemuda dan Masyarakat	bh										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	dokumen										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAN	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang Olahraga	22	862.100.000,00	16	6.100.867.666	20	2.270.000.000	0	0	-	0,00	0,00	16,00	6.100.867.666	72,73	707,68	-	-	Diabudporapar		
2	19	03	2.01		Peningkatan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Olahraga yang tersedia	unit	100	98.500.000	100	1.349.176.000	11	250.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	1.349.176.000	100,00	1.369,72	-	-	Diabudporapar	
2	19	03	2.01	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Tersedianya Perencanaan Olahraga Terpadu	org										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termamfaatkan	unit										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit					255	250.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga kejuaraan yang diselenggarakan	cabor	100	273.000.000	100	669.911.210	10	750.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	669.911.210	100,00	245,39	-	-	Diabudporapar	
2	19	03	2.02	04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan					3	750.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Provinsi	cabor	100	273.000.000	100	3.412.443.866	6	1.200.000.000	0	0	-	-	-	-	100,00	3.412.443.866	100,00	1.249,98	-	-	Diabudporapar	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Prestasi Olahraga	Tersedianya Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga	jenis										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03	2.03	07	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	org					113	400.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	03	2.03	09	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dibina dan diberikan	org					100	800.000.000	0	0	-	-	-	-						Diabudporapar		
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi olahraga yang ditingkatkan kapasitasnya	organisasi	100	190.000.000	100	669.336.590	10	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	669.336.590	100,00	352,28	-	Diabudporapar
2	19	03	2.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Tersedianya pelatih peneliti praktisi dan tehniisi olahraga yang berkualitas	org										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Tersedianya Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah (yang berkembang dimasyarakat exp Atletik Catur Beladiri Wushu Gulat Karateka Taekwondo Pencak Silat)	Jenis										-	-	-	-					Diabudporapar		
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	organisasi										-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!				Diabudporapar	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang ditingkatkan kapasitasnya	cabor	100	27.600.000	0	-	4	70.000.000	0	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	Diabudporapar	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat : senam volly futsalhockeybasket Enggrang Motocross)	org																Diabudporagar		
				01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya senam Massal di Kab. Karo	org																Diabudporagar		
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perikumpulan Olahraga Rekreasi	Adanya Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	cahor																Diabudporagar		
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Tersediaanya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	kali																Diabudporagar		
2	19	03	2.05	010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasahan festival dan olahraga rekreasi	Lembaga			3	70.000.000	0	0										Diabudporagar		
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	70	164.000.000	100	240.588.233	65	410.000.000	0	0			100,00	240.588.233	142,86	146,70		Diabudporagar		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	100	164.000.000	100	240.588.233	3	410.000.000	0	0			100,00	240.588.233	100,00	146,70		Diabudporagar		
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi			3	50.000.000	0	0			0,00	0,000						Diabudporagar		
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Adanya Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Keperumdaan	org/ld									0,00	0,000						Diabudporagar		
2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersediaanya Pedoman Komunikasi Informasi Edukasi dan Advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda	dokumen									0,00	0,000						Diabudporagar		
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan			1	100.000.000	0	0			0,00	0,000						Diabudporagar		
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Laporan			1	260.000.000	0	0			0,00	0,000						Diabudporagar		
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																		DPA		
2	23				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	31.432.419.791	95	9.424.206.619	85	4.765.476.950			1.085.513.015	0	1.085.513.015	0,00	22,78	95,00	10.509.719.634	100,00	33,44	DPA
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	14.478.019.791	12	8.363.581.409	12	4.125.618.690	3	979.924.827	3	970.824.827	25,00	23,53	15,00	9.334.406.236	25,00	64,47	DPA	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	60	14.088.019.791	37	8.220.221.409	37	4.027.058.690	32	970.824.827	32	9.100.000	86,49	0,23						DPA
2	23	01	2.02	02	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminitras Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	360	390.000.000	99	143.360.000	12	98.560.000	9	9.100.000	9	-	75,00	0,00						DPA
2	23	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	77.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		DPA
2	23	01	2.03	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	unit	190	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	01	2.03	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	300	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	01	2.03	03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	200	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	01	2.03	04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	orang	200	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan	Laporan	60	936.400.000	12	366.694.552	12	175.728.460	0	0	0	-	0,00	0,00	12,00	366.694.552	20,00	39,16		DPA
2	23	02	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	80	4.000.000	1	1.853.190	1	1.000.000	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	250	205.000.000	2	116.244.803	2	65.000.000	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	80	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	17.000.000	1	19.469.380	1	8.660.000	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	1.500	20.400.000	2.650	4.370.000	24	4.000.000	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dokumen	1.250	620.000.000	105	219.897.179	100	97.068.460	0	0	10	0	-	0,00	0,00	#REF!				DPA
2	23	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKEMD yang Dilaporkan	Berkas RKEMD	150	12.463.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00		DPA
2	23	02	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	40	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	unit	80	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediaanya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	130	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.07	07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5	10.004.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.07	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	50	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Listrik Wifi Petugas Kebersihan dan Keamanan Dinas Perpustakaan dan Arsip yang Tersedia	Laporan	60	1.985.000.000	12	688.014.987	12	334.129.800	3	70.131.416	3	7.311.416	25,00	2,19	15,00	695.326.403	25,00	35,03		DPA
2	23	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Laporan	60	294.000.000	12	90.695.659	24	48.000.000	6,00	7.311.416	6	-	25,00	0,00						DPA
2	23	02	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	145	16.000.000	30	72.891.750	6	15.000.000	0,00	-	0	62.820.000	0,00	418,80						DPA
2	23	02	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1.140	1.675.000.000	238	578.660.000	25	271.129.800	72,00	62.820.000	72	35.456.772	288,00	13,08						DPA
2	23	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perpustakaan	60	3.478.000.000	12	240.048.356	12	130.000.000	3	35.456.772	3	35.456.772	3	-	25,00	0,00	15,00	240.048.356	25,00	6,90	DPA
2	23	02	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	unit	40	2.474.000.000	8	240.048.356	8	130.000.000	4,00	35.456.772	4	35.456.772	50,00	27,27						DPA
2	23	02	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	unit	5	1.004.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00						DPA
2	23	02			PROGRAM PEMBIKINAN PERPUSTAKAAN	Pewujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional dan berbasis Inklusif Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	persen	100		97	2.007.479.094	100	10.683.974.830	0	0	0	-	0,00	0,00	97,44	2.007.479.094	97,44	#DIV/0!		DPA
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	Perpustakaan	100	3.522.889.000	99	1.150.374.826	100	363.374.830	0	0	0	-	0,00	0,00	98,94	1.150.374.826	98,94	32,65		DPA
2	23	02																							

3			4	5	6			7	8			9	13=9+10+11+12			14=13B*100%			15=7+13			16=15B*100%			17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
3	27	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP, DPA, DPPA yang terverifikasi Penatausahaan RP2D Laporan Keuangan	Berkas Berkas 200 4	91.862.860.367	50.198.911.675	4	200 4	16.554.583.339	4	3.749.146.562	3.749.146.562	0,00	22,65	0,00	53.948.058.237	#VALUE!	58,73					DISTAN
3	27	1	2.02	1	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			146	16.364.863.339	146	3.701.716.562	188	3.701.716.562	128,77	22,62									DISTAN
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			1	189.720.000	1	47.430.000	1	47.430.000	100,00	25,00									DISTAN
3	27	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai, Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Unit Stel	182	420.130.000	199	148.946.127	182	137.250.000	-	-	0,00	0,00	199,00	148.946.127	109,34	35,45					DISTAN
3	27	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			0	-	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			0	137.250.000	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian - Administrasi umum Dinas Pertanian yang terkelola - Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	Laporan Jenis Kegiatan	10 6 2	2.155.252.960	1.857.485.216	10 6 2	556.050.592	41.478.610	-	41.478.610	0,00	7,46	0,00	1.898.963.826	#VALUE!	88,11					DISTAN
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket			8	22.684.780	-	-	8	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			28	213.316.565	-	-	28	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket			28	10.382.247	-	-	28	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			28	45.107.000	-	-	28	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			2	264.560.000	2	41.478.610	2	41.478.610	100,00	15,68								DISTAN	
3	27	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	2	350.000.000	8	223.063.670	0	-	-	-	0,00	0,00	8,00	223.063.670	400,00	63,73				DISTAN	
3	27	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis					0	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik serta Jasa Pelayanan Umum	Bulan	60	1.653.260.000	576	2.357.508.467	12	1.760.100.000	368.533.927	-	368.533.927	0,00	20,94	576,00	2.726.042.394	164,89				DISTAN	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan			288	106.000.000	48	18.103.927	288	18.103.927	100,00	17,08								DISTAN	
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	1.654.100.000	12	350.430.000	12	350.430.000	100,00	21,19								DISTAN	
3	27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, terkamuflase dan terpeliharaan barang inventaris serta barang milik daerah	Jenis	2	495.953.800	109	302.166.388	2	181.290.120	3.186.500	-	3.186.500	0,00	1,76	109,00	305.352.888	5.450,00	61,57			DISTAN	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pakaj dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit			16	96.290.120	16	3.186.500	36	3.186.500	225,00	3,31								DISTAN	
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			15	10.000.000	-	-	15	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit			1	75.000.000	-	-	-	-										DISTAN	
3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi	Kuintal/ha	91.59	12.577.699.880	10.904.262.696	91.13	2.848.276.460	-	-	-	0,00	0,00	0,00	10.904.262.696	86,70					DISTAN	
3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	Poktan	102	2.525.999.960	10	4.863.646.362	29	830.276.500	-	-	-	0,00	0,00	10,00	4.863.646.362	9,80	192,54				DISTAN
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan			0	-	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Laporan			3	830.276.500	-	-	4	-	133,33	0,00								DISTAN	
3	27	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewanngan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi pertanian yang difasilitasi	Jenis	14	7.047.453.999	34	5.147.675.794	4	1.717.999.960	-	-	0,00	0,00	24,00	5.147.675.794	171,43	73,04				DISTAN	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen			2	300.000.000	-	-	1	-	50,00	0,00							DISTAN	
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen			2	1.417.999.960	-	-	0	3	150,00	0,00							DISTAN	
3	27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	100.000.000	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	#VALUE!	-	#VALUE!	0,00				DISTAN	
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan			0	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	2	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan	Ekor	116	2.904.245.931	1380	892.940.540	110	300.000.000	0	-	0,00	0,00	#VALUE!	892.940.540	#VALUE!	30,75				DISTAN	
3	27	2	2.06	3	Pengadaan Benih/Bibit/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain	Ekor			110	300.000.000	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas Komoditi	Kuintal/ha	91.59	12.006.299.840	18.675.828.974	91.13	3.165.000.000	0	-	-	0,00	0,00	#VALUE!	18.675.828.974	155,55					DISTAN	
3	27	3	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pendukung Pertanian	Kegiatan	2	274.999.840	5	670.907.058	2	165.000.000	0	-	0,00	0,00	#VALUE!	670.907.058	#VALUE!	243,97				DISTAN	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan			2	165.000.000	-	-	0	3	150,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian yang di bangun	Unit	59	11.631.300.000	17.918.792.416	6	2.800.000.000	0	-	-	0,00	0,00	#VALUE!	17.918.792.416	#VALUE!	154,06				DISTAN	
3	27	3	2.02	10	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit			0	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			0	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			12	2.400.000.000	0	9	-	75,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	4	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			0	-	-	-	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	5	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Long Storage	Unit			0	-	0	0	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	15	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta berproduksi	Unit			0	-	0	0	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit			1	200.000.000	0	2	-	200,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			1	200.000.000	0	1	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	3	2.04	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Terkelolanya dan terawasanya lahan pengembalaan umum	Ha	10 dan 8	100.000.000	635	86.129.500	30	200.000.000	0	-	0,00	0,00	#VALUE!	86.129.500	86,13					DISTAN	
3	27	3	2.04	2	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dikelola	Ha			30	200.000.000	0	0	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	2	2.06	3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Laporan			0	-	-	0	-	0,00	0,00								DISTAN	
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Hewan DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah HPR yang di vaksin	%	70	3.838.999.960	1.722.904.497	70	458.793.400	0	-	-	0,00	0,00	#VALUE!	1.722.904.497	#VALUE!	44,88				DISTAN	
3	27	4	2.01	Pemeriksaan kesehatan hewan yang terdapat dan Pemeliharaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan penular rabies (HPR) yang divaksin	Ekor	15.000	3.213.999.760	1.650.930.097	15.000	458.793.400	0	-	-	0,00	0,00	#VALUE!	1.650.930.097	#VALUE!	51,37				DISTAN	
3	27	4	2.01	8	Pemeriksaan kesehatan hewan yang terdapat dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan			1	458.793.400	0	1	-	100,00	0,00								DISTAN	
3	27	4	2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	1	150.000.000	0	0	-	-	-	-			0,00	-	0,00	0,00				DISTAN	
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan			0	-	0	0	-											DISTAN
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan			0	-	0	0	-											DISTAN
3	27	4	2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	1	375.000.200	1	71.974.400	0	-	-	-			1,00	71.974.400	100,00	19,19				DISTAN	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan			0	-	0	0	-											DISTAN
3	27	4	2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	100.000.000	0	0	-	-	-	-			0,00	-	0,00	0.0000				DISTAN	
3	27	4	2.05	Redemtingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pakan Ternak dan Tempai Minum Ternak yang Didadakan	Unit			0	-	-	-	-	-										DISTAN	
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan OPT	%	5,75	1.210.554.120	377.390.895	1,31	200.000.000	0	0	-	0,00	0,00	0,00	377.390.895	0,00	31,18				DISTAN	
3	27	5	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Luas lahan pertanian yang dikendalikan OPT nya (ha)	Ha	450	1.210.554.120	850	377.390.895	140	200.000.000	0	-	850,00	377.390.895	188,89	31,18						DISTAN	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha			140	200.000.000	0	0	-											

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
4	1	1	206	9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3346	1600	5.475.532.336	800	1.450.176.078	50	91.196.032	0	0	0,00	6,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	207	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	211	18.837.083.348	9.496.375.812	40	5.524.318.990	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	207	5	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	32	12	2.404.800.000	5	748.513.090	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	207	5	Pengadaan Mebel	Unit	74	22	1.487.275.000	36	320.100.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	55	24	922.777.012	12	663.705.900	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	50	12	2.276.723.800	7	2.738.874.620	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	48	10.562.687.125	7.106.461.145	48	58.685.000	0	0	0,00	0,00%	12,00	7.106.461.145	25,00	67,28	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	24	76.657.000	12	1.249.403.650	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	24	3.128.865.865	12	153.085.970	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	60	22	425.658.772	12	1.277.700.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	24	3.421.205.000	12	2.490.359.470	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	209	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	80	5.731.734.260	9.060.824.040	10	226.054.620	0	0	0,00	0,00%	3,00	9.060.824.040	6,00	158,08	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	24	10	922.200.060	5	753.001.300	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	52	20	3.039.118.312	28	1.403.910.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	20	561.028.240	10	107.393.550	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	44	12	4.538.477.428	6	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA		
4	1	1	211	1	Administrasi Keuangan dan Operasional Daerah yang Dibayarkan Gaji dan	Orang / Bulan	2	3.951.112.910	2.092.781.331	2	886.381.290	2	11.955.279	2	11.955.279	1,00	1,35%	4,00	2.092.781.331	200,00	52,97	0,00	SETDA
4	1	1	211	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	4	1.781.219.331	2	782.381.290	2	11.955.279	2	11.955.279	1,00	1,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA
4	1	1	211	2	Kelengkapan Kepala Daerah dan Atribut	Paket	60	24	311.562.000	12	104.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	212	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	180	9.515.519.800	4.478.758.998	36	2.246.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	212	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	60	24	1.879.326.050	12	1.150.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	212	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	60	24	1.508.349.450	12	880.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	212	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket	60	24	1.091.083.498	12	216.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	213	1	Penataan Organisasi	Dokumen	36	1.250.681.588	767.577.576	7	358.586.550	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	213	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	12	24	211.442.056	2	85.533.700	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	213	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	24	196.556.380	2	127.101.040	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	213	4	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	9	24	248.316.330	2	47.961.650	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	213	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	22	111.262.810	1	135.640.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	214	1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Laporan	100	785.874.540	424.611.800	80	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA
4	1	1	214	1	Facilitasi Keprotokolan	Laporan	51	20	307.491.800	12	30.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	214	2	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	59	20	32.000.000	12	65.640.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	1	214	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	51	22	85.120.000	12	40.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	201	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN RESSIAHTERAPAN KARYAT	Predikat Sangat Tinggi	10.280.704.461	2,83	2.680.835.680	2,92	1.332.074.435	0	0	0,00	0,00%	8,64	2.680.835.680	36,08	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	201	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	700	5.046.130.923	1.381.264.468	140	707.094.670	0	0	0,00	0,00%	63,00	1.381.264.468	9,00	27,37	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	201	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	121	48	79.369.300	30	183.885.300	5	5	0,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	201	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	203	60	114.496.868	50	94.990.160	5	5	0,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	201	3	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	300	100	1.208.208.300	60	408.347.200	46	46	0,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	202	1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	31	870.000.000	547.225.482	8	98.954.300	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	202	1	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Laporan	24	24	195.834.612	12	28.516.850	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	202	2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Laporan	24	24	193.313.820	12	33.086.250	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	202	3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Laporan	24	24	158.077.050	12	37.351.200	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	203	1	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen	3270	4.364.573.538	752.345.730	654	526.025.465	0	0	0,00	0,00%	916,00	752.345.730	28,01	17,24	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	203	1	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dokumen	3020	1766	287.668.500	604	160.220.720	136	136	0,23	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	203	2	Facilitasi Bantuan Hukum	Perkara	32	10	306.981.980	7	217.576.045	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	2	203	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumen	250	100	157.695.250	50	148.228.700	136	136	0,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Paket	220	4.504.315.820	3.397.783.266	220	1.247.162.030	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan	13	898.401.300	584.345.064	3	288.300.690	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	1	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Dokumen	5	2	122.856.118	1	59.259.130	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah Kab. Karo	Laporan	13	8	313.663.176	3	107.500.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	0	16.974.000	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	201	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	5	2	130.851.770	1	121.541.560	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	202	1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan	581	368.450.000	382.174.600	120	66.346.000	0	0	0,00	0,00%	112,00	382.174.600	19,28	95,58	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	202	1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	5	2	37.402.200	1	11.770.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	202	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	2	86.316.180	12	19.576.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	202	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	550	220	228.456.220	150	35.000.000	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	203	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	230	2.826.391.220	2.329.607.602	190	801.568.340	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	203	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	920	306	2.628.630.000	200	635.468.340	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	SETDA	
4	1	3	203</																				

			4	5	6		7	8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD	Dokumen	85	199.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Set. DPRD		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD				
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP yang Terverifikasi Penatausahaan SP2D Belanja, Gaji dan Tunjangan Laporan Keuangan, Laporan Fisik/Non Fisik, Laporan Pajak Pusat, LKIP, LKRP, LPKD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Pengeluaran serta Laporan Evaluasi Renja, Renstra dan Keuangan yang Disusun	Dokumen	40 1500; 195	16.575.319.465	100	9.063.924.694	10; 300; 40	3.256.169.860	479.838.950	0	479.838.950	25,00	44,130	100,00	9.543.763.644	125,00	44,52	Set. DPRD	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		48		25	3.108.109.860,00	25	444.558.950	25	444.558.950	200,00	44,139			Set. DPRD		
4	02	01	2.02	02	Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		24	100	148.060.000,00	15	35.280.000	15	35.280.000	50,00	43,964			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	Laporan	60	127.000.000	0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,00	Set. DPRD	
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	04	Peminaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Peminaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	Dokumen	260	2.373.348.960	100	769.047.067	50	498.704.000	-	0	-	12,50	41,981	100,00	769.047.067	112,50	26,60	Set. DPRD	
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0	1	91.500.000	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		
4	02	01	2.05	03	Pengelolaan dan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Orang		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan/tugaskan	orang		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		71	25	407.204.000	-	0	-	129,17	42,907			Set. DPRD				
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum yang Terkelola	Dokumen	60	8.373.962.960	100	7.755.515.707	12	2.120.536.089	3	81.203.920	3	81.203.920	3,57	20,401	103,00	7.836.719.627	103,57	75,49	Set. DPRD
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/ Kantor yang disediakan	Paket		10	1	25.000.000	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		17	1	546.561.509	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		10	1	558.958.580	-	0	-	0	-	100,00	4,720			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		15	1	29.726.953	-	0	-	0	-	100,00	5,509			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen		13	1	32.400.000	-	0	-	0	-	600,00	14,833			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket		29	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		29	12	286.648.000	-	0	-	0	-	50,00	16,906			Set. DPRD		
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		75	90	703.368.000	13	81.203.920	13	81.203.920	55,56	43,006			Set. DPRD			
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang bertambah	Unit	350	5.357.089.318	100	631.318.020	77	3.691.020.000	-	0	-	0,00	0,000	100,00	631.318.020	100,00	8,11	Set. DPRD	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit		0	3	2.206.020.000	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		0	74	1.485.000.000,00	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		35					0	-	0,00	0,000			Set. DPRD			
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operator Komputer, Jasa Supir Kendaraan Dinas, Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan yang tersedia	Orang	240	5.162.800.000	100	3.407.688.275	12	1.297.600.000	3	176.254.076	3	176.254.076	8,33	33,041	103,00	3.583.942.351	108,33	53,43	Set. DPRD
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan						0	-	0	-	0,00	0,000			Set. DPRD		

3				4		5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen			2		1	28.520.000			0	0,00	0,000						Set. DPRD			
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD																						
					Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan																						
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli																						
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi																						
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1.000	5.449.948.000	100	2.923.545.257	100	2.210.556.500	246.763.270	0	246.763.270	0,00	16.413	100,00	3.170.308.527	100,00	39,81		Set. DPRD			
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen																				
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen																				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang			0	3	180.070.000			0	-	0,00	0,000									
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang			28	8	384.070.000,00	8	84.000.000	8	84.000.000	75,00	41.659									
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen			0	0	-			0	-	0,00	0,000									
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen			1	1	513.200.000,00			0	-	0,00	0,000									
4	02	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Publikasi dan Dokumentasi	Dokumen			12	100	164.230.500,00			0	-	0,00	0,000									
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15	6.422.463.000	100	924.945.000	3	1.336.970.000	3	210.680.000	3	210.680.000	30,00	46.245	103,00	1.135.625.000	130,00	13,95		Set. DPRD		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan			12	100	100.000.000,00	39	11.200.000	39	11.200.000	6,67	12.598							Set. DPRD		
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen			1	1	18.142.000,00			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen			4	3	1.218.828.000,00	1	199.480.000	1	199.480.000	100,00	58.189							Set. DPRD		
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	60	2.116.310.902	0	6.867.000	12	9.560.000			0	-	0,00	0,000	0,00	6.867.000	0,00	0,00		Set. DPRD		
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen			0	0	9.560.000			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan			0	1	9.560.000			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	5	81.040.000	0									0,00	-	0,00	0,00			Set. DPRD		
4	02	02	2.07	01	Fasilitas Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen			0	0	-			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	Dokumen			0	0	-			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3.000	13.743.115.967	100	37.246.992.004	3.000	20.085.793.870	300	2.099.764.726	300	2.099.764.726	0,00	65.529	400,00	39.346.756.730	100,00	204,86		Set. DPRD		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen			600	1.000	19.464.360.220,00	300	2.099.764.726	300	2.099.764.726	66,67	66.620							Set. DPRD		
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan			0	1	12.810.000,00			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen			3	12	49.337.650,00			0	-	0,00	0,000							Set. DPRD		
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen			3	50	559.286.000,00			0	-	125,00	48.346							Set. DPRD		
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen																		Set. DPRD		
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks	95	26.445.410.000		16.204.292.210	83,1	6.327.268.507	21,29	1.347.004.631	0	1.347.004.631	0,00	0,00	0,00	14.506.257.085	0,00	54,85		BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP,DPA dan DPPA yang terverifikasi Penatausahaan SP2D Laporan Keuangan	Berkas Berkas laporan	4 70 4	21.435.057.820	100	13.399.526.490	4 70 4	4.991.122.355	1.206.730.595	1.206.730.595	0,00	-	100,00	14.506.257.085	#VALUE!	67,68				BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan			31	4.659.852.614	31	4.828.607.755	31,00	1.165.960.595	31,00	1.165.960.595	100,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usaha dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen				148.994.600	12	162.514.600	3	40.770.000	3,00	40.770.000	25,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian yang terselesaikan Jumlah hasil evaluasi PNS yang dikelola	berkas pegawai Jumlah PNS	100 100	500.000.000	-	2	88.788.374	-	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#VALUE!	0,00			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	orang			-	2	88.788.374	0,00	-	0	-	0,00	0,00							BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan/pengelolaan barang milik daerah pada Bappedalitbang Administrasi umum Bappedalitbang yang dikelola PetugasKebersihan dan keamanan Bappedalitbang yang tersedia	laporan jenis Orang (petugas)	98% 95% 95%	3.060.352.180	100	2.044.966.073	2 7 2	900.287.778	122.828.642	0	122.828.642	0,00	0,00	100,00	2.167.794.715	#VALUE!	70,83			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	Paket				1.915.850	1	1.757.402			0	-	0,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket				62.931.270	6	140.510.313			0	-	0,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket				10.852.138	4	11.463.184			0	-	0,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket				30.556.053	5	32.902.525			0	-	0,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan				14.811.000	10	20.650.000			0	-	0,00	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan				594.440.286	160	693.004.354	17,72	122.828.642	18	122.828.642	11,08	0,00						BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKMD yang dilaporkan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Berkas	95%	80.000.000	100	307.472.000	0	-	-	0	-	0,00	0,00	100,00	307.472.000	10.526,32	384,34			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit				0	-	-	0	-	0,00	0,00								BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Petugas kebersihan dan keamanan Bappedalitbang yang tersedia	Orang (Petugas)	100	664.363.850	100	315.165.510	2	104.950.000	14.356.200	0	14.356.200	0,00	0,00	100,00	329.521.710	100,00	49,60			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan				1	12.000.000	1,00	2.971.200	1,00	2.971.200	100,00	0,00							BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan				10	17.650.000			0	-	0,00	0,00							BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan				24	75.300.000	8,00	11.385.000	8,00	11.385.000	33,33	0,00							BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan/pengelolaan barang milik daerah pada Bappedalitbang	Laporan	100	435.636.450	100	237.162.137	2	242.120.000	3.089.194	0	3.089.194	0,00	0,00	100,00	240.251.331	100,00	55,15			BAPPEDALITBANG		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperihara dan dibayarkan pajaknya	unit				38.578.743	3	42.120.000	3,00	3.089.194	3,00	3.089.194	100,00	0,00						BAPPEDALITBANG		

3			4	5	6			7	8	9	13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	31.379.569.728	12	1.916.856.458	12	612.118.298	14.013.272	14.013.272	125,00	33,58	12,00	1.930.869.730	1,00	0,06	BKAD		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Paket		1	6.570.105,00	0	-	100,00	99,64			BKAD			
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Unit		79	166.022.005,00	0	-	83,33	87,66			BKAD			
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				jenis		11	18.625.790,00	0	-	75,00	99,96			BKAD			
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan				jenis		9	61.442.515,00	0	-	0,00	0,00			BKAD			
5	02	01	2.06	0006	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				oh		562	359.457.883,00	217	14.013.272	11	14.013.272	26,00	13,72		BKAD		
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	5	175.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BKAD	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Unit		-	-	-	0	-	0,00	0,00			BKAD		
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	3.090.230.000	12	810.217.414	12	315.500.000	34.221.511	34.221.511	125,00	36,82	12,00	844.438.925	1,00	0,27		BKAD	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi yang Dibayarkan dan Listrik				bulan		12	19.200.000	3	3.961.511	3	3.961.511	41,67	33,97			BKAD	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki				unit		6	12.740.000	3	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap				orang		312	283.560.000	168	30.260.000	24	30.260.000	38,10	38,67			BKAD	
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umum Pemeliharaan Daerah yang dipelihara	Unit	10	412.230.000	4	327.218.864	4	157.660.000	-	0	-	125,00	35,40	4,00	327.218.864	0,40	0,79	BKAD	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Kendaraan dinas pejabat yang dipelihara				unit		5	157.660.000	5	-	50,00	35,40					BKAD	
5	02	02	Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalkan pengelolaan keuangan daerah	WTP Opini BPK	0	1.418.024.187.195	-	860.671.936.293	0	294.815.695.622	220.375.517	220.375.517	0	220.375.517	0,00	60,82	0,00	860.892.311.810	+DIV/0!	0,61		BKAD
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rencana Anggaran Daerah yang Disusun dan Dikoordinasikan	Dokumen	10	10.350.580.090	-	4.493.591.240	0	2.067.759.084	69.329.800	69.329.800	0,00	6,52	0,00	4.562.921.040	0,00	0,44		BKAD	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				Dokumen		4	205.957.879	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				Dokumen		4	202.567.900	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				Dokumen		48	161.560.000	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				Dokumen		48	310.960.000	0	63.000.000	0	63.000.000	0,00	21,37			BKAD	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				peraturan		3	531.333.145	0	6.329.800	0	6.329.800	0,00	10,68			BKAD	
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				peraturan		3	549.998.680	0	-	0,00	2,32					BKAD	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				peraturan		6	14.381.480	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.01	0013	Pembiinan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan				OPD		138	91.000.000	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Dilakukan	OPD	59	2.366.931.050	46	578.903.584	46	309.015.230	3.339.000	3.339.000	100,00	12,52	46,00	582.242.584	0,78	0,25		BKAD	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah yang Dikelola				Dokumen		10.507	6.000	58.283.278	0	-	0,00	12,00					BKAD
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi Fasilitas Asistensi Sinkronisasi Supervisi monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				laporan		12	50.128.639	0	-	25,00	57,03					BKAD	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait				Laporan		23	53.222.633	-	3.339.000	0	3.339.000	0,00	0,00			BKAD	
5	02	02	2.02	0011	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peserta Pembinaan				Kegiatan/Sosialisasi		131	147.380.680	0	-	0,00	0,00					BKAD	
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Dilaksanakan dan Dikoordinasikan	Laporan	10	5.610.521.955	4	1.262.499.925	2	888.600.204	-	0	-	100,00	12,70	4,00	1.262.499.925	0,40	0,23		BKAD
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0003	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0004	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0006	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0007	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0008	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0009	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0010	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0011	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0012	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0013	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0014	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0015	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0016	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0017	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0018	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0019	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0020	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0021	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0022	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0023	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0024	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0025	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0026	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0027	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0028	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0029	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0030	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0031	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0032	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69.166.848	0	-	0,00	54,99					BKAD	
5	02	02	2.03	0033	Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Liabilitas Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan				Dokumen		1	69										

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P*100%		15=7+13		16=15P*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis			13	118.572.090			-	100,00	99,94						BAPENDA		
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis			3	115.180.397			-	66,67	70,61						BAPENDA		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ok			120	331.830.609			-	10,83	7,11						BAPENDA		
5	02	01	2.07	0000	Penyediaan Barang Milik Daerah	RKMD yang dilaporkan	berkas	27	86.000.000	19	222.108.000		-	-	0,00	0,00	19,00	222.108.000	70,37	258,27		BAPENDA		
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				-		-	0,00	0,00							BAPENDA		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Isuah				-		-	0,00	0,00							BAPENDA		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah petugas Operator Komputer, Pemangul Pajak Daerah, Kenerihan dan Keamanan yang tersedia	orang/petugas	60	2.710.360.000	24	1.608.528.050	26	450.630.000	4	64.478.311	4	64.478.311	25,00	36,49	28,00	1.673.006.361	46,67	61,73	BAPENDA
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan			12	19.200.000	3	3.858.311	3	3.858.311	75,00	40,05						BAPENDA	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit			6	32.100.000			-	0,00	0,00						BAPENDA		
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang			26	399.330.000	4	60.620.000	4	60.620.000	61,54	39,16						BAPENDA	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	60	334.360.000	2.567	307.231.406	2	79.290.000	1	8.650.000	1	8.650.000	25,00	30,12	2.568,00	315.881.406	4.280,00	94,47	BAPENDA
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Peritinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peritnannya	Unit			4	79.290.000	0,3	8.650.000	0,3	8.650.000	50,00	30,12						BAPENDA	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit							-	0,00	0,00							BAPENDA	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	9.522.364.189			63.708.471.000	4.451.196.875	41.043.543.696	12.688.000	41.043.543.696	12.688.000	22,49	8,53						BAPENDA
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola	Rp.	9.522.364.189	8.834.888.238		63.708.471.000	4.451.196.875	41.043.543.696	12.688.000	41.043.543.696	12.688.000	22,49	8,53	8.847.576.238	46,36	92,91		BAPENDA	
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Laporan			3	74.515.215	1	4.738.000	1	4.738.000	0,00	11,73						BAPENDA	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				17	381.316.745			-	0,00	0,00							BAPENDA	
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daeah yang Didata dan Pendaftaran	WP			300	473.001.745	19	1.200.000	19	1.200.000	25,00	7,96						BAPENDA	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	WP			31	368.596.699			-	100,00	36,39							BAPENDA	
5	02	04	2.01	0007	Pemlitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disediakan NJOP nya	Objek Pajak			4.472	1.032.897.150	118	300.000		300.000	12,14	5,52						BAPENDA	
5	02	04	2.01	0010	Pendaftaran dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Laporan			12	33.000.000			-	50,00	54,60							BAPENDA	
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp.			61.282.835.442	2.037.869.321	20.521.771.779	4.650.000	20.521.771.779	4.650.000	46,93	1,02							BAPENDA
5	02	04	2.01	0011	Pengahan Pajak Daerah	Jumlah Pajak Tertagih	Rp.			61.282.835.442	50.000.000	20.521.771.779	1.800.000	20.521.771.779	1.800.000									BAPENDA
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA			38.330.374.725	13.158.817.351		7.107.098.224	3	1.084.344.934		1.084.344.934	15,26%	0,00	14.243.162.285	0,00	37,16		BKPSDM		
5	03				KEPEGAWAIAN			25.835.931.725	10.656.924.042		6.362.098.224	3	1.084.344.934		1.084.344.934	0,00	17,04	0,00	11.741.268.976	0,00	45,45		BKPSDM	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	18.962.065.025	9.448.001.305	89	4.774.940.659	3	1.044.253.031	3	1.044.253.031	3,37	21,87	3,00	10.492.254.336	0,03	55,33		BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP yang Terverifikasi	Dokumen	35			7													BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan SP2D Belanja, Gaji dan Tunjangan	Dokumen	200			40													BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Renja	Dokumen	20	16.496.680.774	7845	8.006.067.757		4.270.133.009	3	1.019.438.491	3	1.019.438.491	#VALUE!	23,87	7.848,00	9.025.506.248	#VALUE!	54,71	BKPSDM
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Fisik/Non Fisik, Laporan Pajak Pusat, LKPD, LKPD, LPD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Penghasilan yang Disediakan	Dokumen	150			150													BKPSDM
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	181	15.891.680.774	35	7.734.414.207	37	4.150.373.379	3	1.000.098.491	3	1.000.098.491	8,11	24,10					BKPSDM
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	600	605.000.000	12	271.653.550	120	119.739.630	0	19.340.000	0	19.340.000	0,00	16,15					BKPSDM
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian yang Terselasaikan	Dokumen	2480																BKPSDM
5	03	01	2.05	10	Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH)	Hasil evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Dikelola	Dokumen	1500	199.709.531	100	204.016.632	100	30.240.000	0	0	0	0,00	0,00	100,00	204.016.632	#VALUE!	102,16		BKPSDM
5	03	01	2.05	10	Belanja Pakatan Dinas Harian (PDH)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	480	66.118.354	120	204.016.632	36	30.240.000	0	0	0	0,00	0,00						BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada BKPSDM	Dokumen	45																BKPSDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum BKPSDM yang Terkelola	Dokumen	60	1.441.444.720	100	654.182.277	100	246.697.190	0	3.450.000	0	3.450.000	0,00	1,40	100	657.632.277	#VALUE!	45,62	BKPSDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	259	354.444.720	45	62.689.960	52	54.147.190	0	0	0	0,00	0,00						BKPSDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	98.000.000	4	37.461.240	3	19.984.000	0	0	0	0,00	0,00						BKPSDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	717	981.000.000	399	554.031.147	146	172.566.000	0	3.450.000	0	3.450.000	0,00	2,00					BKPSDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	26	75.000.000	6	73.448.450	2	126.170.830	0	7.689.770	0	7.689.770	0,00	0,00	6,00	81.138.220	0,23	108,18	BKPSDM
5	03	01	2.07	003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	74.000.000	0	0	2	48.071.530	0	0									BKPSDM
5	03	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin	Unit	14	75.000.000	6	73.448.450	2	78.099.300	0	0	-	0,00	0,00						BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Internet yang Tersedia	Bulan	60																BKPSDM
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenaga Operator Komputer, Supir Kendaraan Dinas dan Petugas Kebersihan yang Tersedia	Orang	228	452.600.000	8.167	84.957.594	100	49.079.630	0	7.689.770	0	7.689.770	0,00	15,67	8.167,00	92.647.364	#VALUE!	30,47	BKPSDM
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	60	99.600.000	12	25.281.844	12	19.200.000	0	2.729.770	0	2.729.770	0,00	14,22					BKPSDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	228	353.000.000	24	59.675.750	48	29.879.630	0	4.960.000	0	4.960.000	0,00	16,60					BKPSDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKPSDM	Dokumen	10	237.630.000	100	84.098.005	100	52.620.000	-	5.985.000	0	5.985.000	0,00	11,37	100,00	90.083.005	10,00	37,91	BKPSDM
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Peritinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan peritnannya	unit	5	204.420.000	1	71.783.005	1	38.420.000	0	5.985.000	0	5.985.000	0,00	15,58					BKPSDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	39	33.210.000	8	12.315.000	8	14.200.000	0	0	-	0,00	0,00						BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Keterlelhan Jabatan	%	100	6.873.866.700	100,00	1.744.700.881	100	1.887.157.565	0	40.091.903	0	40.091.903	0,00	2,53	100,00	1.784.792.784	1,00	25,96	BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17			0	14	0	0	-	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!		BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	%	15		3	0	1	0	0	-	0	0,00	0,00	3,00	-	0,20	#DIV/0!		BKPSDM
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Penyelesaian Tahapan Pengdaan yang Diproses sesuai Jadwal Panselinas	%	100			100%													BKPSDM
5	03	02	2.01		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Penetapan Pemberhentian dan Pensiun yang Diproses	%	100			100%													BKPSDM
5	03	02	2.01		Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang Dikelola dan Dikembangkan	Aplikasi	24	2.721.616.700	100	592.874.862	5	489.710.000	0	19.715.400	0	19.715.400	#VALUE!	4,03	100,00	612.590.262	#VALUE!	22,51	BKPSDM
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Presentase Pemuktahiran Data Pegawai	%	100			100%													BKPSDM
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P/100%		15=7+13		16=15P/100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Perentase Keterlisan Jabatan	%	100																	
					Dokumen Kenaikan Pangkat	Dokumen	2150																	
					Dokumen Gaji Berkala	Dokumen	2500	1.577.000.000	454	400.308.428	100	456.300.000	166	17.058.503	166	17.058.503	166,00	3,74	620,00	417.366.931	#VALUE!	26,47	BKPSDM	
					Dokumen Mutasi PNS	Dokumen	680																	
5	03	02	2.02	01	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi jabatan administrasi jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen	775	700.000.000	132	337.414.818	150	33.790.040	9	2.600.000	9	2.600.000	6,00	7,69					BKPSDM	
5	03	02	2.02	02	Jumlah Pengembangan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen	4780	262.000.000	804	62.893.610	900	46.130.850	156	1.560.000	156	1.560.000	17,33	3,38					BKPSDM	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	70																BKPSDM	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan Tugas Belajar dan lain Belajar	Orang	490																	
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi Pejabat ASN	Dokumen	690	1.240.000.000	80	368.204.216	100	367.344.685	0	3.318.000	0	3.318.000	0,00	0,90	80,00	368.822.216	#VALUE!	29,72	BKPSDM	
					Jumlah Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	Kasus	590																	
5	03	02	2.03	04	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	orang	220	125.000.000	-	63.396.898	50	96.514.685	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM	
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	dokumen	5	875.000.000	40	205.586.315	1	237.250.000	0	3.318.000	0	3.318.000	0,00	1,40					BKPSDM	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	orang	450	205.000.000	40	96.221.003	40	33.580.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
					Kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang Diproses	Kasus					19													
					Dokumen Cuti yang Diproses	Dokumen					1													
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Perentase ASN yang Menyampaikan SKP	%	100	1.335.250.000	8.844	386.313.375	100%	273.802.880	0	0	0	#VALUE!	0,00	8.844,00	386.313.375	88,44	28,93	BKPSDM		
					Perentase Pengukuran IP ASN melalui Dimensi Kinerja dan Disiplin	%					100%													
5	03	03	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Aparatur	dokumen	5	298.100.000	75	93.644.800	1	60.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
5	03	03	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	282	342.100.000	0	0	55	121.945.000	0	0	0	0	0,00						
5	03	03	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Orang	2000	100.000.000	0	0	500	33.857.880	0	0									
5	03	03	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan	91	325.050.000	0	65.949.575	25	39.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
5	03	03	2.04	09	Pelaksanaan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilaiani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilaiani	dokumen	20	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
5	03	03	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi Disiplin ASN	laporan	85	110.000.000	15	16.911.200	25	19.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
5	04	02			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	17	12.494.443.000	20	864.838.964	11	745.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	105,00	1.906.056.201	#DIV/0!	15,26	BKPSDM
					Perentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	1672		10	0	7			0	0	0	0	0,00	0,00	10,00	-	0,01	#DIV/0!	BKPSDM
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Dilaksanakan	Kegiatan	7	205.000.000	0	185196374	100	45.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	185.196.374	0,00	90,34	BKPSDM
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi - Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	70	205.000.000	0	185196374	35	45.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
					Koordinasi dengan Stekholder Terkait dalam rangka Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi	Instansi	30																	
6	04	02	2.02	Sertifikasi Kelembagaan PengembanganKompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi	Dokumen	70	12.289.443.000	105	2.585.698.791	100	700.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	105,00	2.585.698.791	#VALUE!	21,04	BKPSDM	
					Jumlah Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta dan Daftar Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi	Aplikasi	5																	
5	4	02	2.02	07	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Jabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah jabatan pimpinan tinggi jabatan fungsional kepemimpinan dan jabatatan	laporan	524	12.289.443.000	820	1.780.918.791	6	700.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00					BKPSDM
6	01				INSPEKTORAT DAERAH		9.321	35.788.719.371	1.229	25.818.410.218	489	9.690.028.215		1.886.201.394	0	1.886.201.394	0,00	19,47%	1.229,00	27.704.611.612	13,19	77,4116	INSPEKTORAT	
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Administrasi Perkantoran	8.176	33.577.721.903	769	19.744.609.573	129	7.615.507.115	14	1.639.743.994	14	1.639.743.994	10,85	21,53	783,00	21.384.353.567	9,58	63,6861	INSPEKTORAT	
06	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, jumlah penatausahaan dan pengisian verifikasi keuangan SKPD	132	28.722.285.084	588	17.128.402.437	24	6.476.611.311	5	1.553.225.918	5	1.553.225.918	20,83	23,98	593,00	18.681.628.355	449,24	65,0423	INSPEKTORAT	
06	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	480	16.573.776.437	12	6.372.211.311	3	1.531.185.918	3	1.531.185.918	25,00	24,03					INSPEKTORAT
06	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	-	108	554.626.000	12	104.400.000	2	22.040.000	2	22.040.000	16,67	21,11					INSPEKTORAT
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	449	777.461.000	50	751.337.332	20	368.370.000	4	42.399.000	4	42.399.000	20,00	11,51	54,00	793.736.332	12,02	102,0934	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	JUMLAH	-	-	-	-	118.800.000	-	0	0	0	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	-	-	50	751.337.332	20	249.570.000	4	42.399.000	4	42.399.000	20,00	16,99					INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, jumlah paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan, jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	7.046	1.201.333.480	101	1.222.215.480	45	540.310.713	2	17.760.700	2	17.760.700	4,44	3,29	103,00	1.239.976.180	1,46	103,2167	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-	-	35	177.525.975	3	234.215.003	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	-	-	37	167.698.924	3	38.041.040	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggantian yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggantian yang disediakan	Paket	-	-	3	12.290.659	3	4.115.679	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	-	2	5.399.000	12	1.799.000	1	450.000	1	450.000	8,33	25,01					INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	12	149.489.000	12	25.250.000	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	709.811.931	12	236.890.000	1	17.310.700	1	17.310.700	8,33	7,31					INSPEKTORAT
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	%	429	773.574.871	26	390.006.962	36	137.127.091	2	23.723.643	2	23.723.643	5,56	17,30	28,00	413.730.605	6,53	53,4829	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	-	-	2	57.114.366	12	20.160.000	-	4.581.860	0	4.581.860	0,00	22,73					INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	-	-	12	89.500.000	12	29.500.000	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	-	-	12	243.392.596	12	87.467.091	2	19.141.783	2	19.141.783	16,67	21,88					INSPEKTORAT
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	%	120	2.103.067.468	4	252.647.362	4	93.088.000	1	2.634.733	1	2.634.733	25,00	2,83	5,00	255.282.095	4,17	12,1386	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	UNIT	-	-	4	252.647.362	4	93.088.											

3				4		5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P*100%		15=7+13		16=15P*100%		17	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
6	01	02	2.01		Penyeleenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah Hasil Revisi Laporan Kinerja, Jumlah Hasil Revisi Laporan Keuangan, Jumlah Laporan Pengawasan Desa, Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang terbentuk, Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah Hasil Revisi Laporan Kinerja, Jumlah Hasil Revisi Laporan Keuangan, Jumlah Laporan Pengawasan Desa, Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang terbentuk, Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	515	5.389.808.893	278	4.132.110.709	132	1.194.237.100	11	166.784.000	11	166.784.000	8,33	13,97	289,00	4.298.894.709	56,12	79,7597	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	LAPORAN	-	-	144	342.771.400	20	150.000.000	2	12.600.000	2	12.600.000	10,00	8,40					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAPORAN	-	-	53	1.103.537.600	50	345.725.000	1	51.900.000	1	51.900.000	2,00	15,01					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Hasil Revisi Laporan Kinerja	LAPORAN	-	-	45	351.137.019	10	124.914.000	1	40.500.000	1	40.500.000	10,00	32,42					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Revisi Laporan Keuangan	LAPORAN	-	-	6	88.650.000	3	33.275.000	2	10.050.000	2	10.050.000	66,67	30,20					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	LAPORAN	-	-	2	1.151.174.894	20	201.821.740	1	800.000	1	800.000	5,00	0,40					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kecepatan Pengawasan Internal yang terbentuk	KESEPAKATAN	-	-	5	482.128.746	5	120.000.000	1	6.136.000	1	6.136.000	20,00	5,11					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	dokumen	-	-	23	612.711.050	24	218.501.360	3	44.798.000	3	44.798.000	12,50	20,50					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02		Penyeleenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/Overhead, Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	14	1.052.323.300	34	940.481.220	36	375.000.000	1	44.573.400	1	44.573.400	2,78	11,89	35,00	985.054.620	250,00	93,6076	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Overhead	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/Overhead	laporan	-	-	22	289.924.200	24	105.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00					INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LAPORAN	-	-	12	650.557.020	12	270.000.000	1	44.573.400	1	44.573.400	8,33	16,51					INSPEKTORAT	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Membantu Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1.024	3.251.416.147	148	1.001.208.716	192	505.284.000	21	35.100.000	21	35.100.000	10,94	6,95	169,00	1.036.308.716	16,50	31,8725	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pengawasan Jumlah Dokumen Keputusan		408	1.834.001.878	3	108.865.000	-	6.000.000	-	0	0	0,00	0,00	3,00	108.865.000	0,74	5,9359	INSPEKTORAT		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan	rekomendasi	-	-	-	-	-	5.000.000	-	0	0	0,00	0,00					INSPEKTORAT		
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan yang diusulkan	rekomendasi	-	-	3	108.865.000	-	1.000.000	-	0	0	0,00	0,00					INSPEKTORAT		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangko Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Jumlah Perangko Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		616	1.417.414.269	148	892.343.716	192	499.284.000	21	35.100.000	21	35.100.000	10,94	7,03	166,00	927.443.716	26,95	65,4321	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangko Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Perangko Daerah	-	-	15	122.688.700	48	179.834.000	-	0	0	0,00	0,00					INSPEKTORAT		
6	01	03	2.02	02	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangko Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangko Daerah	-	-	45	317.425.320	46	103.739.000	11	24.300.000	11	24.300.000	23,91	23,42					INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegah dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegah dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	-	-	48	386.360.096	50	190.711.000	10	10.800.000	10	10.800.000	20,00	5,66					INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakuan Integritas	Jumlah Perangko Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengakuan Integritas	Perangko Daerah	-	-	37	65.869.600	48	25.000.000	-	0	0	0,00	0,00					INSPEKTORAT		
7	01				KECAMATAN BARUSAJAHE				14.546.503.145		8.087.266.053	100,0	2.838.933.657		612.237.155	100,00	612.237.155		21,57%		8.699.503.208		59,80	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	13.472.297.660	84,00	7.735.657.753	92	2.729.957.372		596.867.155	0,00	596.867.155	0,00	21,86	84,00	8.332.524.908	88,42	61,85	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan RKA, RKAP dan DPPA yang terverifikasi, Penatausahaan SP2D, Laporan Keuangan	Laporan	60	12.306.686.175	36,00	7.069.028.896	12	2.493.075.784	3,00	570.818.655	3	570.818.655	25,00	22,90	39,00	7.639.847.551	65,00	62,08	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96	11.884.613.675	81,00	6.822.348.896	21	2.448.154.264	21	570.818.655	22	570.818.655	104,76	23,32					KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.02	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapanannya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	422.072.500	36,00	246.680.000	12	44.921.520	0	-	0	0,00	0,00					KECAMATAN BARUSAJAHE		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	60	121.746.800	12,00	18.750.000	12	21.840.000	0	-	0	0,00	0,00	12,00	18.750.000	20,00	15,40	KECAMATAN BARUSAJAHE		
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	20.496.800		0	0	0	0	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/Kelengkapanannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	Paket	135	101.250.000	25,00	18.750.000	25	21.840.000	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Pengandaan, Raput Koordinasi dan Konsultasi.	Paket	36	415.326.355	18,00	222.763.057	100	74.285.004	0	-	0	0,00	0,00	18,00	222.763.057	50,00	53,64	KECAMATAN BARUSAJAHE		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	11.625.051	57,00	4.445.300	15	1.258.998	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3077	107.494.089	1.880,00	40.394.300	615	15.020.265	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	420	13.438.715	520,00	10.998.400	120	9.642.841	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	6415	12.414.500	4.141,00	7.309.900	1780	2.482.900	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	260.154.000	298,00	159.615.157	80	45.880.000	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Belanja Modal yang tersedia	Unit	32	111.423.655	16,00	117.750.000	1	16.114.084	0	-	0	0,00	0,00	16,00	117.750.000	50,00	105,68	KECAMATAN BARUSAJAHE		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	26	59.223.655	8,00	36.300.000		0	0	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	52.200.000	8,00	81.450.000	1	16.114.084	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Operator, Jaga Malam dan Tenaga Kebersihan	Laporan	60	261.551.500	36,00	213.794.700	12	91.172.500	3,00	21.278.500	3	21.278.500	25,00	23,34	39,00	235.073.200	65,00	59,88	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	82.500.000	24,00	43.154.700	12	14.400.000	3	2.453.500	3	2.453.500	25,00	17,04					KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	14.200.000	4,00	5.460.000	1	1.420.000	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	164.851.500	36,00	165.180.000	12	75.352.500	3	18.825.000	3	18.825.000	25,00	24,98					KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Modal dan Bangunan Kantor terawat	Unit	7	255.563.178	3,00	93.571.100	1	33.470.000	1,00	4.770.000	1	4.770.000	100,00	14,25	4,00	98.341.100	57,14	38,48	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan "Jasa Pemeliharaan" Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perintan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perintannya	unit	5	134.828.815	3,00	93.571.100	1	33.470.000	1,00	4.770.000	1,00	4.770.000	100,00	14,25					KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahilasi	Unit	2	120.734.360	0,00			0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	438.007.740	88,41	153.915.400	92	53.704.700		15.370.000	0,00	15.370.000	0,00	28,62	88,41	169.285.400	93,06	38,65	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Pra - Musrenbang, Musrenbang, Harat-Jadi, Peta Bank dan Banga)	Kegiatan	15	189.107.740	9,00	72.747.400	3	29.080.700	1	10.240.000	1	10.240.000	33,33	35,21	10,00	82.987.400	66,67	43,88	KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	66.602.000	3,00	27.917.600	1	10.450.950	1	10.240.000	1	10.240.000	100,00	97,98					KECAMATAN BARUSAJAHE	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	122.505.740	4,00	44.829.800	2	18.629.750	0	-	0	0,00	0,00							KECAMATAN BARUSAJAHE
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi pemerintahan.	Laporan	60	120.900.000	36,00	81.168.000	12	24.624.000	3,00	5.130.000	3	5.130.000	25,00	20,83	39,00	86.298.000	65,00			

3				4		5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15G*100%		17	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	5.000.000	4	920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	39.436.875	5	32.032.355	11	9.604.005	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	70	9.999.505	14	7.643.510	13	2.045.510	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	8.500.000	6	11.540.380	3	4.542.800	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Orang Kali	120	4.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.06	09	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1080	192.140.000	216	157.777.850	110	39.486.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Belanja Modal yang tersedia	Unit	25	45.000.000	31,13	140.090.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	31,13	140.090.000,00	124,52	311,31	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Unit	20	25.000.000	4	11.790.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	Unit	20	20.000.000	12	128.300.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Listrik, Operat, Jaga Malam dan Tenaga Kebersihan	Bulan	60	871.400.000	51,23	292.729.220	12	101.399.815	3	20.405.365	3,00	20.405.365	25,00	20,12	54,23	313.134.585,00	90,38	54,80	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	60	99.000.000	24	57.619.220	12	23.200.000	3	1.580.365	3,00	1.580.365	25,00	6,81	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	unit	20	20.000.000	8	9.210.000	4	2.840.000	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang Bulan	60	452.400.000	120	225.900.000	12	75.359.815	3	18.825.000	3,00	18.825.000	25,00	24,98	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Modal Disas dan Bangunan Kantor terawat	Unit	9	113.750.000	89,45	101.753.870	1	33.470.000	1	6.000.000	1,00	6.000.000	100,00	17,93	90,45	107.753.870,00	1.005,00	94,73	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pakaj dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kelemban Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakaj dan Perawatan	unit	5	93.570.000	1	101.753.570	1	33.470.000	1	6.000.000	1,00	6.000.000	100,00	17,93	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	01	2.07	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	139.920.000	86	149.513.600	92	42.437.600	23,92	11.223.000	86,58	11.223.000	94,11	26,45	86,29	160.736.600,00	90,83	114,88	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksanya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Pra - Murenbang, Murenbang, Harf Jodi, Pesta Buah dan Bungi)	Kegiatan	15	94.920.000	84,10	79.821.000	3	26.261.000	2	11.223.000	2,00	11.223.000	66,67	42,74	86,10	91.046.000,00	574,00	95,92	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	45.000.000	2	29.620.200	1	11.320.200	1	11.223.000	1,00	11.223.000	100,00	99,14	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	49.920.000	2	50.202.000	2	14.940.800	-	-	2,00	-	100,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksanya kegiatan rapat koordinasi pemerintahan.	Usuran	40	25.000.000	100,00	69.690.600	12	16.176.600	-	-	0,00	-	0,00	0,00	50,00	69.690.600,00	125,00	278,76	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	25.000.000	13	69.690.600	12	16.176.600	-	-	6,00	-	50,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana terpelihara dengan baik.	Unit	4	8.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	4	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks	32	12.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada perangkat daerah	Kegiatan	29	74.000.000	6	23.579.600	5	14.979.600	-	-	6,00	-	120,00	0,00	12,00	23.579.600,00	41,38	31,86	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan	28	45.000.000	6,00	23.579.600	5	14.979.600	-	-	0,00	-	0,00	0,00	6,00	23.579.600,00	21,43	52,40	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	80	16.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	25	29.000.000	1	23.579.600	12	14.979.600	-	-	6,00	-	50,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kegiatan	8/8/3	72.602.175	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah tidak kejahatan yang berkurang.	Kegiatan	75	68.602.175	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	43.602.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah tidak kejahatan yang berkurang.	Perda/Perkada	4	4.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengenagan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengenagan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Disediakan	Usuran	5	47.397.825	2	102.816.907	1	24.275.707	-	-	1,00	-	100,00	0,00	3,00	102.816.907,00	60,00	216,92	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangpaan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Wawan Kebangsaan Sebanyak 1 Kegiatan.	Kegiatan	5	47.397.825	3,00	102.816.907	1	24.275.707	-	-	0,00	-	0,00	0,00	3,00	102.816.907,00	60,00	216,92	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	05	2.01	01	Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	500	47.397.825	200	102.816.907	275	24.275.707	-	-	275,00	-	100,00	0,00	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa	35	63.294.240	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06	2.01		Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	35	63.294.240	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06	2.01	01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	35	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	35	34.294.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	35	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN DOLAT RAKYAT	
7	01				KECAMATAN JUHAR		Bulan	60	19.087.580.196	24	4.093.077.573	12	2.902.262.176	-	-	648.744.714	0	648.744.714	22,35%	-	4.741.822.287	-	24,84	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01			PROGRAM PERWILKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	16.849.579.455	-	3.703.989.005	89	2.761.279.016	-	-	634.214.714	0	634.214.714	0,00	22,968	0,00	4.338.203.719	0,00	25,75	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi Penatausahaan Sp2D Laporan Keuangan	Bulan	60	14.738.233.900	-	2.945.618.178	12	2.479.620.957	3,00	599.310.103	3	599.310.103	25,00	24,169	3,00	3.544.928.281	5,00	24,05	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	-	-	26	-	24	2.434.701.957	24,00	588.090.103	24	588.090.103	100,00	24,155	-	-	-	-	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sp2D	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sp2D	Dokumen	-	-	12	-	12	44.919.000	3,00	11.220.000	3	11.220.000	25,00	24,978	-	-	-	-	KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.05																						

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13P*100%		15=7+13		16=15P*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan	Bulan	60	1.016.651.635	417.102.691	12	105.137.059			0	-	0,00	0,000	0,00	417.102.691	0,00	41,03	KECAMATAN JUHAR	
					Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Petugas Keamanan Kecamatan yang tersedia																		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	1.306.335			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2	18.889.164			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2	3.381.380			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2	4.920.180			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2	2.160.000					0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.06	09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			350	74.480.000			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKMD yang dilaporkan	unit	18	214.720.000	-	2	15.232.000					0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			2	15.232.000											KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediananya Jasa Petugas kebersihan, Operator Komputer dan Petugas keamanan, Jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa listrik kantor	Bulan	60	257.211.840	224.647.040	12	104.299.000	3,00	26.537.111	3	26.537.111	25,00	25,443	3,00	251.184.151	5,00	97,6565	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12.000.000	3,00	2.497.111	3	2.497.111	25,00	20,809					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			1	1.420.000	1,00	1.420.000	1	1.420.000	100,00	100,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	90.879.000	3,00	22.620.000	3	22.620.000	25,00	24,890					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan	unit	9	501.322.080	97.871.096	1	33.470.000	1,00	8.367.500	1	8.367.500	100,00	25,000	1,00	106.238.596	11,11	21,1917	KECAMATAN JUHAR
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit			1	33.470.000	1,00	8.367.500	1	8.367.500	100,00	25,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirrehabilitasi	unit															KECAMATAN JUHAR	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	1.308.945.429	286.401.538		100.999.430	14.530.000	0	14.530.000	0,00	14,386	0,00	300.931.538	0,00	22,9904	KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Dieleenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	18	551.233.045	132.447.188	2	60.031.230	1,00	14.530.000	1	14.530.000	50,00	24,204	1,00	146.977.188	5,56	26,6633	KECAMATAN JUHAR
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			2	23.053.140	1,00	14.530.000	1	14.530.000	50,00	63,028					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen			2	36.978.090			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Usuran	132	659.088.384	153.954.350	12	40.968.200			0	-	0,00	0,000	0,00	153.954.350	0,00	23,3887	KECAMATAN JUHAR
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen									0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.02	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan									0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			5	40.968.200			0	-	0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang di Koordinasikan	Unit		66.416.000	-							0,00	-	#DIV/0!	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan															KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen															KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya.	Usuran	680	32.208.000	-							0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen															KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan															KECAMATAN JUHAR	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan															KECAMATAN JUHAR	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	32	236.192.000	-							0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	kegiatan	32	171.776.000	-							0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga															KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan															KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	8	53.680.000	-							0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen															KECAMATAN JUHAR	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	perda dan Perkada	17	285.995.760	-		6.000.000					0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertaman Dan Ketertiban	Kegiatan	9	277.943.760	-	1	6.000.000					0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			2	6.000.000											KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada	8	8.052.000	-							0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang - undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakuan Peraturan Perundang - undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan									0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dieleenggarakan Kecamatan	Usuran	8	390.763.552	102.687.030	1	33.983.730			0	-	0,00	0,000	0,00	102.687.030	0,00	26,2786	KECAMATAN JUHAR
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Pengawasan Kepala Daerah Yang Dieleenggarakan	Usuran	5	390.763.552	68.703.300	1	33.983.730			0		0,00	0,000	0,00	68.703.300	0,00	17,5818	KECAMATAN JUHAR
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang			200	33.983.730			0		0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	100	16.104.000	-	0						0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	06	201		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	100	16.104.000	-	0						0,00	-	0,00	0,0000		KECAMATAN JUHAR	
7	01	06	201	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Dokumen									0,00	0,000					KECAMATAN JUHAR	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	06	201	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Laporan									0,00	0,00					KECAMATAN JUHAR		
7	01				KECAMATAN KABANJAHE	Bulan	75.689.066.445		28.778.491.780		10.965.394.996		1.509.324.005		1.509.324.005		13,76%		30.287.815.785		40,02	KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	48.300.439.141	83	20.141.243.500	90	6.863.624.406	21,00	1.492.794.005	21	1.492.794.005	23,33	21,75	104,00	21.634.037.505	109,47	44,79	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP, DPPA yang terverifikasi, Penatausahaan SP2D, Laporan Keuangan	Dokumen, Berkas, Laporan	4.150,4	41.706.966.028	4.150,4	16.164.775.879	4.150,4	5.855.499.682	1, 9, 1	1.290.357.505	1, 9, 1	1.290.357.505	10,00	22,04	5,199,5	17.458.133.384		41,85	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		41		46	5.566.984.652	11,00	1.290.357.505	11	1.290.357.505	23,91	23,18					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12	288.515.000		0		-	0,00	0,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian yang terselesakan, Terselainya Pakian Dinas beserta perlengkapan lainnya	%	100	223.248.000	100	44.375.400	100	48.720.000		0		0,00	0,00	100,00	44.375.400	100,00	19,88	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit								0		0,00	0,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Paket		51		58	48.720.000		0		0,00	0,000	51,00	0				KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Koordinasi yang di kelola	Paket	100	8.892.331.975.888	96	613.443.505	100	124.249.754	2,00	3.481.500	2	3.481.500	2,00	2,80	98,00	616.925.005	98,00	0,01	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	01	Peningkatan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4	3.481.500	4,00	3.481.500	4	3.481.500	100,00	100,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		50		45	55.294.320		0	0									KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		16		16	8.393.334		0	0	0,00	0,00							KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		4		4	8.872.600		0	0	0,00	0,00							KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Laporan		285		274	48.208.000		0	0	0,00	0,00							KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	11	dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen										0,00	0,000					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKMD yang dilaporkan	Unit	100	351.133.181	100	1.513.320.226							100,00	1.513.320.226	100,00	430,98			KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya wifi, service laptop dan printer, Operator komputer Jaga Malam, Kepala Langkungan, Petugas Jaga Malam, dan Tenaga Kebersihan	Laporan	60	4.266.077.054	36	1.617.034.500	12	790.885.000	2,00	193.755.000	2	193.755.000	16,67	24,51	38,00	1.810.789.500	63,33	42,45	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12	12.000.000		0	0	0,00	0,00							KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.06	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		5		5	3.530.000		0	0	0,00	0,00							KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12	775.055.000	3,00	193.755.000	3	193.755.000	25,00	25,00					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang terawat	Unit	100	863.781.680	66	194.419.390	4	44.570.000	1,00	5.200.000	1	5.200.000	25,00	11,67	67,00	199.619.390	67,00	33,11	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Klaya Pemeliharaan Pakai dan Peritran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Digelbihkan dan dibayarkan Pakai dan Peritrannya	Unit		6		4	44.570.000	1,00	5.200.000	1	5.200.000	25,00	11,67					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	867.535.370	78	151.338.000	90	47.124.000		0	-	0,00	0,00	78,00	151.338.000	89,66	17,44	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Rokorpem, Hari Jadi, Pesta Bunga dan Buah)	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Rokorpem, Hari Jadi, Pesta Bunga dan Buah)	Kegiatan	100	792.559.370	82	151.338.000	4	40.479.000		0	-	0,00	0,00	82,00	151.338.000	82,00	19,09	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		12		12	20.520.000		0	-	0,00	0,00						KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		2		2	19.999.000		0	-	0,00	0,00						KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Kegiatan Pelayanan (inovasi) yang dilaksanakan	%	100	792.559.370	82	151.338.000	95	6.645.000		0	-	0,00	0,00	82,00	151.338.000	82,00	19,09	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		1	6.645.000		0	-	0,00	0,00						KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pengakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Ke-glatan	8/8/13	78.965.424	0/0/1	12.695.000	2/2/2	4.066.840		0	-	0,00	0,00		12.695.000		16,08	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Rasia Kependudukan yang dilaksanakan	Kegiatan	100	73.597.424	82	12.695.000	10	4.066.840		0	-	0,00	0,00	82	12.695.000	82,00	17,25	KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1		1	4.066.840				0,00	0,000					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	95	26.169.600.000	25	8.367.447.480	19	4.019.950.000	1,00	16.530.000	1	16.530.000	5,26	0,41	26	8.383.977.480	27,37	32,04	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan	100	124.000.000	69	32.930.000	2	19.950.000	2,00	16.530.000	2	16.530.000	100,00	82,86	71	49.460.000	71,00	39,89	KECAMATAN KABANJAHE
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan		1		1	19.950.000	1,00	16.530.000	1	16.530.000	100,00	82,86					KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berkepraktisan dan Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kegiatan	100	26.045.600.000	97	8.334.517.480	17	4.000.000.000		0,00	0,00	97	8.334.517.480	97,00				KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit		15		25	2.781.392.804				0,00	0,00					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas		20		20	1.278.393.896		0,00	0,00		0,00					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan kecamatan	Urusan	5	240.386.511	2	90.392.400	1	25.643.425		0,00	0,00	2	90.392.400	40,00	37,60			KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Perayaan HUT RI yang dilaksanakan	Orang	100	240.386.511	100	90.392.400	200	25.643.425		0,00	0,00	100	90.392.400	100,00	37,60			KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang		200		180	25.643.425				0,00	0,00					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01	06			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	40	32.140.000	16	9.250.000	8	2.000.000		0,00	0,00	16	9.250.000	40,00	28,78			KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	06	2.01		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi yang diberi Rekomendasi dan Disoordinasi Pembinaan dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	40	32.140.000	16	9.250.000	8	2.000.000		0,00	0,00	16	9.250.000	40,00	28,78			KECAMATAN KABANJAHE	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan		8		8	2.000.000				0,00	0,00					KECAMATAN KABANJAHE		
7	01				KECAMATAN KUTABULUH			17.024.701.440		7.857.644.851		2.482.244.142		500.655.589		500.655.589		20,42%		8.358.300.440		49,10	KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86	15.914.110.719	86	7.487.979.551	92	2.250.963.542	92	474.301.589	92	474.301.589	100,00	21,071	178,00	7.962.281.140	206,98	50,03	KECAMATAN KUTABULUH
7	1	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP dan DPPA yang terverifikasi, Penatausahaan SP2D, Laporan Keuangan	Laporan, Dokumen	4	14.531.024.565	4	6.511.188.340	4	1.968.470.277	1	439.953.376	1	439.953.376	25,00	22,350	5,00	6.951.141.716	125,00	47,84	KECAMATAN KUTABULUH
7	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				15	1.923.570.777	15	429.363.376	15	429.363.376	100,00	22,321					KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	2.02	07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12	44.899.500	3	10.590.000	3	10.590.000	25,00	23,586					KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakian Dinas beserta Atribut dan Mesin	Absent	1	116.865.087	1	47.920.500	1	16.800.000		-	0	0,00	0,000	1,00	47.920.500	100,00	41,00	KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	2.05	11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		0		0	-	0	0	0	-	0,00	0,000					KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	2.05	12	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Paket		2		2	16.800.000		0	0	-	0,00	0,000					KECAMATAN KUTABULUH	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang baik, dan dapat mendukung Rapat Koordinasi dan Kemitraan	Paket	5	442.696.323	5	330.434.480	5	109.518.165	1	11.606.000	1	11							

3				4				5				6				7				8				9				13=9+10+11+12				14=13/8*100%				15=7+13				16=15/6*100%				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

3				4	5	6			7			8			9			13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17	
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	240	303.600.000	96	178.980.000	48	60.120.000	10	12.500.000	20,83	20,792									KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mobil Dinas dan Bangunan Kantor terawat	Unit	10	218.100.000	80	225.625.085	1	33.470.000	1	7.290.000	1	7.290.000	100,00	21,781	51,00	232.915.085	510,00	106,7928			KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan (dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	198.100.000	2	106.615.085	1	33.470.000	1	7.290.000	1	7.290.000	100,00	21,781							KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilitasi	Unit	1	20.000.000	1	119.010.000				0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	120.000.000	86	89.199.200	92	69.935.130	45,34	11.613.000	86,96	11.613.000	94,52	16,605	172,96	100.812.200	182,06	84,0102			KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tetapi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Pjs. Musrenbang, Moarabang, Hari Jadi, Pesta Buah dan Bunga)	Kegiatan	15	42.000.000	60	66.399.200	3	41.207.130	1	11.613.000	1	11.613.000	33,33	28,182	61,00	78.012.200	406,67	185,7433			KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	40.000.000	2	30.983.800	1	17.328.280	1	11.613.000	1	11.613.000	100,00	67,018							KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	10	2.000.000	2	35.415.400	2	23.878.850		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tetapi penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan	Urusan	40	10.000.000	65	80.160.000	12	28.728.000		0	-	0,00	0,000	65,00		80.160.000	162,50	801,6000			KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	10.000.000	24	80.160.000	12	28.728.000		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Unit	30	38.000.000			0			0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000				KECAMATAN LAU BALENG	
h	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	60	18.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	5	20.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Indeks	95	30.000.000						0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	10	10.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	25	10.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditentukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditentukan	Laporan	5	10.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	29	130.000.000	2	29.646.100.00	1	20.520.000		0	-	0,00	0,000	2,00	29.646.100	6,90	22,8047				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan	28	90.000.000	40	29.646.100.00	1	20.520.000		0	-	0,00	0,000	40,00	29.646.100	142,86	32,9401				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	50	75.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	15.000.000	1	29.646.100.00	1	20.520.000		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan Pembinaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kecamatan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Data terkait terpapar covid-19 di tingkat kecamatan	Data	48	40.000.000						0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	03	2.05	01	Penegakan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penegakan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	48	40.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Perda Perkada dan Kegiatan	Perda Perkada dan Kegiatan	8/8/3	355.171.700	1	24.300.000	1	8.953.300		0	-	0,00	0,000	1,00	24.300.000	0,00	6,8418				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak kejahatan yang berkurang.	Kegiatan	75	323.171.700	365	24.300.000				0	-	0,00	0,000	365,00	24.300.000	486,67	7,5192				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	323.171.700	1	24.300.000				0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah tindak kejahatan yang berkurang.	Penegakan Perda/Perkada	8	32.000.000			0	2	8.953.300		0	-	0,00	0,000	0,00	-	0,00	0,0000				KECAMATAN LAU BALENG
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Laporan	8	32.000.000			3	8.953.300		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan	5	89.500.000	2	84.451.600	1	38.249.210		0	-	0,00	0,000	2,00	84.451.600	40,00	141,9355				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasa Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan Selama 1 Kegiatan	Kegiatan	5	89.500.000	80	84.451.600	1	38.249.210		0	-	0,00	0,000	80,00	84.451.600	1.600,00	141,9355				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	05	2.01	01	Pemilihan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Program Penguasaan Pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Program Penguasaan Pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang	500	59.500.000	1000	84.451.600	500	38.249.210		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	05	2.01	01	Pemilihan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Program Penguasaan Pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pemilihan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Program Penguasaan Pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang	500	59.500.000	1000	84.451.600	500	38.249.210		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06			PROGRAM PEMBIKINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	75	200.000.000	15	3.290.000	5	3.078.000		0	-	0,00	0,000	15,00	3.290.000	20,00	1,6450				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Penguasaannya	Pemerintahan Desa	75	200.000.000	45	3.290.000	15	3.078.000		0	-	0,00	0,000	45,00	3.290.000	60,00	1,6450				KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	150	75.000.000			15	3.078.000		0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	75	50.000.000						0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	75	75.000.000	15	3.290.000				0	-	0,00	0,000								KECAMATAN LAU BALENG	
7	1				KECAMATAN MARDINDING			12.160.122.614	36	6.337.439.390		2.348.018.345		476.662.531		476.662.531		20,30%		6.814.101.921		56%				KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	11.352.190.057	85	5.980.793.732	95	2.198.875.365	95	458.523.531	95	458.523.531	95%	21%	95,00	6.439.317.263	100%	56,7231			KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP dan DPPA yang terverifikasi, Pentausahaan SP2D, Laporan Keuangan	Laporan	60	10.579.824.835	12	5.414.692.232	12	1.950.945.575	3	434.838.729	3	434.838.729	28%	22%	15	5.849.530.961	25%	55,2895			KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang Bulan	90	10.239.924.835	36	5.245.472.232	13	1.910.959.325	14	424.848.729	14	424.848.729	108%	22%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.05	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	240	339.900.000	24	39.986.250	12	9.990.000	3	9.990.000	3	9.990.000	25%	25%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakalan Dinas beserta Atribut.	Paket	78	55.900.000	28	15.669.640	1	24.360.000	0	-	-	-	0%	0%	28	15.669.640	36%	28,0316			KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.05		Penyediaan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Stel	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1	2.06	1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2	4.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1	2.06	2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	72	51.900.000	22	15.669.640	29	24.360.000	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang baik dan dapat menghadiri Rapat Koordinasi dan	Paket	60	353.345.222	52	257.170.480	12	81.933.590	1	6.000.000	1	6.000.000	8%	7%	53	263.170.480	88%	74,4797			KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	4.800.000	6	3.423.463	39	2.268.790	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	125	67.045.222	50	60.664.388	100	19.772.190	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	5.000.000	26	6.025.329	119	3.151.610	0	-	-	-	0%	0%							KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.07	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	6.794.450	4	6.794.450	40	444.000	0	-	-	-	0%	0%							KECAM	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13*100%		15=7+13		16=15*100%		17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mebel kantor yang sesuai dengan kebutuhan.	Unit	16	18.000.000	2	21.435.076	4	44.989.200	0	-	-	0%	0%	2	21.435.076	13%	119,0838	KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1	2.07	3	Pengadaan Mebel	Paket	6	18.000.000	0	0	4	15.000.000	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		11.313.300	2		4	29.989.200	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING		
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi kantor dengan penerangan yang baik dan keadaan bersih, rapi dan aman.	Bulan	60	277.620.000	38	157.850.228	12	62.177.000	3	10.334.802	3	10.334.802	25%	17%	41	168.185.030	68%	60,5810	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	52.800.000	14	26.825.228	12	14.400.000	3	2.894.802	3	2.894.802	25%	20%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	32.160.000	0	0	4	2.760.000	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	240	192.660.000	24	131.025.000	12	45.017.000	3	7.440.000	3	7.440.000	25%	17%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mobil Dinas dan Bangunan Kantor terawat	Unit	5	67.500.000	1	113.976.076	1	34.470.000	1	7.350.000	1	7.350.000	100%	21%	2	121.326.076	40%	179,7423	KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	5	47.500.000	2	113.976.076	1	34.470.000	1	7.350.000	1	7.350.000	100%	21%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	1	2.09	2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	522.000.001	85	204.852.863	92	100.047.280	95	18.139.000	95	18.139.000	103%	18%	180	222.991.863	189%	42,7187	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Pra - Musrenbang, Musrenbang, Hari Jadi, Pesta Buah dan Bunga) berjalan dengan baik.	Laporan	20	445.000.000	23	140.986.263	2	73.467.280	2	11.581.000	2	11.581.000	100%	16%	25	152.567.263	128%	34,2848	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Pemencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pemencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	5	65.000.000	4	32.011.070	2	16.592.660	2	11.581.000	2	11.581.000	100%	70%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	15	380.000.000	6	104.915.193	4	56.874.620	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.02	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rapat koordinasi pemerintahan dilaksanakan dengan baik	Usuran	60	57.000.001	56	#REF!	24	26.580.000	3	6.558.000	3	6.558.000	13%	25%	59	#REF!	98%	#REF!	KECAMATAN MARDINDING
7	1	2	2.02	18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	57.000.000	24	67.926.600	12	26.580.000	3	6.558.000	3	6.558.000	25%	25%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	2	2.03	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		8	10.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.03	1	Pelaksanaan Urutan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peritran Non Usaha		8	10000000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.04	1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		8	10.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	2	2.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		8	10.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dikoordinasikan	Kegiatan	29	53.932.544	14	24.049.465,00	0	0	0	0	-	-	0%	0%	14	24.049.465	48%	45%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang Diberdayakan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	1	53.932.544	1	24.049.465,00	0	0	0	0	-	-	0%	0%	1	24.049.465	100%	45%	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	5	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60	53.932.544	36	24.049.465,00	0	0	0	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada	10/10/10	60.000.000	6/6/6	2.000.000	2/2/3	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0%	3,3333	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteraturan dan Keteritiban Umum	Jumlah tindak kejahatan yang berkurang.	Kegiatan	5	50.000.000	4	2.000.000	1	4.800.000	0	0	0	0	0	0	4	2.000.000	80%	4,0000	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	6	2.01	2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	50.000.000	4	2.000.000	1	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteraturan dan Keteritiban Umum	Jumlah tindak kejahatan yang berkurang.	Kegiatan	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	4	2.01	3	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan Perundang/undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Laporan	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	4	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Perda dan Perkada	10/10/10	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	10	5.000.000	-	0	-	0	0	0	-	-	0%	0%					KECAMATAN MARDINDING
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dieleenggarakan Kecamatan	Usuran	5	148.000.000	1	95.223.330	1	41.575.700	0	0	0	0	0	0	1	95.223.330	20%	64,3401	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	5	2.01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan Sebanyak 1 Kegiatan.	Orang	2400	148.000.000	41	95.223.330	500	41.575.700	0	0	0	0	0	41	95.223.330	2%	64,3401	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	2400	148.000.000	900	#REF!	500	41.575.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	6		PROGRAM PEMUDAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintah desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa	12	24.000.012	12	30.520.000	12	2.720.000	0	0	0	0	0	0	12	30.520.000	100%	127,1666	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	6	2.01	1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	-	24	12.920.000	12	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	1	6	2.01	2	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	60	24.000.000	24	17.600.000	12	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MARDINDING	
7	01			KECAMATAN MERDEKA			15.870.273.059		5.964.287.592	100	2.352.028.687		509.674.448	0	509.674.448		21,67%		6.473.962.040		40,7930	KECAMATAN MERDEKA		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	14.801.001.682	54,00	5.713.342.215	89	2.200.270.141		493.233.938	0	493.233.938	0,00	22,417	54,00	6.206.576.153	56,84	41,9335	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP dan DPPA yang terverifikasi, Penatausahaan SP2D, Laporan Keuangan	%	100	13.402.313.095	40,00	5.281.887.324	100	1.991.391.584	25	491.784.005	25	491.784.005	25,00	24,695	65,00	5.773.671.329	65,00	43,0797	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				12	1.936.791.954	3	486.084.005	3	486.084.005	25,00		25,097				KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12	54.599.630	3	5.700.000	3	5.700.000							KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.05	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pakaian Dinas beserta Atribut	%	100	133.786.400	-	-	100	17.320.000	0	0	0	0	0,00	-	0,00	0,0000			KECAMATAN MERDEKA
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakiaun Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaun Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				16	17.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Komponen Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggunaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	%	100	540.126.238	40,00	207.890.209,00	100	77.970.777	0	0	0	0	0,00	0,000	40,00	207.890.209	40,00	38,4892	KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket				1	4.968.790	0	0	0	0	0,00	0,000					KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket				1	11.774.425	0	0	0	0	0,00	0,000					KECAMATAN MERDEKA	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket				1	8.724.232	0	0	0	0	0,00	0,000						

3				4				5				6				7				8				9				13=9+10+11+12				14=13/8*100%				15=7+13				16=15/6*100%				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

			4	5			6	7	8	9	13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terancang dan tersedianya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah	Berkas RKEMD	20	381.561.358	12	63.312.228		21.000.000	-	0	-	0,00	0,00	12,00	63.312.228	60,00	16,99	KECAMATAN MUNTE				
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	unit	5		1			0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE				
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Unit	60		12			0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE				
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	60		12	21.000.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE				
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	25		5			0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE				
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkoordinasinya kegiatan pengamanan dan kebersihan kantor	Unit	240	371.010.480	240	170.663.354	87	73.940.000	21,17	5.860.000	21	5.860.000	24,33	7,93	261,17	176.523.354	108,82	47,88	KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	10		24		12 laporan	24.000.000	3	800.000	3	800.000	0,00	3,33					KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	laporan	5		5		3 laporan	5.000.000	-	0	-	0,00	0,00						KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1		3		36 laporan	44.940.000	2	5.060.000	2	5.060.000	0,00	11,26					KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teridentifikasi terkeleka terpelihara teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah	Laporan	87	532.829.760	87	118.084.612	84	35.510.000	21	4.400.000	21	4.400.000	25,00	12,39	108,00	122.484.612	124,14	22,99	KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	15		15		2 unit	35.510.000	1	4.400.000	1	4.400.000	0,00	12,39					KECAMATAN MUNTE			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	5		5			0	-	0,00	0,00								KECAMATAN MUNTE			
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	10	581.216.800	10	129.539.320	84,00	111.000.000	21,00	20.160.000	21	20.160.000	25,00	18,16	31,00	149.699.320	310,00	25,76	KECAMATAN MUNTE			
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terseleenggaranya kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Indeks	40	195.529.440	40	59.024.370	84	61.000.000	21	20.160.000	21	20.160.000	25,00	33,05	61,00	79.184.370	152,50	40,80	KECAMATAN MUNTE			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	60		60		2 laporan	20.300.000	2	20.160.000	2	20.160.000	0,00	99,31					KECAMATAN MUNTE			
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan	dokumen	30		30		1 dokumen	40.700.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.02	02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	60	294.687.360	60	70.514.950	84	50.000.000	-	0	-	0,00	0,00	60,00	70.514.950	100,00	23,93			KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	5		5		12 laporan	50.000.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.03	03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen	95	55.000.000	95		0			0	-	0,00	0,00	95,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen	10		10			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Unit	25		25			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.04	04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	dokumen	5	36.000.000	5		0			0	-	0,00	0,00	5,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	dokumen	29		29			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Perizinan	laporan	28		28			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	50		50			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE		
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	5	80.000.000	5		0	5	16.150.000	-	0	-	0,00	0,00	5,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terseleenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Laporan	48	65.000.000	48	15.789.000	84	16.150.000	-	0	-	0,00	0,00	48,00	15.789.000	100,00	24,29			KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	48		48		1 Lembaga Kemasyarakatan	8.150.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	10/10/10		2/2/2		5 laporan	8.000.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.05	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Terseleenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Lembaga Kemasyarakatan	75	20.000.000	75		0			0	-	0,00	0,00	75,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE	
7	01	03	2.05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	dokumen	5		5			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkda	Perda/Perkda/Kegiatan	8	235.529.440	8	9.490.000	2/2/2	18.684.000	-	0	-	0,00	0,00	8,00	9.490.000	100,00	4,03			KECAMATAN MUNTE		
7	01	04	2.01	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	100	195.529.440	100	9.490.000	100%	15.660.000	-	0	-	0,00	0,00	100,00	9.490.000	100,00	4,85			KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan kepolisian negara RI TNI dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan				1 laporan	15.660.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE		
7	01	04	2.02	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	4		4			0	-	0,00	0,00									KECAMATAN MUNTE	
7	01	04	2.02	02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkda	Terseleenggaranya koordinasi Perda dan Perkda yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkda	100	40.000.000	100		0	84	3.024.000	-	0	-	0,00	0,00	100,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkangan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkangan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan				1 laporan	3.024.000		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Di selenggarakan Kecamatan	Urusan	5	601.888.894	5	163.541.851	1	41.315.713	-	0	-	0,00	0,00	5,00	163.541.851	100,00	27,17			KECAMATAN MUNTE		
7	01	05	2.01	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangasan Kepala Daerah	Terseleenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Urusan	100	601.888.894	100	163.541.851		41.315.713	-	0	-	0,00	0,00	100,00	163.541.851	100,00	27,17			KECAMATAN MUNTE	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Pelestarian Bahasa Nasional dan Penguatan Pergerakan Pemuda dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Pelestarian Bihneka Tunggul Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Bernilik Indonesia	orang				300 orang	41.315.713		0	-	0,00	0,00							KECAMATAN MUNTE		
7	01	06		PROGRAM PEMERINTAH DAN PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	56	60.000.000	56		0	12	10.150.000	-	0	-	0,00	0,00	56,00	-	100,00	0,00			KECAMATAN MUNTE	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Terseleenggaranya Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	100	60.000.000	100	8.700.000	100%	10.150.000	-	0	-	0,00	0,00	100,00	8.700.000	100,00	14,50			KECAMATAN MUNTE	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	laporan				1 Laporan	6.000.000		-	-										KECAMATAN MUNTE	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	laporan				1 laporan	4.150.000		0	-	0,00	0,00								KECAMATAN MUNTE	
7	01			KECAMATAN NAMANTERAN	Unit	4	17.927.437.993		6.779.671.169		2.681.169.895	0,00	413.829.091		413.829.091		15,43%		7.193.500.260		40,13			KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,91	16.368.802.859	864,00	6.435.695.012	89,91	2.531.631.636	22,48	402.054.091	22	402.054.091	25,00	15,881	886,48	6.837.749.103	985,96	41,77		KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01	2.02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Uraian RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi	Berkas	4																KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Berkas	70	14.332.016.747	864,00	5.878.857.357	12	2.315.701.840	3,00	374.078.291	3	374.078.291	25,00	16,154	867,00	6.262.935.648	94,00	43,63		KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	01	2.02	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	12		43		21	2.264.693.740,00	5,25	374.078.291,00	5	374.078.291	25,00	16,518					KECAMATAN NAMANTERAN		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	46		100		12	51.008.100,00	3,00		-	3		25,00	0,000					KECAMATAN NAMANTERAN	

3			4	5		6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13B*100%		15=7+13		16=15B*100%		17	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Pengawasan Kepala Daerah Yang Dielektifikasi	urusan	1	601.888.894	100,00	195.274.511	1	55.318.259	0,25	0	-	25,00	0,00	100,25	195.274.511	10.025,00	32,44	KECAMATAN NAMANTERAN	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketertuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Urang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila/Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Ketertuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	300		600	300	55.318.259,00	-	0	-	0,00	0,00						KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa	12	60.000.000		0	12	3,00	-	3	-	25,00	0,00	3,00	-	25,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	06	2.01	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	12	60.000.000		0	12	3,00	-	3	-	25,00	0,00	3,00	-	25,00	0,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah kecamatan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah kecamatan	laporan	12			12		-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN NAMANTERAN	
7	01			KECAMATAN PAYUNG			100	10.653.337.788	53,46	5.695.055.896	100	2.090.213.377	100,00	309.638.889		309.638.889	14,81%		6.004.694.785		56,36	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	10.109.070.555	89	5.476.343.896	89,00	1.973.964.033	89,00	298.402.889	89	298.402.889	200,00	35,78	178,00	5.774.746.785	187,37	57,12	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	* Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN. *Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD. * Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	9.045.963.102	24	4.888.747.683	12	1.781.687.017	3	278.589.979	3	278.589.979	200,00	35,68	27,00	5.167.337.662	45,00	57,12	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan			13		13	1.741.727.017	3	268.599.979	3	268.599.979	200,00	35,91			KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		24		12	39.960.000	3	9.990.000	3	9.990.000	100,00	25,00				KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	* Jumlah hasil evaluasi PNS yang dikelola * Jumlah Paket Pakatan Dinas Beserta Atribut	Bulan	60	75.000.000	24	14.487.800								24,00	14.487.800	40,00	19,32	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.03	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit															KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	-	Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		1													KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan * Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan * Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan * Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan * Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	60	357.007.453	24	225.393.455	12	53.737.016		0	-	200,00	39,01	24,00	225.393.455	40,00	63,13	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		2	3.383.008		0	-	100,00	99,32					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		8		4	9.799.530		0	-	100,00	99,89					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan		4		2	5.698.328		0	-	100,00	98,64					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	Paket		2		1	2.612.150		0	-	100,00	97,39					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		0		0	1.500.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		120		60	30.744.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	13	64.000.000	1	30.865.659							1,00	30.865.659	7,69	48,23		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.05	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1													KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	48	441.260.000	24	212.143.729	12	100.370.000		19.812.910	0	19.812.910	50,00	40,84	24,00	231.956.639	50,00	52,57	KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		24		12	22.200.000	3	2.252.910	3	2.252.910	50,00	30,43					KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		4		2	2.190.000		0	-	100,00	100,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		24		12	75.980.000	3	17.560.000	3	17.560.000	50,00	42,18					KECAMATAN PAYUNG
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	5	155.840.000	2	104.705.570	1	38.170.000		0	-	100,00	22,56	2,00	104.705.570	40,00	67,19	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		2		1	38.170.000		0	-	100,00	22,56					KECAMATAN PAYUNG	
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Pemangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		1		1	4.700.000												
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Pemangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit					33.470.000												
7	01	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit						0	-	0,00	0,00						KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	95	211.463.376	89	93.493.000	89	51.399.940	89	11.236.000	89	11.236.000	200,00	80,73	178,00	104.729.000	187,37	49,53	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Dielektifikasi Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	10	140.273.496	2	63.301.000	2	27.305.000	2	11.236.000	2	11.236.000	100,00	64,05	4,00	74.537.000	40,00	53,14	KECAMATAN PAYUNG
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		2		1	12.310.000	1	11.236.000	1	11.236.000	0,00	92,18				KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		2		1	14.995.000		0	-	100,00	40,96					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan	40	64.192.000	24	92.518.000	12	19.096.000		0	-	50,00	99,71	24,00	92.518.000	60,00	144,13	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		24		12	19.096.000		0	-	50,00	99,71					KECAMATAN PAYUNG	
7	-	-	-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dikordinasikan pemeliharaannya	Unit	40	16.000.000		-							0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	-	-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen																KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	-	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit																KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan pelayanan lainnya	Dokumen	28	18.997.880		4.964.000	7	4.998.940		0	-	100,00	99,30	0,00	4.964.000	0,00	26,13	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen															KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		7		7	4.998.940		0	-	100,00	99,30					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan															KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan	100	64.680.200	-	37,09		23.987.100		0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan	24	54.680.200		5.000.000	6	23.987.100		0	-	0,00	0,00	0,00	5.000.000	0,00	9,14	KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		5		5	5.000.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2	18.987.100		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Dokumen	36	10.000.000		-						0,00	-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG	
7	01	01	2.06	03	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen															KECAMATAN PAYUNG	

3			4	5	6			7			8			9			13=9+10+11+12			14=13B*100%			15=7+13			16=15G*100%			17
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pengakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada/Kesatuan	10/10/10	88.061.148	2/2/2/	21.797.000	2/2/2/	11.980.000			2/2/2/		-	0,00	0,00			0,00	0,00			21.797.000	0,00	24,75	KECAMATAN PAYUNG
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	44	78.061.148	6	21.797.000	6	11.980.000			0		-	0,00	0,00			0,00	0,00			21.797.000	13,64	27,92	KECAMATAN PAYUNG
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan			6		6	11.980.000			0		-	0,00	0,00										KECAMATAN PAYUNG
7	01	04	2.01		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan			6								-												KECAMATAN PAYUNG
7	01	04	2.01		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Laporan	8	10.000.000	-							-					0,00			-	0,00	0,00		KECAMATAN PAYUNG
7	01	04	2.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Pungsiya di Bidang Pengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisan Negara Republik Indonesia	Laporan											-												KECAMATAN PAYUNG
7	01	05		PROGRAM PENYELANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dieleenggarakan Kecamatan	Urusan	100	122.404.509	100	86.252.000	17,06	20.882.304			0		-	0,00	0,00			100,00				86.252.000	100,00	70,46	KECAMATAN PAYUNG
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemngasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penguasaan Kepala Daerah Yang Dieleenggarakan	urusan	24	122.404.509	6	86.252.000	1	20.882.304			0		-	0,00	0,00			6,00				86.252.000	25,00	70,46	KECAMATAN PAYUNG
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		300		180	20.882.304			0		-	0,00	0,00										KECAMATAN PAYUNG
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Dokumen	82	57.658.000	16	17.170.000	8	8.000.000			0		-	100,00	63,75			16,00				17.170.000	30,77	29,78	KECAMATAN PAYUNG
7	01	06	2.01	Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa	82	57.658.000	16	17.170.000	8	8.000.000			0		-	100,00	63,75			16,00				17.170.000	30,77	29,78	KECAMATAN PAYUNG
7	01	06	2.01	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen				38	8.000.000			0		-	100,00	63,75										KECAMATAN PAYUNG
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen										-												KECAMATAN PAYUNG
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen										-												KECAMATAN PAYUNG
7	01			KEC. SIMPANG EMPAT				23.137.301.689		8.595.515.489	37,833	3.174.337.400			488.972.003	19	488.972.003		15,40%							9.084.487.492		39,26	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	21.612.799.919	972	8.201.415.486	66	2.990.737.400			473.014.483	0	473.014.483		0,00	15,816			972,00			8.674.429.969	1.023,16	40,14	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi	bulan	78	19.978.748.140	148	7.514.395.764	12	2.677.561.900	3	459.496.483	0	459.496.483	25,00	17,161	151,00			7.973.892.247	193,59	39,91					KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan				12	2.627.841.900	3	459.496.483	0	459.496.483	25,00	17,486											KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	honorarium Pengelola Keuangan	orang bulan				12	49.720.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	bulan	201	137.940.000	24	42.987.800	12	47.040.000			-		-					24,00				42.987.800	11,94	31,16	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	bulan										-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	atei				52	47.040.000					-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Kecamatan Simpang Empat yang terkelola	Laporan	98%	902.483.170	704	309.963.556	2	102.045.500			8.508.000	0	8.508.000		0,00	8,337			704,00			318.471.556	74.105,26	35,29	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis				7	1.500.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah				39	16.500.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis				2	2.100.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis				4.252	8.445.500			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Perjalanan Dinas	orang kali				490	73.500.000			8.508.000	0	8.508.000		0,00	11,576									KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berkas BMD yang dilaporkan	%	12	53.680.000	11	31.870.000	3						-					11,00				31.870.000	91,67	59,37	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit										-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.08	Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Petugas Kebersihan, Operator Komputer dan Petugas Keamanan Kecamatan Simpang Empat yang terakreditasi	Laporan	2	283.868.315	28	167.272.400	12	80.620.000			5.010.000	0	5.010.000		0,00	6,214			28,00			172.282.400	1.400,00	60,69	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa TeleponInternetAir dan Listrik	bulan				12	14.500.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit				4	6.000.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai tidak Tetap	orang bulan				12	60.120.000			5.010.000	0	5.010.000		0,00	8,333									KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Simpang Empat	Laporan	2	256.080.293	2	101.396.166	3	83.470.000			0		-	0,00	0,000			2,00				101.396.166	100,00	39,60	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan Baya	Jasa pemeliharaan Baya Pemeliharaan Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit				1	33.470.000			0		-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit				1	50.000.000					-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02		PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	100	756.652.245	16	215.871.057	112	106.600.000			15.957.520	13,39	14.970		15.957.520		31,00					231.828.577	31,00	30,64	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dieleenggarakan di Tingkat Kecamatan	dokumen	16	408.385.364	8	76.531.050	100	61.000.000			12.557.520	3	12.557.520		3,00	20,586			11,00			89.088.570	68,75	21,81	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Pemerintahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	orang kali				2	16.000.000			12.557.520	0	12.557.520		0,00	78,485									KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.01	02	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	1	45.000.000						1		-	100,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Urusan	47	348.266.880	9	139.340.007	12	45.600.000			3.400.000	12	3.400.000		100,00	7,456			21,00			142.740.007	44,68	40,99	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali				12	45.600.000			3.400.000	12	3.400.000		100,00	7,456									KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang dikoordinasikan pemeliharaannya	Laporan	12	60.000.000	-								-					0,00			-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	kali										-												KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	unit										-												KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada Camat	Jumlah layanan peritinan, non peritinan dan tugas lainnya	Laporan	40	28.000.000	-								-					0,00			-	0,00	0,00		KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peritinan Non Usaha	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peritinan Non Usaha	urusan										-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peritinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peritinan	urusan										-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Ditimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Ditimpahkan	urusan										-	0,00	0,000										KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan	-		-								-	0,00	0,000			0,00			-	#DIV/0!	#DIV/0!		KECAMATAN SIMPANG EMPAT
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	orang	-		-								-	0,00	0,000			0,00			-	#DIV/0!	#DIV/0!		KECAMATAN SIMPANG EMPAT

			4	5			6	7	8	9	13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7	01	03	2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kegiatan	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	03	2.05	01 Pengenalan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	0		0	0	0	0	-	0	0	-	0,00	0,000			KECAMATAN TIGA PANAH			
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETETERAN DAN KETERIBATAN UMUM	Jumlah Perda Perkada dan Kegiatan	10/2010	295.604.800	0	80.842.190	10/2010	16.907.000	0	10/2010	-	0,00	0,000	#VALUE!	80.842.190	#VALUE!	27,35	KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertanan dan Keterbitan Umum	Kegiatan	0	258.604.800	100	80.842.190	0	16.907.000	-	0	0	-	0,00	0,000	100,00	80.842.190	#DIV/0!	31,26	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0		2	0	0	16.907.000	-	0	0	-	0,00	0,000				KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0		0	0	0	0	-	0	0	-	0,00	0,000				KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Pengakn Peraturan Daerah	Kegiatan	0	37.000.000	0	0	0	0	-	0	0	-	0,00	0,000	0,00	-	#DIV/0!	0,00	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Laporan	0		0	0	0	0	-	0	0	-	0,00	0,000				KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dielektengrakan Kecamatan	Urusan	100	348.772.969	1	190.651.343	100	67.699.680	0	100	-	100,00	0,000	101,00	190.651.343	101,00	54,66	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Kegiatan	100	348.772.969	100	190.651.343	100	67.699.680	-	0	100	-	100,00	0,000	200,00	190.651.343	200,00	54,66	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Orang	350		2	350	67.699.680	0	350	-	100,00	0,000						KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01	06		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	29	101.500.000	29	18.994.000	29	15.000.000	0	0	29	-	0,00	0,000	58,00	18.994.000	200,00	18,71	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	06	2.01	01 Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa yang difasilitasi pengalihan rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasannya	116	101.500.000	100	18.994.000	116	15.000.000	-	0	116	-	0,00	0,000	216,00	18.994.000	186,21	18,71	KECAMATAN TIGA PANAH	
7	01	06	2.01	01 01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	116		151	116	15.000.000	-	0	116	-	100,00	0,000					KECAMATAN TIGA PANAH		
7	01			KECAMATAN TIGA BINANGA			31.984.962.415		9.684.146.401		3.594.391.947		692.992.499		19,28%		10.377.138.900		32,44		KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	25.029.928.900	90	8.359.446.083	89	2.650.751.417		670.666.924	89	670.666.924	100,00	25,30	179,00	9.030.113.007	198,89	36,08	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.01	01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	5.368.000	0	0	0			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.01	01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen								0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.02	01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA telah disetujui Penatunahan SP2D Laporan Keuangan	Laporan	780	22.804.148.543	384	7.416.442.297	12	2.248.868.502	3	560.803.672	12	560.803.672	100,00	24,94	396,00	7.977.248.969	50,77	34,98	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.02	01 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan			22	2.140.268.502	3	545.473.672	3	545.473.672	13,64	25,49					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatunahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan	Dokumen			108	108.600.000	25	15.330.000	42	15.330.000	38,89	14,12					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.05	01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	160	193.248.000	48	36.000.000	28	23.520.000	28	23.520.000	100,00	100,00	76,00	59.520.000	47,50	30,80	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.05	02 01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	paket			28	23.520.000	28	23.520.000	28	23.520.000	100,00	100,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Paket	60	794.611.996	24	301.086.526	12	106.202.915	3	26.466.189	3	26.466.189	25,00	24,92	27,00	327.552.715	45,00	41,22	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.06	01 01 Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Peralatan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	paket			12	1.554.870			0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	02 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket			4	43.682.675	1	13.918.835	1	13.918.835	25,00	31,86					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	03 01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	paket			1	2.807.870	1	2.807.870	1	2.807.870	100,00	100,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	05 01 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	paket			1	5.525.500			0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	09 01 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas	laporan			233	52.632.000	33	9.739.484	33	9.739.484	14,16	18,50					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.06	11 01 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.07	01 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Belanja Modal yang tersedia	Unit	58	80.520.000	15	16.500.000	0	-	0	-	0,00	0,00	15,00	16.500.000	25,86	20,49	KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.07	05 01 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.07	10 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Tagihan Listrik, Operator, Jaga Malam dan Tenaga Kebersihan	bulan	60	581.395.299	24	468.977.260	12	225.220.000	3	48.377.063	12	48.377.063	100,00	21,48	36,00	517.354.323	60,00	88,98	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.08	02 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Telepon, Internet, Air dan Listrik	Laporan			12	30.000.000	3	6.407.063	3	6.407.063	25,00	21,36					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.08	03 01 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan			3	7.300.000	-	0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	01	2.08	04 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	Laporan			12	187.920.000	3	41.970.000	3	41.970.000	25,00	22,33					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.09	01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mobil Dinas dan Bangunan Kantor terawat	unit	102	570.637.061	4	120.440.000	2	46.940.000	1	11.500.000	2	11.500.000	100,00	24,50	6,00	131.940.000	5,88	23,12	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	01	2.09	02 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	unit			2	46.940.000	1	11.500.000	2	11.500.000	100,00	24,50					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.09	05 01 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.09	09 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.09	10 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	01	2.09	11 01 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	570.899.575	86	131.508.330	86	79.883.420		22.325.575	80	22.325.575	93,02	27,95	166,00	153.833.905	190,80	26,95	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	02	2.01	01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan (Pra Musrebang, Hari Jadi, Pesta Buah dan Bunga)	Kegiatan	1.060	140.795.072	12	136.929.830	1	55.083.420	1	22.325.575	1	22.325.575	100,00	40,53	13,00	159.255.405	1,23	113,11	KECAMATAN TIGA BINANGA
7	01	02	2.01	01 01 Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan			1	22.329.420	1	22.325.575	1	22.325.575	100,00	99,98					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.01	02 01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Dielektengrakan Di Tingkat Kecamatan	Dokumen			2	32.754.000			0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.02	01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintahan	Kegiatan	32	16.104.000	4	42.573.600	12	24.800.000		1	-	8,33	0,00	5,00	42.573.600	15,63	264,37	KECAMATAN TIGA BINANGA	
7	01	02	2.02	01 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.02	02 01 Fasilitas - Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	persen					0	-	0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.02	03 01 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan			12	24.800.000			1	-	8,33	0,00					KECAMATAN TIGA BINANGA		
7	01	02	2.03	01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana terpelihara dengan baik	Unit	8																

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/100%		15=7+13		16=15/100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
7	1	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	26.000.000		1	15.720.000			0	0,00	0,00						KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	03	2.05		Koordinat dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kegiatan										0	-	#DIV/0!	#DIV/0!			KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	03	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen	5	18.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTIRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pemda/Perkada Kegiatan	10/10/5	166.000.000	4/4/2	190.862.064	2/2/1	19.587.000		2/2/1	-	100,00	0,00	6/6/3	190.862.064	97,78	114,98	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	04	201		Koordinat Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kegiatan	5	166.000.000	2	190.862.064	1	19.587.000		0	-	0,00	0,00	2	190.862.064	40,00	114,98	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	04	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	65.000.000			1	19.587.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGANDERKET			
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	101.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Urusan	10	362.238.595	4	143.354.070	2	58.918.000		0	-	0,00	0,00	4	143.354.070	40,00	39,57	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penggunaan Kepala Daerah	Kegiatan	10	362.238.595	4	143.354.070		58.918.000		0	-	0,00	0,00	4	143.354.070	40,00	39,57	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	5	201	1	Pembinan Wawasan Kelangkaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	org	1.500	162.238.595			350	43.297.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	05	201	03	Pembinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	org	850	100.000.000			170	15.621.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	05	201	04	Pembinan Kerukunan Antar Suku dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	org	850	100.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06			PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pendes	17	150.000.000	34	32.378.000	2	48.151.000		0	-	0,00	0,000	34,00	32.378.000	37,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201		Facilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	15	150.000.000	6	32.378.000	3	48.151.000		0	-	0,00	0,000	6,00	32.378.000	37,00	0,00	KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	85	25.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	85	25.000.000			17	30.749.000		0	-	0,00	0,00					KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	85	25.000.000			17	17.402.000										KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	85	25.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	85	25.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
7	1	06	201	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	85	25.000.000														KECAMATAN TIGANDERKET			
8	1				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			53.406.345.930		68.671.115.413		9.702.434.198		1.018.373.790		1.018.373.790		10,50%	69.689.489.203		130,49	Bakesbangpol			
08	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	268	26.761.772.579	86	9.904.815.373	92	4.919.649.860	24	1.000.433.790	24	1.000.433.790	26,09	20,34	110	10.905.249.163	41,04	40,75	Bakesbangpol	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	61	23.716.487.339	12	8.863.098.972	12	4.553.687.062	3	965.678.331	3	965.678.331	25,00	21,21	15	9.828.777.303	24,59	41,44	Bakesbangpol	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0		32		32	4.382.183.464,00	32	943.278.331	32	943.278.331	100,00	21,53					Bakesbangpol		
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			1	12	171.503.598,00	3	22.400.000	3	22.400.000	25,00	13,06					Bakesbangpol			
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya	paket	75	157.920.000	0	38	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bakesbangpol		
8	1	1	2.05	2	Pengadaan pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	paket			0	38	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket perlengkapan kantor seperti ATK, alat rumah tangga dan barang cetak dan penggandaan	paket	113	2.177.065.240	47	656.185.643	60	182.639.200	12	7.790.259	12	7.790.259	20,00	4,27	59	663.975.902	52,21	30,50	Bakesbangpol	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Kantor	paket			1	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				Bakesbangpol			
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket			31	18	39.306.185	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket			12	12	1.442.669,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket			2	2	10.053.410,00	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen			1	1	1.799.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			65	36	130.037.936	9	7.790.259	9	7.790.259	25,00	5,99					Bakesbangpol			
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang	Dokumen	5	120.000.000	1	8.500.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	1	8.500.000	20,00	7,08	Bakesbangpol	
8	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit			1	0	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00				Bakesbangpol		
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan penganaman dan kebersihan lingkungan	dokumen	10	342.700.000	4	239.895.758	26	133.803.598	4	17.045.200	4	17.045.200	15,38	12,74	8	256.940.958	80,00	74,98	Bakesbangpol	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan			1	12	12.000.000	3	1.865.200	3	1.865.200	25,00	0,00					Bakesbangpol			
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan			2	2	14.200.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00			Bakesbangpol			
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan			1	12	107.603.598	3	15.180.000	3	15.180.000	25,00	0,00					Bakesbangpol			
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang inventaris serta barang milik daerah yang terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramanakan dan tercatat	Unit	4	247.600.000	4	137.135.000	4	49.520.000	1	9.920.000	1	9.920.000	25,00	20,03	5	147.055.000	125,00	59,39	Bakesbangpol	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit			4	4	49.520.000	1	9.920.000	1	9.920.000	25,00	0,00					Bakesbangpol			
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Hari-Hari Besar Nasional dan Pelaksanaan Sosialisasi ONRM	Kegiatan	22	8.017.594.530	11	2.446.173.853	11	1.148.651.215	0	-	0	-	0,00	0,00	11	2.446.173.853	50,00	30,51	Bakesbangpol	
8	1	2	2.01		Karakter Kebangsaan	Kegiatan	22	8.017.594.530	11	2.446.173.853	11	1.148.651.215	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	11	2.446.173.853	50,00	30,51	Bakesbangpol
8	1	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen			4	11		0	0	0	0	0	0,00	0,00				Bakesbangpol			
8	1	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumen			5	2		0	0	0	0	0	0,00	0,00				Bakesbangpol			
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Pembinaan Partai Politik	Parpol	400	6.217.594.530	400	52.912.873.753	40	1.103.296.437	0	-	0	-	0,00	0,00	400	52.912.873.753	100,00	851,02	Bakesbangpol	
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan penempatan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitas kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang dibina	Parpol	400	6.217.594.530	400	52.912.873.753	40	1.103.296.437	0	-	0	-	0,00	0,00	400	52.912.873.753	100,00	851,02	Bakesbangpol	

3				4	5	6		7		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6*100%		17			
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta pemantauan situasi politik di daerah	Dokumen	400		400		40	1.103.296.437	0	-	0,00	0,00					Bakeshangpol			
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Ormas	Kegiatan	80	474.790.880	0	0	1	32.661.333	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bakeshangpol	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	Kegiatan	80	474.790.880	0	0	1	32.661.333	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Bakeshangpol	
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Penderitaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	dokumen	12		0		1	32.661.333	0	-	0	-	0,00	0,00				Bakeshangpol		
8	1	5			PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan sosialisasi	Kegiatan	172	9.498.593.411	32	3.043.589.934	36	2.176.834.580	0	17.940.000	0	17.940.000	0,00	0,82	32	3.061.529.934	18,60	32,23	Bakeshangpol	
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah kegiatan keagamaan dan Forum Keagamaan	Kegiatan	172	9.498.593.411	32	3.043.589.934	36	2.176.834.580	0	17.940.000	0	17.940.000	0,00	0,82	32	3.061.529.934	18,60	32,23	Bakeshangpol	
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kegiatan	25		3		3	422.961.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00				Bakeshangpol		
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Kegiatan	62		300		300	1.607.083.580,00	0	17.940.000	0	17.940.000	0,00	1,12				Bakeshangpol		
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kegiatan	88		300		300	146.790.000,00	0	-	0	-	0,00	0,00				Bakeshangpol		
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopinda dan Forkopimcam, Persentase Pemantauan /Pengawasan Konflik di Masyarakat	Kegiatan	20	2.436.000.000	363.662.500	400	321.340.773	0	-	0	-	0,00	0,00	0	363.662.500	0,00	14,93	Bakeshangpol		
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan Forkopinda dan Pemantauan Konflik Sosial	Orang	20	2.436.000.000	4	363.662.500	400	321.340.773	0	-	0	-	0,00	0,00	4	363.662.500	20,00	14,93	Bakeshangpol	
8	1	6	2.01	4	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Orang	20	2.436.000.000	4		400	321.340.773	0	-	0	-	0,00	0,00				Bakeshangpol		



LAMPIRAN II

PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KARO
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat				89 92 Indeks Indeks	89 92 Indeks Indeks	311.278.955.926,00	320.190.993.983,00	325.068.708.599,00	31.357.495.593,00							342.636.451.519,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	31.739.227,00	16.945.631,00	-13.054.369,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 0	1 Dokumen	30.000.000,00	31.739.227,00	16.945.631,00	-13.054.369,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	309.715.185.976,00	318.195.947.776,00	323.214.630.088,00	13.499.444.112,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		340.686.704.574,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2765 Orang /bulan	3064 Orang /bulan	309.565.185.976,00	317.802.587.776,00	0,00	-309.565.185.976,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							408.070.524.796,00	428.411.048.713,00	435.649.552.837,00	27.579.028.041,00							462.953.254.881,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				500 Dokumen	23 Dokumen	150.000.000,00	393.360.000,00	393.360.000,00	243.360.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	136.590.000,00	142.590.000,00	142.590.000,00	6.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		143.349.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	100 Paket	69.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	67.590.000,00	67.590.000,00	67.590.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			74.349.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	279.999.950,00	533.896.980,00	409.722.880,00	129.722.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		307.999.945,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	126.700.000,00	112.325.000,00	62.325.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.999.950,00	150.798.780,00	129.698.780,00	79.698.830,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			54.999.945,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	130.000.000,00	171.398.200,00	85.699.100,00	-44.300.900,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	45.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	305.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		253.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	6 Unit	15.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	6 Unit	30.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	725.340.000,00	689.980.000,00	689.980.000,00	-35.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		797.874.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	54.000.000,00	73.800.000,00	73.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			59.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	641.340.000,00	586.180.000,00	586.180.000,00	-55.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			705.474.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	346.840.000,00	246.840.000,00	244.840.000,00	-102.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas Pendidikan		414.524.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	76.840.000,00	76.840.000,00	76.840.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			84.524.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	270.000.000,00	170.000.000,00	168.000.000,00	-102.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan				68,35 %	68,35 %	96.538.118.870,00	107.787.044.730,00	110.290.232.244,00	23.379.889.492,00							119.918.008.362,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				100 %	100 %	47.745.127.000,00	59.905.787.000,00	62.291.437.256,00	14.546.310.256,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		58.833.632.395,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	667.830.000,00	967.830.000,00	963.478.366,00	295.648.366,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			734.613.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	16 Ruang	3.562.800.000,00	3.162.800.000,00	3.132.515.088,00	-430.284.912,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			4.282.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	6 Ruang	100.000.000,00	700.000.000,00	698.950.000,00	598.950.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			892.975.395,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	15 Unit	100.000.000,00	1.500.000.000,00	3.063.700.440,00	2.963.700.440,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	198.967.650,00	598.967.650,00	874.281.536,00	675.313.886,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	3.180.000,00	-96.820.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	19 Paket	20.000.000,00	940.000.000,00	805.560.000,00	785.560.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				395 Peserta Didik	281 Peserta Didik	155.000.000,00	255.000.000,00	362.125.405,00	207.125.405,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	350 Orang	299.000.000,00	399.000.000,00	330.657.086,00	31.657.086,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			328.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				296 Satuan Pendidikan	278 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	220.000.000,00	131.030.715,00	111.030.715,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				200 Satuan Pendidikan	278 Satuan Pendidikan	30.433.340.000,00	37.554.000.000,00	37.554.000.000,00	7.120.660.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			33.476.674.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				200 Orang	278 Orang	20.000.000,00	320.000.000,00	144.990.715,00	124.990.715,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	12 Ruang	6.393.900.000,00	6.393.900.000,00	6.326.446.678,00	-67.453.322,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			7.253.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	98.597.463,00	-21.402.537,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				120 Konten Digital	120 Konten Digital	190.000.000,00	190.000.000,00	138.835.007,00	-51.164.993,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			209.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	100 Orang	20.000.000,00	180.000.000,00	116.658.382,00	96.658.382,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			182.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				40 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	780.098.350,00	367.463.055,00	357.463.055,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	10 Komunitas	100.000.000,00	100.000.000,00	84.897.252,00	-15.102.748,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	281 Kegiatan	100.000.000,00	200.000.000,00	185.135.207,00	85.135.207,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	278 Buku	570.098.350,00	0,00	180.000.000,00	-390.098.350,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	19 Paket	1.931.000.000,00	1.931.000.000,00	2.027.058.698,00	96.058.698,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			2.124.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 Ruang	0 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	8 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	895.147.500,00	-4.852.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	100 Orang	0,00	180.000.000,00	154.534.382,00	154.534.382,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				250 Satuan Pendidikan	278 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	70.000.000,00	59.248.015,00	39.248.015,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	7 Ruang	1.338.191.000,00	1.338.191.000,00	2.797.167.970,00	1.458.976.970,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	784 Peserta Didik	135.000.000,00	485.000.000,00	375.890.444,00	240.890.444,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	4 Paket	20.000.000,00	420.000.000,00	419.887.852,00	399.887.852,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				100 %	100 %	44.013.964.090,00	41.239.049.950,00	42.155.522.478,00	-1.858.441.612,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		55.417.445.409,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	382.310.000,00	682.310.000,00	678.914.270,00	296.604.270,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			420.541.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	9 Ruang	1.704.250.000,00	1.704.250.000,00	1.909.698.553,00	205.448.553,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.874.675.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	3 Ruang	829.260.000,00	1.629.260.000,00	1.619.076.146,00	789.816.146,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.229.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	5 Unit	100.000.000,00	800.000.000,00	807.405.000,00	707.405.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			2.366.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	16 Ruang	5.232.670.000,00	5.232.670.000,00	7.350.970.358,00	2.118.300.358,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			5.904.437.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	2 Ruang	535.390.000,00	535.390.000,00	532.464.630,00	-2.925.370,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			588.929.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	257.330.000,00	757.330.000,00	751.998.009,00	494.668.009,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			283.063.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	5 Unit	615.490.000,00	615.490.000,00	611.618.530,00	-3.871.470,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				74 paket Paket	10 Paket	10.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	490.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 paket Paket	5 paket Paket	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	1006 Peserta Didik	175.000.000,00	475.000.000,00	761.350.000,00	586.350.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				400 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	10.000.000,00	710.000.000,00	380.000.000,00	370.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	60 Orang	0,00	100.000.000,00	64.040.156,00	64.040.156,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	562.324.090,00	662.829.950,00	439.783.095,00	-122.540.995,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			618.556.499,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				70 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	200.000.000,00	107.832.007,00	97.832.007,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			83.923.910,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	31.694.000.000,00	23.119.900.000,00	23.119.900.000,00	-8.574.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			34.863.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				38 Orang	69 Orang	20.000.000,00	410.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			20.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	83.366.863,00	-16.633.137,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	110.000.000,00	110.000.000,00	76.185.193,00	-33.814.807,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	90 Orang	0,00	140.000.000,00	90.553.956,00	90.553.956,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				67 Dokumen	69 Dokumen	30.000.000,00	1.099.340.000,00	594.562.926,00	564.562.926,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			82.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	76.308.830,00	-23.691.170,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				7000 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Orang	16 Orang	0,00	160.000.000,00	127.115.000,00	127.115.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				0 Buku	1 Buku	50.000.000,00	30.500.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-SM P	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	3 Paket	10.000.000,00	488.180.000,00	518.680.000,00	508.680.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	0 Ruang	799.340.000,00	0,00	0,00	-799.340.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	3 Paket	376.600.000,00	376.600.000,00	373.698.956,00	-2.901.044,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			1.818.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				100 %	100 %	3.810.137.780,00	5.674.697.780,00	4.952.499.351,70	1.142.361.571,70			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		4.743.151.558,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	3 Unit	377.489.000,00	377.489.000,00	534.341.073,00	156.852.073,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			415.787.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	300 Peserta Didik	10.000.000,00	170.500.000,00	152.873.215,00	142.873.215,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	120.000.000,00	75.455.963,00	-24.544.037,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	114.000.000,00	114.000.000,00	80.221.763,00	-33.778.237,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			125.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	975.000.000,00	319.185.331,70	299.185.331,70	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				160 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	2.971.500.000,00	2.980.560.000,00	2.980.560.000,00	9.060.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			3.268.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				160 Orang	360 Orang	80.000.000,00	160.000.000,00	99.709.208,00	19.709.208,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	10 Konten Digital	20.000.000,00	70.000.000,00	44.848.612,00	24.848.612,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				8 Orang	8 Orang	10.000.000,00	70.000.000,00	44.882.456,00	34.882.456,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	200.000.000,00	133.208.267,00	123.208.267,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	100.000.000,00	59.022.400,00	49.022.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>				-	0 Komunitas	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				-	60 Orang	0,00	100.000.000,00	65.111.312,00	65.111.312,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	9.909.635,00	-90.365,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i>				1 Paket	10 Paket	77.148.780,00	177.148.780,00	326.502.153,00	249.353.373,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			84.313.658,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i>				-	11 Satuan Pendidikan	0,00	50.000.000,00	26.667.963,00	26.667.963,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				100 %	100 %	968.890.000,00	967.510.000,00	890.773.158,30	-78.116.841,70			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		923.779.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	10.000.000,00	33.800.000,00	32.835.000,00	22.835.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	3.921.926,00	-1.078.074,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	29.042.963,00	-10.957.037,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	200.000.000,00	130.088.499,00	100.088.499,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	303.890.000,00	248.710.000,00	248.710.000,00	-55.180.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			334.279.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				12 Orang	12 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	10.000.000,00	10.000.000,00	7.175.481,00	-2.824.519,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	16.356.015,00	-3.643.985,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				80% Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.700.841,00	-3.299.159,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	10.000.000,00	10.000.000,00	9.243.481,00	-756.519,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	7.176.400,00	-2.823.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	35.941.333,00	15.941.333,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				50 Buku	0 Buku	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	173.691.454,30	93.691.454,30	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.135.426,00	-2.864.574,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	180.000.000,00	180.000.000,00	162.754.339,00	-17.245.661,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				17 sekolah	17 sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru				0,06 %	0,06 %	170.000.000,00	233.560.000,00	167.681.201,00	17.000.000,00							187.000.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				100 %	100 %	170.000.000,00	233.560.000,00	167.681.201,00	-2.318.799,00			-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	60.000.000,00	98.315.334,00	68.315.334,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				1 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	173.560.000,00	69.365.867,00	-70.634.133,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			154.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal				8 %	8 %	83.450.000,00	199.450.000,00	122.930.793,00	128.345.000,00							211.795.000,00		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	<i>Rata- rata Capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				100 %	100 %	83.450.000,00	199.450.000,00	122.930.793,00	39.480.793,00			-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Satuan Pendidikan di Kabupaten Karo		211.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				-	150 Dokumen	0,00	116.000.000,00	73.533.333,00	73.533.333,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	83.450.000,00	83.450.000,00	49.397.460,00	-34.052.540,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda Peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda			91.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
		DINAS KESEHATAN								157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	12.449.856.794,00							151.017.813.639,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	12.449.856.794,00							151.017.813.639,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.290.171.518,00	163.860.589.432,00	169.740.028.312,00	12.449.856.794,00							151.017.813.639,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	105.087.695.124,00	95.452.608.299,00	95.342.937.961,00	-6.644.244.926,00							98.443.450.198,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>				100 %	100 %	84.174.500,00	82.108.500,00	47.809.200,00	-36.365.300,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	84.174.500,00	82.108.500,00	47.809.200,00	-36.365.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	103.661.090.624,00	94.113.359.799,00	94.113.359.799,00	-9.547.730.825,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		96.779.240.198,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100 Orang /bulan	1100 Orang /bulan	103.060.610.624,00	93.878.039.799,00	93.878.039.799,00	-9.182.570.825,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			96.118.760.198,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	600.480.000,00	235.320.000,00	235.320.000,00	-365.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			660.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	232.870.000,00	232.420.000,00	157.048.962,00	-75.821.038,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		437.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	33.848.362,00	-16.151.638,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	134.550.000,00	81.330.600,00	-53.669.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				120 Unit	120 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.019.560.000,00	963.820.000,00	963.820.000,00	-55.740.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		1.019.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	949.560.000,00	893.820.000,00	893.820.000,00	-55.740.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			949.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	90.000.000,00	60.900.000,00	60.900.000,00	-29.100.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		77.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	75.000.000,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-29.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	50.746.836.594,00	66.952.341.333,00	72.749.435.871,00	209.773.068,00							50.956.609.662,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota undefined				100 % undefined	100 % undefined	12.735.362.984,00	21.948.808.724,00	22.177.954.001,00	9.442.591.017,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		13.003.213.133,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	2 Unit	0,00	10.598.917.740,00	11.598.917.740,00	11.598.917.740,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	1.209.600,00	1.209.600,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			2.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	5 Unit	5.200.000.000,00	1.308.800.000,00	1.308.800.000,00	-3.891.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				0 Unit	1 Unit	0,00	2.605.728.000,00	2.605.728.000,00	2.605.728.000,00	Kab. Karo, Naman Teran, Naman	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	469.900.000,00	269.900.000,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Limang Kab. Karo, Naman Teran, Sukandebi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			285.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1100 Unit	1100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				200 Unit	200 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			109.789.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				200 Unit	446 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	137.781.000,00	37.781.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				19 Paket	19 Paket	7.029.362.984,00	7.029.362.984,00	5.732.509.661,00	-1.296.853.323,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			7.160.831.133,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				19 Paket	19 Paket	106.000.000,00	106.000.000,00	123.108.000,00	17.108.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			106.893.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	37.035.435.410,00	44.027.494.409,00	50.420.361.270,00	13.384.925.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat dan Tenaga Kesehatan		37.028.396.529,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7789 Orang	7789 Orang	950.000.000,00	950.000.000,00	257.978.000,00	-692.022.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7777 Orang	7581 Orang	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.400.000,00	-1.994.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19 Orang	7581 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	289.783.000,00	209.783.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	29349 Orang	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	1.020.454.000,00	-154.546.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			1.175.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3342 Orang	77976 Orang	675.000.000,00	675.000.000,00	575.100.000,00	-99.900.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			675.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150478 Orang	150478 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	5.400.000,00	-129.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	48404 Orang	485.000.000,00	485.000.000,00	159.800.000,00	-325.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			485.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				36203 Orang	36203 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	5.400.000,00	-19.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4913 Orang	4913 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	5.400.000,00	-19.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				131 Orang	131 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	225.400.000,00	125.400.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6423 Orang	6423 Orang	294.600.000,00	294.600.000,00	1.273.220.400,00	978.620.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12335 Orang	12335 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	2.700.000,00	-197.300.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	19 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.604.898.000,00	2.104.898.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				19 puskesmas Dokumen	19 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	185.500.000,00	170.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				15 Dokumen	19 Dokumen	142.100.000,00	142.100.000,00	1.336.210.000,00	1.194.110.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			147.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				19 Dokumen	19 Dokumen	540.305.000,00	540.305.000,00	238.838.000,00	-301.467.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			534.905.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				19 Dokumen	19 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	701.517.000,00	676.517.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				85 Orang	85 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	81.800.000,00	11.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			72.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	1.045.902.000,00	1.045.902.000,00	3.305.089.958,00	2.259.187.958,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			1.168.991.529,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				20 Dokumen	144 Dokumen	23.922.608.410,00	29.340.013.043,00	32.714.536.912,00	8.791.928.502,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITAS JKN PADA FKTP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			25.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				580 Orang	580 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				12 Dokumen	456 Dokumen	3.494.920.000,00	5.069.574.366,00	4.421.436.000,00	926.516.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>				19 Unit	19 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				-	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>				-	19 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi</i>				79 %	79 %	151.038.200,00	151.038.200,00	140.970.600,00	-10.067.600,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				20 Dokumen	240 Dokumen	151.038.200,00	151.038.200,00	140.970.600,00	-10.067.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota				100 %	100 %	825.000.000,00	825.000.000,00	10.150.000,00	-814.850.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Tenaga Kesehatan, lintas Sektoral		825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	10.150.000,00	-4.850.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				19 Unit	19 Unit	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	-810.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			810.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar				100 %	100 %	719.939.800,00	719.939.800,00	863.846.480,00	157.560.200,00							877.500.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				96.4 %	96.4 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Tenaga Kesehatan, lintas Sektoral		17.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				75 Dokumen	75 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			17.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				89 %	89 %	269.939.800,00	269.939.800,00	198.882.480,00	-71.057.320,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Tenaga Kesehatan, lintas Sektoral		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	269.939.800,00	269.939.800,00	198.882.480,00	-71.057.320,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10 %	10 %	350.000.000,00	350.000.000,00	664.964.000,00	314.964.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				60 Orang	110 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	664.964.000,00	314.964.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan Persentase Sarana farmasi memenuhi persyaratan/persentase makanan yang memenuhi persyaratan				68 95/66 % %	68 95/66 % %	215.700.000,00	215.700.000,00	220.748.000,00	4.553.779,00							220.253.779,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				95 %	95 %	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan, Optik, Toko obat tradisional		26.924.627,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	30 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			26.924.627,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				95 %	95 %	42.500.000,00	42.500.000,00	56.870.000,00	14.370.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	-		46.784.257,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				35 Dokumen	35 Dokumen	42.500.000,00	42.500.000,00	56.870.000,00	14.370.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			46.784.257,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan				66 %	66 %	97.200.000,00	97.200.000,00	43.620.000,00	-53.580.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Produsen Pangan Industri Rumah Tangga		97.271.895,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60 Dokumen	60 Dokumen	97.200.000,00	97.200.000,00	43.620.000,00	-53.580.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			97.271.895,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				13 %	13 %	50.000.000,00	50.000.000,00	120.258.000,00	70.258.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	-		49.273.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				40 Unit	40 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	120.258.000,00	70.258.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			49.273.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per. 1.000 balita				9,6 rasio	9,6 rasio	520.000.000,00	520.000.000,00	563.060.000,00	0,00							520.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				59 %	59 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat, Kader Kesehatan, Lintas Sektoral		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				19 Dokumen	19 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1001 %	1001 %	500.000.000,00	500.000.000,00	563.060.000,00	63.060.000,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat, Kader Kesehatan, Lintas Sektoral		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				377 Dokumen	19 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	563.060.000,00	63.060.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	3.753.454.175,00						57.028.843.329,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	3.753.454.175,00							57.028.843.329,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50.400.479.046,00	52.291.032.208,00	54.153.933.221,00	3.753.454.175,00							57.028.843.329,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	50.116.539.046,00	51.506.249.648,00	53.135.392.581,00	1.069.315.101,00							51.185.854.147,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Keuangan RSUD				100 % 11 %	100 % 11 %	22.479.557.905,00	23.832.143.507,00	23.823.745.322,00	1.344.187.417,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		23.273.999.633,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				219 Orang/ bulan	219 Orang/ bulan	22.244.597.905,00	23.632.452.257,00	23.632.452.257,00	1.387.854.352,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			22.943.249.633,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				36 Dokumen	36 Dokumen	234.960.000,00	199.691.250,00	191.293.065,00	-43.666.935,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			330.750.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian kinerja Administrtasi Kepegawaian RSUD</i>				100 %	100 %	279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		494.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				372 Paket	372 Paket	279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			279.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				223 Orang	223 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			215.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian kinerja Administrtasi Umum RSUD</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				58 Paket	58 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		571.968.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			571.968.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD</i>				100 %	100 %	3.602.710.000,00	3.602.710.000,00	3.419.918.920,00	-182.791.080,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		3.664.359.998,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	428.400.000,00	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			381.600.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				314 Laporan	314 Laporan	3.174.310.000,00	3.174.310.000,00	2.991.518.920,00	-182.791.080,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.282.759.998,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada RSUD				100 %	100 %	55.271.141,00	55.271.141,00	55.271.141,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		55.271.141,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	55.271.141,00	55.271.141,00	55.271.141,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			55.271.141,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD				100 %	100 %	23.700.000.000,00	23.737.125.000,00	25.557.457.198,00	1.857.457.198,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		23.076.255.375,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	23.700.000.000,00	23.737.125.000,00	25.557.457.198,00	1.857.457.198,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			23.076.255.375,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar/Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar/Persentase Capaian Kepuasan Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum				95/95/93 %/%/%	95/95/93 %/%/%	283.940.000,00	784.782.560,00	1.018.540.640,00	5.559.049.182,00							5.842.989.182,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah				100 %	100 %	0,00	500.842.560,00	734.600.640,00	734.600.640,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		5.542.989.182,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	500.842.560,00	734.600.640,00	734.600.640,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.542.989.182,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan pada RSUD				100 %	100 %	283.940.000,00	283.940.000,00	283.940.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan		300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	283.940.000,00	283.940.000,00	283.940.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			140.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	-60.108.221.948,00					110.802.595.327,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	-60.108.221.948,00							110.802.595.327,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							124.950.149.424,00	99.180.494.885,00	64.841.927.476,00	-60.108.221.948,00							110.802.595.327,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	9.553.384.667,00	9.906.082.782,00	9.631.490.522,00	9.073.050.719,00							18.626.435.386,00	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.720.647.072,00	7.005.670.783,00	7.005.670.783,00	285.023.711,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Dinas PUTR Kab.Karo		6.849.613.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	742 Orang/ bulan	6.198.892.072,00	6.743.017.533,00	6.743.017.533,00	544.125.461,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			6.327.858.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	521.755.000,00	262.653.250,00	262.653.250,00	-259.101.750,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			521.755.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	50.000.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	10.480.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Dinas PUTR Kab.Karo		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	72 Paket	50.000.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	10.480.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	856.201.700,00	1.117.579.779,00	842.987.519,00	-13.214.181,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Dinas PUTR Kab.Karo		1.355.501.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.000.000,00	13.999.345,00	13.999.345,00	9.999.345,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			403.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	40 Paket	251.800.000,00	363.504.385,00	349.730.705,00	97.930.705,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			301.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	70.000.000,00	84.773.349,00	84.773.349,00	14.773.349,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.401.700,00	30.398.700,00	24.317.120,00	-6.084.580,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			30.401.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900 Laporan	500 Laporan	500.000.000,00	624.904.000,00	370.167.000,00	-129.833.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	193.715.895,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-163.715.895,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Dinas PUTR Kab.Karo		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	193.715.895,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-163.715.895,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	982.820.000,00	993.092.720,00	993.092.720,00	10.272.720,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Dinas PUTR Kab.Karo		9.421.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			8.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.560.000,00	64.610.000,00	64.610.000,00	10.050.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			54.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	866.760.000,00	866.982.720,00	866.982.720,00	222.720,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			866.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	750.000.000,00	699.259.500,00	699.259.500,00	-50.740.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Dinas PUTR Kab.Karo		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	10 Unit	50.000.000,00	49.270.000,00	49.270.000,00	-730.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				20 Unit	18 Unit	700.000.000,00	649.989.500,00	649.989.500,00	-50.010.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				51.61 %	56 %	16.422.140.000,00	17.085.489.800,00	5.344.499.962,00	-3.266.140.000,00							13.156.000.000,00	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	16.422.140.000,00	17.085.489.800,00	5.344.499.962,00	-11.077.640.038,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		13.156.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	1 Bendung	700.000.000,00	1.500.000.000,00	1.300.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	0,00	7.300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				40.5 KM	0.4 KM	12.166.140.000,00	4.929.489.800,00	1.488.499.962,00	-10.677.640.038,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAANN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				225 KM	3 KM	3.356.000.000,00	3.356.000.000,00	2.556.000.000,00	-800.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAANN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan			3.156.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	0 Bendung	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum				68.706 %	68.708 %	15.790.588.183,00	1.100.000.000,00	992.601.998,00	-11.090.588.183,00							4.700.000.000,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	15.790.588.183,00	1.100.000.000,00	992.601.998,00	-14.797.986.185,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Masyarakat Kabupaten Karo		4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	278.564.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	-78.564.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				8 Liter/Detik	1 Liter/Detik	13.280.563.000,00	1.000.000.000,00	592.601.998,00	-12.687.961.002,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.103.461.183,00	0,00	0,00	-1.103.461.183,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				400 SR	0 SR	1.128.000.000,00	0,00	0,00	-1.128.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi				75.08 %	75.58 %	4.528.158.000,00	4.619.118.404,00	4.569.978.189,00	-1.928.158.000,00							2.600.000.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	4.528.158.000,00	4.619.118.404,00	4.569.978.189,00	41.820.189,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	Masyarakat Kabupaten Karo		2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																			
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				10 M³/Hari	10 M³/Hari	4.328.158.000,00	4.409.323.000,00	4.409.323.000,00	81.165.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	109.795.404,00	60.655.189,00	-39.344.811,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik (pembuangan aliran air tidak tersumbat)				64 %	64 %	3.730.085.481,00	6.000.000.000,00	11.107.975.853,00	1.328.179.519,00							5.058.265.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	3.730.085.481,00	6.000.000.000,00	11.107.975.853,00	7.377.890.372,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Masyarakat Kabupaten Karo		5.058.265.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				4 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00	3.894.000.000,00	2.594.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			1.358.265.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	200.000.000,00	200.000.000,00	399.100.000,00	199.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	950.000.000,00	2.500.000.000,00	4.864.919.553,00	3.914.919.553,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Terpelihara				4 Sistem Drainase Perkotaan	30 Sistem Drainase Perkotaan	1.180.085.481,00	1.500.000.000,00	1.649.956.300,00	469.870.819,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik				66 %	66 %	250.000.000,00	1.396.000.000,00	2.196.000.000,00	1.050.000.000,00							1.300.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				100 %	100 %	250.000.000,00	1.396.000.000,00	2.196.000.000,00	1.946.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	1.396.000.000,00	2.096.000.000,00	1.996.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan				27 %	27 %	1.125.000.000,00	2.158.000.000,00	2.608.000.000,00	-525.000.000,00							600.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.125.000.000,00	2.158.000.000,00	2.608.000.000,00	1.483.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	2 Kawasan	1.125.000.000,00	2.158.000.000,00	2.608.000.000,00	1.483.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik				66 %	68 %	72.900.793.093,00	56.426.744.414,00	28.083.721.417,00	-8.738.898.152,00							64.161.894.941,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	72.900.793.093,00	56.426.744.414,00	28.083.721.417,00	-44.817.071.676,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Karo		64.161.894.941,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>				1 Jembatan	0 Jembatan	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																			
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>				20 KM	7 KM	13.560.000.000,00	13.790.291.286,00	13.369.070.702,00	-190.929.298,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			7.421.101.848,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				40 KM	2 KM	48.460.793.093,00	35.084.720.000,00	3.133.632.462,00	-45.327.160.631,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			48.460.793.093,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				1 Jembatan	1 Jembatan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				1 Jembatan	1 Jembatan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				1 Jembatan	2 Jembatan	1.000.000.000,00	815.158.628,00	3.359.850.738,00	2.359.850.738,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				40 KM	0 KM	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1 KM	1,1 KM	1.130.000.000,00	1.792.290.500,00	3.817.710.167,00	2.687.710.167,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			1.130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40 KM	14 KM	4.900.000.000,00	4.744.284.000,00	4.103.457.348,00	-796.542.652,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan			4.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM tenaga terampil konstruksi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00							150.000.000,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				100 %	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	0 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW				78 %	74 %	500.000.000,00	489.059.485,00	307.659.535,00	-50.000.000,00							450.000.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				100 %	100 %	350.000.000,00	97.899.300,00	73.509.000,00	-276.491.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																			
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	1 Publikasi	100.000.000,00	97.899.300,00	73.509.000,00	-26.491.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	150.000.000,00	391.160.185,00	234.150.535,00	84.150.535,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	Masyarakat Kabupaten Karo		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	391.160.185,00	234.150.535,00	84.150.535,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN							8.874.408.865,00	10.069.228.164,00	11.575.264.224,00	2.700.855.359,00							7.910.823.306,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.304.408.865,00	9.499.228.164,00	11.006.702.849,00	2.702.293.984,00							7.479.823.306,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							8.304.408.865,00	9.499.228.164,00	11.006.702.849,00	2.702.293.984,00							7.479.823.306,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				89 Indeks	89 Indeks	4.295.837.435,00	4.290.656.734,00	4.203.018.219,00	-1.027.585.435,00							3.268.252.000,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan SP2D, Tersusunnya Laporan Keuangan				12 laporan	12 laporan	3.885.578.480,00	3.884.133.779,00	3.836.269.514,00	-49.308.966,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perkimtan		2.685.252.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	3.447.254.515,00	3.445.809.814,00	3.445.809.814,00	-1.444.701,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.385.252.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	438.323.965,00	438.323.965,00	390.459.700,00	-47.864.265,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	48.260.000,00	48.260.000,00			-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	-		60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	64 Paket	0,00	0,00	48.260.000,00	48.260.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah yang meliputi administrasi surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, perlengkapan/berbekalan dan rumah tangga dinas				12 Laporan	12 Laporan	284.375.499,00	280.639.499,00	186.901.499,00	-97.474.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perkimtan		388.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			23.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	59.315.949,00	59.315.949,00	57.109.949,00	-2.206.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	12.659.550,00	12.659.550,00	12.659.550,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				600 Dokumen	600 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600 Laporan	600 Laporan	200.000.000,00	196.264.000,00	104.732.000,00	-95.268.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkoordinasinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Laporan	12 Laporan	44.930.000,00	44.930.000,00	44.930.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perkimtan		85.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	14.930.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terdistribusi, dikelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah</i>				8 Unit	8 Unit	80.953.456,00	80.953.456,00	86.657.206,00	5.703.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perkimtan		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	5 Unit	80.953.456,00	80.953.456,00	86.657.206,00	5.703.750,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Kabupaten Karo		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>				169 Orang	169 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																			
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>				200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani				60 Persen	60 Persen	300.000.000,00	120.000.000,00	0,00	10.000.000,00							310.000.000,00		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i>				60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	300.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				200 Unit Rumah	200 Unit Rumah	200.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1.04.04.2.01.0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)				98,7 Persen	98,7 Persen	3.708.571.430,00	5.088.571.430,00	6.803.684.630,00	192.999.876,00							3.901.571.306,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Terverifikasinya Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				98 Lokasi	98 Lokasi	3.708.571.430,00	5.088.571.430,00	6.803.684.630,00	3.095.113.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		3.901.571.306,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	185.269.591,00	35.269.591,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				20 Lokasi	20 Lokasi	3.478.571.430,00	4.858.571.430,00	6.543.863.049,00	3.065.291.619,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.501.571.306,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>				4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	74.551.990,00	-5.448.010,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							570.000.000,00	570.000.000,00	568.561.375,00	-1.438.625,00							431.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							570.000.000,00	570.000.000,00	568.561.375,00	-1.438.625,00							431.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dental Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan				1 Kasus	1 Kasus	210.000.000,00	210.000.000,00	208.561.375,00	21.000.000,00							231.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terinventarisasinya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan salami 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokument	1 Dokument	210.000.000,00	210.000.000,00	208.561.375,00	-1.438.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		231.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000,00	150.000.000,00	149.039.895,00	-960.105,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	59.521.480,00	-478.520,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan				1,30 Pensen	1,30 Pensen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	-160.000.000,00							200.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	2.180.210.141,00						23.500.308.174,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	2.180.210.141,00							23.500.308.174,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.437.603.299,00	17.705.700.379,00	17.617.813.440,00	2.180.210.141,00							23.500.308.174,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang terselesaikan, selaras dan terimplementasikan Persentase employee engagement ASN Satpol PP yang "Sangat Engaged" Persentase capaian sasaran strategis Satpol PP				100 13 86 % % %	100 13 86 % % %	11.513.427.399,00	13.444.576.829,00	13.384.041.404,00	5.634.931.766,00							17.148.359.165,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi keuangan Satpol PP				100 %	100 %	4.772.410.521,00	7.051.399.858,00	7.051.399.858,00	2.278.989.337,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Satpol PP Kab. Karo		7.756.539.844,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/ bulan	886 Orang/ bulan	4.652.650.521,00	6.929.239.858,00	6.929.239.858,00	2.276.589.337,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			7.622.163.844,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2 Dokumen	119.760.000,00	122.160.000,00	122.160.000,00	2.400.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			134.376.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket dan orang yang mengikuti penyelenggaraan administrasi kepegawaian Satpol PP				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Satpol PP Kab. Karo		540.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan laporan penyelenggaraan administrasi umum Satpol PP				100 %	100 %	167.183.611,00	276.038.471,00	214.613.656,00	47.430.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Satpol PP Kab. Karo		321.779.521,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.987.290,00	34.684.700,00	34.684.700,00	19.697.410,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			38.153.170,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.395,00	83.939.900,00	71.101.456,00	46.102.061,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			92.333.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.383.056,00	36.094.984,00	36.094.984,00	32.711.928,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.999.870,00	25.648.336,00	24.922.516,00	19.922.646,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			28.213.372,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84 Laporan	20 Laporan	118.814.000,00	95.670.551,00	47.810.000,00	-71.004.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			114.579.089,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket penyelenggaraan pengadaan BMD penunjang urusan Satpol PP				100 %	100 %	4.993.767,00	12.078.500,00	12.078.500,00	7.084.733,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Satpol PP Kab. Karo		1.813.286.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	5 Unit	4.993.767,00	12.078.500,00	12.078.500,00	7.084.733,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			13.286.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Satpol PP Kab. Karo				100 %	100 %	6.568.839.500,00	6.105.060.000,00	6.105.949.390,00	-462.890.110,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN dan Non ASN Satpol PP Kab. Karo		6.716.753.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	36 Laporan	52.299.500,00	51.220.000,00	52.109.390,00	-190.110,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			57.529.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	14 Laporan	9.980.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			10.978.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	6.506.560.000,00	6.043.860.000,00	6.043.860.000,00	-462.700.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			6.648.246.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan Perda Kab. Karo dan Peraturan Bupati Karo Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)				66,80 77,15 84,03 % % %	66,80 77,15 84,03 % % %	830.193.150,00	1.144.540.800,00	1.117.189.286,00	1.899.086.834,00							2.729.279.984,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen, unit sarpras dan laporan penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam menyelenggarakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	793.593.150,00	1.109.540.800,00	1.094.060.470,00	300.467.320,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		2.447.109.554,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1 Dokumen	140.110.000,00	8.710.000,00	4.330.370,00	-135.779.630,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			9.581.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000,00	108.024.000,00	108.024.000,00	104.874.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			118.826.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Orang	75 Orang	44.369.000,00	26.290.000,00	16.130.000,00	-28.239.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			28.919.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				19 laporan	158 laporan	53.993.150,00	250.000.000,00	249.059.300,00	195.066.150,00	Kab. Karo, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.461.614.894,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				28 Unit	27 Unit	546.371.000,00	716.516.800,00	716.516.800,00	170.145.800,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			788.168.260,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda Kab. Karo dan Peraturan Bupati Karo				100 %	100 %	32.600.000,00	31.608.000,00	20.760.816,00	-11.839.184,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kabupaten Karo		217.329.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.200.000,00	15.388.000,00	9.415.816,00	-10.784.184,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			69.656.690,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				5 Laporan	3 Laporan	6.400.000,00	10.220.000,00	5.345.000,00	-1.055.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			72.673.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8 Laporan	8 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Jumlah laporan penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				100 %	100 %	4.000.000,00	3.392.000,00	2.368.000,00	-1.632.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	PPNS Kabupaten Karo		64.840.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.392.000,00	2.368.000,00	-1.632.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			64.840.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				54 89,94 % %	54 89,94 % %	3.093.982.750,00	3.116.582.750,00	3.116.582.750,00	528.686.275,00							3.622.669.025,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana, dokumen serta laporan penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran Kab. Karo yang diadakan				100 %	100 %	3.093.982.750,00	3.116.582.750,00	3.116.582.750,00	22.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Masyarakat Kabupaten Karo		3.522.669.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				13 Laporan	15 Laporan	1.052.120.000,00	1.069.120.000,00	1.069.120.000,00	17.000.000,00	Kab. Karo, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			1.232.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	20 Unit	2.036.862.750,00	2.036.862.750,00	2.036.862.750,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			2.240.549.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang diberdayakan dalam pencegahan kebakaran				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Masyarakat Kabupaten Karo		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	4.418.453.848,00					8.100.836.396,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	4.418.453.848,00							8.100.836.396,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.261.954.304,00	6.518.794.087,00	10.680.408.152,00	4.418.453.848,00							8.100.836.396,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah				92 Indeks	20 %	5.351.907.204,00	5.610.688.947,00	5.466.705.355,00	634.369.192,00							5.986.276.396,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	BPBD Kab. Karo		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	20 %	3.902.811.246,00	4.170.017.029,00	4.170.017.029,00	267.205.783,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		4.216.664.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.827.561.246,00	4.094.767.029,00	4.094.767.029,00	267.205.783,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	75.250.000,00	75.250.000,00	75.250.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			116.664.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	20 %	53.760.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	53.760.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	53.760.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			53.760.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	20 %	348.872.078,00	348.201.318,00	208.387.726,00	-140.484.352,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo	422.206.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.997.410,00	3.990.808,00	3.990.808,00	-6.602,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	37 Paket	52.344.180,00	52.489.312,00	38.436.190,00	-13.907.990,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			48.850.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	18 Paket	8.083.838,00	8.099.888,00	8.099.888,00	16.050,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.606.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	43.600.650,00	43.615.310,00	33.619.840,00	-9.980.810,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	0 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	46.390.000,00	46.390.000,00	38.738.000,00	-7.652.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			46.390.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	192.356.000,00	191.516.000,00	85.503.000,00	-106.853.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			270.360.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	20 %	257.026.596,00	257.049.600,00	256.479.600,00	-546.996,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		212.074.396,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				33 Unit	51 Unit	134.856.600,00	134.856.600,00	134.819.100,00	-37.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			89.904.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	12 Unit	122.169.996,00	122.193.000,00	121.660.500,00	-509.496,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			122.169.996,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	20 %	509.379.600,00	502.544.000,00	495.944.000,00	-13.435.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		434.362.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.760.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-5.760.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			28.960.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	482.619.600,00	481.544.000,00	474.944.000,00	-7.675.600,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			405.402.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	20 %	280.057.684,00	279.117.000,00	282.117.000,00	2.059.316,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai BPBD Kab. Karo		647.210.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	153.880.000,00	153.880.000,00	153.880.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			231.920.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	11 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	10.100.000,00	3.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.290.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	119.077.684,00	118.137.000,00	118.137.000,00	-940.684,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				0,56 Indeks	20 %	910.047.100,00	908.105.140,00	5.213.702.797,00	1.204.512.900,00							2.114.560.000,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Persentase penyediaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</i>				100 %	20 %	50.000.000,00	50.143.275,00	34.269.000,00	-15.731.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo		260.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.143.275,00	34.269.000,00	-15.731.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			110.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase penyediaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>				100 %	20 %	420.047.550,00	417.944.703,00	522.190.252,00	102.142.702,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo		1.237.560.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani</i>				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>				2 Unit	5 Unit	30.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
			<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>				400 Orang	300 Orang	100.000.000,00	100.059.282,00	70.338.462,00	-29.661.538,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			146.560.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	0 Kawasan	10.047.550,00	10.047.165,00	0,00	-10.047.550,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.976,00	38.407.057,00	-11.592.943,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	70.000.000,00	69.849.880,00	43.587.770,00	-26.412.230,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulungan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	159.987.400,00	341.856.963,00	181.856.963,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				0 Kawasan	0 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penyediaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	20 %	70.000.000,00	70.049.144,00	2.502.474.202,00	2.432.474.202,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	274.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	704 Orang	20.000.000,00	19.999.780,00	2.452.424.838,00	2.432.424.838,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		79.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				60 Orang	60 Orang	50.000.000,00	50.049.364,00	50.049.364,00	49.364,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																			
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyediaan Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana diselesaikan				5 Dokumen	20 %	369.999.550,00	369.968.018,00	2.154.769.343,00	1.784.769.793,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo		343.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.860,00	31.556.965,00	-18.443.035,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			18.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulan Bencana				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	65.738.710,00	-34.261.290,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	1.946.800.000,00	1.936.800.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	59.999.550,00	59.968.158,00	40.996.380,00	-19.003.170,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	69.677.288,00	-80.322.712,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL								4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00						5.348.369.522,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	3.590.047.575,00	4.056.085.315,00	4.044.170.454,00	447.839.127,00							4.037.886.702,00		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Tunjangan				100 %	100 %	2.720.747.702,00	3.133.296.442,00	3.133.296.442,00	412.548.740,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Sosial		3.084.437.702,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.636.787.702,00	3.049.336.442,00	3.049.336.442,00	412.548.740,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.946.787.702,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	83.960.000,00	83.960.000,00	83.960.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			137.650.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Pakaian Dinas				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Sosial		55.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	245.179.873,00	267.798.873,00	256.325.312,00	11.145.439,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	Kantor Dinas Sosial Kab.Karo		277.770.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	4.489.163,00	4.489.163,00	4.489.163,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	38.000.000,00	38.000.000,00	30.181.359,00	-7.818.641,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			41.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	14.880.000,00	-120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	2.700.000,00	17.410.710,00	14.135.790,00	11.435.790,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				260 Dokumen	260 Dokumen	19.990.710,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-17.290.710,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			2.970.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			16.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				360 Laporan	360 Laporan	150.000.000,00	175.199.000,00	174.939.000,00	24.939.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				158 Unit	158 Unit	143.000.000,00	143.000.000,00	142.558.700,00	-441.300,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Kantor Dinas Sosial Kab.Karo		157.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				115 Unit	115 Unit	143.000.000,00	143.000.000,00	142.558.700,00	-441.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			157.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				100 % 4 Laporan	100 % 4 Laporan	220.420.000,00	220.420.000,00	220.420.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Kantor Dinas Sosial Kab.Karo		242.282.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.760.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			32.556.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				115 Laporan	115 Laporan	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.010.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	NON URUSAN							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4.735.737.412,00	5.392.143.152,00	5.192.916.646,00	457.179.234,00							5.348.369.522,00		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	181.560.000,00	181.560.000,00	181.560.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			199.716.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 unit	6 unit	215.700.000,00	246.570.000,00	246.570.000,00	30.870.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Sosial		221.097.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	179.700.000,00	179.700.000,00	179.700.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			181.497.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	66.870.000,00	66.870.000,00	30.870.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			39.600.000,00	DINAS SOSIAL	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja Kabupaten/Kota sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota				90 Orang	90 Orang	190.000.000,00	255.000.000,00	170.837.601,00	19.000.000,00							209.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja Kabupaten/Kota sosial masyarakat Kewenangan kabupaten /Kota Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten /Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	190.000.000,00	255.000.000,00	170.837.601,00	-19.162.399,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat dan Pendamping Sosial		209.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	27.467.200,00	-12.532.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	150.000.000,00	215.000.000,00	143.370.401,00	-6.629.599,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				65 Orang	65 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	50,00	15.000.000,00							30.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan Kabupaten/Kota				46 Orang	46 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	50,00	-14.999.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	PMKS		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	50,00	-14.999.950,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial				61,54 %	61,54 %	255.689.837,00	449.057.837,00	426.075.952,00	39.792.983,00							295.482.820,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang disabilitas Terlantar, anak terlantarLansia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial				90 Orang	90 Orang	255.689.837,00	449.057.837,00	426.075.952,00	170.386.115,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	PMKS		295.482.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50 Orang	71.787.810,00	71.787.810,00	60.162.387,00	-11.625.423,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			78.966.591,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				24 Orang	24 Orang	25.024.380,00	275.024.380,00	275.024.380,00	250.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			27.526.818,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				310 Orang	310 Orang	102.717.647,00	46.085.647,00	34.939.185,00	-67.778.462,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			113.989.411,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	40 Orang	56.160.000,00	56.160.000,00	55.950.000,00	-210.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGINAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial				97,66 %	97,66 %	170.000.000,00	167.000.000,00	117.500.473,00	17.000.000,00							187.000.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	170.000.000,00	167.000.000,00	117.500.473,00	-52.499.527,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Miskin		187.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>				600 Orang	600 Orang	120.000.000,00	117.000.000,00	87.662.353,00	-32.337.647,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			132.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				110 Keluarga	110 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	29.838.120,00	-20.161.880,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat				100 %	100 %	135.000.000,00	135.000.000,00	119.332.116,00	36.000.000,00							171.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	99.360.733,00	-10.639.267,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	PMKS		121.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	24.767.200,00	-232.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	74.593.533,00	-10.406.467,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			93.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	19.971.383,00	-5.028.617,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	19.971.383,00	-5.028.617,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				100 %	100 %	380.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	38.000.000,00							418.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rata-rata Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	380.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	-65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Makam Pahlawan dan Tugu Juang		418.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharannya Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			88.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>				4 Makam	4 Makam	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			330.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH							6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	720.329.189,00					6.316.820.868,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	720.329.189,00							6.316.820.868,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00	284.879.502,00							4.240.577.610,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	4.214.672.149,00	4.507.242.394,00	4.210.275.313,00	-606.094.539,00							3.608.577.610,00	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	3.068.395.527,00	3.365.964.912,00	3.381.564.912,00	313.169.385,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Aparatur Sipil Negara		2.861.447.710,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				20 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.963.875.527,00	3.261.444.912,00	3.261.444.912,00	297.569.385,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			2.680.832.710,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	104.520.000,00	104.520.000,00	120.120.000,00	15.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			180.615.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Aparatur Sipil Negara		47.040.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			47.040.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	336.386.622,00	331.387.482,00	193.509.144,00	-142.877.478,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Aparatur Sipil Negara		334.129.900,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.995.440,00	6.995.440,00	6.995.440,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.661.640,00	49.661.640,00	38.090.731,00	-11.570.909,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			21.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.998.699,00	9.998.699,00	9.998.699,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			9.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19.730.843,00	19.730.843,00	15.910.944,00	-3.819.899,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			13.500.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	245.000.860,00	122.513.330,00	-127.486.670,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			285.629.900,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	88.121.000,00	88.121.000,00			-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	-		0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	88.121.000,00	88.121.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	190.200.000,00	190.200.000,00	281.800.000,00	91.600.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Aparatur Sipil Negara		200.960.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			19.400.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	166.380.000,00	166.380.000,00	257.980.000,00	91.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			181.560.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	598.690.000,00	598.690.000,00	244.280.257,00	-354.409.743,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Aparatur Sipil Negara		165.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	NON URUSAN							6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	720.329.189,00							6.316.820.868,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00	284.879.502,00							4.240.577.610,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.338.622.407,00	7.646.350.452,00	7.058.951.596,00	720.329.189,00							6.316.820.868,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							4.784.672.149,00	5.476.256.394,00	5.069.551.651,00	284.879.502,00							4.240.577.610,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	54.271.000,00	-729.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	24.832.000,00	-168.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	480.270.000,00	480.270.000,00	126.757.257,00	-353.512.743,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih undefined				20 undefined % undefined	20 undefined % undefined	400.000.000,00	800.000.000,00	777.000.000,00	30.000.000,00							430.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih Rata-rata capaian kinerja indikator Subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				100 % 48 Orang	100 % 48 Orang	400.000.000,00	800.000.000,00	777.000.000,00	377.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Pencari Kerja		430.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				48 Orang	100 Orang	400.000.000,00	800.000.000,00	777.000.000,00	377.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			430.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase penempatan tenaga kerja				70 %	70 %	50.000.000,00	49.754.000,00	19.058.081,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				100 %	100 %	50.000.000,00	49.754.000,00	19.058.081,00	-30.941.919,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Perusahaan dan Pekerja		55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				300 Orang	300 Orang	50.000.000,00	49.754.000,00	19.058.081,00	-30.941.919,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			55.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	120.000.000,00	119.260.000,00	63.218.257,00	27.000.000,00							147.000.000,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	29.574.000,00	11.606.381,00	-18.393.619,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Perusahaan dan Pekerja		40.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.574.000,00	11.606.381,00	-18.393.619,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			40.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	90.000.000,00	89.686.000,00	51.611.876,00	-38.388.124,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Perusahaan dan Pekerja		107.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	70.000.000,00	69.686.000,00	41.771.876,00	-28.228.124,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			72.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	9.840.000,00	-10.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			35.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							1.553.950.258,00	2.170.094.058,00	1.989.399.945,00	435.449.687,00							2.076.243.258,00		
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Koperasi yang patuh				25 koperasi	25 koperasi	100.000.000,00	99.580.000,00	33.601.055,00	30.000.000,00							130.000.000,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				100 % 20 koperasi	100 % 20 koperasi	100.000.000,00	99.580.000,00	33.601.055,00	-66.398.945,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Koperasi		130.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100.000.000,00	99.580.000,00	33.601.055,00	-66.398.945,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			130.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	koperasi aktif				64,84 %	64,84 %	878.950.258,00	1.496.894.858,00	1.360.979.359,00	87.293.000,00							966.243.258,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 % 352 Orang	100 % 352 Orang	878.950.258,00	1.496.894.858,00	1.360.979.359,00	482.029.101,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	SDM Koperasi		966.243.258,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				352 Orang	321 Orang	878.950.258,00	1.496.894.858,00	1.360.979.359,00	482.029.101,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-PK2UMK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			966.243.258,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi yang meningkat pendapatannya				21 %	21 %	180.000.000,00	179.949.000,00	334.906.562,00	120.000.000,00							300.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	180.000.000,00	179.949.000,00	334.906.562,00	154.906.562,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Koperasi		300.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	180.000.000,00	179.949.000,00	334.906.562,00	154.906.562,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			300.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase umkm yang bermitra Persentase umkm yang bermitra				0,432 35,65 % %	0,432 35,65 % %	145.000.000,00	144.583.800,00	94.650.663,00	235.000.000,00							380.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				100 %	100 %	145.000.000,00	144.583.800,00	94.650.663,00	-50.349.337,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Usaha Mikro		380.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.000.000,00	24.940.000,00	16.311.083,00	-8.688.917,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			150.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00	49.925.000,00	33.830.448,00	-16.169.552,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			80.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	69.718.800,00	44.509.132,00	-25.490.868,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			150.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas Persentase peningkatan UMKM yang naik kelas				0,576 34,78 % %	0,576 34,78 % %	250.000.000,00	249.086.400,00	165.262.306,00	50.000.000,00							300.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				100 %	100 %	250.000.000,00	249.086.400,00	165.262.306,00	-84.737.694,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	pelaku usaha mikro yang menghasilkan produk		300.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	250.000.000,00	249.086.400,00	165.262.306,00	-84.737.694,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			300.000.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	-1.517.846.986,00						16.591.342.098,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	-1.517.846.986,00							16.591.342.098,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	-183.140.985,00							10.359.092.098,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)				92 Indeks	92 Indeks	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	4.080.053.973,00							9.478.092.098,00	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	4.632.714.125,00	4.555.931.434,00	4.469.670.933,00	-163.043.192,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo	7.624.892.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	4.392.714.125,00	4.297.931.434,00	4.297.931.434,00	-94.782.691,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		7.374.892.098,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	258.000.000,00	171.739.499,00	-68.260.501,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	90.000.000,00	65.520.000,00	65.520.000,00	-24.480.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	65.520.000,00	65.520.000,00	-24.480.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	205.600.000,00	231.809.976,00	176.893.501,00	-28.706.499,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo	1.042.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.534.500,00	1.534.500,00	-1.465.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	57.737.001,00	57.737.001,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	1.596.000,00	1.862.000,00	262.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	157.679.476,00	104.760.000,00	-25.240.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2	NON URUSAN							10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	-1.517.846.986,00							16.591.342.098,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	-183.140.985,00							10.359.092.098,00		
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.926.926.470,00	9.638.062.259,00	9.409.079.484,00	-1.517.846.986,00							16.591.342.098,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.928.334.470,00	5.906.281.259,00	5.745.193.485,00	-183.140.985,00							10.359.092.098,00		
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	61.400.000,00	7.879.600,00	64.908.100,00	3.508.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	11.400.000,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	7.879.600,00	64.908.100,00	64.908.100,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	255.000.000,00	254.300.000,00	243.140.000,00	-11.860.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo		259.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	-700.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	218.840.000,00	-11.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			233.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>				100 %	100 %	153.324.000,00	155.343.904,00	157.348.544,00	4.024.544,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo		340.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	148.479.504,00	148.479.504,00	-1.520.496,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	15 Unit	3.324.000,00	6.864.400,00	8.869.040,00	5.545.040,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender				96,5 96,5 % %	96,5 96,5 % %	162.017.095,00	160.517.095,00	86.027.457,00	12.982.905,00							175.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenagnan Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	60.000.000,00	59.250.000,00	27.300.500,00	-32.699.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota</i>				120 Orang	200 Orang	60.000.000,00	59.250.000,00	27.300.500,00	-32.699.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum,sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	60.000.000,00	59.250.000,00	26.523.200,00	-33.476.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			<i>Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>				120 Orang	200 Orang	60.000.000,00	59.250.000,00	26.523.200,00	-33.476.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	42.017.095,00	42.017.095,00	32.203.757,00	-9.813.338,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	70 Orang	42.017.095,00	42.017.095,00	32.203.757,00	-9.813.338,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100 100 %	100 100 %	70.000.000,00	69.250.000,00	56.287.225,00	230.000.000,00							300.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPenyediaan Layanan rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Krekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	70.000.000,00	69.250.000,00	56.287.225,00	-13.712.775,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,dunia Usaha Kab.Karo		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				40 Orang	40 Orang	70.000.000,00	69.250.000,00	56.287.225,00	-13.712.775,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT				0,01 %	0,01 %	60.000.000,00	120.000.000,00	58.903.620,00	135.000.000,00							195.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tingkat Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	60.000.000,00	120.000.000,00	58.903.620,00	-1.096.380,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah,Non Pemerintah,dunia usaha Kab.Karo		195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	0,00	60.000.000,00	31.233.940,00	31.233.940,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	27.669.680,00	-32.330.320,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio KDRT				0,01 %	0,01 %	247.777.115,00	245.827.115,00	335.894.603,00	-146.777.115,00							101.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	97.253.105,00	109.003.105,00	275.699.112,00	178.446.007,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	46 Organisasi	67.253.105,00	67.253.105,00	250.056.932,00	182.803.827,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	41.750.000,00	25.642.180,00	-4.357.820,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Organisasi	10 Organisasi	150.524.010,00	136.824.010,00	60.195.491,00	-90.328.519,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	100.524.010,00	87.424.010,00	41.450.095,00	-59.073.915,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.400.000,00	18.745.396,00	-31.254.604,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio KDRT				0,01 %	0,01 %	111.502.135,00	110.902.135,00	30.599.502,00	-1.502.135,00							110.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	90.000.000,00	89.400.000,00	22.768.712,00	-67.231.288,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	90.000.000,00	89.400.000,00	22.768.712,00	-67.231.288,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10 Organisasi	10 Organisasi	21.502.135,00	21.502.135,00	7.830.790,00	-13.671.345,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perempuan dan anak, masyarakat Kabupaten Karo		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	21.502.135,00	21.502.135,00	7.830.790,00	-13.671.345,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				200 Orang	200 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.998.592.000,00	3.731.781.000,00	3.663.885.999,00	-1.334.706.001,00							6.232.250.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat(IKM)				92 Indeks	92 Indeks	5.398.038.125,00	5.270.784.914,00	5.177.481.078,00	4.080.053.973,00							9.478.092.098,00	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	205.600.000,00	231.809.976,00	176.893.501,00	-28.706.499,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB Kab.Karo		1.042.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	61.400.000,00	7.879.600,00	64.908.100,00	3.508.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DP3AP2KB		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Paramater dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan/Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, yang melakukan pendidikan kependudukan/Ratio Akseptor KB				64/8/69,81 %	64/8/69,81 %	459.000.000,00	297.750.000,00	286.254.999,00	252.600.000,00							711.600.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemauduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian kualitas penduduk				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	18.504.999,00	-11.495.001,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat ,Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	18.504.999,00	-11.495.001,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	429.000.000,00	267.750.000,00	267.750.000,00	-161.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dunia usaha Kab. Karo		351.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	161.400.000,00	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	138.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	51.600.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	-23.250.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			51.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	0,00	0,00	-78.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) Laju Pertumbuhan Pendudukan/Tahun				12,98 1,35 % %	12,98 1,35 % %	2.941.092.000,00	2.263.671.000,00	2.251.671.000,00	812.058.000,00							3.753.150.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatanPelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				100 %	100 %	1.279.800.000,00	754.220.000,00	742.220.000,00	-537.580.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		1.426.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	644.800.000,00	529.400.000,00	517.400.000,00	-127.400.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan	10 Laporan	255.000.000,00	99.820.000,00	99.820.000,00	-155.180.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			256.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				20 Organisasi	20 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100 %	100 %	757.000.000,00	449.211.000,00	449.211.000,00	-307.789.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		1.194.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																			
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				2 Unit	14 Unit	50.000.000,00	218.011.000,00	218.011.000,00	168.011.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				269 Orang	269 Orang	707.000.000,00	231.200.000,00	231.200.000,00	-475.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			808.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				46 Organisasi	46 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	868.542.000,00	746.640.000,00	746.640.000,00	-121.902.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat,Lembag a Pemerintah/Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		977.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	24.300.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	-3.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1800 Orang	1800 Orang	815.842.000,00	713.200.000,00	713.200.000,00	-102.642.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			920.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				17 Laporan	17 Laporan	28.400.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00	-16.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			29.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan emberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				100 %	100 %	35.750.000,00	313.600.000,00	313.600.000,00	277.850.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		155.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																			
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- - -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				269 Kampung	56 Kampung	35.750.000,00	313.600.000,00	313.600.000,00	277.850.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			35.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan				52,26 52,26 % %	52,26 52,26 % %	1.477.500.000,00	1.099.360.000,00	1.125.960.000,00	290.000.000,00							1.767.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				100 %	100 %	1.477.500.000,00	1.099.360.000,00	1.125.960.000,00	-351.540.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat,Lembag a Pemerintah,Non pemerintah,Dunia Usaha Kab.Karo		1.767.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																		
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				-	1 Kegiatan	0,00	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			490.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1053 Orang	1053 Orang	577.500.000,00	576.360.000,00	576.360.000,00	-1.140.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			577.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				351 Kelompok	351 Kelompok	500.000.000,00	523.000.000,00	523.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			580.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				46 Kelompok	46 Kelompok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN								9.980.026.791,00	9.973.419.909,00	9.613.447.024,00	-366.579.767,00					10.557.340.779,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.364.921.791,00	7.358.314.909,00	7.116.919.948,00	-248.001.843,00							9.421.283.279,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							7.364.921.791,00	7.358.314.909,00	7.116.919.948,00	-248.001.843,00							9.421.283.279,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	6.486.090.791,00	6.519.483.909,00	6.423.977.921,00	1.583.416.738,00							8.069.507.529,00	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, DPA dan DPPA serta Penatausahaan SP2D dan Laporan Keuangan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.725.595.695,00	5.726.955.973,00	5.725.330.550,00	-265.145,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		7.055.882.266,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				528 Orang/bulan	528 Orang/bulan	5.584.991.456,00	5.586.351.734,00	5.586.351.734,00	1.360.278,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.818.910.687,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	140.604.239,00	140.604.239,00	138.978.816,00	-1.625.423,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			236.971.579,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian pensiun, pembuatan karsi,karsu				12 Bulan	12 Bulan	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		50.628.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket	57 Paket	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.628.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdistribusi, terkelola , terelihara dan teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah				12 Bulan	12 Bulan	344.675.096,00	376.707.936,00	286.884.349,00	-57.790.747,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		542.947.813,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket	130.000.000,00	130.000.000,00	120.117.481,00	-9.882.519,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			145.508.375,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.635.000,00	16.635.000,00	18.323.212,00	1.688.212,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			39.104.342,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.040.096,00	26.040.096,00	20.832.077,00	-5.208.019,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.040.096,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	202.032.840,00	125.611.579,00	-44.388.421,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			337.270.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	38.701.322,00	-1.298.678,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	29.948.762,00	-51.238,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	8.752.560,00	-1.247.440,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jaringan wifi, telepon air dan listrik tersedia</i>				12 Unit	12 Bulan	239.150.000,00	239.150.000,00	238.956.660,00	-193.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		260.048.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			27.648.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.660.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	181.000.000,00	181.000.000,00	180.806.660,00	-193.340,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			211.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta BMD</i>				6 Unit	6 Unit	89.420.000,00	89.420.000,00	86.855.040,00	-2.564.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		138.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	51.000.000,00	51.000.000,00	48.435.040,00	-2.564.960,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			93.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama				4 Unit	20 %	200.000.000,00	150.000.000,00	137.674.466,00	-30.630.250,00							169.369.750,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Kemandirian Pangan</i>				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	137.674.466,00	-62.325.534,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		169.369.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	137.674.466,00	-62.325.534,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			169.369.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama				20 Persen	20 Persen	498.831.000,00	508.831.000,00	417.830.906,00	283.575.000,00							782.406.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	ketersediaan energi yang cukup Ketersediaan Protein yang Cukup				100 %	2400 Kal/Kap/Hr 63 Gr/Kap/Hr	113.831.000,00	123.831.000,00	100.635.102,00	-13.195.898,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		67.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	40.000.000,00	36.040.000,00	6.040.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	20 Keluarga	40.000.000,00	40.000.000,00	27.839.061,00	-12.160.939,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	43.831.000,00	43.831.000,00	36.756.041,00	-7.074.959,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan				-	100 %	265.000.000,00	265.000.000,00	226.873.890,00	-38.126.110,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		475.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	39.398.055,00	-15.601.945,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				12,5 Ton	12,5 Ton	200.000.000,00	200.000.000,00	178.225.835,00	-21.774.165,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				12,5 Ton	12,5 Ton	10.000.000,00	10.000.000,00	9.250.000,00	-750.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan				92 Persen	92 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	90.321.914,00	-29.678.086,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		240.406.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	35.929.247,00	-14.070.753,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			73.205.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				17 Laporan	17 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	54.392.667,00	-15.607.333,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			167.201.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan				-	1 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.881.600,00	250.000.000,00							300.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Tertanganinya Kerawanan Pangan</i>				-	1 %	50.000.000,00	50.000.000,00	39.881.600,00	-10.118.400,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.881.600,00	-10.118.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (PSAT)				100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	130.000.000,00	97.555.055,00	-30.000.000,00							100.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan</i>				90 %	90 %	130.000.000,00	130.000.000,00	97.555.055,00	-32.444.945,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	97.555.055,00	-32.444.945,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.615.105.000,00	2.615.105.000,00	2.496.527.076,00	-118.577.924,00							1.136.057.500,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.615.105.000,00	2.615.105.000,00	2.496.527.076,00	-118.577.924,00							1.136.057.500,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				-	74,23` %	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	1.217.390.000,00	-1.120.000.000,00							100.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap</i>				-	30 Ton	50.000.000,00	50.000.000,00	47.390.000,00	-2.610.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>				8 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	47.390.000,00	-2.610.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Produksi Perikanan Tangkap</i>				30 Ton	30 Ton	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			<i>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya</i>				5 Orang	30 Orang	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya				94,38 Persen	100 Persen	1.245.105.000,00	1.245.105.000,00	1.134.582.924,00	-359.047.500,00							886.057.500,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Produksi Perikanan Budidaya</i>				450 Ton	677 Ton	680.605.000,00	680.605.000,00	626.409.946,00	-54.195.054,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		477.307.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				15 Kelompok	20 Kelompok	500.558.000,00	500.558.000,00	474.322.284,00	-26.235.716,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			439.807.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	3 Kelompok	180.047.000,00	180.047.000,00	152.087.662,00	-27.959.338,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			37.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tercapainya Produksi Benih Ikan				-	747.452 Ekor	564.500.000,00	564.500.000,00	508.172.978,00	-56.327.022,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		408.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	36.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	463.072.793,00	-36.927.207,00	Kab. Karo, Munte, Munte	PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				5 Unit	15 Unit	14.500.000,00	14.500.000,00	8.600.185,00	-5.899.815,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			18.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				20 Usaha	20 Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	144.554.152,00	0,00							150.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedia dan tersalurkannya bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kab/kota				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	144.554.152,00	-5.445.848,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Ton	3 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	99.570.998,00	-429.002,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	44.983.154,00	-5.016.846,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 indeks	92 indeks	11.584.609.133,00	11.721.187.507,00	12.081.721.385,60	2.236.245.555,00							13.820.854.688,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKA-P, DPA dan DPPA, Terlaksananya penatausahaan SP2D, Tersusunnya Laporan Keuangan				100 dokumen	100 dokumen	3.827.079.841,00	3.969.535.995,00	3.968.067.982,00	140.988.141,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Lingkungan Hidup		4.684.752.028,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	3.666.702.841,00	3.809.158.995,00	3.809.158.995,00	142.456.154,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.428.872.878,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	160.377.000,00	160.377.000,00	158.908.987,00	-1.468.013,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			255.879.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan				100 berkas	100 berkas	42.750.000,00	42.750.000,00	55.253.098,00	12.503.098,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Lingkungan Hidup		40.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket	80 Paket	0,00	42.750.000,00	55.253.098,00	55.253.098,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	NON URUSAN							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00		
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Daerah				100 laporan	100 laporan	331.000.000,00	325.122.220,00	244.223.013,60	-86.776.986,40			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Lingkungan Hidup		329.671.035,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	29.943.985,00	-10.056.015,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			41.593.685,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.252.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	68.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			132.419.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	194.122.220,00	140.279.028,60	-59.720.971,40	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			149.405.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berkas RKBMd yang dilaporkan				100 berkas	100 berkas	105.000.000,00	105.000.000,00	415.759.600,00	310.759.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Lingkungan Hidup		16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	NON URUSAN							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	8 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	195.759.600,00	120.759.600,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Petugas Operator Komputer, Pengamanan dan Kebersihan				100 laporan	100 laporan	412.948.000,00	412.948.000,00	382.586.400,00	-30.361.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Lingkungan Hidup		491.108.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			74.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							28.759.909.828,00	26.896.488.202,00	27.592.751.763,00	-1.167.158.065,00							15.726.134.738,00	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	347.948.000,00	347.948.000,00	317.586.400,00	-30.361.600,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			398.408.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup				100 laporan	100 laporan	6.865.831.292,00	6.865.831.292,00	7.015.831.292,00	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Lingkungan Hidup		8.259.122.857,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				171 Unit	171 Unit	6.865.831.292,00	6.865.831.292,00	6.865.831.292,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.259.122.857,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS, RPPLH di tingkat Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.660.000,00	20.000.000,00							40.000.000,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Laporan RPPLH				100 dokumen	100 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.660.000,00	-12.340.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kab. Karo		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.660.000,00	-12.340.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				68,88 Indeks	68,88 Indeks	710.000.000,00	710.000.000,00	529.978.215,00	-420.000.000,00							290.000.000,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan				100 laporan	100 laporan	590.000.000,00	590.000.000,00	409.978.215,00	-180.021.785,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kab. Karo		190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	117.579.200,00	-2.420.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	470.000.000,00	470.000.000,00	292.399.015,00	-177.600.985,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Kampung Iklim				100 dokumen	100 dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kab. Karo		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Pengelolaan RTH				1 Lokasi	1 Lokasi	18.998.077,00	18.998.077,00	160.641.062,00	1.001.923,00							20.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang Terbuka Hijau				100 lokasi	100 lokasi	18.998.077,00	18.998.077,00	160.641.062,00	141.642.985,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Terjaganya Hutan Kota		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1,35 Ha	1,35 Ha	18.998.077,00	18.998.077,00	18.998.077,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				-	3 Unit	0,00	0,00	141.642.985,00	141.642.985,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Rekomendasi Ijin Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00							30.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Ijin yang dikeluarkan				100 rekomendasi	100 rekomendasi	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pelaku Usaha		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota,				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	21.192.800,00	-7.000.000,00							38.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang diawasi dan Rekomendasi Izin Lingkungan yang diterbitkan				100 dokumen	100 dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	21.192.800,00	-23.807.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pelaku Usaha		38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	13.690.400,00	-16.309.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	7.502.400,00	-7.497.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00							40.000.000,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha, sekolah yang didampingi				100 orang	100 orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kab. Karo		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan tentang lingkungan hidup				ada ada	ada ada	100.000.000,00	100.000.000,00	71.008.340,00	140.000.000,00							240.000.000,00		
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sekolah Adiwiyata				100 ada	100 ada	100.000.000,00	100.000.000,00	71.008.340,00	-28.991.660,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Sekolah Sekolah di Kab.Karo		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				50 Entitas	50 Entitas	100.000.000,00	100.000.000,00	71.008.340,00	-28.991.660,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	45.000.000,00	42.434.800,00	19.000.000,00							64.000.000,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang tertangani				100 dokumen	100 dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	42.434.800,00	-2.565.200,00			-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kab. Karo		64.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota				3 Perkara	3 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				2 Pengaduan	2 Pengaduan	45.000.000,00	45.000.000,00	42.434.800,00	-2.565.200,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				2 Perkara	2 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kevenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah penerapan sanksi administrai yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				12 Perkara	12 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani				86 Persen	86 Persen	16.181.302.618,00	14.181.302.618,00	14.630.615.160,40	-15.038.022.568,00							1.143.280.050,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dapat ditangani				100 ton	100 ton	16.181.302.618,00	14.181.302.618,00	14.630.615.160,40	-1.550.687.457,60			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Kebersihan Kab.Karo		1.143.280.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	200.000.000,00	154.667.884,00	-45.332.116,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	6 Unit	3.087.304.000,00	1.087.304.000,00	2.063.858.456,00	-1.023.445.544,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan Perwujudan kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan			803.280.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	1 Ton	250.000.000,00	250.000.000,00	249.954.280,00	-45.720,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				276252 Ton	276252 Ton	12.463.998.618,00	12.463.998.618,00	11.988.915.740,40	-475.082.877,60	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	23.218.800,00	-6.781.200,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	4.000.765.123,00	4.593.176.841,00	4.611.046.690,00	2.803.750.460,00							6.804.515.583,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.842.076.093,00	3.434.487.811,00	3.433.857.811,00	591.781.718,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		3.536.655.017,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.762.966.093,00	3.355.377.811,00	3.355.377.811,00	592.411.718,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.401.875.017,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	79.110.000,00	79.110.000,00	78.480.000,00	-630.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			134.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		234.992.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				49 Paket	49 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			32.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				49 Orang	49 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			202.742.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	219.199.832,00	227.199.832,00	124.691.917,00	-94.507.915,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		1.076.089.866,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	1 Paket	6.433.300,00	6.433.300,00	2.805.000,00	-3.628.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.944.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	32 Paket	60.439.390,00	60.439.390,00	45.900.080,00	-14.539.310,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			942.960.796,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	22 Paket	9.452.362,00	9.452.362,00	9.452.362,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.622.853,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.548.780,00	31.548.780,00	21.890.475,00	-9.658.305,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			19.131.634,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	45 Laporan	109.166.000,00	117.166.000,00	42.484.000,00	-66.682.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			105.270.583,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	199.069.198,00	199.069.198,00	320.076.962,00	121.007.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		1.211.091.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.167.201.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2	NON URUSAN							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							5.040.301.402,00	5.627.715.920,00	5.497.743.909,00	457.442.507,00							7.879.473.202,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	63.210.734,00	63.210.734,00	63.210.734,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	135.858.464,00	135.858.464,00	226.866.228,00	91.007.764,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			37.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	521.640.000,00	538.640.000,00	538.640.000,00	17.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		658.037.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.560.000,00	57.560.000,00	57.560.000,00	17.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	324 Laporan	463.860.000,00	463.860.000,00	463.860.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			645.637.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	185.030.000,00	160.030.000,00	160.030.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Disdukcapil		87.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	85.030.000,00	85.030.000,00	85.030.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			85.030.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.420.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berkTP per satuan penduduk (%) / Kepemilikan Kartu Identitas Anak				100/70 %	100/70 %	787.660.409,00	782.663.209,00	707.691.519,00	75.401.700,00							863.062.109,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	787.660.409,00	782.663.209,00	707.691.519,00	-79.968.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat		863.062.109,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	12 Dokumen	662.619.284,00	662.619.284,00	590.639.890,00	-71.979.394,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			712.211.984,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				50 Laporan	40 Laporan	125.041.125,00	120.043.925,00	117.051.629,00	-7.989.496,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			150.850.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Rasio bayi berakte kelahiran (%) / Rasio pasangan berakte nikah (%)				100 / 100 %	100 / 100 %	99.747.070,00	99.747.070,00	75.187.880,00	-49.747.070,00							50.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				100 %	100 %	99.747.070,00	99.747.070,00	75.187.880,00	-24.559.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				4 Dokumen	12 Dokumen	49.872.070,00	49.872.070,00	34.703.180,00	-15.168.890,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				50 Layanan	40 Layanan	49.875.000,00	49.875.000,00	40.484.700,00	-9.390.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK				Sudah Sudah ah/Belum	Sudah Sudah ah/Belum	97.440.120,00	97.440.120,00	49.279.140,00	-17.440.120,00							80.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	19.424.600,00	19.424.600,00	19.211.700,00	-212.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				4 Dokumen	4 Dokumen	19.424.600,00	19.424.600,00	19.211.700,00	-212.900,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	78.015.520,00	78.015.520,00	30.067.440,00	-47.948.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.303.520,00	27.303.520,00	14.835.440,00	-12.468.080,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	50.712.000,00	50.712.000,00	15.232.000,00	-35.480.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi				Ada Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada	54.688.680,00	54.688.680,00	54.538.680,00	27.206.830,00							81.895.510,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Rata-rata kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				100 %	100 %	54.688.680,00	54.688.680,00	54.538.680,00	-150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat		81.895.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	54.688.680,00	54.688.680,00	54.538.680,00	-150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			81.895.510,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	-1.348.080.409,00						9.967.609.385,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	-1.348.080.409,00							9.967.609.385,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							10.472.450.167,00	10.939.728.086,00	9.124.369.758,00	-1.348.080.409,00							9.967.609.385,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.636.982.000,00	4.756.231.579,00	4.872.308.717,00	154.653.000,00							4.791.635.000,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Lapon	100 Lapon	4.049.998.270,00	4.175.927.849,00	4.175.927.849,00	125.929.579,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	ASN DPMD Kabupaten Karo		4.110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.908.038.270,00	4.029.887.849,00	4.029.887.849,00	121.849.579,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			3.960.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	141.960.000,00	146.040.000,00	146.040.000,00	4.080.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50 Berkas	50 Berkas	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	ASN DPMD Kabupaten Karo		28.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			28.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Laporan	100 Laporan	246.733.730,00	244.133.730,00	371.560.181,00	124.826.451,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	ASN DPMO Kabupaten Karo		264.235.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.083.730,00	81.083.730,00	183.751.845,00	102.668.115,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			14.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	21.986.662,00	6.986.662,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			4.935.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	50 Laporan	130.000.000,00	127.400.000,00	145.171.674,00	15.171.674,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			145.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 Orang/ Petugas	100 Orang/ Petugas	221.200.000,00	221.200.000,00	245.148.719,00	23.948.719,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	ASN DPMD Kabupaten Karo		227.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			19.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	5 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	26.290.000,00	9.290.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	199.658.719,00	14.658.719,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</i>				100 Laporan	100 Laporan	91.300.000,00	87.220.000,00	51.921.968,00	-39.378.032,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN DPMD Kabupaten Karo		161.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				-	3 Unit	0,00	0,00	51.921.968,00	51.921.968,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	91.300.000,00	87.220.000,00	0,00	-91.300.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			91.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	5.187.485.262,00	5.181.948.602,00	3.316.642.354,00	-637.510.877,00							4.549.974.385,00		
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				259 Dokumen	259 Dokumen	5.187.485.262,00	5.181.948.602,00	3.316.642.354,00	-1.870.842.908,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Aparatur Pemerintahan Desa		4.549.974.385,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	3.754.834.608,00	3.754.834.608,00	2.469.481.736,00	-1.285.352.872,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			3.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	86.446.500,00	86.446.500,00	86.446.500,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				259 Dokumen	259 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				260 Dokumen	260 Dokumen	200.000.000,00	198.120.000,00	149.130.455,00	-50.869.545,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				60 Orang	60 Orang	68.800.000,00	68.800.000,00	144.464.580,00	75.664.580,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.974.385,00	974.385,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			90.974.385,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				18 Laporan	18 Laporan	837.404.154,00	833.747.494,00	113.398.200,00	-724.005.954,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			655.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	154.498.498,00	104.498.498,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				17 Dokumen	17 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	38.248.000,00	-11.752.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota				9 Lembaga	9 Lembaga	647.982.905,00	1.001.547.905,00	935.418.687,00	-21.982.905,00							626.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota				9 Lembaga	9 Lembaga	647.982.905,00	1.001.547.905,00	935.418.687,00	287.435.782,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Lembaga Desa/Lembaga Masyarakat Desa Kabupaten Karo		626.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	10 Lembaga	150.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	49.700.000,00	31.881.240,00	-18.118.760,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 Laporan	10 Laporan	140.000.000,00	136.531.000,00	2.410.000,00	-137.590.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				17 Laporan	17 Laporan	50.000.000,00	49.630.000,00	29.094.020,00	-20.905.980,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				17 Dokumen	17 Dokumen	257.982.905,00	255.686.905,00	362.033.427,00	104.050.522,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	70.539.620,00							25.123.761.043,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	70.539.620,00							25.123.761.043,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.863.056.264,00	23.022.712.208,00	22.933.595.884,00	70.539.620,00							25.123.761.043,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat/Skor Nilai AKIP				72/63 Indeks/B	72/63 Indeks/B	17.935.869.573,00	7.873.732.484,00	7.760.915.943,00	937.393.231,00							18.873.262.804,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.491.815,00	-1.508.185,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.491.815,00	-1.508.185,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	5.716.726.573,00	5.781.062.517,00	5.753.949.252,00	37.222.679,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		6.656.892.804,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	5.527.414.603,00	5.591.750.547,00	5.591.750.547,00	64.335.944,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.460.580.834,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	189.311.970,00	189.311.970,00	162.198.705,00	-27.113.265,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			196.311.970,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000,00	700.000,00	312.000,00	-388.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		770.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000,00	700.000,00	312.000,00	-388.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			770.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	71.650.000,00	66.650.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	90 Paket	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	1.650.000,00	-3.350.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan				550 Dokumen	550 Dokumen	400.100.000,00	400.100.000,00	289.375.992,00	-110.724.008,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		437.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	94.047.185,00	-5.952.815,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	29.938.892,00	-61.108,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	64.000.000,00	64.000.000,00	50.705.600,00	-13.294.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			68.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.556.000,00	-44.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	108.628.315,00	-91.371.685,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	30.369.400,00	-4.630.600,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	890.000,00	-4.110.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	19.850.000,00	-150.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	9.629.400,00	-370.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	34 Laporan	11.469.343.000,00	789.343.000,00	769.187.335,00	-10.700.155.665,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		11.345.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.719.343.000,00	39.343.000,00	38.344.705,00	-10.680.998.295,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PBUT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	8.228.000,00	-1.772.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	740.000.000,00	740.000.000,00	722.614.630,00	-17.385.370,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			740.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara				21 Unit	21 Unit	305.000.000,00	858.526.967,00	843.580.149,00	538.580.149,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Perhubungan Kabupaten Karo		335.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	39.448.112,00	-551.888,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	149.602.630,00	-397.370,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	115.000.000,00	668.526.967,00	654.529.407,00	539.529.407,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kinerja Lalu Lintas Kabupaten				97/0,77 Ra sio/Indeks	97/0,77 Ra sio/Indeks	4.902.186.691,00	15.123.979.724,00	15.160.123.205,00	1.318.311.548,00							6.220.498.239,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang				675 Unit	675 Unit	2.566.160.572,00	13.024.277.605,00	13.507.533.430,00	10.941.372.858,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Jalan		2.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				150 Unit	73 Unit	500.000.000,00	158.117.033,00	123.752.558,00	-376.247.442,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				425 Unit	425 Unit	2.066.160.572,00	12.866.160.572,00	12.819.130.572,00	10.752.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				-	136 Unit	0,00	0,00	564.650.300,00	564.650.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Terbangun				4 Laporan	4 Laporan	372.466.769,00	372.466.769,00	335.731.994,00	-36.734.775,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Kendaraan		213.297.239,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	235.000.000,00	223.635.521,00	-11.364.479,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	137.466.769,00	137.466.769,00	112.096.473,00	-25.370.296,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			113.297.239,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	15.228.822,00	-14.771.178,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Kendaraan		437.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																			
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.038.072,00	-9.961.928,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.190.750,00	-4.809.250,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	1.678.659.350,00	1.442.335.350,00	1.136.907.603,00	-541.751.747,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Jalan		2.492.201.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	937.344.000,00	912.664.000,00	568.521.940,00	-368.822.060,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			940.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	159.447.350,00	66.503.350,00	17.235.462,00	-142.211.888,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				3 Dokumen	4 Dokumen	463.168.000,00	463.168.000,00	551.150.201,00	87.982.201,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			967.201.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	0 Laporan	118.700.000,00	0,00	0,00	-118.700.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			425.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	48.400.000,00	48.400.000,00	24.540.438,00	-23.859.562,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Jalan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				1 Laporan	1 Laporan	48.400.000,00	48.400.000,00	24.540.438,00	-23.859.562,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				12 Laporan	100 %	54.500.000,00	54.500.000,00	28.063.810,00	-26.436.190,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Jalan		68.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				3 Laporan	3 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	8.204.352,00	-7.795.648,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	14.900.000,00	14.900.000,00	7.646.390,00	-7.253.610,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				6 Laporan	6 Laporan	23.600.000,00	23.600.000,00	12.213.068,00	-11.386.932,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan Angkutan Barang dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	81.000.000,00	81.000.000,00	49.575.720,00	-31.424.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Angkutan		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	81.000.000,00	81.000.000,00	49.575.720,00	-31.424.280,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000,00	71.000.000,00	62.541.388,00	-8.458.612,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengguna Angkutan		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71.000.000,00	71.000.000,00	62.541.388,00	-8.458.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	12.556.736,00	5.000.000,00							30.000.000,00	
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.03.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.556.736,00	-12.443.264,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pengusaha dan Pengguna Kapal		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.08.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	12.556.736,00	-12.443.264,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									8.427.691.879,00	9.656.238.480,00	9.087.111.473,00	659.419.594,00					8.787.853.780,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.427.691.879,00	9.656.238.480,00	9.087.111.473,00	659.419.594,00							8.787.853.780,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.772.691.879,00	8.948.781.395,00	8.652.481.875,00	879.789.996,00							7.912.853.780,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	5.207.764.674,00	5.735.886.190,00	5.630.427.005,00	443.601.867,00							5.651.366.541,00		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.832.272.424,00	3.287.878.025,00	3.287.801.405,00	455.528.981,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kominfo		3.186.222.841,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	2.730.155.174,00	3.172.805.775,00	3.172.805.775,00	442.650.601,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.084.105.591,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	102.117.250,00	115.072.250,00	114.995.630,00	12.878.380,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			102.117.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	31.500.000,00	58.455.000,00	58.455.000,00	26.955.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kominfo		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	90 Paket	31.500.000,00	58.455.000,00	58.455.000,00	26.955.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	390.118.550,00	390.073.700,00	284.691.135,00	-105.427.415,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Dinas Kominfo		364.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	20 Paket	21.188.550,00	21.243.700,00	18.193.135,00	-2.995.415,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.370.000,00	47.270.000,00	47.270.000,00	5.900.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			43.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1080 Dokumen	1080 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.600.000,00	-400.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	300.000.000,00	294.000.000,00	192.068.000,00	-107.932.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.878.283.700,00	1.923.889.465,00	1.923.889.465,00	45.605.765,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kabupaten Karo		1.986.143.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.523.000.000,00	1.586.000.000,00	1.586.000.000,00	63.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.283.700,00	332.889.465,00	332.889.465,00	-17.394.235,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			380.643.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	75.590.000,00	75.590.000,00	75.590.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dinas Kominfo		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	75.590.000,00	75.590.000,00	75.590.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE Indeks SPBE				2,8 Indeks Indeks	2,8 Indeks Indeks	1.067.666.761,00	1.065.634.761,00	905.170.866,00	-303.439.966,00							764.226.795,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.067.666.761,00	1.065.634.761,00	905.170.866,00	-162.495.895,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pegawai Dinas Kominfo		764.226.795,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				65 Laporan	65 Laporan	320.369.906,00	320.369.906,00	320.369.906,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			218.281.476,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				35 Permohonan	35 Permohonan	366.870.735,00	365.870.735,00	305.864.400,00	-61.006.335,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)			206.262.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	34.125.000,00	33.948.000,00	12.500.000,00	-21.625.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			34.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				69 Dokumen	69 Dokumen	262.960.000,00	262.535.000,00	203.570.000,00	-59.390.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			212.960.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				1049 Konten	1049 Konten	66.000.000,00	65.640.000,00	50.332.560,00	-15.667.440,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			92.598.119,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				15 Orang	15 Orang	17.341.120,00	17.271.120,00	12.534.000,00	-4.807.120,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	1.497.260.444,00	2.147.260.444,00	2.116.884.004,00	0,00							1.497.260.444,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.497.260.444,00	2.147.260.444,00	2.116.884.004,00	619.623.560,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kabupaten Karo		1.497.260.444,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	199.373.645,00	-626.355,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				4 Aplikasi	4 Aplikasi	192.000.000,00	842.000.000,00	823.652.203,00	631.652.203,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			192.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Aplikasi	4 Aplikasi	96.000.000,00	96.000.000,00	84.597.712,00	-11.402.288,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			96.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				46 unit	46 unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																			
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				65 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah	309.260.444,00	309.260.444,00	309.260.444,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			309.260.444,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							550.000.000,00	603.755.085,00	378.077.598,00	-171.922.402,00							700.000.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE				2,8 Indeks	2,8 Indeks	550.000.000,00	603.755.085,00	378.077.598,00	150.000.000,00							700.000.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	550.000.000,00	603.755.085,00	378.077.598,00	-171.922.402,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Kabupaten Karo		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																			
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				30 Persentase	30 Persentase	200.000.000,00	257.305.085,00	180.056.340,00	-19.943.660,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				25 Dokumen	25 Dokumen	350.000.000,00	346.450.000,00	198.021.258,00	-151.978.742,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	-48.448.000,00							175.000.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	70.000.000,00							175.000.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	-48.448.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kabupaten Karo		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	2 Laporan	105.000.000,00	103.702.000,00	56.552.000,00	-48.448.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	-1.994.153.183,00							8.341.876.032,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	-1.994.153.183,00							8.341.876.032,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.294.206.694,00	5.826.908.311,00	5.300.053.511,00	-1.994.153.183,00							8.341.876.032,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				87 Indeks	87 Indeks	5.301.221.694,00	4.633.958.311,00	4.398.652.186,00	1.053.835.338,00							6.355.057.032,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Penatausahaan SP2D sulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA				4 berkas 4 laporan 79 berkas	4 berkas 4 laporan 79 berkas	3.920.827.429,00	3.268.564.046,00	3.268.564.046,00	-652.263.383,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN		5.048.987.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	3.827.707.429,00	3.175.444.046,00	3.175.444.046,00	-652.263.383,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.901.637.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	93.120.000,00	93.120.000,00	93.120.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			147.350.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian berupa usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami, kartu istri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidik dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai Persentase Hasil evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, analisis jabatan pegawai dan mengelola sistem informasi pegawai				100 persen	100 persen	52.080.000,00	55.440.000,00	55.440.000,00	3.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN dan THL		108.226.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	75 Paket	52.080.000,00	55.440.000,00	55.440.000,00	3.360.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			108.226.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	512.584.695,00	519.174.295,00	283.868.170,00	-228.716.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN dan THL		486.571.185,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	3.165.635,00	3.165.635,00	3.165.635,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.660.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				39 Paket	45 Paket	64.573.052,00	64.600.152,00	52.452.527,00	-12.120.525,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			84.780.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	20.845.788,00	20.845.788,00	20.845.788,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			23.196.225,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50.000.220,00	49.977.720,00	34.100.220,00	-15.900.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			82.114.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	374.000.000,00	380.585.000,00	173.304.000,00	-200.696.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			292.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				21 unit	21 unit	292.819.570,00	287.869.970,00	287.869.970,00	-4.949.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN dan THL		160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	6 Unit	9.682.410,00	9.682.410,00	9.682.410,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	283.137.160,00	278.187.560,00	278.187.560,00	-4.949.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Pemerintahan	-				-	-	484.490.000,00	464.490.000,00	464.490.000,00	-20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN dan THL		495.022.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.160.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			36.602.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	14.810.000,00	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	439.520.000,00	419.520.000,00	419.520.000,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			439.520.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN dan THL		56.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			56.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	200.000.000,00	160.027.000,00	134.382.000,00	100.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	160.027.000,00	134.382.000,00	-65.618.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Stakeholder		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	160.027.000,00	134.382.000,00	-65.618.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN				97 investor	97 investor	500.000.000,00	305.553.000,00	241.414.000,00	-200.000.000,00							300.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah minat investasi				2 Investor	2 Investor	500.000.000,00	305.553.000,00	241.414.000,00	-258.586.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Stakeholder		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	185.544.000,00	169.716.000,00	-30.284.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	120.009.000,00	71.698.000,00	-228.302.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan dan non perizinan				2100 izin	2100 izin	374.000.000,00	357.950.000,00	240.014.000,00	25.096.000,00							399.096.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan informasi, konsultasi dan pengaduan terkait perizinan dan non perizinan Jumlah perizinan dan non perizinan Persentase pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha dengan izin yang terkait				2100 izin 5 pengaduan 97 persen	2100 izin 5 pengaduan 97 persen	374.000.000,00	357.950.000,00	240.014.000,00	-133.986.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Stakeholder		399.096.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	12.739.000,00	-17.261.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2100 Pelaku Usaha	2100 Pelaku Usaha	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				40 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30.000.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			49.096.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				800 Kegiatan Usaha	800 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	189.950.000,00	98.275.000,00	-101.725.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN				97 investor	97 investor	798.985.000,00	249.420.000,00	165.591.325,00	51.015.000,00							850.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah perusahaan penerima layanan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				43 kegiatan usaha 440 pelaku usaha 70 kegiatan usaha	43 kegiatan usaha 440 pelaku usaha 70 kegiatan usaha	798.985.000,00	249.420.000,00	165.591.325,00	-633.393.675,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Stakeholder		850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				50 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	119.847.000,00	26.220.000,00	22.970.000,00	-96.877.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				440 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	439.443.000,00	132.183.775,00	82.673.100,00	-356.769.900,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	239.695.000,00	91.016.225,00	59.948.225,00	-179.746.775,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan				2100 izin	2100 izin	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	17.723.000,00							137.723.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan data perizinan dan non perizinan Jumlah media sosial yang dikelola sebagai sarana penyampaian informasi pelayanan perizinan Jumlah pengembangan webside dinas Jumlah Perizinan Pengembangan Aplikasi Persentase permintaan data yang dipenuhi kepada instansi yang membutuhkan				100 persen 12 dokumen 1 item 5 media sosial	100 persen 12 dokumen 1 item 5 media sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	Stakeholder		137.723.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			137.723.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA							22.929.001.299,00	23.875.530.660,00	22.108.353.888,00	-820.647.411,00						34.732.583.839,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.475.750.000,00	5.067.750.000,00	4.828.766.213,00	1.353.016.213,00							2.206.456.559,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							2.525.750.000,00	3.852.750.000,00	2.928.581.183,00	402.831.183,00							1.107.521.500,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif				50 %	50 %	300.000.000,00	1.127.000.000,00	515.550.190,00	30.000.000,00							330.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda, pemuda pelopor yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 orang	100 Orang	300.000.000,00	1.127.000.000,00	515.550.190,00	215.550.190,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	Pemuda/i		330.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				20 Orang	50 Orang	120.000.000,00	407.000.000,00	184.265.046,00	64.265.046,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi</i>				20 Orang	50 Orang	80.000.000,00	500.000.000,00	207.347.659,00	127.347.659,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			88.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				5 Orang	85 Orang	100.000.000,00	220.000.000,00	123.937.485,00	23.937.485,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga				20 cabang olahraga	20 cabang olahraga	1.770.000.000,00	2.270.000.000,00	2.005.233.652,00	-1.139.316.000,00							630.684.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia</i>				11 unit	11 unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	Atlet dan Masyarakat		93.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>				15 Unit	255 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			93.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Cabang Olahraga Kejuaraan Yang Diselenggarakan</i>				10 Cabor	10 Cabor	250.000.000,00	750.000.000,00	688.477.329,00	438.477.329,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	atlet dan masyarakat		180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	250.000.000,00	750.000.000,00	688.477.329,00	438.477.329,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Yang Berprestasi di Tingkat Provinsi				6 Cabor	6 Cabor	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.006.731.330,00	-193.268.670,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	Atlet		349.184.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				40 Orang	113 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	398.395.185,00	-1.604.815,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			134.184.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	100 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	608.336.145,00	-191.663.855,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			215.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlga Cabang Olahraga Rekreasi Yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Cabor	4 Cabor	70.000.000,00	70.000.000,00	60.024.993,00	-9.975.007,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	atlet dan masyarakat		8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	2 Lembaga	70.000.000,00	70.000.000,00	60.024.993,00	-9.975.007,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif				65 %	65 %	410.000.000,00	410.000.000,00	362.047.341,00	-304.000.000,00							106.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Yang Meningkatkan Kapasitasnya				3 Organisasi	3 Organisasi	410.000.000,00	410.000.000,00	362.047.341,00	-47.952.659,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	organisasi pramuka		106.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				3 Organisasi	3 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	32.509.000,00	-17.491.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			8.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	69.538.341,00	-30.461.659,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			18.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			<i>Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>				2 Unit	1 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni Perwujudan kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni			80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
4.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 indeks	92 indeks	7.613.737.155,00	7.789.027.836,00	7.608.327.136,00	1.399.126.519,00							9.012.863.674,00		
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Jumlah layanan pendidikan/pelatihan kepegawaian</i>				1 dokumen 1 pelatihan	1 dokumen 1 pelatihan	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar		40.837.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				61 Paket	61 Paket	45.750.000,00	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.837.500,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							950.000.000,00	1.215.000.000,00	1.900.185.030,00	950.185.030,00							1.098.935.059,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi				30 karya budaya	30 karya budaya	250.000.000,00	450.000.000,00	815.730.673,00	34.006.118,00							284.006.118,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM Kebudayaan, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Yang Dibina</i>				120 orang	120 orang	250.000.000,00	450.000.000,00	815.730.673,00	565.730.673,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat		284.006.118,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																			
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				120 Orang	120 Orang	250.000.000,00	450.000.000,00	815.730.673,00	565.730.673,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			284.006.118,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya				12 kali	12 kali	150.000.000,00	215.000.000,00	541.423.357,00	233.728.941,00							383.728.941,00		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM Kesenian Tradisional Yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>				120 Orang	120 Orang	150.000.000,00	215.000.000,00	541.423.357,00	391.423.357,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pelaku seni		383.728.941,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				90 Orang	200 Orang	150.000.000,00	215.000.000,00	541.423.357,00	391.423.357,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			383.728.941,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan				22 Cagar Budaya	22 Cagar Budaya	550.000.000,00	550.000.000,00	543.031.000,00	-118.800.000,00							431.200.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang ditetapkan				13 objek	13 objek	150.000.000,00	150.000.000,00	143.031.000,00	-6.969.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat dan cagar budaya		299.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	150.000.000,00	150.000.000,00	143.031.000,00	-6.969.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			299.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola				22 Cagar Budaya	22 Cagar Budaya	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat dan cagar budaya		132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				1 Objek	1 Objek	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			132.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.453.251.299,00	18.807.780.660,00	17.279.587.675,00	-2.173.663.624,00							32.526.127.280,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							19.453.251.299,00	18.807.780.660,00	17.279.587.675,00	-2.173.663.624,00							32.526.127.280,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	7.613.737.155,00	7.789.027.836,00	7.608.327.136,00	1.399.126.519,00							9.012.863.674,00	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Penatausahaan SP2D Laporan Keuangan Usulan RKA, DPA,RKAP,DPPA, yang diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.516.093.666,00	5.641.384.347,00	5.658.904.347,00	142.810.681,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar		6.030.983.085,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.339.573.666,00	5.464.864.347,00	5.464.864.347,00	125.290.681,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.728.633.125,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	176.520.000,00	176.520.000,00	194.040.000,00	17.520.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			302.349.960,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyaknya koordinasi dan koordinasi yang dilakukan OPD Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan Jumlah Dokumen Bahan Cetak Yang Daidakan Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Unit Rumah Tangga Yang Diadakan				1 Dokumen 1 Laporan 38 Paket 5 Paket 8 Paket	1 Dokumen 1 Laporan 38 Paket 5 Paket 8 Paket	479.318.289,00	480.798.289,00	308.125.789,00	-171.192.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar		1.413.010.966,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.904.100,00	-4.095.900,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	98.558.600,00	-1.441.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			636.340.674,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	16 Paket	11.000.000,00	12.480.000,00	15.224.800,00	4.224.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.325.575,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	36.860.000,00	36.860.000,00	22.648.000,00	-14.212.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			79.860.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.988.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			19.965.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	311.470.289,00	311.470.289,00	155.802.289,00	-155.668.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			647.519.717,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Diadakan				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	183.450.462,00	23.450.462,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar		3.970.903,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	33 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	42.997.962,00	12.997.962,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	79 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	60.452.500,00	10.452.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			970.903,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan layanan komunikasi, SDA dan listrik yang dipakai Jumlah bulan pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Unit Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 bulan 35 Unit	12 bulan 35 Unit	1.131.010.000,00	1.179.530.000,00	1.119.530.000,00	-11.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar		1.299.881.220,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	142.920.000,00	82.920.000,00	-12.080.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		133.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		30.453.280,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.011.060.000,00	1.011.660.000,00	1.011.660.000,00	600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		1.136.327.940,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	281.565.200,00	281.565.200,00	292.566.538,00	11.001.338,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Disbudporapar	224.180.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	242.565.200,00	242.565.200,00	242.565.200,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		215.430.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	39.000.000,00	39.000.000,00	50.001.338,00	11.001.338,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		8.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan				1204500 orang	1204500 orang	3.900.000.000,00	4.490.934.000,00	5.476.904.316,00	15.692.231.842,00						19.592.231.842,00		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Dikelola				4 objek	4 objek	3.900.000.000,00	4.490.934.000,00	5.476.904.316,00	1.576.904.316,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat	19.592.231.842,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Lokasi	2 Lokasi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi		0,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)</i>				2 Lokasi	2 Lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			5.844.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>				20 Unit	13 Unit	3.100.000.000,00	3.490.934.000,00	4.688.261.916,00	1.588.261.916,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATNYA BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			13.630.901.454,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	500.000.000,00	288.642.400,00	188.642.400,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			117.030.388,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan				1204500 orang	1204500 orang	5.855.264.144,00	4.055.264.144,00	2.838.829.128,00	-3.893.394.880,00							1.961.869.264,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Event Pemasaran Yang Diselenggarakan</i>				12 Event 1 Dokumen	12 Event 1 Dokumen	5.855.264.144,00	4.055.264.144,00	2.838.829.128,00	-3.016.435.016,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	Masyarakat		1.961.869.264,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	205.264.144,00	205.264.144,00	205.264.144,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				12 Kegiatan	18 Kegiatan	5.450.000.000,00	3.650.000.000,00	2.439.164.984,00	-3.010.835.016,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			1.538.019.264,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>				1 Promosi	1 Promosi	200.000.000,00	200.000.000,00	194.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			223.850.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi				185 orang	185 orang	2.130.000.000,00	2.518.304.680,00	1.401.277.095,00	-130.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				120 Orang	120 Orang	2.050.000.000,00	2.438.304.680,00	1.351.724.595,00	-698.275.405,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif		1.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				160 Orang	200 Orang	100.000.000,00	500.000.000,00	281.185.999,00	181.185.999,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang Menperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				200 Orang	200 Orang	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	993.670.490,00	-806.329.510,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				90 Orang	24 Orang	150.000.000,00	138.304.680,00	76.868.106,00	-73.131.894,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				90 Orang	90 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	49.552.500,00	-30.447.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	Pelaku ekraf		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	75 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	49.552.500,00	-30.447.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	10.219.194.362,00							5.459.886.480,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	10.219.194.362,00							5.459.886.480,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	10.291.397.787,00							5.249.886.480,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	4.702.574.310,00	4.765.476.950,00	4.699.347.332,00	196.312.170,00							4.898.886.480,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.054.444.510,00	4.125.618.690,00	4.130.758.690,00	76.314.180,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		4.120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.966.224.510,00	4.027.058.690,00	4.027.058.690,00	60.834.180,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	88.220.000,00	98.560.000,00	103.700.000,00	15.480.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata Rata capaian kinerja Indikator Sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Administrasi Umum pada Dinas Perpustakaan dan Arsip				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	184.000.000,00	175.728.460,00	112.342.338,00	-71.657.662,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		204.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	909.000,00	-91.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	65.000.000,00	46.275.525,00	-18.724.475,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			67.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.660.000,00	6.924.350,00	6.924.350,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	NON URUSAN							5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	10.219.194.362,00							5.459.886.480,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	10.291.397.787,00							5.249.886.480,00	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.270.151.830,00	15.627.062.470,00	15.489.346.192,00	10.219.194.362,00							5.459.886.480,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5.091.549.140,00	15.449.451.780,00	15.382.946.927,00	10.291.397.787,00							5.249.886.480,00	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	720 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	3.966.000,00	-34.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	100.000.000,00	97.068.460,00	54.267.463,00	-45.732.537,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	334.129.800,00	334.129.800,00	326.250.000,00	-7.879.800,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		409.386.480,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	44.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	14.890.000,00	-110.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				216 Laporan	216 Laporan	271.129.800,00	271.129.800,00	266.460.000,00	-4.669.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			327.386.480,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah				8 Unit	8 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	129.996.304,00	-3.696,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab Karo		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	129.996.304,00	-3.696,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan				25.26 Indeks	25.26 Indeks	388.974.830,00	10.683.974.830,00	10.683.599.595,00	-37.974.830,00							351.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Perpustakaan di Kabupaten Karo Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 % 1 Perpusta kaan	100 % 1 Perpusta kaan	180.000.000,00	363.374.830,00	400.698.865,00	220.698.865,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat		241.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				40 Perpust akaan	15 Perpust akaan	40.000.000,00	90.000.000,00	55.320.000,00	15.320.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	108.974.830,00	149.588.160,00	99.588.160,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	54.400.000,00	36.005.000,00	6.005.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																			
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	50.000.000,00	110.000.000,00	159.785.705,00	109.785.705,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rata rata Capaian Kinerja Indikator Subkegiatan pada Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kabupaten/kota Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	208.974.830,00	10.320.600.000,00	10.282.900.730,00	10.073.925.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	108.974.830,00	0,00	0,00	-108.974.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.000.000,00	10.300.000.000,00	10.266.730.730,00	10.261.730.730,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PE RPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				50 Orang	24 Orang	50.000.000,00	20.600.000,00	16.170.000,00	-33.830.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																			
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				2 Lokus	2 Lokus	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							178.602.690,00	177.610.690,00	106.399.265,00	-72.203.425,00							210.000.000,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola arsip secara baku				86 95.85 % %	86 95.85 % %	178.602.690,00	177.610.690,00	106.399.265,00	31.397.310,00							210.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota Terlaksananya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	56.262.495,00	56.262.495,00	38.177.265,00	-18.085.230,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	SKPD Kab Karo		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				250 Berkas	1 Berkas	25.265.130,00	25.265.130,00	20.927.720,00	-4.337.410,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Laporan	1 Laporan	30.997.365,00	30.997.365,00	17.249.545,00	-13.747.820,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	122.340.195,00	121.348.195,00	68.222.000,00	-54.118.195,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat		145.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	27 Pengguna	82.340.195,00	82.340.195,00	49.207.730,00	-33.132.465,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.008.000,00	19.014.270,00	-20.985.730,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS PERTANIAN								30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	-3.349.870.896,00						27.974.085.284,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	-3.349.870.896,00							27.974.085.284,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							30.406.108.380,00	26.661.059.831,00	27.056.237.484,00	-3.349.870.896,00							27.974.085.284,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				86 Indeks	86 Indeks	19.244.962.920,00	19.189.274.051,00	19.434.100.087,00	2.353.107.404,00							21.598.070.324,00	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	16.610.272.208,00	16.554.583.339,00	16.565.642.200,00	-44.630.008,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		20.557.808.972,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				146 Orang/ bulan	154 Orang/ bulan	16.420.552.208,00	16.364.863.339,00	16.375.922.200,00	-44.630.008,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.558.618.972,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	189.720.000,00	189.720.000,00	189.720.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.999.190.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	137.250.000,00	137.250.000,00	137.250.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		136.710.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				183 Paket	183 Paket	137.250.000,00	137.250.000,00	137.250.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			126.710.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	556.050.592,00	556.050.592,00	789.817.767,00	233.767.175,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		416.050.592,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	22.684.780,00	22.684.780,00	22.684.780,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			32.684.780,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	213.316.565,00	213.316.565,00	201.845.036,00	-11.471.529,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			63.316.565,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	10.382.247,00	10.382.247,00	10.382.247,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.382.247,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	45.107.000,00	45.107.000,00	25.766.992,00	-19.340.008,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.107.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	264.560.000,00	264.560.000,00	529.138.712,00	264.578.712,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			264.560.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikatpr subkegiatan pada kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		63.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			63.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.760.100.000,00	1.760.100.000,00	1.760.100.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		325.310.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				288 Laporan	288 Laporan	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			48.290.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.654.100.000,00	1.654.100.000,00	1.654.100.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			277.020.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	181.290.120,00	181.290.120,00	181.290.120,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		99.190.760,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	96.290.120,00	96.290.120,00	96.290.120,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			94.190.760,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	DINAS PERTANIAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian Produktivitas Komoditi Pertanian Produktivitas komoditi pertanian				6,37 91,13 93,24 Persen Kuintal/ha Persen	6,37 91,13 93,24 Persen Kuintal/ha Persen	3.498.276.460,00	2.848.276.460,00	2.770.462.639,00	-665.276.500,00							2.832.999.960,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				100 % 8 Poktan	100 % 8 Poktan	1.480.276.500,00	830.276.500,00	823.971.760,00	-656.304.740,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		649.999.960,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	5 Laporan	1.480.276.500,00	830.276.500,00	823.971.760,00	-656.304.740,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			549.999.960,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi pertanian yang difasilitasi Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota				100 % 14 Jenis	100 % 14 Jenis	1.717.999.960,00	1.717.999.960,00	1.657.522.493,00	-60.477.467,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		1.333.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	274.548.230,00	-25.451.770,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			533.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	1.417.999.960,00	1.417.999.960,00	1.382.974.263,00	-35.025.697,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			800.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				100 % 100 Ekor	100 % 100 Ekor	300.000.000,00	300.000.000,00	288.968.386,00	-11.031.614,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		850.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				100 Ekor	110 Ekor	300.000.000,00	300.000.000,00	288.968.386,00	-11.031.614,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			850.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Produktivitas Komoditi Pertanian				3 91,13 Persen Kw/ha	3 91,13 Persen Kw/ha	6.612.869.000,00	3.165.000.000,00	3.122.093.423,00	-5.212.869.040,00							1.399.999.960,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				100 %	100 %	165.000.000,00	165.000.000,00	154.560.000,00	-10.440.000,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kabupaten Karo		49.999.960,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	154.560.000,00	-10.440.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			49.999.960,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian				100 %	100 %	6.247.869.000,00	2.800.000.000,00	2.777.867.623,00	-3.470.001.377,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Kelompok Tani		1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																			
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				19 Unit	12 Unit	3.865.500.000,00	2.400.000.000,00	2.382.285.374,00	-1.483.214.626,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			575.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	1 Unit	1.247.869.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-1.047.869.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	1.134.500.000,00	200.000.000,00	195.582.249,00	-938.917.751,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			575.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																			
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	189.665.800,00	-10.334.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																			
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				1 Ha	24 Ha	200.000.000,00	200.000.000,00	189.665.800,00	-10.334.200,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			0,00	DINAS PERTANIAN	
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Jumlah HPR yang divaksin				70 Persen	70 Persen	450.000.000,00	458.793.400,00	442.084.480,00	322.800.000,00							772.800.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	450.000.000,00	458.793.400,00	442.084.480,00	-7.915.520,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Hewan Penular rabies		697.799.960,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	458.793.400,00	442.084.480,00	-7.915.520,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			697.799.960,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatanPengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Masyarakat Veteriner				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		75.000.040,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			75.000.040,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																		
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			0,00	DINAS PERTANIAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penaggulan OPT Persentase Luas Pertanaman yang Dikendalikan OPT nya undefined				1,83 23 undefined Persen Persen undefined	1,83 23 undefined Persen Persen undefined	200.000.000,00	200.000.000,00	196.424.796,00	170.803.040,00							370.803.040,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	196.424.796,00	-3.575.204,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		370.803.040,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				300 Ha	300 Ha	200.000.000,00	200.000.000,00	196.424.796,00	-3.575.204,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			370.803.040,00	DINAS PERTANIAN
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan				80 Rekomendasi	80 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00							50.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																				
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	ASN Dinas Pertanian Kab.Karo		10.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																				
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani				7,45 Persen	7,45 Persen	400.000.000,00	799.715.920,00	1.091.072.059,00	549.412.000,00							949.412.000,00			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100 %	100 %	400.000.000,00	799.715.920,00	1.091.072.059,00	691.072.059,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Kelompok Tani		949.412.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																				
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	97.529.438,00	-52.470.562,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																				
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	160.000.000,00	149.715.920,00	44.130.621,00	-115.869.379,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	20 Unit	90.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	410.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN		
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																				
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	90 Orang	0,00	0,00	449.412.000,00	449.412.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			449.412.000,00	DINAS PERTANIAN		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																			623.032.200.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.770.958.282,00	14.845.662.827,00	14.217.435.206,00	-1.553.523.076,00							623.032.200.000,00			
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	-22.976.342,00							55.000.000,00			
1.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-				-	-	50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	5.000.000,00							55.000.000,00			
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				20 pengusaha	20 pengusaha	50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	-22.976.342,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.500.000,00	27.023.658,00	-22.976.342,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							13.066.856.282,00	13.753.622.827,00	13.373.688.947,00	306.832.665,00							622.087.200.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang terkelola dengan baik				52,49 %	52,49 %	2.880.000.000,00	2.877.537.000,00	3.055.832.306,00	340.000.000,00							3.220.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Terselenggaranya kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 unit	1 unit	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.950.000.000,00	250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		3.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Unit	4 Unit	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.950.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			3.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>				1 kelompok	1 kelompok	180.000.000,00	177.537.000,00	105.832.306,00	-74.167.694,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	177.537.000,00	105.832.306,00	-74.167.694,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor				6749 miliar	6749 miliar	450.000.000,00	445.269.000,00	315.104.844,00	40.000.000,00							490.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 kerjasama	3 kerjasama	450.000.000,00	445.269.000,00	315.104.844,00	-134.895.156,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	200.000.000,00	198.344.000,00	156.841.333,00	-43.158.667,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	98.938.200,00	70.946.084,00	-29.053.916,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100.000.000,00	98.346.800,00	53.883.863,00	-46.116.137,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																			
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	50.000.000,00	49.640.000,00	33.433.564,00	-16.566.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur sarana perdagangan yang ditera dan tera ulang				100 %	100 %	106.000.000,00	104.467.860,00	59.412.614,00	2.000.000,00							108.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terselenggarannya Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				100 unit	100 unit	106.000.000,00	104.467.860,00	59.412.614,00	-46.587.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		108.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	56.000.000,00	55.243.820,00	31.853.909,00	-24.146.091,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			57.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	49.224.040,00	27.558.705,00	-22.441.295,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			51.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 indeks	92 indeks	9.630.856.282,00	10.326.348.967,00	9.943.339.183,00	608.638.343.718,00							618.269.200.000,00		
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan SP2D Tersusunnya Laporan Keuangan Terverifikasinya usulan RKA dan RKAP, DPA dan DPPA				1 Laporan 4 berkas 50 berkas	1 Laporan 4 berkas 50 berkas	5.675.356.282,00	6.377.358.967,00	6.251.068.547,00	575.712.265,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		610.272.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/b ulan	52 Orang/b ulan	5.404.356.282,00	6.106.358.967,00	6.106.358.967,00	702.002.685,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			610.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	271.000.000,00	271.000.000,00	144.709.580,00	-126.290.420,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			272.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				20 berkas	20 berkas	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		376.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				134 Paket	134 Paket	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			376.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah				20 berkas	20 berkas	507.000.000,00	500.490.000,00	310.098.626,00	-196.901.374,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		537.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	74.553.626,00	-25.446.374,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			16.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.000.000,00	91.000.000,00	72.800.000,00	-18.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			91.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	293.490.000,00	146.745.000,00	-153.255.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			310.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10 unit	10 unit	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		221.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			111.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.446.000.000,00	1.446.000.000,00	1.379.728.010,00	-66.271.990,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		1.460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86.000.000,00	86.000.000,00	85.984.000,00	-16.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.360.000.000,00	1.360.000.000,00	1.293.744.010,00	-66.255.990,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10 unit	10 unit	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	1.691.944.000,00	-56.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Disperindag		5.403.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			96.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	5.944.000,00	-56.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.654.102.000,00	1.042.540.000,00	816.722.601,00	-1.837.379.399,00							890.000.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase pertumbuhan industri/ikm				4,03 %	4,03 %	2.504.102.000,00	895.590.000,00	741.783.758,00	-1.824.102.000,00							680.000.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.504.102.000,00	895.590.000,00	741.783.758,00	-1.762.318.242,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		680.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	97.790.000,00	50.081.813,00	-49.918.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	399.700.000,00	388.482.426,00	-11.517.574,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.004.102.000,00	398.100.000,00	303.219.519,00	-1.700.882.481,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			310.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase ikm yang masuk kedalam sistem informasi industri nasional				100	100	150.000.000,00	146.950.000,00	74.938.843,00	60.000.000,00							210.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Terselenggaranya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 industri	100 industri	150.000.000,00	146.950.000,00	74.938.843,00	-75.061.157,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Disperindag		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	146.950.000,00	74.938.843,00	-75.061.157,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	3.200.560.085,00						280.481.980.961,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	3.200.560.085,00							280.481.980.961,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							34.106.833.289,00	34.716.893.027,00	37.307.393.374,00	3.200.560.085,00							280.481.980.961,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83 Indeks	83 Indeks	31.527.596.824,00	32.137.656.562,00	35.290.927.768,00	246.172.183.991,00							277.699.780.815,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Dokumen Penatausahaan Keuangan Laporan Keuangan</i>				4 laporan 97 Dokumen	4 laporan 97 Dokumen	12.611.546.667,00	13.270.424.205,00	13.220.925.824,99	609.379.157,99			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		13.872.701.334,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				94 Orang/b ulan	94 Orang/b ulan	12.190.944.967,00	12.849.822.505,00	12.849.822.505,00	658.877.538,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			13.410.039.464,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	420.601.700,00	420.601.700,00	371.103.319,99	-49.498.380,01	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			462.661.870,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Administrasi kepegawaian yang terselesaikan</i>				2 Paket	2 Paket	43.252.000,00	43.252.000,00	148.240.200,00	104.988.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Karo		115.047.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				-	140 Paket	0,00	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			115.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1 Orang	1 Orang	43.252.000,00	43.252.000,00	43.240.200,00	-11.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			47.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.494.637.237,00	4.445.819.437,00	5.964.756.096,01	1.470.118.859,01			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Sekretariat Daerah		136.813.113.686,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			132.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				36 Paket	36 Paket	380.193.109,00	380.193.109,00	286.245.590,00	-93.947.519,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			418.212.420,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	394.357.200,00	394.357.200,00	693.685.760,00	299.328.560,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			434.358.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	100.704.050,00	100.704.050,00	80.563.240,00	-20.140.810,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			110.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				2000 Laporan	2000 Laporan	2.000.389.000,00	2.000.389.000,00	2.036.489.000,00	36.100.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.200.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				800 Laporan	800 Laporan	1.498.993.878,00	1.450.176.078,00	2.747.772.506,01	1.248.778.628,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.648.893.266,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</i>				40 Unit	40 Unit	5.524.318.990,00	5.524.318.990,00	6.124.318.990,00	600.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		2.449.013.090,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	3.792.000.000,00	3.792.000.000,00	3.792.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			594.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				36 Unit	36 Unit	748.513.090,00	748.513.090,00	948.513.090,00	200.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			808.513.090,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	12 Unit	320.100.000,00	320.100.000,00	320.100.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			330.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				7 Unit	7 Unit	663.705.900,00	663.705.900,00	1.063.705.900,00	400.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			715.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				48 Laporan	48 Laporan	2.738.874.620,00	2.738.874.620,00	2.952.979.620,00	214.105.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		2.918.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	58.685.000,00	58.685.000,00	58.685.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.249.403.650,00	1.249.403.650,00	1.449.403.650,00	200.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.288.045.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	153.085.970,00	153.085.970,00	153.085.970,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			168.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.277.700.000,00	1.277.700.000,00	1.291.805.000,00	14.105.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.401.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</i>				10 Unit	10 Unit	2.490.359.470,00	2.490.359.470,00	3.440.359.470,00	950.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		2.660.961.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	5 Unit	226.054.620,00	226.054.620,00	526.054.620,00	300.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			233.046.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	28 Unit	753.001.300,00	753.001.300,00	1.203.001.300,00	450.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			776.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	107.393.550,00	107.393.550,00	107.393.550,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			110.715.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.403.910.000,00	1.403.910.000,00	1.603.910.000,00	200.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.540.910.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dibayarkan Gaji dan Operasionalnya				2 Orang Bulan	2 Orang Bulan	886.381.290,00	886.381.290,00	886.381.290,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo		957.652.705,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	782.381.290,00	782.381.290,00	782.381.290,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			843.052.705,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			114.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah				36 Paket	36 Paket	2.246.000.000,00	2.246.000.000,00	2.246.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		2.463.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.260.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	880.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			966.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																				
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			237.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi				7 Dokumen	7 Dokumen	356.586.550,00	356.586.550,00	212.689.242,00	-143.897.308,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN dan Masyarakat di Kabupaten Karo		367.615.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	86.533.700,00	86.533.700,00	53.650.524,00	-32.883.176,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			89.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	94.990.160,00	94.990.160,00	61.052.271,00	-33.937.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			97.928.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	127.101.040,00	127.101.040,00	66.527.044,00	-60.573.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			131.032.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	47.961.650,00	47.961.650,00	31.459.403,00	-16.502.247,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			49.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan, Komunikasi, dan Dokumentasi Pimpinan				80 Laporan	80 Laporan	135.640.000,00	135.640.000,00	94.277.035,00	-41.362.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		149.204.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	34.646.500,00	4.646.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1 Laporan	65.640.000,00	65.640.000,00	29.064.218,00	-36.575.782,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			72.204.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	30.566.317,00	-9.433.683,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1.332.074.435,00	1.332.074.435,00	992.412.791,00	122.140.652,00							1.454.215.087,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan				140 Dokumen	140 Dokumen	707.094.670,00	707.094.670,00	489.786.646,00	-217.308.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Karo		777.804.137,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				30 Dokumen	30 Dokumen	114.862.170,00	114.862.170,00	73.890.000,00	-40.972.170,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			126.348.387,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				50 Dokumen	50 Dokumen	183.885.300,00	183.885.300,00	111.455.646,00	-72.429.654,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			202.273.830,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	408.347.200,00	408.347.200,00	304.441.000,00	-103.906.200,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			449.181.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				8 Dokumen	8 Dokumen	98.954.300,00	98.954.300,00	63.045.800,00	-35.908.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat dan ASN Kabupaten Karo		108.849.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	12 Dokumen	28.516.850,00	28.516.850,00	18.600.350,00	-9.916.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			31.368.535,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	33.086.250,00	33.086.250,00	20.384.250,00	-12.702.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			36.394.875,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				12 Dokumen	12 Dokumen	37.351.200,00	37.351.200,00	24.061.200,00	-13.290.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			41.086.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Tersusun				654 dokumen 7 kasus	654 dokumen 7 kasus	526.025.465,00	526.025.465,00	439.580.345,00	-86.445.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Karo		567.561.220,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				604 Dokumen	604 Dokumen	160.220.720,00	160.220.720,00	133.394.720,00	-26.826.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			165.176.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	217.576.045,00	217.576.045,00	172.361.725,00	-45.214.320,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			239.333.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				50 Dokumen	50 Dokumen	148.228.700,00	148.228.700,00	133.823.900,00	-14.404.800,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			163.051.570,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan jumlah Permohonan tender Laporan TPID				220 7,75 Paket Nilai	220 7,75 Paket Nilai	1.247.162.030,00	1.247.162.030,00	1.024.052.815,00	80.823.029,00							1.327.985.059,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Kebijakan Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	288.300.690,00	288.300.690,00	170.283.930,00	-118.016.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Karo		317.130.759,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	59.259.130,00	59.259.130,00	30.639.430,00	-28.619.700,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			65.185.043,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	107.500.000,00	107.500.000,00	75.553.000,00	-31.947.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			118.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	1 Dokumen	121.541.560,00	121.541.560,00	64.091.500,00	-57.450.060,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			133.695.716,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				120 Laporan	120 Laporan	66.346.000,00	66.346.000,00	37.518.245,00	-28.827.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Karo		72.980.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.770.000,00	11.770.000,00	3.857.000,00	-7.913.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			12.947.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	19.576.000,00	19.576.000,00	8.411.245,00	-11.164.755,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			21.533.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				150 Laporan	150 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	25.250.000,00	-9.750.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			38.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Barang Secara Elektronik				190 Laporan	190 Laporan	801.568.340,00	801.568.340,00	773.351.940,00	-28.216.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN Kabupaten Karo		837.832.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				200 Dokumen	200 Dokumen	635.468.340,00	635.468.340,00	633.383.840,00	-2.084.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			655.122.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	79.800.000,00	79.800.000,00	75.432.500,00	-4.367.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			87.780.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	200 Orang	86.300.000,00	86.300.000,00	64.535.600,00	-21.764.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			94.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Monitoring Kebijakan Sumber Daya Alam				2 Dokumen	2 Dokumen	90.947.000,00	90.947.000,00	42.898.700,00	-48.048.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Karo		100.041.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	45.950.000,00	45.950.000,00	21.760.400,00	-24.189.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.545.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	44.997.000,00	44.997.000,00	21.138.300,00	-23.858.700,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			49.496.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	-9.422.424.722,00						51.928.522.175,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	-9.422.424.722,00							51.928.522.175,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							61.351.278.204,00	62.746.519.786,00	51.928.853.482,00	-9.422.424.722,00							51.928.522.175,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	31.676.387.054,00	33.745.543.916,00	35.897.820.116,00	-3.171.293.179,00							28.505.093.875,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Fisik/Non Fisik, Laporan Pajak Pusat, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Pengeluaran serta Laporan Evaluasi Renja, Renstra dan Keuangan yang Disusun Penatausahaan SP2D Belanja, Gaji dan Tunjangan Usulan Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP yang Terverifikasi				300 Dokumen 36 Laporan 8 Dokumen	300 Dokumen 36 Laporan 8 Dokumen	3.237.639.122,00	3.256.169.860,00	3.256.107.860,00	18.468.738,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		3.522.169.943,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.089.579.122,00	3.108.109.860,00	3.108.109.860,00	18.530.738,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.374.109.943,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	148.060.000,00	148.060.000,00	147.998.000,00	-62.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			148.060.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Dikelola Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 % 12 Dokumen 12 Laporan	100 % 12 Dokumen 12 Laporan	467.204.000,00	498.704.000,00	414.112.000,00	-53.092.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		487.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	31.500.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	407.204.000,00	407.204.000,00	322.612.000,00	-84.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			407.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum yang Terkelola Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.091.402.543,00	2.182.663.042,00	3.132.042.802,00	1.040.640.259,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		2.091.402.543,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	24.998.160,00	-1.840,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	462.471.010,00	546.561.509,00	574.861.110,00	112.390.100,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			462.471.010,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	558.958.580,00	558.958.580,00	1.903.759.670,00	1.344.801.090,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			558.958.580,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.726.953,00	29.726.953,00	23.781.562,00	-5.945.391,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			29.726.953,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	84 Dokumen	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			32.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	286.648.000,00	286.648.000,00	220.553.300,00	-66.094.700,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			286.648.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	400 Laporan	696.198.000,00	703.368.000,00	351.689.000,00	-344.509.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			696.198.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang bertambah				74 Unit	74 Unit	3.691.020.000,00	3.691.020.000,00	3.691.020.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.206.020.000,00	2.206.020.000,00	2.206.020.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				74 Unit	74 Unit	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operator Komputer, Jasa Supir Kendaraan Dinas ,Jasa Kebersihan dan Jasa keamanan yang tersedia Layanan Listrik, Air dan Internet yang tersedia Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 20 Orang 48 Unit Bulan	100 % 20 Orang 48 Unit Bulan	1.282.420.000,00	1.297.600.000,00	1.282.090.000,00	-330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		1.294.480.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	157.200.000,00	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			174.480.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.290.000,00	76.290.000,00	76.290.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.048.930.000,00	1.064.110.000,00	1.048.600.000,00	-330.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diberikan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	898.360.000,00	898.360.000,00	1.098.349.440,00	199.989.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		898.360.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	397.310.000,00	397.310.000,00	397.310.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			397.310.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	501.050.000,00	501.050.000,00	701.039.440,00	199.989.440,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			501.050.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Kesejahteraan DPRD				12 Laporan 480 Orang Bulan	12 Laporan 480 Orang Bulan	18.108.821.389,00	20.021.507.014,00	21.131.507.014,00	3.022.685.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		18.108.821.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	17.396.821.389,00	19.309.507.014,00	20.419.507.014,00	3.022.685.625,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			17.396.821.389,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	472.000.000,00	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			472.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			240.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.899.520.000,00	1.899.520.000,00	1.892.591.000,00	-6.929.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		1.902.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.520.000,00	27.520.000,00	20.591.000,00	-6.929.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00	1.872.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.872.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD				Ada Ada/ Tidak	Ada Ada/ Tidak	29.674.891.150,00	29.000.975.870,00	16.031.033.366,00	-6.251.462.850,00							23.423.428.300,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				1 Dokumen 6 Dokumen	100 %	4.812.088.000,00	4.812.088.000,00	2.464.373.100,00	-2.347.714.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		5.768.435.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.330.000,00	24.330.000,00	17.514.000,00	-6.816.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			24.330.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.619.645.000,00	4.619.645.000,00	2.341.929.000,00	-2.277.716.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.619.645.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	13.040.000,00	-4.560.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			17.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	143.653.000,00	143.653.000,00	86.961.600,00	-56.691.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	6.860.000,00	6.860.000,00	4.928.500,00	-1.931.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			6.860.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	293.270.000,00	293.270.000,00	207.091.500,00	-86.178.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		293.270.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	67.070.000,00	67.070.000,00	47.708.500,00	-19.361.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			67.070.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	66.370.000,00	66.370.000,00	47.148.500,00	-19.221.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			66.370.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	52.680.000,00	52.680.000,00	36.949.500,00	-15.730.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			52.680.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	43.300.000,00	43.300.000,00	30.380.000,00	-12.920.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			43.300.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	10.450.000,00	10.450.000,00	7.385.000,00	-3.065.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			10.450.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.400.000,00	53.400.000,00	37.520.000,00	-15.880.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			53.400.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100 % 1 Dokumen 1 Laporan	100 % 1 Dokumen 1 Laporan	243.177.500,00	243.177.500,00	172.317.200,00	-70.860.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		243.177.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	35.578.000,00	35.578.000,00	25.079.600,00	-10.498.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			35.578.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	27.512.000,00	27.512.000,00	19.409.600,00	-8.102.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			27.512.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	45.120.000,00	45.120.000,00	31.836.000,00	-13.284.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			45.120.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	34.702.500,00	34.702.500,00	24.332.000,00	-10.370.500,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			34.702.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	34.825.000,00	34.825.000,00	24.430.000,00	-10.395.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			34.825.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.280.000,00	18.280.000,00	13.714.000,00	-4.566.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			18.280.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	18.640.000,00	18.640.000,00	13.300.000,00	-5.340.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			18.640.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	28.520.000,00	28.520.000,00	20.216.000,00	-8.304.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			28.520.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				12 Dokumen 1 Dokumen 200 Dokumen 8 Orang	12 Dokumen 1 Dokumen 200 Dokumen 8 Orang	2.116.315.000,00	2.210.556.500,00	2.066.734.940,00	-49.580.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		2.596.245.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				200 Dokumen	200 Dokumen	968.986.000,00	968.986.000,00	1.056.433.000,00	87.447.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.268.986.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	3 Orang	180.070.000,00	180.070.000,00	180.056.000,00	-14.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			360.070.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	384.070.000,00	384.070.000,00	384.056.000,00	-14.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			384.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	513.200.000,00	513.200.000,00	265.445.540,00	-247.754.460,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			513.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				100 Dokumen	100 Dokumen	69.989.000,00	164.230.500,00	180.744.400,00	110.755.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			69.989.450,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang disusun Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				180 Laporan 1 Dokumen	180 Laporan 1 Dokumen	1.336.970.000,00	1.336.970.000,00	1.031.448.000,00	-305.522.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		1.336.970.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				100 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	18.142.000,00	18.142.000,00	13.033.600,00	-5.108.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			18.142.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.218.828.000,00	1.218.828.000,00	968.414.400,00	-250.413.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.218.828.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.120.000,00	19.120.000,00	13.996.000,00	-5.124.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		19.120.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.560.000,00	9.560.000,00	6.998.000,00	-2.562.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			9.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	9.560.000,00	9.560.000,00	6.998.000,00	-2.562.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			9.560.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen 6 Dokumen	12 Dokumen 12 Laporan 500 Dokumen 6 Dokumen	20.853.950.650,00	20.085.793.870,00	10.075.072.626,00	-10.778.878.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD		13.166.210.350,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	20.232.517.000,00	19.464.360.220,00	9.748.494.706,00	-10.484.022.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			12.544.776.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	12.810.000,00	12.810.000,00	9.273.000,00	-3.537.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			12.810.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	49.337.650,00	49.337.650,00	34.595.120,00	-14.742.530,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			49.337.650,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				50 Dokumen	50 Dokumen	559.286.000,00	559.286.000,00	282.709.800,00	-276.576.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			559.286.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00						11.090.129.317,60		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00							11.090.129.317,60		
	5.01	PERENCANAAN							8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	-954.781.174,00							9.992.518.904,60		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	5.961.734.199,00	6.327.268.507,00	6.118.206.341,00	795.650.747,60							6.757.384.946,60		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Penatausahaan SP2D Usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi				4 Berkas 4 Laporan 70 Berkas	4 Berkas 4 Laporan 70 Berkas	4.768.326.301,00	4.991.122.355,00	4.985.392.355,00	217.066.054,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Bappedalitbang		5.245.158.931,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.611.691.701,00	4.828.607.755,00	4.828.607.755,00	216.916.054,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.072.860.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	156.634.600,00	162.514.600,00	156.784.600,00	150.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			172.298.060,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya				2 paket	2 paket	54.432.000,00	88.788.374,00	30.240.000,00	-24.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Bappedalitbang		97.532.052,20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	54.432.000,00	88.788.374,00	30.240.000,00	-24.192.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			97.532.052,20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Bappedalitbang yang dikelola Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Bappedalitbang Petugas Kebersihan dan keamanan Bappedalitbang yang tersedia				2 Laporan 2 Orang (Petugas) 7 Jenis	2 Laporan 2 Orang (Petugas) 7 Jenis	756.485.898,00	900.287.778,00	500.923.899,00	-255.561.999,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Bappedalitbang		962.916.963,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.915.850,00	1.757.402,00	1.757.402,00	-158.448,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.933.142,20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	63.126.610,00	140.510.313,00	49.285.270,00	-13.841.340,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			127.161.752,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.940.138,00	11.463.184,00	11.463.184,00	523.046,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.609.502,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	32.997.200,00	32.902.525,00	23.139.015,00	-9.858.185,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			36.192.777,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	33.120.000,00	20.650.000,00	17.400.000,00	-15.720.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			22.715.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	160 Laporan	614.386.100,00	693.004.354,00	397.879.028,00	-216.507.072,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			762.304.789,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	254.580.087,00	254.580.087,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	16 Unit	0,00	0,00	254.580.087,00	254.580.087,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Petugas kebersihan dan keamanan Bappedalitbang yang tersedia				2 Orang (Petgas)	2 Orang (Petgas)	106.900.000,00	104.950.000,00	104.950.000,00	-1.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Bappedalitbang		115.445.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			13.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	NON URUSAN							9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00							11.090.129.317,60		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	-954.781.174,00							9.992.518.904,60		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00							11.090.129.317,60		
	5.01	PERENCANAAN							8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	-954.781.174,00							9.992.518.904,60		
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	17.200.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	450.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			19.415.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	0,00	75.300.000,00	75.300.000,00	75.300.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			82.830.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	NON URUSAN							9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00							11.090.129.317,60		
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	-954.781.174,00							9.992.518.904,60		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							9.492.250.234,00	10.285.561.948,00	8.802.285.571,00	-689.964.663,00							11.090.129.317,60		
	5.01	PERENCANAAN							8.953.952.832,00	9.137.951.535,00	7.999.171.658,00	-954.781.174,00							9.992.518.904,60		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Bappedalitbang				2 Laporan	2 Laporan	275.590.000,00	242.120.000,00	242.120.000,00	-33.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Bappedalitbang		256.332.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	75.590.000,00	42.120.000,00	42.120.000,00	-33.470.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			46.332.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				100 %	100 %	1.687.371.022,00	1.574.838.777,00	1.052.830.000,00	112.430.563,00							1.799.801.585,00			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan				46 Perangkat Daerah 5 Dokumen undefined aplikasi	5 Dokumen	1.191.767.841,00	1.271.635.596,00	879.196.200,00	-312.571.641,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Mayarakat dan Pemerintah Kabupaten Karo		1.310.944.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																				
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	2 Berita Acara	35.000.000,00	50.000.000,00	32.176.280,00	-2.823.720,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			38.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																				
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	40.000.000,00	55.000.000,00	23.224.555,00	-16.775.445,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	133.145.990,00	225.545.990,00	42.741.755,00	-90.404.235,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			146.460.589,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	983.621.851,00	941.089.606,00	781.053.610,00	-202.568.241,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.081.984.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	155.500.000,00	63.100.000,00	43.026.190,00	-112.473.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karo		171.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	155.500.000,00	63.100.000,00	43.026.190,00	-112.473.810,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			171.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi yang diterapkan				sistem	2 sistem	340.103.181,00	240.103.181,00	130.607.610,00	-209.495.571,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemerintah Kabupaten Karo		317.806.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	340.103.181,00	240.103.181,00	130.607.610,00	-209.495.571,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			317.806.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.304.847.611,00	1.235.844.251,00	828.135.317,00	130.484.762,00							1.435.332.373,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase indikator sasaran RPJMDBidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai 80% Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00	371.315.600,00	-128.684.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perangkat Daerah dan masyarakat		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	56.600.000,00	56.600.000,00	37.476.722,00	-19.123.278,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			62.260.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	78.300.000,00	78.300.000,00	52.576.000,00	-25.724.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			86.130.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	118.528.000,00	118.528.000,00	79.108.803,00	-39.419.197,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			130.380.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	7 Laporan	246.572.000,00	246.572.000,00	202.154.075,00	-44.417.925,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			271.229.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase indikator sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang mencapai 80% Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	523.511.166,00	454.507.806,00	278.961.872,00	-244.549.294,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perangkat Daerah dan masyarakat)		575.862.283,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	236.880.347,00	236.880.347,00	152.575.521,00	-84.304.826,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			260.568.382,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.100.000,00	-6.900.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	101.000.000,00	48.472.272,00	-101.527.728,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	28.484.000,00	-16.516.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			49.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	32.300.000,00	12.296.640,00	10.313.560,00	-21.986.440,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	44.330.819,00	44.330.819,00	31.016.519,00	-13.314.300,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			48.763.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase indikator sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai 80% Tingkat Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tingkat Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100 Persen 95 Persen	100 Persen 95 Persen	281.336.445,00	281.336.445,00	177.857.845,00	-103.478.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perangkat Daerah dan masyarakat		309.470.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	105.836.445,00	105.836.445,00	63.369.445,00	-42.467.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			116.420.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	66.855.750,00	-23.144.250,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	21.415.020,00	-21.584.980,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			47.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	42.500.000,00	42.500.000,00	26.217.630,00	-16.282.370,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			46.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							538.297.402,00	1.147.610.413,00	803.113.913,00	264.816.511,00							1.097.610.413,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah				3,75 Indeks	3,75 Indeks	538.297.402,00	1.147.610.413,00	803.113.913,00	559.313.011,00							1.097.610.413,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Policy Brief Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				1 Kebijakan	1 Kebijakan	190.275.081,00	262.237.681,00	203.819.681,00	13.544.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perangkat Daerah dan masyarakat		261.737.681,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				3 Laporan	3 Laporan	190.275.081,00	262.237.681,00	203.819.681,00	13.544.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			261.737.681,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah instansi yang mendapatkan peringkat Indeks Inovasi "Sangat Inovatif" dan "Inovatif"				Si 7 dan 17 Indeks Inovasi	18 Instansi Inovasi	348.022.321,00	885.372.732,00	599.294.232,00	251.271.911,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Perangkat Daerah dan masyarakat		835.872.732,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	348.022.321,00	885.372.732,00	599.294.232,00	251.271.911,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			835.872.732,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	-1.672.419.064,00						299.012.725.170,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	-1.672.419.064,00							299.012.725.170,00		
	5.02	KEUANGAN							299.007.725.170,00	301.447.389.438,00	297.335.306.106,00	-1.672.419.064,00							299.012.725.170,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	5.180.756.299,00	5.722.743.287,00	5.507.334.635,00	5.000.000,00							5.185.756.299,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.696.000,00	-2.304.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.696.000,00	-2.304.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	4.036.739.821,00	4.577.464.989,00	4.577.464.989,00	540.725.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		4.036.739.821,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.746.219.821,00	4.295.104.989,00	4.295.104.989,00	548.885.168,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.746.219.821,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	290.520.000,00	282.360.000,00	282.360.000,00	-8.160.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			290.520.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	35.100.000,00	-9.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	53 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	35.100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	659.456.478,00	612.118.298,00	408.913.646,00	-250.542.832,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		659.456.478,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.570.105,00	6.570.105,00	6.570.105,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.570.105,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	206.570.105,00	166.022.005,00	147.979.881,00	-58.590.224,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			206.570.105,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	18.517.690,00	18.625.790,00	18.625.790,00	108.100,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.517.690,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	61.442.515,00	61.442.515,00	50.421.212,00	-11.021.303,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			61.442.515,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				217 Laporan	217 Laporan	366.356.063,00	359.457.883,00	185.316.658,00	-181.039.405,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			366.356.063,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	315.500.000,00	315.500.000,00	315.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		315.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			19.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.740.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.740.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	283.560.000,00	283.560.000,00	283.560.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			283.560.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	109.060.000,00	157.660.000,00	157.660.000,00	48.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Pegawai BKAD Kabupaten Karo		109.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	5 Unit	109.060.000,00	157.660.000,00	157.660.000,00	48.600.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			109.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah				WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	292.908.007.502,00	294.815.695.622,00	291.253.496.974,00	0,00							292.908.007.502,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tercapainya optimalisasi pengelolaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.074.268.804,00	2.067.759.084,00	1.796.323.579,00	-277.945.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		2.074.268.804,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	205.957.879,00	205.957.879,00	191.581.056,00	-14.376.823,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			205.957.879,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	202.567.900,00	202.567.900,00	190.104.840,00	-12.463.060,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			202.567.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				92 Dokumen	92 Dokumen	161.560.000,00	161.560.000,00	157.912.000,00	-3.648.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			161.560.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				138 Dokumen	138 Dokumen	310.960.000,00	310.960.000,00	305.752.000,00	-5.208.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			310.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	535.225.545,00	531.333.145,00	411.726.359,00	-123.499.186,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			535.225.545,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	552.616.000,00	549.998.680,00	465.244.340,00	-87.371.660,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			552.616.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	14.381.480,00	14.381.480,00	11.042.984,00	-3.338.496,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			14.381.480,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				138 Orang	138 Orang	91.000.000,00	91.000.000,00	62.960.000,00	-28.040.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			91.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Dilakukan				59 OPD	59 OPD	313.026.290,00	309.015.230,00	181.246.691,00	-131.779.599,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		313.026.290,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6000 Dokumen	6000 Dokumen	58.283.278,00	58.283.278,00	38.234.584,00	-20.048.694,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			58.283.278,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	50.128.639,00	50.128.639,00	30.388.639,00	-19.740.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.128.639,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				23 Dokumen	23 Dokumen	54.614.373,00	53.222.633,00	28.523.788,00	-26.090.585,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			54.614.373,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	150.000.000,00	147.380.680,00	84.099.680,00	-65.900.320,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)				2 Laporan	2 Laporan	896.556.204,00	888.600.204,00	625.634.000,00	-270.922.204,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		896.556.204,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	69.166.848,00	69.166.848,00	44.176.809,00	-24.990.039,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			69.166.848,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	242.760.192,00	234.804.192,00	132.985.047,00	-109.775.145,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			242.760.192,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				46 Laporan	46 Laporan	203.477.765,00	203.477.765,00	178.137.148,00	-25.340.617,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			203.477.765,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	231.151.399,00	231.151.399,00	184.744.006,00	-46.407.393,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			231.151.399,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	85.590.990,00	-64.409.010,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BKAD selaku SKPKD				3 Jenis	3 Jenis	289.624.156.204,00	291.550.321.104,00	288.650.292.704,00	-973.863.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Pemerintahan Desa		289.624.156.204,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	274.369.276.200,00	276.295.441.100,00	273.895.412.700,00	-473.863.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			274.369.276.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				4 Laporan	4 Laporan	3.464.550.812,00	3.464.550.812,00	2.964.550.812,00	-500.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.464.550.812,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	11.790.329.192,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.790.329.192,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah				WTP Opini BPK	WTP Opini BPK	918.961.369,00	908.950.529,00	574.474.497,00	0,00							918.961.369,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Tata Kelola Barang Milik Daerah				59 OPD	59 OPD	918.961.369,00	908.950.529,00	574.474.497,00	-344.486.872,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karo		918.961.369,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 dokumen Dokumen	4 Dokumen	65.382.385,00	65.382.385,00	40.385.108,00	-24.997.277,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.382.385,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4179 Dokumen Laporan	200 Dokumen Laporan	257.335.741,00	251.694.901,00	145.763.108,00	-111.572.633,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			257.335.741,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	368.583.948,00	364.213.948,00	240.218.008,00	-128.365.940,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			368.583.948,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				3949 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	102.963.877,00	-47.036.123,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				210 Orang	210 Orang	77.659.295,00	77.659.295,00	45.144.396,00	-32.514.899,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			77.659.295,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	-409.035.464,00						5.638.074.139,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	-409.035.464,00							5.638.074.139,00	
	5.02	KEUANGAN							11.517.918.218,00	11.705.846.464,00	11.108.882.754,00	-409.035.464,00							5.638.074.139,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				83 Indeks	83 Indeks	7.684.846.343,00	7.254.649.589,00	7.050.593.612,00	-3.914.196.543,00							3.770.649.800,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Ealuasi PAD Terlaksananya Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pengelola PAD		25.738.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.738.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan SP2D Tersusunnya Laporan Keuangan terverifikasinya RKA, RKAP, DPA, DPPA				4 berkas 4 Laporan 5500 Berkas	4 berkas 4 Laporan 5500 Berkas	6.527.123.247,00	6.110.426.493,00	6.110.426.493,00	-416.696.754,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		2.879.957.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	6.377.273.247,00	5.960.576.493,00	5.960.576.493,00	-416.696.754,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.791.632.610,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	149.850.000,00	149.850.000,00	149.850.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			88.325.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Tapkin, SOP, Anjab, SKP				Berkan 4	Berkan 4	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		32.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			32.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	565.583.096,00	565.583.096,00	364.227.119,00	-201.355.977,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		330.014.190,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	118.572.090,00	118.572.090,00	102.409.060,00	-16.163.030,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			36.628.595,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	115.180.397,00	115.180.397,00	92.044.450,00	-23.135.947,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			43.385.595,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				161 Laporan	161 Laporan	331.830.609,00	331.830.609,00	169.773.609,00	-162.057.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RKBMD yang dilaporkan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah petugas Operator Komputer, Pemungut Pajak Daerah, Kenersihlan dan Keamanan yang tersedia				26 Orang	26 Orang	464.130.000,00	450.630.000,00	447.930.000,00	-16.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		469.470.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	32.100.000,00	32.100.000,00	32.100.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			26.420.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	412.830.000,00	399.330.000,00	396.630.000,00	-16.200.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			425.050.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	79.290.000,00	79.290.000,00	79.290.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	pegawai BAPENDA		33.470.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	79.290.000,00	79.290.000,00	79.290.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			33.470.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				637054710 00 Rp	637054710 00 Rp	3.833.071.875,00	4.451.196.875,00	4.058.289.142,00	-1.965.647.536,00							1.867.424.339,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikelola				637054710 00 Rp	637054710 00 Rp	3.833.071.875,00	4.451.196.875,00	4.058.289.142,00	225.217.267,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -	wajib pajak dan pegawai bapenda		1.867.424.339,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	74.515.215,00	74.515.215,00	67.100.215,00	-7.415.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	101.316.745,00	381.316.745,00	260.102.480,00	158.785.735,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	473.001.745,00	398.920.456,00	318.920.456,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	368.596.699,00	368.596.699,00	314.816.899,00	-53.779.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			318.596.699,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				75000 Obyek Pajak	75000 Obyek Pajak	1.032.897.150,00	1.032.897.150,00	981.161.890,00	-51.735.260,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	4 Dokumen	33.000.000,00	33.000.000,00	16.106.110,00	-16.893.890,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				5000 Dokumen	5000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	26.796.995,00	-23.203.005,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.092.746.066,00	2.037.869.321,00	1.993.284.097,00	-99.461.969,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	- -			1.278.827.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7.058.482.441,00	7.107.098.224,00	7.094.008.419,00	35.525.978,00						10.250.391.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.058.482.441,00	7.107.098.224,00	7.094.008.419,00	35.525.978,00							10.250.391.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.313.482.441,00	6.362.098.224,00	6.416.901.219,00	103.418.778,00							5.464.387.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				89 Indeks	89 Indeks	4.707.154.876,00	4.774.940.659,00	4.766.577.354,00	-872.817.876,00							3.834.337.000,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Fisik/Non Fisik, Laporan Pajak Pusat, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Pengeluaran yang Disusun Penatausahaan SP2D Belanja, Gaji dan Tunjangan Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Usulan Renstra, Renja, RKA, RKAP, DPA, DPAP yang Terverifikasi				100 % 30 Dokumen 40 Dokumen 7 Dokumen	100 % 30 Dokumen 40 Dokumen 7 Dokumen	4.202.347.226,00	4.270.133.009,00	4.270.133.009,00	67.785.783,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		3.341.137.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.082.587.596,00	4.150.373.379,00	4.150.373.379,00	67.785.783,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.221.137.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				120 Dokumen	120 Dokumen	119.759.630,00	119.759.630,00	119.759.630,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian yang Terealisasi Hasil evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai yang Dikelola				310 Dokumen 510 Dokumen	310 Dokumen 510 Dokumen	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	30.240.000,00	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum BKPSDM yang Terkelola Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada BKPSDM Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 12 Dokumen 9 Dokumen	100 % 12 Dokumen 9 Dokumen	246.697.190,00	246.697.190,00	241.326.415,00	-5.370.775,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		286.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	54.147.190,00	54.147.190,00	29.674.415,00	-24.472.775,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.984.000,00	19.984.000,00	19.984.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146 Laporan	146 Laporan	172.566.000,00	172.566.000,00	191.668.000,00	19.102.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			203.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan				2 Unit	2 Unit	126.170.830,00	126.170.830,00	132.258.300,00	6.087.470,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	48.071.530,00	48.071.530,00	49.487.350,00	1.415.820,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			21.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	78.099.300,00	78.099.300,00	82.770.950,00	4.671.650,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Internet yang Tersedia Tenaga Operator Komputer, Supir Kendaraan Dinas dan Petugas Kebersihan yang Tersedia				12 Bulan 48 Orang	12 Bulan 48 Orang	49.079.630,00	49.079.630,00	36.429.630,00	-12.650.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		97.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			20.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	29.879.630,00	29.879.630,00	17.229.630,00	-12.650.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKPSDM				2 Dokumen	2 Dokumen	52.620.000,00	52.620.000,00	56.190.000,00	3.570.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN BKPSDM		48.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.420.000,00	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	17.770.000,00	3.570.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			6.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,dan Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah				36 dan 323 jabatan	36 dan 323 jabatan	1.606.327.565,00	1.587.157.565,00	1.650.323.865,00	23.722.435,00							1.630.050.000,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang Dikelola dan Dikembangkan Persentase Pemuktahiran Data Pegawai Persentase Penetapan Pemberhentian dan Pensiun yang Diproses Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 % 5 %	100 % 5 %	489.710.000,00	489.710.000,00	294.372.000,00	-195.338.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		620.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	309.710.000,00	309.710.000,00	182.526.000,00	-127.184.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			490.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	9.450.000,00	-15.550.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	155.000.000,00	102.396.000,00	-52.604.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Keterisian Jabatan				100 %	100 %	456.300.000,00	456.300.000,00	932.912.600,00	476.612.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		390.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	150 Dokumen	33.790.040,00	33.790.040,00	17.345.040,00	-16.445.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				900 Dokumen	900 Dokumen	46.130.850,00	46.130.850,00	23.880.450,00	-22.250.400,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	376.379.110,00	376.379.110,00	891.687.110,00	515.308.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				100 % 120 Kegiatan	100 % 120 Kegiatan	386.514.685,00	367.344.685,00	224.888.385,00	-161.626.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	50 Orang	96.514.685,00	96.514.685,00	62.226.385,00	-34.288.300,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	237.250.000,00	143.738.000,00	-106.262.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				40 Orang	40 Orang	40.000.000,00	33.580.000,00	18.924.000,00	-21.076.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Cuti yang Diproses Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal berdasarkan Tugas Belajar dan Izin Belajar Kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang Diproses Persentase ASN yang Menyampaikan SKP Persentase Pengukuran IP ASN melalui Dimensi Kinerja dan Disiplin Rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 % 100 Orang 100 Persentase 19 kasus 1 Dokumen	100 % 100 Orang 100 Persentase 19 kasus 1 Dokumen	273.802.880,00	273.802.880,00	198.150.880,00	-75.652.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		320.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	21.750.000,00	-38.250.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				55 Orang	55 Orang	121.945.000,00	121.945.000,00	115.745.000,00	-6.200.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	500 Orang	33.857.880,00	33.857.880,00	30.623.880,00	-3.234.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				25 Laporan	25 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	28.045.000,00	-10.955.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				25 Laporan	25 Laporan	19.000.000,00	19.000.000,00	1.987.000,00	-17.013.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							745.000.000,00	745.000.000,00	677.107.200,00	-67.892.800,00							4.786.004.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/ Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				12,26 15 15/12,26 % %/%	12,26 15 15/12,26 % %/%	745.000.000,00	745.000.000,00	677.107.200,00	4.041.004.000,00							4.786.004.000,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rata-rata capaian kinerja Indikator sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	25.575.000,00	-19.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				35 Orang	35 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	25.575.000,00	-19.425.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Aplikasi Pendataan Calon Peserta dan Daftar Kebutuhan Diklat Pengembangan Kompetensi Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Diklat Perjenjangan dan Sertifikas Koordinasi dengan Stekholder Terkait dalam rangka Perencanaan dan/atau Pelaksanaan Diklat Perjenjangan dan Sertifikasi				14 Dokumen 1 Aplikasi 6 Instansi	14 Dokumen 1 Aplikasi 6 Instansi	700.000.000,00	700.000.000,00	651.532.200,00	-48.467.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Pemerintah Kabupaten Karo		4.741.004.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Laporan	6 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	651.532.200,00	-48.467.800,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.741.004.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		INSPEKTORAT DAERAH							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00						29.119.054.673,00			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00						29.119.054.673,00			
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00						29.119.054.673,00			
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	8.076.224.861,00	7.615.507.115,00	7.316.946.494,00	9.823.159.674,00							17.899.384.535,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.220.520.716,00	6.476.611.311,00	6.494.881.311,00	274.360.595,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		11.678.588.135,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	0,00	6.372.211.311,00	6.372.211.311,00	6.372.211.311,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			11.514.555.695,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.638.605,00	104.400.000,00	122.670.000,00	-62.968.605,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			164.032.440,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	444.260.000,00	368.370.000,00	243.610.465,00	-200.649.535,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		953.060.852,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	118.800.000,00	118.800.000,00	76.680.000,00	-42.120.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			149.815.662,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	325.460.000,00	249.570.000,00	166.930.465,00	-158.529.535,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			803.245.190,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	918.979.054,00	540.310.713,00	381.531.232,00	-537.447.822,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		1.902.611.916,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				05 Paket	05 Paket	587.203.344,00	234.215.003,00	230.435.522,00	-356.767.822,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			787.012.690,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	38.041.040,00	38.041.040,00	38.041.040,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			177.007.375,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	4.115.670,00	4.115.670,00	4.115.670,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			36.024.779,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	NON URUSAN							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							12.440.877.275,00	9.690.028.215,00	8.414.134.654,00	-4.026.742.621,00							29.119.054.673,00	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			19.059.920,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.930.000,00	25.250.000,00	25.250.000,00	-25.680.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			84.907.152,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	236.890.000,00	236.890.000,00	81.890.000,00	-155.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			798.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	262.250.000,00	0,00	0,00	-262.250.000,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		2.688.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.422.420.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				81 Unit	81 Unit	87.250.000,00	0,00	0,00	-87.250.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			266.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	137.127.091,00	137.127.091,00	107.483.486,00	-29.643.605,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Inspektorat Daerah		583.415.632,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	19.200.000,00	-960.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			284.168.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	29.500.000,00	29.500.000,00	10.000.000,00	-19.500.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			93.170.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				226684846 Laporan	226684846 Laporan	87.467.091,00	87.467.091,00	78.283.486,00	-9.183.605,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			206.077.132,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	93.088.000,00	93.088.000,00	89.440.000,00	-3.648.000,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kendaraan Dinas Inspektorat Daerah		93.088.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	93.088.000,00	93.088.000,00	89.440.000,00	-3.648.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			93.088.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan / Persentase pelanggaran pegawai				92/0 % /%	92/0 % /%	3.492.063.001,00	1.569.237.100,00	837.625.060,00	6.038.333.415,00							9.530.396.416,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				100 %	100 %	1.877.644.275,00	1.194.237.100,00	658.207.560,00	-1.219.436.715,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo		9.186.386.356,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				24 Laporan	24 Laporan	238.093.425,00	150.000.000,00	74.997.000,00	-163.096.425,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.872.843.323,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				20 Laporan	20 Laporan	367.013.600,00	345.725.000,00	215.362.500,00	-151.651.100,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.251.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	194.914.250,00	124.914.000,00	62.457.000,00	-132.457.250,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			585.622.165,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				2 Laporan	3 Laporan	42.000.000,00	33.275.000,00	33.150.000,00	-8.850.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				5 Laporan	5 Laporan	623.000.000,00	201.821.740,00	97.136.870,00	-525.863.130,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.302.548.977,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	200.000.000,00	120.000.000,00	38.980.000,00	-161.020.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			682.054.446,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				121 Dokumen	121 Dokumen	212.623.000,00	218.501.360,00	136.124.190,00	-76.498.810,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.458.902.445,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100 %	100 %	1.614.418.726,00	375.000.000,00	179.417.500,00	-1.435.001.226,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo		344.010.060,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				18 Laporan	18 Laporan	135.060.000,00	105.000.000,00	55.672.500,00	-79.387.500,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			182.000.740,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	1.479.358.726,00	270.000.000,00	123.745.000,00	-1.355.613.726,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			162.009.320,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan/Persentase pelanggaran pegawai/				92/0 %/%	92/0 %/%	872.589.413,00	505.284.000,00	259.563.100,00	816.684.309,00							1.689.273.722,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100 %	100 %	40.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo		179.140.947,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			71.016.337,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	20.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			108.124.610,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				100 %	100 %	832.589.413,00	499.284.000,00	249.563.100,00	-583.026.313,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo		1.510.132.775,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	179.834.180,00	179.834.000,00	0,00	-179.834.180,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			505.649.695,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	167.739.000,00	103.739.000,00	68.443.100,00	-99.295.900,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			311.113.264,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	319.711.808,00	190.711.000,00	168.670.000,00	-151.041.808,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			660.094.816,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				46 perangkat daerah	46 perangkat daerah	165.304.425,00	25.000.000,00	12.450.000,00	-152.854.425,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.275.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KABANJAHE							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00						15.373.972.396,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	6.570.124.232,00	6.863.624.406,00	6.824.633.486,00	1.335.671.884,00							7.905.796.116,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja yang Dilakukan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				150 Penata usahaan 4 Dokumen 4 Laporan	100 %	5.561.999.478,00	5.855.499.652,00	5.855.492.652,00	293.493.174,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		6.145.487.009,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	5.273.484.478,00	5.566.984.652,00	5.566.984.652,00	293.500.174,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.854.679.009,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	288.515.000,00	288.515.000,00	288.508.000,00	-7.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			290.808.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		62.208.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				58 Paket	58 Paket	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			62.208.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Paket	100 %	124.249.754,00	124.249.754,00	85.272.834,00	-38.976.920,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		223.288.819,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.481.500,00	3.481.500,00	3.481.500,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			6.739.810,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45 Paket	55.294.320,00	55.294.320,00	42.033.860,00	-13.260.460,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			107.638.355,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	8.393.334,00	8.393.334,00	8.393.334,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			13.211.764,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.872.600,00	8.872.600,00	7.057.140,00	-1.815.460,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			15.365.156,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				274 Laporan	140 Laporan	48.208.000,00	48.208.000,00	24.307.000,00	-23.901.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			80.333.734,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Laporan	100 %	790.585.000,00	790.585.000,00	790.578.000,00	-7.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		1.239.355.008,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			18.662.400,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			7.319.808,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	775.055.000,00	775.055.000,00	775.048.000,00	-7.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.213.372.800,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	44.570.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		235.457.280,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	44.570.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			235.457.280,00	KECAMATAN KABANJAHE	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	47.124.000,00	47.124.000,00	33.615.000,00	88.122.280,00							135.246.280,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	40.479.000,00	40.479.000,00	26.970.000,00	-13.509.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		120.846.280,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	20.520.000,00	20.520.000,00	11.856.000,00	-8.664.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			38.465.280,00	KECAMATAN KABANJAHE	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.959.000,00	19.959.000,00	15.114.000,00	-4.845.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			82.381.000,00	KECAMATAN KABANJAHE	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				95 %	1 Urusan	6.645.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		14.400.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.645.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			14.400.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				-	13 Desa/Ke-lurahan	19.950.000,00	19.950.000,00	16.530.000,00	-3.420.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		20.400.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.950.000,00	19.950.000,00	16.530.000,00	-3.420.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			20.400.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada				2/2/2 Perda /Perkada/Kegiatan	2/2/2 Perda /Perkada/Kegiatan	7.100.000,00	4.066.840,00	2.000.000,00	8.407.000,00							15.507.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Kegiatan	1 Kali	7.100.000,00	4.066.840,00	2.000.000,00	-5.100.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		15.507.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.100.000,00	4.066.840,00	2.000.000,00	-5.100.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			15.507.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan				2 Urusan	2 Urusan	28.629.750,00	28.629.750,00	25.779.150,00	7.353.250,00							35.983.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				200 Orang	1 Urusan	28.629.750,00	28.629.750,00	25.779.150,00	-2.850.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		35.983.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	150 Orang	28.629.750,00	28.629.750,00	25.779.150,00	-2.850.600,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			35.983.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi				8 Pemerintahan Desa	8 Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.440.000,00							3.440.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8 Pemerintahan Desa	8 Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Pegawai Kantor Camat Kabanjahe		3.440.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			3.440.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KELURAHAN KAMPUNG DALAM							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				17 Kegiatan	5 Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.008.019.501,00	8.019.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kelurahan Kampung Dalam		7.257.600.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	6 Unit	541.600.000,00	541.600.000,00	541.600.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			870.912.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	258.400.000,00	258.400.000,00	258.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			580.608.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KELURAHAN GUNG NEGERI							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00					15.373.972.396,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				-	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	5 Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.008.019.501,00	8.019.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kelurahan Gung Negeri		7.257.600.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	510.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			1.016.064.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	290.000.000,00	290.000.000,00	285.980.000,00	-4.020.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			435.456.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KELURAHAN PADANG MAS							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00					15.373.972.396,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				17 Kegiatan	5 Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.008.019.501,00	8.019.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kelurahan Padang Mas		7.257.600.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	579.000.000,00	579.000.000,00	579.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			870.912.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	221.000.000,00	221.000.000,00	273.299.501,00	52.299.501,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			580.608.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KELURAHAN LAU CIMBA							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00					15.373.972.396,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				19 Kegiatan	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				17 Kgiatan	5 Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.008.019.501,00	8.019.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kelurahan Lau Cimba		7.257.600.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	674.240.000,00	674.240.000,00	674.240.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			1.016.064.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	125.760.000,00	125.760.000,00	94.500.000,00	-31.260.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			435.456.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KELURAHAN GUNG LETO							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
	7.01	KECAMATAN							10.674.927.982,00	10.965.394.996,00	10.912.577.137,00	237.649.155,00							15.373.972.396,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				-	19 Kegiatan	4.019.950.000,00	4.019.950.000,00	4.024.549.501,00	3.258.050.000,00							7.278.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	5 Kelurahan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.008.019.501,00	8.019.501,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kelurahan Gung Leto		7.257.600.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	4 Unit	555.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			1.016.064.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	245.000.000,00	245.000.000,00	236.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			435.456.000,00	KECAMATAN KABANJAHE
		KECAMATAN BERASTAGI							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7.01	KECAMATAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	89,20 92 Indeks Indeks	5.501.204.288,00	5.540.176.685,00	5.488.654.597,00	2.489.308.803,00							7.990.513.091,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 % 14 Orang/b ulan	4.531.125.518,00	4.570.569.115,00	4.570.569.115,00	39.443.597,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kantor Camat Berastagi		6.582.453.091,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	4.281.062.759,00	4.320.506.356,00	4.320.506.356,00	39.443.597,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.315.933.091,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.062.759,00	250.062.759,00	250.062.759,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			266.520.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 % 1 Paket	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kantor Camat Berastagi		100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	35.200.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 % 5 Jenis	147.898.770,00	147.427.570,00	95.905.482,00	-51.993.288,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASn Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		275.500.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.813.090,00	5.813.090,00	5.813.090,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	61.435.320,00	61.435.320,00	45.873.098,00	-15.562.222,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.090.360,00	5.090.360,00	4.830.494,00	-259.866,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.500.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.500.000,00	4.500.000,00	2.404.000,00	-2.096.000,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.646.000,00	-2.354.000,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.060.000,00	65.588.800,00	34.338.800,00	-31.721.200,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			85.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 % 3 Jenis	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kantor Camat Berastagi dan Masyarakat Kecamatan Berastagi		300.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			200.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu terlaksananya kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatanpada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 % 12 BulanTe riaksanany a P	628.810.000,00	628.810.000,00	628.810.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kantor Camat Berastagi		661.920.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			21.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	565.740.000,00	565.740.000,00	565.740.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			580.920.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Rata rata capaian kinerja indikator sub kegiatan pada Subkegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 % 2 Jenis	37.170.000,00	37.170.000,00	37.170.000,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kantor Camat Berastagi		70.640.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.170.000,00	37.170.000,00	37.170.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.640.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	89,20 Indeks	114.933.010,00	112.419.010,00	88.547.045,00	285.066.990,00							400.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	2 kali	70.933.010,00	70.933.010,00	61.247.045,00	-9.685.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Bersatagi		250.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	14.995.560,00	14.995.560,00	14.995.560,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	55.937.450,00	55.937.450,00	46.251.485,00	-9.685.965,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 %	2 Urusan	34.000.000,00	34.000.000,00	23.800.000,00	-10.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Berastagi		80.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	23.800.000,00	-10.200.000,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				100 %	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Berastagi		50.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				100 %	100 %	5.000.000,00	2.486.000,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Berastagi		20.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	2.486.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertipan Umum Masyarakat di tingkat Kecamatan				2/2/2 Perda /Perkada/Kegiatan	100 persen	13.944.819,00	13.944.819,00	8.820.000,00	46.055.181,00							60.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	1 Kali	13.944.819,00	13.944.819,00	8.820.000,00	-5.124.819,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Berastagi		60.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13.944.819,00	13.944.819,00	8.820.000,00	-5.124.819,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan				2 Urusan	100 2 persen Urusan	63.197.450,00	63.197.450,00	60.322.250,00	36.802.550,00							100.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 % 1 Urusan	63.197.450,00	63.197.450,00	60.322.250,00	-2.875.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Ktr Camat Berastagi dan Masyarakat		100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	63.197.450,00	63.197.450,00	60.322.250,00	-2.875.200,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
		KELURAHAN TAMBAK LAU MULGAP II							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7.01	KECAMATAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan				19 Kegiatan	19 4 Kegiatan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	1.431.504.301,00							4.631.504.301,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 % 4 Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	-75.034.371,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Berastagi		4.631.504.301,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			800.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	31.921.685,00	-18.078.315,00	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			361.504.301,00	KECAMATAN BERASTAGI
		KELURAHAN TAMBAK LAU MULGAP I							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00					13.182.017.392,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7.01	KECAMATAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan				19 Kegiatan	19 4 Kegiatan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	1.431.504.301,00							4.631.504.301,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 % 4 Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	-75.034.371,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Berastagi		4.631.504.301,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			900.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	30.359.334,00	-19.640.666,00	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			250.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
		KELURAHAN GUNDALING II							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00					13.182.017.392,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7.01	KECAMATAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan				19 Kegiatan	19 4 Kegiatan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	1.431.504.301,00							4.631.504.301,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 % 4 Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	-75.034.371,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Berastagi		4.631.504.301,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			1.000.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	32.149.910,00	-17.850.090,00	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			200.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
		KELURAHAN GUNDALING I							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00					13.182.017.392,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
	7.01	KECAMATAN							8.893.279.567,00	8.929.737.964,00	8.771.309.521,00	-121.970.046,00							13.182.017.392,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Tingkat Pemeberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan				19 Kegiatan	19 4 Kegiatan Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	1.431.504.301,00							4.631.504.301,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang diberdayakan Rata- rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 % 4 Kelurahan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.124.965.629,00	-75.034.371,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Berastagi		4.631.504.301,00	KECAMATAN BERASTAGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			900.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	30.534.700,00	-19.465.300,00	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			220.000.000,00	KECAMATAN BERASTAGI
		KECAMATAN BARUSJAHE								2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	-72.899.472,00						2.761.592.649,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	-72.899.472,00							2.761.592.649,00	
	7.01	KECAMATAN							2.860.510.034,00	2.838.933.657,00	2.787.610.562,00	-72.899.472,00							2.761.592.649,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat Daerah				92 Indeks	100 %	2.751.728.449,00	2.729.957.372,00	2.704.237.837,00	-117.636.097,00							2.634.092.352,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Laporan	100 %	2.513.658.161,00	2.493.075.784,00	2.493.075.784,00	-20.582.377,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		2.449.193.235,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	2.468.736.641,00	2.448.154.264,00	2.448.154.264,00	-20.582.377,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.376.922.735,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	44.921.520,00	44.921.520,00	44.921.520,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			72.270.500,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	100 %	21.840.000,00	21.840.000,00	20.160.000,00	-1.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		20.250.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	26 Paket	21.840.000,00	21.840.000,00	20.160.000,00	-1.680.000,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.250.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Rapat Koordinasi dan Konsultasi				6 Paket	100% undefined 6 Paket	75.473.704,00	74.285.004,00	49.981.969,00	-25.491.735,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		58.264.817,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.866.189,00	1.258.998,00	1.258.998,00	-607.191,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.866.189,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				615 Paket	615 Paket	14.524.285,00	15.020.265,00	12.552.090,00	-1.972.195,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.409.985,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	9.644.330,00	9.642.841,00	9.642.841,00	-1.489,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.687.743,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1780 Paket	1780 Paket	2.482.900,00	2.482.900,00	2.238.040,00	-244.860,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.482.900,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	46.956.000,00	45.880.000,00	24.290.000,00	-22.666.000,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.818.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Unit	100 %	16.114.084,00	16.114.084,00	16.114.084,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		18.100.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.114.084,00	16.114.084,00	16.114.084,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.100.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Operator, Jaga Malam dan Tenaga Kebersihan				12 Laporan	100 % 12 Laporan	91.172.500,00	91.172.500,00	91.436.000,00	263.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		64.454.300,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.663.500,00	263.500,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			16.500.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.840.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.352.500,00	75.352.500,00	75.352.500,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.114.300,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Mobil Dinas dan Bangunan Kantor terawat				1 Unit	100 % 1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Barusjahe		23.830.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			23.830.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM				92 Indeks	3,56 Indeks	53.732.830,00	53.704.700,00	45.198.900,00	3.668.718,00							57.401.548,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	29.108.830,00	29.080.700,00	20.574.900,00	-8.533.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		33.221.548,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.450.950,00	10.450.950,00	10.240.000,00	-210.950,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.720.400,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.657.880,00	18.629.750,00	10.334.900,00	-8.322.980,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.501.148,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				12 Laporan	1 Urusan	24.624.000,00	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		24.180.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.624.000,00	24.624.000,00	24.624.000,00	0,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			24.180.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				1 kegiatan	80 %	7.533.950,00	7.533.950,00	5.146.950,00	2.806.850,00							10.340.800,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan				1 Kegiatan	19 Pemerin-tahan Desa	7.533.950,00	7.533.950,00	5.146.950,00	-2.387.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		10.340.800,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.533.950,00	7.533.950,00	5.146.950,00	-2.387.000,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.340.800,00	KECAMATAN BARUSJAHE
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan				1 Urusan	70 %	36.509.855,00	36.732.685,00	29.743.925,00	-5.792.017,00							30.717.838,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan				1 Kegiatan	1 Urusan	36.509.855,00	36.732.685,00	29.743.925,00	-6.765.930,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		30.717.838,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	36.509.855,00	36.732.685,00	29.743.925,00	-6.765.930,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.717.838,00	KECAMATAN BARUSJAHE
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rata-Rata Capaian Peningkatan Kapasitas Apartur Desa dan Fasilitasi Tata Kelola Desa				19 Pemerin-tahan Desa	75 %	11.004.950,00	11.004.950,00	3.282.950,00	18.035.161,00							29.040.111,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya				19 Pemerin tahan Desa	19 Pemerin tahan Desa	11.004.950,00	11.004.950,00	3.282.950,00	-7.722.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Barusjahe		29.040.111,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				38 Dokumen	38 Dokumen	5.082.950,00	5.082.950,00	1.746.950,00	-3.336.000,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			13.890.111,00	KECAMATAN BARUSJAHE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				38 Dokumen	38 Dokumen	5.922.000,00	5.922.000,00	1.536.000,00	-4.386.000,00	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.150.000,00	KECAMATAN BARUSJAHE
		KECAMATAN TIGA PANAHH							3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	-135.315.644,00						3.638.610.571,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	-135.315.644,00							3.638.610.571,00	
	7.01	KECAMATAN							3.093.036.945,00	3.057.386.301,00	2.957.721.301,00	-135.315.644,00							3.638.610.571,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat				92 Indeks	100 %	2.849.300.465,00	2.813.649.821,00	2.772.517.841,00	557.584.983,00							3.406.885.448,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4 Laporan	100 %	2.545.189.699,00	2.510.877.155,00	2.510.877.155,00	-34.312.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		3.125.700.531,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.502.709.699,00	2.468.397.155,00	2.468.397.155,00	-34.312.544,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.027.960.531,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.480.000,00	42.480.000,00	42.480.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			97.740.000,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 Dokumen	100 %	20.160.000,00	20.160.000,00	32.160.000,00	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN SKPD Kecamatan Tigapanah		24.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.160.000,00	20.160.000,00	32.160.000,00	12.000.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			24.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Paket	100 %	95.054.991,00	93.716.891,00	60.084.911,00	-34.970.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN SKPD Kecamatan Tigapanah		103.114.779,00	KECAMATAN TIGA PANAHH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.144.670,00	1.144.670,00	1.144.670,00	0,00	Kab. Karo, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.067.514,00	KECAMATAN TIGA PANAHH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.788.255,00	17.788.255,00	12.338.295,00	-5.449.960,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			40.638.855,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.723.466,00	5.723.466,00	4.006.426,00	-1.717.040,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			7.612.410,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.493.600,00	3.493.600,00	2.445.520,00	-1.048.080,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.370.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				256 Laporan	141 Laporan	66.905.000,00	65.566.900,00	40.150.000,00	-26.755.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.426.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	25.890.869,00	25.890.869,00	26.070.869,00	180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN SKPD Kecamatan Tigapanah		35.140.138,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.890.869,00	25.890.869,00	26.070.869,00	180.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			35.140.138,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	67.200.000,00	67.200.000,00	47.520.000,00	-19.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN SKPD Kecamatan Tigapanah		48.460.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19.500.000,00	19.500.000,00	15.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			13.560.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.140.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	44.940.000,00	44.940.000,00	29.760.000,00	-15.180.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			29.760.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Unit	100 %	95.804.906,00	95.804.906,00	95.804.906,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	ASN SKPD Kecamatan Tigapanah		70.470.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.804.906,00	45.804.906,00	45.804.906,00	0,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			33.470.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			37.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 indeks	128.924.000,00	128.924.000,00	102.757.520,00	-18.683.600,00							110.240.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	80.924.000,00	80.924.000,00	69.157.520,00	-11.766.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		62.720.400,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.298.000,00	25.298.000,00	23.886.200,00	-1.411.800,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			41.720.400,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	55.626.000,00	55.626.000,00	45.271.320,00	-10.354.680,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			21.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	33.600.000,00	-14.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		47.520.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	33.600.000,00	-14.400.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			47.520.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				10 Kegiatan	100 %	15.205.800,00	15.205.800,00	7.554.060,00	-5.205.800,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan pada perangkat daerah				10 Kegiatan	10 Kegiatan	15.205.800,00	15.205.800,00	7.554.060,00	-7.651.740,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		10.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	15.205.800,00	15.205.800,00	7.554.060,00	-7.651.740,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			10.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				90 %	100 %	16.907.000,00	16.907.000,00	10.968.200,00	9.653.400,00							26.560.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				90 %	1 Laporan	16.907.000,00	16.907.000,00	10.968.200,00	-5.938.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		26.560.400,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	16.907.000,00	16.907.000,00	10.968.200,00	-5.938.800,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			26.560.400,00	KECAMATAN TIGA PANAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	100 %	67.699.680,00	67.699.680,00	54.913.680,00	5.224.643,00							72.924.323,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				-	1 Urusan	67.699.680,00	67.699.680,00	54.913.680,00	-12.786.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		72.924.323,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	67.699.680,00	67.699.680,00	54.913.680,00	-12.786.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			72.924.323,00	KECAMATAN TIGA PANAH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan				29 Desa	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	9.010.000,00	-3.000.000,00							12.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				29 Desa	29 Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	9.010.000,00	-5.990.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Masyarakat Kecamatan Tigapanah		12.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				58 Dokumen	58 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.010.000,00	-5.990.000,00	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			12.000.000,00	KECAMATAN TIGA PANAH
		KECAMATAN MEREK							3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	-155.176.036,00						5.709.289.444,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	-155.176.036,00							5.709.289.444,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.216.676,00	3.026.304.110,00	2.949.040.640,00	-155.176.036,00							5.709.289.444,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan				laporan bulan	laporan bulan	2.939.816.676,00	2.861.904.110,00	2.818.858.640,00	2.587.072.768,00							5.526.889.444,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terverifikasinya usulan RKA,RKAP,DPA dan DPPA Terlaksananya Penatausahaan SP2D, dan Tersusunya Laporan Keuangan				100 PERSEN	100 PERSEN	2.673.902.768,00	2.597.490.202,00	2.597.110.202,00	-76.792.566,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Merek		2.673.902.768,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 orang O rang/bulan	24 orang O rang/bulan	2.621.762.768,00	2.545.350.202,00	2.545.350.202,00	-76.412.566,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.621.762.768,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.140.000,00	52.140.000,00	51.760.000,00	-380.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			52.140.000,00	KECAMATAN MEREK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaiaan Berupa usulan kenaikan Pangkat,Mutasi,Gaji Berkala ,Pemberhentiaan /Pensisun,Pembuatan kartu Suami,Pembuatan Kartu Isrtri,Tabungan asuransi ,Pensiunan,Pengiriman Peserta pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan teknis,dan Urusan Kepegawaian lainnya serta memelihara File Kepegawaian Masing masing pegawai,terkoordinasinya Hasil Evaluasidan penilaian kinerja pegawai,dan mengelola sistem informasi kepegawaian				100 PERSEN	100 PERSEN	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN KANTOR CAMAT MEREK		2.621.762.768,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.621.762.768,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terverivikasinya usulan RKA,RKAP,DPA dan DPPA Terlaksananya Penatausahaan SP2D, dan Tersusunya Laporan Keuangan				100 PERSEN	100 PERSEN	118.103.908,00	116.603.908,00	74.457.413,00	-43.646.495,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN KANTOR CAMAT MEREK		118.103.908,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.995,00	-25.005,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	32.201.376,00	-7.798.624,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	3.051.954,00	3.051.954,00	3.042.588,00	-9.366,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.051.954,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.051.954,00	3.051.954,00	3.051.954,00	0,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.051.954,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	70.000.000,00	68.500.000,00	34.186.500,00	-35.813.500,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			70.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terancang dan terprosesnya pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga badan				100 PERSEN	100 PERSEN	21.000.000,00	21.000.000,00	20.641.900,00	-358.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN KANTOR CAMAT MEREK		21.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	20.641.900,00	-358.100,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			21.000.000,00	KECAMATAN MEREK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.820.000,00	69.820.000,00	69.659.125,00	-160.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merek		69.820.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.300.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	2.840.000,00	-160.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.000.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.520.000,00	59.520.000,00	59.519.125,00	-875,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			59.520.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusi,Terkelola,Terpetli hara,Teramankan dan Tercatatnya,Barang Inventaris Serta Brang Milik Daerah				100 PERSEN	100 PERSEN	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merek		22.300.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			22.300.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	KECAMATAN MEREK	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan				kegiatan Dokumen	kegiatan Dokumen	99.050.000,00	99.050.000,00	77.998.000,00	-4.000.000,00							95.050.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintah Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan				100 PERSEN	100 PERSEN	64.050.000,00	64.050.000,00	49.526.000,00	-14.524.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merek		60.050.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	24.050.000,00	24.050.000,00	18.226.000,00	-5.824.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.050.000,00	KECAMATAN MEREK	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	31.300.000,00	-8.700.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	KECAMATAN MEREK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan				100 PERSEN	100 PERSEN	35.000.000,00	35.000.000,00	28.472.000,00	-6.528.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merek		35.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	28.472.000,00	-6.528.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	KECAMATAN MEREK
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada				perda Kegiatan	perda Kegiatan	15.350.000,00	15.350.000,00	3.720.000,00	22.000.000,00							37.350.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terseleenggaranya Koordinasi Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 PERSEN	100 PERSEN	15.350.000,00	15.350.000,00	3.720.000,00	-11.630.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	KECAMATAN MEREK		37.350.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	15.350.000,00	15.350.000,00	3.720.000,00	-11.630.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			37.350.000,00	KECAMATAN MEREK
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				urusan Laporan	urusan Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.464.000,00	0,00							50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan UmumSesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan				100 PERSEN	100 PERSEN	50.000.000,00	50.000.000,00	48.464.000,00	-1.536.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	MASYARAKAT		50.000.000,00	KECAMATAN MEREK
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	48.464.000,00	-1.536.000,00	Kab. Karo, Merek, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN MEREK
		KECAMATAN MUNTE							2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	-249.259.868,00							2.577.444.611,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	-249.259.868,00							2.577.444.611,00	
	7.01	KECAMATAN							2.607.020.611,00	2.449.121.245,00	2.357.760.743,00	-249.259.868,00							2.577.444.611,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek Kepuasan Masyarakat				84,50 87 92 Indeks indeks Indeks	84,50 87 92 Indeks indeks Indeks	2.409.720.898,00	2.251.821.532,00	2.214.468.373,00	-15.192.000,00							2.394.528.898,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA yang terverifikasi Penatausahaan Sp2D Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2.161.310.898,00	2.004.611.532,00	2.004.559.532,00	-156.751.366,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		2.161.310.898,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	2.114.630.898,00	1.957.931.532,00	1.957.931.532,00	-156.699.366,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.114.630.898,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	46.680.000,00	46.680.000,00	46.628.000,00	-52.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			46.680.000,00	KECAMATAN MUNTE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.960.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		12.768.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	15.960.000,00	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.768.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	100.800.000,00	63.539.261,00	-38.460.739,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		102.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	18.324.261,00	-6.675.739,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	4.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	60.000.000,00	58.800.000,00	29.415.000,00	-30.585.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 Unit	2 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	20.969.580,00	-30.420,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		21.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	20.969.580,00	-30.420,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			21.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Petugas kebersihan, Operator Komputer dan Petugas keamanan Kecamatan Munte yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	73.940.000,00	73.940.000,00	73.930.000,00	-10.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		61.940.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.000.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	44.940.000,00	44.940.000,00	44.940.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			44.940.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Naman Teran				1 Unit	1 Unit	35.510.000,00	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		35.510.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.510.000,00	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.510.000,00	KECAMATAN MUNTE	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Naman Teran Indek Kepuasan Masyarakat				84 92 Indeks Indeks	84 92 Indeks Indeks	111.000.000,00	111.000.000,00	80.880.600,00	-25.714.000,00							85.286.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	61.000.000,00	61.000.000,00	45.752.600,00	-15.247.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		61.000.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.242.000,00	-58.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.300.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.700.000,00	40.700.000,00	25.510.600,00	-15.189.400,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.700.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.128.000,00	-14.872.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		24.286.000,00	KECAMATAN MUNTE	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.128.000,00	-14.872.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			24.286.000,00	KECAMATAN MUNTE	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	16.150.000,00	16.150.000,00	11.342.400,00	10.000.000,00							26.150.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	16.150.000,00	16.150.000,00	11.342.400,00	-4.807.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		26.150.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				22 Lembaga K emasyarak atan	22 Lembaga K emasyarak atan	8.150.000,00	8.150.000,00	5.725.400,00	-2.424.600,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.150.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.617.000,00	-2.383.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.000.000,00	KECAMATAN MUNTE
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan Penegakan Perda dan Perkada				1 2/2/2 Kegiatan Perda/Perk ada/Kegiat an	1 2/2/2 Kegiatan Perda/Perk ada/Kegiat an	18.684.000,00	18.684.000,00	13.160.800,00	0,00							18.684.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.660.000,00	15.660.000,00	11.031.600,00	-4.628.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		15.660.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.660.000,00	15.660.000,00	11.031.600,00	-4.628.400,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.660.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.024.000,00	3.024.000,00	2.129.200,00	-894.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		3.024.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	3.024.000,00	3.024.000,00	2.129.200,00	-894.800,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.024.000,00	KECAMATAN MUNTE
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan kecamatan				1 1 Urusan Urusan	1 1 Urusan Urusan	41.315.713,00	41.315.713,00	30.774.570,00	0,00							41.315.713,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan				1 Urusan	1 Urusan	41.315.713,00	41.315.713,00	30.774.570,00	-10.541.143,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		41.315.713,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	41.315.713,00	41.315.713,00	30.774.570,00	-10.541.143,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			41.315.713,00	KECAMATAN MUNTE
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina dan Diawasi				22 22 Desa Pemerinta han Desa	22 22 Desa Pemerinta han Desa	10.150.000,00	10.150.000,00	7.134.000,00	1.330.000,00							11.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya				22 Desa	22 Desa	10.150.000,00	10.150.000,00	7.134.000,00	-3.016.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Munte		11.480.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.220.000,00	-1.780.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.330.000,00	KECAMATAN MUNTE
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4.150.000,00	4.150.000,00	2.914.000,00	-1.236.000,00	Kab. Karo, Munte, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.150.000,00	KECAMATAN MUNTE
		KECAMATAN JUHAR							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00					5.936.062.337,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	2.963.661.691,00	2.761.279.016,00	2.718.154.206,00	2.493.694.131,00							5.457.355.822,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.680.483.632,00	2.479.620.957,00	2.479.620.957,00	-200.862.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		4.993.856.956,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	2.635.564.632,00	2.434.701.957,00	2.434.701.957,00	-200.862.675,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.721.351.356,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	44.919.000,00	44.919.000,00	44.919.000,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			272.505.600,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		25.200.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.200.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	106.657.059,00	105.137.059,00	62.012.249,00	-44.644.810,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	-		266.305.266,00	KECAMATAN JUHAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	1.306.335,00	1.306.335,00	1.306.335,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.678.400,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	18.889.164,00	14.480.408,00	14.480.408,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			84.692.466,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.381.380,00	3.381.380,00	3.381.380,00	0,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.138.880,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.920.180,00	4.920.180,00	3.444.126,00	-1.476.054,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.543.040,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.732.480,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				349 Laporan	349 Laporan	76.000.000,00	74.480.000,00	37.240.000,00	-38.760.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			155.520.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.232.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		57.600.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	15.232.000,00	15.232.000,00	15.232.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			57.600.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	104.299.000,00	104.299.000,00	104.299.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		60.307.200,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			31.104.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.320.000,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	90.879.000,00	90.879.000,00	90.879.000,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			24.883.200,00	KECAMATAN JUHAR
	7	NON URUSAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01	KECAMATAN							3.104.644.851,00	2.902.262.176,00	2.822.093.096,00	-282.551.755,00							5.936.062.337,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		54.086.400,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			54.086.400,00	KECAMATAN JUHAR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				87 Indeks	87 Indeks	100.999.430,00	100.999.430,00	74.719.430,00	172.568.083,00							273.567.513,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				100 %	100 %	60.031.230,00	60.031.230,00	43.761.230,00	-16.270.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		128.000.793,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	23.053.140,00	23.053.140,00	14.783.140,00	-8.270.000,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			66.534.912,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.978.090,00	36.978.090,00	28.978.090,00	-8.000.000,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			61.465.881,00	KECAMATAN JUHAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	40.968.200,00	40.968.200,00	30.958.200,00	-10.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		145.566.720,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40.968.200,00	40.968.200,00	30.958.200,00	-10.010.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			145.566.720,00	KECAMATAN JUHAR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	3.235.730,00	58.540.800,00							64.540.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	3.235.730,00	-2.764.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		64.540.800,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.235.730,00	-2.764.270,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			64.540.800,00	KECAMATAN JUHAR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan				1 Urusan	1 Urusan	33.983.730,00	33.983.730,00	25.983.730,00	106.614.472,00							140.598.202,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				100 %	100 %	33.983.730,00	33.983.730,00	25.983.730,00	-8.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan		140.598.202,00	KECAMATAN JUHAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	33.983.730,00	33.983.730,00	25.983.730,00	-8.000.000,00	Kab. Karo, Juhar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			140.598.202,00	KECAMATAN JUHAR
		KECAMATAN TIGA BINANGA																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	-75.610.381,00							9.761.407.886,00	
	7.01	KECAMATAN							3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	-75.610.381,00							9.761.407.886,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	2.666.597.182,00	2.650.751.417,00	2.628.754.161,00	4.505.758.358,00							7.172.355.540,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.264.714.267,00	2.248.868.502,00	2.248.868.502,00	-15.845.765,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Tigabinanga		6.354.370.352,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	2.156.114.267,00	2.140.268.502,00	2.140.268.502,00	-15.845.765,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.744.019.779,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				108 Dokumen	108 Dokumen	108.600.000,00	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			610.350.573,00	KECAMATAN TIGA BINANGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kecamatan Tigabinanga		57.024.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 Paket	52 Paket	23.520.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			57.024.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	106.202.915,00	106.202.915,00	62.860.939,00	-43.341.976,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kecamatan Tigabinanga		219.922.643,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.554.870,00	1.554.870,00	1.554.870,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.557.124,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.682.675,00	43.682.675,00	31.490.715,00	-12.191.960,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			52.845.911,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.807.870,00	2.807.870,00	2.807.870,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.368.422,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.525.500,00	5.525.500,00	4.231.000,00	-1.294.500,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.631.186,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				233 Laporan	233 Laporan	52.632.000,00	52.632.000,00	22.776.484,00	-29.855.516,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			155.520.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	225.220.000,00	225.220.000,00	225.220.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Tigabinanga		350.915.855,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			63.452.160,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			52.189.852,00	KECAMATAN TIGA BINANGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	187.920.000,00	187.920.000,00	187.920.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			235.273.843,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	46.940.000,00	46.940.000,00	68.284.720,00	21.344.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Tigabinanga		190.122.690,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	46.940.000,00	46.940.000,00	46.940.000,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			166.122.690,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	21.344.720,00	21.344.720,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			24.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86 Indeks	86 Indeks	79.883.420,00	79.883.420,00	51.128.700,00	172.231.270,00							252.114.690,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	55.083.420,00	55.083.420,00	40.832.700,00	-14.250.720,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		147.114.690,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	22.329.420,00	22.329.420,00	22.329.420,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			39.232.512,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	32.754.000,00	32.754.000,00	18.503.280,00	-14.250.720,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			107.882.178,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 %	100 %	24.800.000,00	24.800.000,00	10.296.000,00	-14.504.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		105.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.800.000,00	24.800.000,00	10.296.000,00	-14.504.000,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			105.000.000,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada				2/2/2 Perda /Perkada/K egiatan	2/2/2 Perda /Perkada/K egiatan	20.600.000,00	19.387.360,00	16.787.360,00	28.378.432,00							48.978.432,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	20.600.000,00	19.387.360,00	16.787.360,00	-3.812.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		48.978.432,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	20.600.000,00	19.387.360,00	16.787.360,00	-3.812.640,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			48.978.432,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan				2 Urusan	2 Urusan	44.569.750,00	44.569.750,00	39.369.750,00	72.250.284,00							116.820.034,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				100 %	100 %	44.569.750,00	44.569.750,00	39.369.750,00	-5.200.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Tigabinanga		116.820.034,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				200 Orang	200 Orang	44.569.750,00	44.569.750,00	39.369.750,00	-5.200.000,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			116.820.034,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
		KELURAHAN TIGA BINANGA							3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	-75.610.381,00							9.761.407.886,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	-75.610.381,00							9.761.407.886,00	
	7.01	KECAMATAN							3.611.650.352,00	3.594.591.947,00	3.536.039.971,00	-75.610.381,00							9.761.407.886,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				19 kegiatan	19 kegiatan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	1.371.139.190,00							2.171.139.190,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				100 %	100 %	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kelurahan Tigabinanga		2.171.139.190,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				14 Unit	14 Unit	711.332.340,00	711.332.340,00	711.332.340,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.321.233.638,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	88.667.660,00	88.667.660,00	88.667.660,00	0,00	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			849.905.552,00	KECAMATAN TIGA BINANGA
		KECAMATAN LAU BALENG							2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	-45.293.291,00							2.566.120.753,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	-45.293.291,00							2.566.120.753,00	
	7.01	KECAMATAN							2.424.102.723,00	2.443.781.517,00	2.378.809.432,00	-45.293.291,00							2.566.120.753,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat				92 Indeks	100 %	2.283.367.083,00	2.303.045.877,00	2.268.935.572,00	65.557.210,00							2.348.924.293,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				12 Dokumen	100 %	2.026.807.618,00	2.047.686.412,00	2.047.357.782,00	20.550.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		2.026.807.618,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.983.998.988,00	2.004.877.782,00	2.004.877.782,00	20.878.794,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.983.998.988,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.808.630,00	42.808.630,00	42.480.000,00	-328.630,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			42.808.630,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	100 %	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		28.560.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			28.560.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	100 %	96.611.565,00	95.411.565,00	61.629.890,00	-34.981.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		104.055.875,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.157.860,00	2.157.860,00	2.157.860,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.938.920,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	24 Paket	17.172.475,00	17.172.475,00	13.804.370,00	-3.368.105,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			19.239.725,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	13.960.580,00	13.960.580,00	13.960.580,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			13.960.580,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.488.650,00	3.488.650,00	2.859.080,00	-629.570,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			3.488.650,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				270 Laporan	110 Laporan	59.832.000,00	58.632.000,00	28.848.000,00	-30.984.000,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			64.428.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	29.077.900,00	29.077.900,00	29.077.900,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		58.155.800,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	29.077.900,00	29.077.900,00	29.077.900,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			58.155.800,00	KECAMATAN LAU BALENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	100 %	83.960.000,00	83.960.000,00	83.960.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		83.960.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			21.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.840.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	37 Laporan	60.120.000,00	60.120.000,00	60.120.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.120.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Unit	100 %	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Lau Baleng		47.385.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			33.470.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			13.915.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	69.935.130,00	69.935.130,00	55.343.650,00	48.624.400,00							118.559.530,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	41.207.130,00	41.207.130,00	31.061.650,00	-10.145.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		82.559.530,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	17.328.280,00	17.328.280,00	11.613.950,00	-5.714.330,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			18.601.280,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	23.878.850,00	23.878.850,00	19.447.700,00	-4.431.150,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			63.958.250,00	KECAMATAN LAU BALENG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Urusan	12 Urusan	28.728.000,00	28.728.000,00	24.282.000,00	-4.446.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		36.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	28.728.000,00	28.728.000,00	24.282.000,00	-4.446.000,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			36.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				1 Kegiatan	100 %	20.520.000,00	20.520.000,00	9.565.700,00	0,00							20.520.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				1 Kegiatan	5 Desa	20.520.000,00	20.520.000,00	9.565.700,00	-10.954.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		20.520.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.520.000,00	20.520.000,00	9.565.700,00	-10.954.300,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			20.520.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				2/2/3 Perda /Perkada/K egiat	100 %	8.953.300,00	8.953.300,00	6.373.300,00	6.046.700,00							15.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				1/1 Perda/P erkada	1/1 Perda/P erkada	8.953.300,00	8.953.300,00	6.373.300,00	-2.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		15.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				3 Laporan	3 Laporan	8.953.300,00	8.953.300,00	6.373.300,00	-2.580.000,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			15.000.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Urusan	100 %	38.249.210,00	38.249.210,00	35.513.210,00	21.789.720,00							60.038.930,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				1 Kegiatan	1 Urusan	38.249.210,00	38.249.210,00	35.513.210,00	-2.736.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		60.038.930,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				500 Orang	400 Orang	38.249.210,00	38.249.210,00	35.513.210,00	-2.736.000,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.038.930,00	KECAMATAN LAU BALENG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan				15 Pemer ntahan Desa	100 %	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00							3.078.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	15 Pemerin tahan Desa	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Kecamatan Lau Baleng		3.078.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30 Dokumen	15 Dokumen	3.078.000,00	3.078.000,00	3.078.000,00	0,00	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			3.078.000,00	KECAMATAN LAU BALENG
		KECAMATAN MARDINDING							2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	-2.100.389,00						2.759.645.978,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	-2.100.389,00							2.759.645.978,00	
	7.01	KECAMATAN							2.282.045.317,00	2.348.018.345,00	2.279.944.928,00	-2.100.389,00							2.759.645.978,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat				92 Indeks	100% Persen	2.132.902.337,00	2.198.875.365,00	2.156.023.528,00	406.191.630,00							2.539.093.967,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan				undefined undefined	12 Dokumen	1.883.772.547,00	1.950.945.575,00	1.950.940.325,00	67.167.778,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Mardinding		2.159.949.842,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.843.786.297,00	1.910.959.325,00	1.910.959.325,00	67.173.028,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.115.964.967,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.986.250,00	39.986.250,00	39.981.000,00	-5.250,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			43.984.875,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				19 Paket	14 Orang	24.360.000,00	24.360.000,00	14.280.000,00	-10.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Mardinding		28.644.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	24.360.000,00	24.360.000,00	14.280.000,00	-10.080.000,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			28.644.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				undefined undefined	12 paket	83.133.590,00	81.933.590,00	49.182.403,00	-33.951.187,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Mardinding		107.522.885,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				39 Paket	39 Paket	2.268.790,00	2.268.790,00	2.268.790,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			2.674.298,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	19.772.190,00	19.772.190,00	15.309.803,00	-4.462.387,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			29.717.531,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				119 Paket	119 Paket	3.151.610,00	3.151.610,00	3.151.610,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			4.409.416,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	444.000,00	444.000,00	355.200,00	-88.800,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			5.152.840,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				74 Laporan	74 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			3.256.000,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				268 Laporan	268 Laporan	57.497.000,00	56.297.000,00	28.097.000,00	-29.400.000,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			62.312.800,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4 unit	1 unit	44.989.200,00	44.989.200,00	44.989.200,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Mardinding		135.345.540,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			49.500.000,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	29.989.200,00	29.989.200,00	29.989.200,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			85.845.540,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				undefined	12 Bulan	62.177.000,00	62.177.000,00	62.161.600,00	-15.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Mardinding		69.714.700,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			17.160.000,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			3.036.000,00	KECAMATAN MARDINDING	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.017.000,00	45.017.000,00	45.001.600,00	-15.400,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			49.518.700,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Unit	1 Unit	34.470.000,00	34.470.000,00	34.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Mardingding		37.917.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34.470.000,00	34.470.000,00	34.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			37.917.000,00	KECAMATAN MARDINDING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	95 Indeks	100.047.280,00	100.047.280,00	84.358.840,00	27.076.671,00							127.123.951,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan				4 kegiatan	4 kegiatan	73.467.280,00	73.467.280,00	65.752.840,00	-7.714.440,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Mardingding		93.898.951,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	16.592.660,00	16.592.660,00	12.129.470,00	-4.463.190,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			20.305.676,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	56.874.620,00	56.874.620,00	53.623.370,00	-3.251.250,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			73.593.275,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Tidak Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.580.000,00	26.580.000,00	18.606.000,00	-7.974.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Mardingding		33.225.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	26.580.000,00	26.580.000,00	18.606.000,00	-7.974.000,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			33.225.000,00	KECAMATAN MARDINDING
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				2/2/3 Perda/ Per kada/Kegia	2/2/3 Perda/ Per kada/Kegia	4.800.000,00	4.800.000,00	3.360.000,00	1.800.000,00							6.600.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				undefined undefined	1 Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	3.360.000,00	-1.440.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi	Masyarakat Kecamatan Mardingding		6.600.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	3.360.000,00	-1.440.000,00	Kab. Karo, Mardingding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi Peningkatan layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi			6.600.000,00	KECAMATAN MARDINDING
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Urusan	1 Urusan	41.575.700,00	41.575.700,00	34.362.560,00	19.028.360,00							60.604.060,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan				500 Orang	500 Orang	41.575.700,00	41.575.700,00	34.362.560,00	-7.213.140,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Mardingding		60.604.060,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	41.575.700,00	41.575.700,00	34.362.560,00	-7.213.140,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			60.604.060,00	KECAMATAN MARDINDING
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah				12 Desa	12 Desa	2.720.000,00	2.720.000,00	1.840.000,00	23.504.000,00							26.224.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.720.000,00	2.720.000,00	1.840.000,00	-880.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Kecamatan Mardinding		26.224.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	920.000,00	-440.000,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			13.112.000,00	KECAMATAN MARDINDING
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.360.000,00	1.360.000,00	920.000,00	-440.000,00	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			13.112.000,00	KECAMATAN MARDINDING
		KECAMATAN PAYUNG							2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	-137.965.674,00						2.214.229.349,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	-137.965.674,00							2.214.229.349,00	
	7.01	KECAMATAN							2.176.896.717,00	2.090.213.377,00	2.038.931.043,00	-137.965.674,00							2.214.229.349,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah				-	100 %	2.060.647.373,00	1.973.964.033,00	1.968.199.889,00	37.332.632,00							2.097.980.005,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -				12 Bulan	100 %	1.867.470.357,00	1.781.687.017,00	1.781.687.017,00	-85.783.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Payung		1.877.470.357,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	1.827.510.357,00	0,00	0,00	-1.827.510.357,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	168 Orang/ bulan	0,00	1.741.727.017,00	1.741.727.017,00	1.741.727.017,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.827.510.357,00	KECAMATAN PAYUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.960.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			49.960.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	18 stel	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	ASN Kecamatan Payung		13.500.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	18 Paket	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			13.500.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capain kinerja pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah -				12 Bulan	100 %	54.637.016,00	53.737.016,00	39.172.872,00	-15.464.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Payung		59.869.648,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.383.008,00	3.383.008,00	3.383.008,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.383.008,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.799.530,00	9.799.530,00	7.782.254,00	-2.017.276,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.799.530,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.698.328,00	5.698.328,00	5.698.328,00	0,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			7.698.328,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.612.150,00	2.612.150,00	1.465.282,00	-1.146.868,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.719.068,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.500.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	31.644.000,00	30.744.000,00	20.844.000,00	-10.800.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			32.769.714,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian kinerja pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -</i>				20 bulan	100 %	100.370.000,00	100.370.000,00	100.370.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Payung		107.970.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			27.800.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.190.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	75.980.000,00	75.980.000,00	75.980.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			76.980.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				2 Laporan	100 %	38.170.000,00	38.170.000,00	33.470.000,00	-4.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Payung		39.170.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	38.170.000,00	38.170.000,00	33.470.000,00	-4.700.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			39.170.000,00	KECAMATAN PAYUNG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ingkat indeks kepuasan masyarakat -				-	84,3 indeks	51.399.940,00	51.399.940,00	46.210.450,00	0,00							51.399.940,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan -</i>				20 KEGIATAN	3 kali	27.305.000,00	27.305.000,00	27.114.450,00	-190.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		27.305.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.310.000,00	12.310.000,00	11.286.000,00	-1.024.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			12.310.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	14.995.000,00	14.995.000,00	15.828.450,00	833.450,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			14.995.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>umlah Urusan Pemerintahan di Kecamatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan -</i>				1 aplikasi	1 urusan	19.096.000,00	19.096.000,00	19.096.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		19.096.000,00	KECAMATAN PAYUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.096.000,00	19.096.000,00	19.096.000,00	0,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			19.096.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Partisipasi Masyarakat (stackholder) dalam Pembangunan Desa -				4 Laporan	1 urusan	4.998.940,00	4.998.940,00	0,00	-4.998.940,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		4.998.940,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	4.998.940,00	4.998.940,00	0,00	-4.998.940,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.998.940,00	KECAMATAN PAYUNG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				1 kegiatan	100 %	23.987.100,00	23.987.100,00	0,00	0,00							23.987.100,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Diberdayakan				2 KEGIATAN	7 desa	23.987.100,00	23.987.100,00	0,00	-23.987.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		23.987.100,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18.987.100,00	18.987.100,00	0,00	-18.987.100,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			18.987.100,00	KECAMATAN PAYUNG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				38 indeks	100 %	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	0,00							11.980.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 rekomendasi	1 kali	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	-11.980.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		11.980.000,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	-11.980.000,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.980.000,00	KECAMATAN PAYUNG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan -				2,75 indeks	100 %	20.882.304,00	20.882.304,00	19.420.704,00	0,00							20.882.304,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				20 urusan	1 urusan	20.882.304,00	20.882.304,00	19.420.704,00	-1.461.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		20.882.304,00	KECAMATAN PAYUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	20.882.304,00	20.882.304,00	19.420.704,00	-1.461.600,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.882.304,00	KECAMATAN PAYUNG	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan				2,75 indeks	100 %	8.000.000,00	8.000.000,00	5.100.000,00	0,00							8.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya				20 pemerintahan desa	7 pemdes	8.000.000,00	8.000.000,00	5.100.000,00	-2.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Payung		8.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0 0	0 0	8.000.000,00	8.000.000,00	5.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Karo, Payung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG	
		KECAMATAN SIMPANG EMPAT								3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	-227.906.853,00						4.227.567.329,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	-227.906.853,00							4.227.567.329,00		
	7.01	KECAMATAN							3.308.942.829,00	3.174.337.400,00	3.081.035.976,00	-227.906.853,00							4.227.567.329,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.125.342.829,00	2.990.737.400,00	2.941.629.256,00	679.224.500,00							3.804.567.329,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.810.667.329,00	2.677.561.900,00	2.677.561.900,00	-133.105.429,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		2.810.947.329,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.760.947.329,00	2.627.841.900,00	2.627.841.900,00	-133.105.429,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.760.947.329,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	49.720.000,00	49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	47.040.000,00	47.040.000,00	47.040.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	47.040.000,00	47.040.000,00	47.040.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	103.545.500,00	102.045.500,00	59.537.356,00	-44.008.144,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		123.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	12.430.956,00	-4.069.044,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			16.500.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.445.500,00	8.445.500,00	6.756.400,00	-1.689.100,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			9.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	75.000.000,00	73.500.000,00	36.750.000,00	-38.250.000,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			90.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		500.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			100.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			300.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	80.620.000,00	80.620.000,00	74.020.000,00	-6.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		105.120.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	7.900.000,00	-6.600.000,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.120.000,00	60.120.000,00	60.120.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.120.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.470.000,00	83.470.000,00	83.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN Kecamatan Simpang Empat		215.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			150.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	106.600.000,00	106.600.000,00	84.622.000,00	38.400.000,00							145.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan di tingkat kecamatan Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 % 1 kegiatan	100 % 1 kegiatan	61.000.000,00	61.000.000,00	54.500.000,00	-6.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		95.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	13.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	41.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			65.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 % 1 urusan	100 % 1 urusan	45.600.000,00	45.600.000,00	30.122.000,00	-15.478.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	45.600.000,00	45.600.000,00	30.122.000,00	-15.478.000,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Penegakan Perda dan Perkada				2/2/3 N/A % Perda/Perk ada/Kegiat	2/2/3 N/A % Perda/Perk ada/Kegiat	17.000.000,00	17.000.000,00	2.903.600,00	116.000.000,00							133.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	2.903.600,00	-14.096.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	2.903.600,00	-14.096.400,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			25.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		108.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			108.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan				1 1 2,75 Laporan Urusan Indeks	1 1 2,75 Laporan Urusan Indeks	60.000.000,00	60.000.000,00	51.881.120,00	0,00							60.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	51.881.120,00	-8.118.880,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		60.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				450 Orang	430 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	51.881.120,00	-8.118.880,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang di Bina Dan Di awasi				17 Pemerntahan Desa	17 Pemerntahan Desa	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00							85.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah rata rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Kecamatan Simpang Empat		85.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			85.000.000,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			0,00	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		KECAMATAN KUTABULUH							2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	-262.918.155,00						3.434.392.888,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	-262.918.155,00						3.434.392.888,00		
	7.01	KECAMATAN							2.631.536.721,00	2.452.244.142,00	2.368.618.566,00	-262.918.155,00						3.434.392.888,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat				92 Indeks	100 %	2.430.256.121,00	2.250.963.542,00	2.208.668.034,00	805.136.767,00						3.235.392.888,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4 Dokumen	100 %	2.146.100.656,00	1.968.470.277,00	1.965.938.577,00	-180.162.079,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		2.996.503.319,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	2.101.201.156,00	1.923.570.777,00	1.923.570.777,00	-177.630.379,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.906.503.319,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	44.899.500,00	44.899.500,00	42.367.800,00	-2.531.700,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			90.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Stel	100 %	16.800.000,00	16.800.000,00	15.054.537,00	-1.745.463,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		20.651.029,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	16.800.000,00	16.800.000,00	15.054.537,00	-1.745.463,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			20.651.029,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	111.180.365,00	109.518.165,00	71.511.520,00	-39.668.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		95.378.540,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.405.600,00	1.405.600,00	1.405.600,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	15.868.245,00	15.868.245,00	13.485.750,00	-2.382.495,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			10.378.540,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	7.075.770,00	7.075.770,00	12.890.260,00	5.814.490,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			4.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.720.750,00	3.720.750,00	3.006.010,00	-714.740,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			4.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	83.110.000,00	81.447.800,00	40.723.900,00	-42.386.100,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			75.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Unit	100 %	51.575.600,00	51.575.600,00	51.575.600,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		34.920.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.335.600,00	11.335.600,00	11.335.600,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.840.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			14.920.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	100 %	60.029.500,00	60.029.500,00	60.017.800,00	-11.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		60.940.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			14.400.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.779.500,00	29.779.500,00	29.767.800,00	-11.700,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			45.540.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Unit	100 %	44.570.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		27.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				4 Unit	4 Unit	44.570.000,00	44.570.000,00	44.570.000,00	0,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	94,5 Indeks	132.365.900,00	132.365.900,00	101.606.900,00	-18.365.900,00							114.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Kegiatan	2 Laporan	79.265.900,00	79.265.900,00	63.206.900,00	-16.059.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		87.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	15.800.000,00	15.800.000,00	13.060.000,00	-2.740.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			37.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	63.465.900,00	63.465.900,00	50.146.900,00	-13.319.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Laporan	12 Urusan	53.100.000,00	53.100.000,00	38.400.000,00	-14.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		27.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	53.100.000,00	53.100.000,00	38.400.000,00	-14.700.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			27.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				2 Kegiatan	100 %	7.570.000,00	7.570.000,00	5.170.000,00	-2.570.000,00							5.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2 Kegiatan	16 Desa	7.570.000,00	7.570.000,00	5.170.000,00	-2.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Kecamatan Kutabuluh		5.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	7.570.000,00	7.570.000,00	5.170.000,00	-2.400.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			5.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				2 Perda dan Perkada	100 %	8.140.000,00	8.140.000,00	5.930.000,00	11.860.000,00							20.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				4 Laporan	4 Kali	8.140.000,00	8.140.000,00	5.930.000,00	-2.210.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Kecamatan Kutabuluh		20.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	8.140.000,00	8.140.000,00	5.930.000,00	-2.210.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			20.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Urusan	100 %	40.834.700,00	40.834.700,00	38.233.632,00	9.165.300,00							50.000.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				1 Kegiatan	1 Urusan	40.834.700,00	40.834.700,00	38.233.632,00	-2.601.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Kutabuluh		50.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				800 Orang	800 Orang	40.834.700,00	40.834.700,00	38.233.632,00	-2.601.068,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan				16 Peremi ntah Desa	100 %	12.370.000,00	12.370.000,00	9.010.000,00	-2.370.000,00							10.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				16 Dokumen	16 Desa	12.370.000,00	12.370.000,00	9.010.000,00	-3.360.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Kecamatan Kutabuluh		10.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	12.370.000,00	12.370.000,00	9.010.000,00	-3.360.000,00	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa			10.000.000,00	KECAMATAN KUTABULUH	
		KECAMATAN DOLAT RAYAT								2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	-55.051.645,00						2.006.222.642,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	-55.051.645,00							2.006.222.642,00		
	7.01	KECAMATAN							2.126.030.690,00	2.112.591.472,00	2.070.979.045,00	-55.051.645,00							2.006.222.642,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Perangkat				92 Indeks	100 %	2.044.337.783,00	2.030.898.565,00	2.007.584.045,00	-75.578.706,00							1.968.759.077,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja <i>Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 % 12 Laporan	100 %	1.819.373.653,00	1.806.750.435,00	1.806.690.620,00	-12.683.033,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Dolat Rayat		1.751.013.801,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.781.753.838,00	1.769.130.620,00	1.769.130.620,00	-12.623.218,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.681.773.801,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.619.815,00	37.619.815,00	37.560.000,00	-59.815,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			69.240.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja <i>Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 % 12 Dokumen	100 %	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Dolat Rayat		29.900.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			29.900.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja <i>Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 % 12 Paket	100 %	56.494.315,00	55.678.315,00	32.483.425,00	-24.010.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Dolat Rayat		49.815.276,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9.604.005,00	9.604.005,00	6.927.715,00	-2.676.290,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			7.887.375,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	2.045.510,00	2.045.510,00	2.045.510,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.999.901,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	4.542.800,00	4.542.800,00	3.767.200,00	-775.600,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.500.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	131 Laporan	40.302.000,00	39.486.000,00	19.743.000,00	-20.559.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			38.428.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 12 Laporan	100 %	101.399.815,00	101.399.815,00	101.340.000,00	-59.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Dolat Rayat		114.280.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			19.800.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			4.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.359.815,00	75.359.815,00	75.300.000,00	-59.815,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			90.480.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 1 Unit	100 %	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	ASN Kecamatan Dolat Rayat		23.750.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	33.470.000,00	33.470.000,00	33.470.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			23.750.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	42.437.600,00	42.437.600,00	34.098.200,00	-19.453.600,00							22.984.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	3 Kegiatan	26.261.000,00	26.261.000,00	21.888.800,00	-4.372.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		18.984.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.320.200,00	11.320.200,00	11.223.000,00	-97.200,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			9.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	14.940.800,00	14.940.800,00	10.665.800,00	-4.275.000,00	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			9.984.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				100 % 12 Laporan	12 Urusan	16.176.600,00	16.176.600,00	12.209.400,00	-3.967.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		4.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 laporan Laporan	12 laporan Laporan	16.176.600,00	16.176.600,00	12.209.400,00	-3.967.200,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			4.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				5 kegiatan	100 %	14.979.600,00	14.979.600,00	5.095.800,00	-9.979.600,00							5.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>				5 Kegiatan	7 Desa	14.979.600,00	14.979.600,00	5.095.800,00	-9.883.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		5.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	14.979.600,00	14.979.600,00	5.095.800,00	-9.883.800,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN Pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN			5.000.000,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Urusan	100 %	24.275.707,00	24.275.707,00	24.201.000,00	-14.796.142,00							9.479.565,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				100 % 1 Kegiatan	1 Urusan	24.275.707,00	24.275.707,00	24.201.000,00	-74.707,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat Kecamatan Dolat Rayat		9.479.565,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				275 Orang	275 Orang	24.275.707,00	24.275.707,00	24.201.000,00	-74.707,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			9.479.565,00	KECAMATAN DOLAT RAYAT
		KECAMATAN MERDEKA								2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	-170.059.022,00					3.985.671.991,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	-170.059.022,00							3.985.671.991,00	
	7.01	KECAMATAN							2.465.167.008,00	2.352.028.687,00	2.295.107.986,00	-170.059.022,00							3.985.671.991,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	92 Indeks	2.313.408.462,00	2.200.270.141,00	2.172.985.300,00	1.400.416.462,00							3.713.824.924,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.103.583.085,00	1.991.391.584,00	1.991.355.695,00	-112.227.390,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		3.360.277.263,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.048.983.455,00	1.936.791.954,00	1.936.791.954,00	-112.191.501,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			3.279.301.335,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	54.599.630,00	54.599.630,00	54.563.741,00	-35.889,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.975.928,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		38.214.400,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	17.320.000,00	17.320.000,00	17.320.000,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			38.214.400,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	78.917.597,00	77.970.777,00	50.937.159,00	-27.980.438,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		148.183.961,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.968.790,00	4.968.790,00	4.968.790,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			8.587.047,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.774.425,00	11.774.425,00	8.791.357,00	-2.983.068,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			37.219.523,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.724.232,00	8.724.232,00	8.724.232,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.083.331,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.925.150,00	3.925.150,00	3.071.690,00	-853.460,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.783.084,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	2.184.000,00	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.478.976,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	47.341.000,00	46.394.180,00	23.197.090,00	-24.143.910,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			76.032.000,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	78.077.780,00	78.077.780,00	77.862.446,00	-215.334,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		121.459.668,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			54.743.040,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.889.024,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	60.237.780,00	60.237.780,00	60.022.446,00	-215.334,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.827.604,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	35.510.000,00	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		45.689.632,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.510.000,00	35.510.000,00	35.510.000,00	0,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.689.632,00	KECAMATAN MERDEKA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	73.991.160,00	73.991.160,00	57.296.250,00	87.750.279,00							161.741.439,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	39.791.160,00	39.791.160,00	33.356.250,00	-6.434.910,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		84.105.855,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	18.135.460,00	18.135.460,00	13.579.310,00	-4.556.150,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			31.345.591,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	21.655.700,00	21.655.700,00	19.776.940,00	-1.878.760,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			52.760.264,00	KECAMATAN MERDEKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 %	100 %	34.200.000,00	34.200.000,00	23.940.000,00	-10.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		77.635.584,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	34.200.000,00	34.200.000,00	23.940.000,00	-10.260.000,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			77.635.584,00	KECAMATAN MERDEKA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan				6 kegiatan	6 kegiatan	19.082.900,00	19.082.900,00	17.260.080,00	6.917.100,00							26.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	19.082.900,00	19.082.900,00	17.260.080,00	-1.822.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		26.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	19.082.900,00	19.082.900,00	17.260.080,00	-1.822.820,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			26.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada				2/2/6 Perda /Perkada/Kegiatan	2/2/6 Perda /Perkada/Kegiatan	16.331.030,00	16.331.030,00	11.525.824,00	-8.331.030,00							8.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	6.840.000,00	6.840.000,00	4.788.000,00	-2.052.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		2.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	6.840.000,00	6.840.000,00	4.788.000,00	-2.052.000,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100 %	100 %	9.491.030,00	9.491.030,00	6.737.824,00	-2.753.206,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		6.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	9.491.030,00	9.491.030,00	6.737.824,00	-2.753.206,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan di kecamatan				1 Urusan	1 Urusan	37.354.456,00	37.354.456,00	32.541.232,00	29.751.172,00							67.105.628,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	37.354.456,00	37.354.456,00	32.541.232,00	-4.813.224,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		67.105.628,00	KECAMATAN MERDEKA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	200 Orang	37.354.456,00	37.354.456,00	32.541.232,00	-4.813.224,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			67.105.628,00	KECAMATAN MERDEKA	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi				9 Pemerintahan Desa	9 Pemerintahan Desa	4.999.000,00	4.999.000,00	3.499.300,00	4.001.000,00							9.000.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	4.999.000,00	4.999.000,00	3.499.300,00	-1.499.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Merdeka		9.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	4.999.000,00	4.999.000,00	3.499.300,00	-1.499.700,00	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			9.000.000,00	KECAMATAN MERDEKA	
		KECAMATAN NAMANTERAN								2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	128.786.143,00						4.716.698.080,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	128.786.143,00							4.716.698.080,00		
	7.01	KECAMATAN							2.490.977.838,00	2.681.169.895,00	2.619.763.981,00	128.786.143,00							4.716.698.080,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				89,91 indeks	89,91 indeks	2.341.439.579,00	2.531.631.636,00	2.496.305.212,00	2.028.751.269,00							4.370.190.848,00		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terverifikasi usulan RKA, RKAP, DPA dan DPPA Terlaksananya penatausahaan SP2D Tersusunnya Laporan Keuangan				4 berkas	4 berkas	2.124.295.983,00	2.315.701.840,00	2.315.701.840,00	191.405.857,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		3.993.612.923,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.073.287.883,00	2.264.693.740,00	2.264.693.740,00	191.405.857,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			3.851.737.211,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	51.008.100,00	51.008.100,00	51.008.100,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			141.875.712,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian berupa usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami, kartu istri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai Terkoordinasinya hasil evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, analisis jabatan pegawai dan mengelola Sistem Informasi Kepegawaian				100 %	100 %	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		29.548.800,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	19 Paket	15.750.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			29.548.800,00	KECAMATAN NAMANTERAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terdistribusi, dikelola, terpelihara, teramankan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah</i> <i>Terkelolanya administrasi umum perangkat daerah yang meliputi, administrasi surat menyurat, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, perlengkapan/ perbekalan, dan rumah tangga Kecamatan Naman Teran</i> <i>Terkoordinasinya kegiatan pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor</i>				2 laporan	2 laporan	84.812.840,00	83.599.040,00	48.272.616,00	-36.540.224,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		161.990.725,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	1.951.845,00	1.951.845,00	1.951.845,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			4.219.776,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	16.718.335,00	16.718.335,00	13.083.791,00	-3.634.544,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			29.482.418,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	3.162.660,00	3.162.660,00	3.162.660,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			5.246.291,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	2.290.000,00	2.290.000,00	336.220,00	-1.953.780,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			2.848.090,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				457 Laporan	457 Laporan	60.690.000,00	59.476.200,00	29.738.100,00	-30.951.900,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			120.194.150,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terancang dan terprosesnya pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga badan</i>				2 berkas RKBMD	2 berkas RKBMD	20.312.656,00	20.312.656,00	20.312.656,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		22.523.360,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	12.156.856,00	12.156.856,00	12.156.856,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			14.367.560,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	8.155.800,00	8.155.800,00	8.155.800,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			8.155.800,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terkoordinasinya kegiatan pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor</i>				3 orang	3 orang	60.768.100,00	60.768.100,00	60.768.100,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		103.210.080,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			19.595.520,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.500.000,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.068.100,00	45.068.100,00	45.068.100,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			82.114.560,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdistribusi, terkelola, terpelihara, teramanakan dan tercatatnya barang inventaris serta barang milik daerah				2 laporan	2 laporan	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		59.304.960,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			59.304.960,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	82.620.000,00	82.620.000,00	57.460.510,00	52.832.800,00							135.452.800,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				2 kegiatan	2 kegiatan	44.460.000,00	44.460.000,00	36.222.310,00	-8.237.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		53.338.240,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	8.752.800,00	-5.047.200,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			43.338.240,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.660.000,00	30.660.000,00	27.469.510,00	-3.190.490,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan				5 urusan	5 urusan	38.160.000,00	38.160.000,00	21.238.200,00	-16.921.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		82.114.560,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	38.160.000,00	38.160.000,00	21.238.200,00	-16.921.800,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			82.114.560,00	KECAMATAN NAMANTERAN	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada				100 %	100 %	11.600.000,00	11.600.000,00	10.680.000,00	31.738.240,00							43.338.240,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya koordinasi Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				1 kegiatan	1 kegiatan	11.600.000,00	11.600.000,00	10.680.000,00	-920.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Kecamatan Naman Teran		43.338.240,00	KECAMATAN NAMANTERAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	11.600.000,00	11.600.000,00	10.680.000,00	-920.000,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			43.338.240,00	KECAMATAN NAMANTERAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan				1 urusan	1 urusan	55.318.259,00	55.318.259,00	55.318.259,00	112.397.933,00							167.716.192,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan</i>				1 urusan	1 urusan	55.318.259,00	55.318.259,00	55.318.259,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Naman Teran		167.716.192,00	KECAMATAN NAMANTERAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				300 Orang	300 Orang	55.318.259,00	55.318.259,00	55.318.259,00	0,00	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			167.716.192,00	KECAMATAN NAMANTERAN
		KECAMATAN TIGANDERKET							2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	-147.073.342,00						2.990.093.225,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	-147.073.342,00							2.990.093.225,00	
	7.01	KECAMATAN							2.835.948.825,00	2.753.785.683,00	2.688.875.483,00	-147.073.342,00							2.990.093.225,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Kecamatan				92 Indeks	100 %	2.617.692.825,00	2.535.529.683,00	2.501.637.883,00	102.400.400,00							2.720.093.225,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				60 Dokumen	17 Orang/b ulan 60 Dokumen	2.356.793.225,00	2.275.924.483,00	2.275.924.483,00	-80.868.742,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket		2.356.793.225,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.302.313.225,00	2.221.444.483,00	2.221.444.483,00	-80.868.742,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			2.302.313.225,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	54.480.000,00	54.480.000,00	54.480.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			54.480.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				-	27 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket		35.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				25 Paket	25 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			35.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	10 Paket 12 Laporan 20 Paket 250 Laporan 5 Paket 8 Paket	90.002.100,00	88.707.700,00	55.397.500,00	-34.604.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket		104.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14.977.700,00	14.977.700,00	11.453.020,00	-3.524.680,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.972.400,00	4.972.400,00	4.972.400,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			10.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.272.000,00	4.272.000,00	3.802.080,00	-469.920,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.180.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			5.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	59.720.000,00	58.425.600,00	29.110.000,00	-30.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			60.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	80.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			80.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 org/bln	1 Laporan 24 Laporan	98.020.000,00	98.020.000,00	97.438.400,00	-581.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket	99.300.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	16.418.400,00	-581.600,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			17.400.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			6.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.300.000,00	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			75.900.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				2 Unit	2 unit	35.377.500,00	35.377.500,00	35.377.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pegawai Kantor Camat Tiganderket		45.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	35.377.500,00	35.377.500,00	35.377.500,00	0,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			45.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat				92 Indeks	3,35 indeks	60.680.000,00	60.680.000,00	53.329.400,00	9.320.000,00							70.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	60.680.000,00	60.680.000,00	53.329.400,00	-7.350.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Tiganderket		70.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20.680.000,00	20.680.000,00	14.257.600,00	-6.422.400,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	39.071.800,00	-928.200,00	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan				2 Kegiatan	100 %	30.920.000,00	30.920.000,00	22.624.400,00	9.080.000,00							40.000.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				34 LKD	1 Laporan 34 Lembaga K emasyarak at	30.920.000,00	30.920.000,00	22.624.400,00	-8.295.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Tiganderket		40.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				34 Lembaga K emasyarak atan	34 Lembaga K emasyarak atan	15.200.000,00	15.200.000,00	10.864.400,00	-4.335.600,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.720.000,00	15.720.000,00	11.760.000,00	-3.960.000,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan				2/2/1 Perda /Perkada/K egiat	100 %	19.587.000,00	19.587.000,00	15.675.800,00	20.413.000,00							40.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	1 Laporan	19.587.000,00	19.587.000,00	15.675.800,00	-3.911.200,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Tiganderket		40.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	19.587.000,00	19.587.000,00	15.675.800,00	-3.911.200,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			40.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				2 Urusan	100 %	58.918.000,00	58.918.000,00	53.335.600,00	21.082.000,00							80.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				-	170 Orang 320 Orang	58.918.000,00	58.918.000,00	53.335.600,00	-5.582.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat Tiganderket		80.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	43.297.000,00	43.297.000,00	38.891.800,00	-4.405.200,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			50.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				170 Orang	170 Orang	15.621.000,00	15.621.000,00	14.443.800,00	-1.177.200,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			30.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan				-	100 %	48.151.000,00	48.151.000,00	42.272.400,00	-8.151.000,00							40.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Kegiatan	17 Dokumen	48.151.000,00	48.151.000,00	42.272.400,00	-5.878.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pemerintah Desa		40.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	30.749.000,00	30.749.000,00	29.992.400,00	-756.600,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	17.402.000,00	17.402.000,00	12.280.000,00	-5.122.000,00	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			20.000.000,00	KECAMATAN TIGANDERKET	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	-836.708.762,00						10.359.793.693,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	-836.708.762,00							10.359.793.693,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							9.387.994.265,00	9.702.434.198,00	8.551.285.503,00	-836.708.762,00							10.359.793.693,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				92 Indeks	92 Indeks	4.585.000.927,00	4.919.649.860,00	4.939.939.854,00	491.500.094,00							5.076.501.021,00		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.214.882.065,00	4.553.687.062,00	4.524.743.464,00	309.861.399,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN		4.636.370.272,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	4.043.378.467,00	4.382.183.464,00	4.382.183.464,00	338.804.997,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			4.447.716.314,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	171.503.598,00	171.503.598,00	142.560.000,00	-28.943.598,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			188.653.958,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	-		33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	39 Paket	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	186.795.264,00	182.639.200,00	201.872.792,00	15.077.528,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN		205.474.791,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	39.306.185,00	39.306.185,00	118.495.324,00	79.189.139,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			43.236.804,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.442.669,00	1.442.669,00	1.442.669,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.586.936,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.053.410,00	10.053.410,00	10.336.799,00	283.389,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			11.058.751,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			1.978.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	36 Laporan	134.194.000,00	130.037.936,00	69.799.000,00	-64.395.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			147.613.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Rata-rata capaian kinerja indikator subkegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	133.803.598,00	133.803.598,00	133.803.598,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN		147.183.958,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			15.620.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	107.603.598,00	107.603.598,00	107.603.598,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			118.363.958,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	ASN		54.472.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	4 Unit	49.520.000,00	49.520.000,00	49.520.000,00	0,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)			54.472.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.152.140.215,00	1.148.651.215,00	964.419.325,00	115.214.022,00							1.267.354.237,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah Hari-Hari Besar Nasional</i>				12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.152.140.215,00	1.148.651.215,00	964.419.325,00	-187.720.890,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat, Pelajar, Pemuda dan Tokoh-tokoh Masyarakat lainnya		1.267.354.237,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	1.114.841.930,00	1.114.841.930,00	961.529.880,00	-153.312.050,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.226.326.123,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			<i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	37.298.285,00	33.809.285,00	2.889.445,00	-34.408.840,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			41.028.114,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Pembinaan Partai Politik				11 Parpol	11 Parpol	1.103.296.437,00	1.103.296.437,00	1.088.748.437,00	110.329.644,00							1.213.626.081,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partai Politik yang dibina				11 Parpol	11 Parpol	1.103.296.437,00	1.103.296.437,00	1.088.748.437,00	-14.548.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat, Pelajar dan Parpol		1.213.626.081,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				40 Dokumen	40 Dokumen	1.103.296.437,00	1.103.296.437,00	1.088.748.437,00	-14.548.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			1.213.626.081,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Pembinaan Ormas				2 Kegiatan	2 Kegiatan	32.661.333,00	32.661.333,00	20.047.333,00	3.266.133,00							35.927.466,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina				2 Kegiatan	2 Kegiatan	32.661.333,00	32.661.333,00	20.047.333,00	-12.614.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Ormas		35.927.466,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	32.661.333,00	32.661.333,00	20.047.333,00	-12.614.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			35.927.466,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Pertemuan dan Sosialisasi				42 Kegiatan	42 Kegiatan	2.192.444.580,00	2.176.834.580,00	1.293.890.765,00	219.244.458,00							2.411.689.038,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Forum Keagamaan				42 Kegiatan	42 Kegiatan	2.192.444.580,00	2.176.834.580,00	1.293.890.765,00	-898.553.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Masyarakat dan Pelajar		2.411.689.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	424.731.000,00	422.961.000,00	207.219.090,00	-217.511.910,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			467.204.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	1.618.713.580,00	1.607.083.580,00	1.013.936.675,00	-604.776.905,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			1.780.584.938,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	149.000.000,00	146.790.000,00	72.735.000,00	-76.265.000,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel			163.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan Forkopimda dan Forkopincam, Persentase Pamantauan/Pengawasan Konflik di Masyarakat				11 Kegiatan	11 Kegiatan	322.450.773,00	321.340.773,00	244.239.789,00	32.245.077,00							354.695.850,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan Forkopimda dan Pemantuan Konflik di Masyarakat				11 Kegiatan	11 Kegiatan	322.450.773,00	321.340.773,00	244.239.789,00	-78.210.984,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius	Masyarakat, PNS dan Forkopimda		354.695.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				400 Orang	400 Orang	322.450.773,00	321.340.773,00	244.239.789,00	-78.210.984,00	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius Perwujudan masyarakat yang berbudaya, modern dan religius			354.695.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								1.465.554.735.139,00	1.481.239.644.849,00	1.443.398.690.754,00	-22.156.044.385,00							2.412.875.522.751,60	